



Katalog: 4104001
ISSN 2086-1036

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2024

Volume 21, 2024



BADAN PUSAT STATISTIK

Katalog: 4104001
ISSN 2086-1036

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2024

Volume 21, 2024

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2024

Volume 21, 2024

Katalog : 4104001
ISSN : 2086-1036
Nomor Publikasi : 04200.24021

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xxxii+280 halaman

Penyusun Naskah:
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Penyunting:
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Pembuat Kover:
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Penerbit:
©Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi:
unsplash.com; freepik.com

“Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”



TIM PENYUSUN

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2024

Volume 21, 2024

Pengarah:

Ateng Hartono

Penanggung Jawab:

Ahmad Avenzora

Penyunting:

Yeni Rachmawati

Raden Sinang

Budi Santoso

Penulis Naskah:

Nindya Riana Sari

Sigit Wahyu Nugroho

Rini Sulistyowati

Rida Agustina

Kurniawan Tri Yulianto

Ganish Anggraeni

Pengolah Data:

Ganish Anggraeni

Heykal

Penata Letak:

Nindya Riana Sari

KATA PENGANTAR

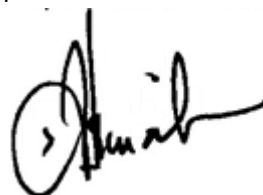
Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menciptakan berbagai tantangan pada setiap aspek kehidupan. Program pembangunan kelanjutusiaan seyogyanya berangkat dari data konkret dan komprehensif yang menggambarkan kondisi dan potensi penduduk lanjut usia. Menyikapi kebutuhan fenomena tersebut, BPS menyusun Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024.

Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024 merupakan publikasi tahunan yang memuat informasi makro mengenai kondisi lansia dari aspek demografi, status pendidikan, kondisi kesehatan, potensi ekonomi, keadaan sosial, dan akses lansia terhadap berbagai fasilitas perlindungan sosial serta pemberdayaan bagi peningkatan kualitas hidupnya. Data yang digunakan dalam publikasi ini sebagian besar dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik masyarakat, akademisi, maupun penyusun kebijakan. Selain itu, publikasi ini diharapkan sebagai acuan untuk dapat mengoptimalkan potensi lansia sebagai bagian dari kekuatan pembangunan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga sehingga publikasi ini dapat selesai. Semoga hasil karya ini memberi manfaat sebesar-besarnya untuk dunia kelanjutusiaan Indonesia.

Jakarta, Desember 2024
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik



Amalia Adininggar Widyasanti

RINGKASAN

Sebagai dampak dari pembangunan berkelanjutan, penduduk lanjut usia (lansia) terus mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun proporsi. Perbaikan di bidang kesehatan, akses pendidikan, ketenagakerjaan, kualitas hidup, serta berbagai aspek sosial ekonomi lainnya, telah berpengaruh pada meningkatnya umur harapan hidup dan menurunnya angka kematian.

Sejak tahun 2021, Indonesia telah memasuki fase struktur penduduk tua (*ageing population*), di mana sekitar 1 dari 10 penduduk adalah lansia. Fenomena *ageing population* bisa menjadi bonus demografi kedua, yaitu ketika proporsi lansia semakin banyak tetapi masih produktif dan dapat memberikan sumbangan bagi perekonomian negara (Heryanah, 2015). Akan tetapi, lansia dapat menjadi tantangan pembangunan ketika tidak produktif dan menjadi bagian dari penduduk rentan.

Berdasarkan aspek demografi, sebesar 12,00 persen penduduk Indonesia pada tahun 2024 adalah lansia dengan rasio ketergantungan lansia sebesar 17,08. Lansia lebih banyak berjenis kelamin perempuan, tinggal di perkotaan, dan tergolong lansia muda (60–69 tahun). DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan proporsi lansia terbesar yaitu 16,28 persen. Sekitar 36,05 persen rumah tangga memiliki lansia sebagai anggota rumah tangga, dengan separuh lansia (53,91 persen) bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Sebanyak 66,23 persen lansia masih memiliki pasangan. Jika dilihat menurut jenis kelamin, lansia yang berstatus kawin didominasi oleh lansia laki-laki (85,60 persen) dibandingkan lansia perempuan (48,48 persen), sedangkan lansia yang berstatus cerai mati didominasi oleh lansia perempuan (47,86 persen) dibandingkan lansia laki-laki (12,69 persen). Mayoritas lansia tinggal dalam rumah tangga yang berisi tiga generasi (35,73 persen) dan bersama keluarga inti (34,45 persen).

Menurut tingkat keaksaraan penduduk yang diwakili oleh indikator angka melek huruf (AMH), sebanyak 83,79 persen lansia dapat membaca dan menulis. Angka melek huruf lansia laki-laki lebih besar daripada perempuan (88,75 persen berbanding 79,25 persen). Lansia yang tinggal di perkotaan memiliki AMH lebih besar daripada perdesaan (88,57 persen berbanding 77,75 persen).

Selain itu, lansia dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi memiliki kemampuan membaca dan menulis yang jauh lebih baik. Sekitar separuh dari jumlah lansia memiliki tingkat pendidikan tamat SD sederajat (32,57 persen) atau tidak tamat SD sederajat (28,89 persen), dengan angka rata-rata lama sekolah sebesar 5,60 tahun. Rata-rata lama sekolah lansia laki-laki lebih besar daripada perempuan (6,48 tahun berbanding 4,79 tahun), lansia di perkotaan lebih besar daripada perdesaan (6,72 tahun berbanding 4,19 tahun), serta lansia dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik memiliki pengalaman bersekolah yang jauh lebih lama.

Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan lansia untuk lebih mendekatkan diri pada keluarga dan memberikan kesempatan untuk menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Susenas 2024, akses lansia terhadap teknologi informasi dan komunikasi didapatkan dari informasi apakah masyarakat tersebut menggunakan telepon seluler (HP), menggunakan komputer, dan menggunakan internet dalam tiga bulan terakhir. Hampir separuh (49,27 persen) lansia yang menggunakan telepon seluler dan sekitar satu dari empat (26,42 persen) lansia mengakses internet. Menurut kelompok umur, sekitar 24,06 persen lansia tua dan 40,53 persen lansia madya memiliki akses ke telepon seluler. Kemudahan akses telepon seluler dan internet lebih dinikmati oleh lansia pada kelompok umur muda (60–69 tahun), lansia di perkotaan, lansia yang bukan penyandang disabilitas, serta lansia yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Dari sisi kesehatan, sekitar dua dari lima (42,81 persen) lansia mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir dengan angka morbiditas lansia sebesar 20,71 persen. Keluhan kesehatan yang dicatat pada Susenas Maret 2024 mencakup gangguan yang sering dialami seperti panas, batuk, pilek, diare, sakit kepala, maupun keluhan yang disebabkan oleh penyakit menahun, disabilitas, kecelakaan, atau keluhan kesehatan lainnya. Adapun angka morbiditas atau angka kesakitan lansia dihitung berdasarkan lansia yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya sehari-hari. Kondisi kesehatan lansia merupakan cerminan dari gaya hidupnya, misalnya kebiasaan merokok. Hampir seperempat (24,01 persen) lansia masih merokok dalam sebulan terakhir dan sebagian besar di antaranya masih merokok setiap hari.



Di antara lansia yang mengalami keluhan kesehatan, sebanyak 50,38 persen mengobati sendiri keluhannya, 26,98 persen mengobati sendiri dan rawat jalan, 19,12 persen rawat jalan, dan hanya 3,53 persen yang tidak melakukan pengobatan. Untuk rawat jalan, lansia banyak memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan seperti praktik dokter/bidan (31,44 persen), puskesmas/pustu (26,37 persen), klinik/praktik dokter bersama (15,95 persen), serta rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Sebanyak 6,19 persen lansia pernah dirawat inap dalam setahun terakhir dengan rata-rata waktu perawatan selama 5 sampai 6 hari. Kehadiran jaminan kesehatan banyak membantu proses pengobatan lansia. Sebanyak 56,10 persen lansia yang rawat jalan dan 84,01 persen yang dirawat inap memanfaatkan jaminan kesehatan untuk pengobatannya, seperti BPJS PBI dan nonBPI, Jamkesda, maupun asuransi kesehatan lainnya.

Kondisi pendidikan dan kesehatan lansia dapat mendukung posisinya sebagai lansia potensial, yaitu penduduk lanjut usia yang masih aktif secara ekonomi. Data Sakernas Agustus 2024 memperlihatkan bahwa lebih dari separuh lansia masih bekerja (55,32 persen). Sekitar 3 dari 5 lansia (65,24 persen) di perdesaan bekerja, jumlah ini lebih besar daripada lansia di perkotaan yang bekerja (48,55 persen). Tingkat pendidikan dari lansia bekerja didominasi oleh mereka yang tamat SD sederajat (37,64 persen) atau tidak tamat SD sederajat (40,54 persen). Kondisi ini turut berpengaruh pada karakteristik pekerjaan lansia, seperti lapangan usaha, status pekerjaan, jam kerja, maupun penghasilannya.

Lebih dari separuh lansia (52,19 persen) bekerja di sektor pertanian dan sekitar 2 dari 3 pekerja lansia (66,65 persen) bekerja dengan status berusaha sendiri maupun dibantu buruh dibayar atau tidak dibayar. Dari lansia yang bekerja, sebanyak 84,75 persen di antaranya bekerja di sektor informal, sebanyak 75,21 persen bekerja sebagai pekerja rentan, dan 18,66 persen sebagai pekerja tidak tetap. Menurut status jam kerja berlebih (*excessive hours*), sebanyak 20,69 persen pekerja lansia bekerja lebih dari 48 jam dalam seminggu. Walaupun demikian, rata-rata penghasilan pekerja lansia hanya sebesar 2,070 juta rupiah per bulan, jauh di bawah upah minimum yang ditetapkan pemerintah sehingga berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi rumah tangganya.



Persentase lansia lebih tinggi seiring semakin rendahnya tingkat kesejahteraan. Hal itu terlihat dari persentase lansia di Indonesia yang berada di rumah tangga dengan distribusi pengeluaran 20 persen teratas sebesar 20,45 persen, 40 persen menengah sebesar 37,67 persen, dan 40 persen terbawah sebesar 41,87 persen. Sebesar 83,74 persen rumah tangga lansia memenuhi kebutuhan hidupnya dari penghasilan anggota ruma tangga yang bekerja, kemudian dari kiriman pihak lain (10,97 persen), dan dari uang pensiun (5,01 persen). Masih sedikit lansia yang memiliki perlindungan finansial dalam bentuk tabungan di lembaga keuangan (34,36 persen).

Mayoritas lansia tinggal di rumah dengan status milik sendiri atau milik anggota rumah tangga yang lain (92,38 persen), sisanya tinggal di rumah bebas sewa (5,72 persen), dan kontrak atau sewa (1,74 persen). Selain dukungan ekonomi, lansia membutuhkan dukungan sosial untuk menjaga kualitas hidupnya. Susenas Maret 2024 mencatat 19 dari 100 lansia pernah bepergian dalam setahun terakhir, terutama untuk mengunjungi teman atau keluarga (54,32 persen). Namun demikian, masih ada sekitar 1 dari 100 lansia pernah menjadi korban kejahatan.

Lansia merupakan salah satu dari kelompok rentan. Keberadaan program kesejahteraan lansia menjadi penting agar lansia terjamin masa tuanya. Dalam rentang waktu enam tahun terakhir, persentase rumah tangga lansia yang menjadi penerima PKH semakin meningkat. Pada tahun 2024, terdapat 16,94 persen rumah tangga lansia yang tercatat sebagai penerima PKH. Selain itu, Susenas Maret 2024 mencatat ada sebanyak 6 persen rumah tangga lansia yang memperoleh Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (ATENSI LU) dalam setahun terakhir. Pada tahun 2024, persentase rumah tangga lansia yang pernah mendapat program sembako sebesar 25,89 persen dan sekitar 77,75 persen lansia telah tercakup dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).



DAFTAR ISI

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2024

Volume 21, 2024

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xxi
PETUNJUK TEKNIS	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Penuaan Penduduk (<i>Ageing Population</i>)	3
1.2 Tantangan Penduduk Lanjut Usia	6
1.3 Kebijakan Kesejahteraan Lanjut Usia	8
1.4 Ketersediaan Data	10
BAB II DEMOGRAFI	13
2.1 Komposisi Penduduk Lanjut Usia	15
2.2 Lansia di Rumah Tangga	18
2.3 Status Tinggal Bersama Lansia	19
BAB III PENDIDIKAN	41
3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis	43
3.2 Tingkat Pendidikan	46
3.3 Akses Teknologi Informasi dan Telekomunikasi	51
BAB IV KESEHATAN	71
4.1 Kondisi Kesehatan	73
4.2 Tindakan Pengobatan	74
4.3 Pemanfaatan Jaminan Kesehatan	80
4.4 Kebiasaan Merokok	83

BAB V KETENAGAKERJAAN	111
5.1 Lansia Bekerja	113
5.2 Karakteristik Pekerja Lansia	116
5.3 Jam Kerja Lansia	122
5.4 Penghasilan Lansia	123
BAB VI SOSIAL EKONOMI	161
6.1 Kesejahteraan Lansia	163
6.2 Rumah Layak Bagi Lansia	167
6.3 Kehidupan Sosial Lansia	170
BAB VII PERLINDUNGAN SOSIAL	201
7.1 Strategi Nasional Kelanjutusiaan	203
7.2 Program Kesejahteraan Lanjut Usia	206
7.3 Program Kesejahteraan Lainnya	214
DAFTAR PUSTAKA	237
LAMPIRAN	245
Lampiran I Kuesioner Susenas Maret 2024	247
Lampiran II Metadata	273





DAFTAR TABEL

DEMOGRAFI

Halaman

Tabel 2.1	Persentase Lansia Menurut Kelompok Umur, 2024.....	22
Tabel 2.2	Persentase Lansia Menurut Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2024	23
Tabel 2.3	Persentase Lansia Menurut Status Perkawinan, 2024	24
Tabel 2.4	Persentase Lansia Menurut Status Tinggal dalam Rumah Tangga, 2024.....	25
Tabel 2.5	Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2024	26
Tabel 2.6	Persentase Lansia Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024.....	27
Tabel 2.7	Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2024.....	28
Tabel 2.8	Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024	29
Tabel 2.9	Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2024.....	30
Tabel 2.10	Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2024	31
Tabel 2.11	Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal dalam Rumah Tangga, 2024.....	32
Tabel 2.12	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2024.....	33
Tabel 2.13	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024	34
Tabel 2.14	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2024.....	35
Tabel 2.15	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2024.....	37
Tabel 2.16	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal Dalam Rumah Tangga, 2024.....	39



PENDIDIKAN

Tabel 3.1	Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2024.....	55
Tabel 3.2	Persentase Lansia Menurut Karakteristik dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2024	56
Tabel 3.3	Rata-Rata Lama Sekolah Lansia Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2024.....	57
Tabel 3.4	Persentase Lansia yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Karakteristik dan Jenis Fasilitas, 2024	58
Tabel 3.5	Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2024	59
Tabel 3.6	Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2024.....	60
Tabel 3.7	Rata-Rata Lama Sekolah Lansia (Tahun) Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2024	61
Tabel 3.8	Persentase Lansia yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2024	62
Tabel 3.9	Persentase Lansia yang Mengakses Internet Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2024	63
Tabel 3.10	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2024	63
Tabel 3.11	<i>Sampling Error</i> Rata-Rata Lama Sekolah Lansia (Tahun) Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024.....	66
Tabel 3.12	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024.....	67
Tabel 3.13	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2024	68
Tabel 3.14	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Mengakses Internet Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024.....	69
Tabel 3.15	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Mengakses Internet Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024.....	70

KESEHATAN

Tabel 4.1	Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Angka Kesakitan Lansia Menurut Karakteristik, 2024	84
-----------	--	----



Tabel 4.2	Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Tindakan Pengobatan, 2024.....	85
Tabel 4.3	Persentase Lansia yang Tidak Rawat Jalan Menurut Karakteristik dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2024.....	86
Tabel 4.4	Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik, 2024	87
Tabel 4.5	Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Lamanya Rawat Inap, 2024.....	88
Tabel 4.6	Persentase Lansia yang Rawat Jalan atau Rawat Inap dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik, 2024	89
Tabel 4.7	Persentase Lansia yang Pernah Rawat Jalan dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2024	90
Tabel 4.8	Persentase Lansia yang Pernah Rawat Inap dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2024	91
Tabel 4.9	Persentase Lansia menurut Perilaku Merokok dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2024	92
Tabel 4.10	Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024.....	93
Tabel 4.11	Angka Kesakitan Lansia Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024.....	94
Tabel 4.12	Persentase Lansia yang Mengobati Sendiri Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024.....	95
Tabel 4.13	Persentase Lansia yang Rawat Jalan ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024	96
Tabel 4.14	Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024	97
Tabel 4.15	Persentase Lansia yang Rawat Jalan atau Rawat Inap dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2024	98



Tabel 4.16	Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Perilaku Merokok, 2024	99
Tabel 4.17	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024.....	100
Tabel 4.18	<i>Sampling Error</i> Angka Kesakitan Lansia Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024.....	101
Tabel 4.19	<i>Sampling Error</i> Angka Kesakitan Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2024.....	102
Tabel 4.20	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Rawat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024.....	103
Tabel 4.21	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Rawat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2024	104
Tabel 4.22	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024	105
Tabel 4.23	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2024	106
Tabel 4.24	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Rawat Jalan dan Rawat Inap dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2024	107
Tabel 4.25	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Perilaku Merokok dalam Sebulan Terakhir, 2024	108

KETENAGAKERJAAN

Tabel 5.1	Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2024	127
Tabel 5.2	Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Lapangan Usaha Utama, 2024	128
Tabel 5.3	Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Status Pekerjaan Utama, 2024.....	129
Tabel 5.4	Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Lapangan Usaha Utama, 2024	131



Tabel 5.5	Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Status Pekerjaan, 2024.....	132
Tabel 5.6	Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Jam Kerja Seluruh Pekerjaan dalam Seminggu, 2024.....	133
Tabel 5.7	Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Penghasilan dalam Sebulan, 2024.....	134
Tabel 5.8	Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Median Upah, 2024.....	135
Tabel 5.9	Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2024.....	136
Tabel 5.10	Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama, 2024.....	137
Tabel 5.11	Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2024	138
Tabel 5.12	Persentase Lansia Bekerja dengan Status Pekerja Tidak Tetap Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024.....	140
Tabel 5.13	Persentase Lansia Bekerja di Sektor Formal Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024.....	141
Tabel 5.14	Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Seluruh Pekerjaan dalam Seminggu, 2024	142
Tabel 5.15	Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Penghasilan dalam Sebulan, 2024.....	143
Tabel 5.16	Persentase Lansia Bekerja dengan Status Upah Rendah Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024.....	144
Tabel 5.17	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, 2024.....	145
Tabel 5.18	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama, 2024.....	147
Tabel 5.19	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2024.....	148
Tabel 5.20	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Bekerja dengan Status Pekerja Tidak Tetap Menurut Provinsi, 2024	150
Tabel 5.21	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Bekerja di Sektor Formal Menurut Provinsi, 2024	153
Tabel 5.22	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Pendapatan dalam Sebulan, 2024	156



Tabel 5.23	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Bekerja dengan Upah Rendah Menurut Provinsi, 2024.....	158
------------	--	-----

SOSIAL EKONOMI

Tabel 6.1	Persentase Lansia Menurut Karakteristik dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2024.....	173
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Karakteristik dan Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga, 2024.....	174
Tabel 6.3	Persentase Lansia yang Memiliki Rekening Tabungan di Lembaga Keuangan Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2024	175
Tabel 6.4	Persentase Lansia Menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2024	176
Tabel 6.5	Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2024.....	177
Tabel 6.6	Persentase Lansia yang Pernah Bepergian Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2024.....	178
Tabel 6.7	Persentase Lansia yang Pernah Bepergian Menurut Karakteristik dan Maksud Utama Bepergian, 2024.....	179
Tabel 6.8	Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2024.....	180
Tabel 6.9	Persentase Lansia di Perkotaan Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2024	181
Tabel 6.10	Persentase Lansia di Perdesaan Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2024	182
Tabel 6.11	Persentase Lansia Laki-Laki Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2024.....	183
Tabel 6.12	Persentase Lansia Perempuan Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2024	184
Tabel 6.13	Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2024.....	185
Tabel 6.14	Persentase Lansia yang Memiliki Rekening Tabungan di Lembaga Keuangan Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024	186
Tabel 6.15	Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2024.....	187



Tabel 6.16	Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024.....	188
Tabel 6.17	Persentase Lansia yang Bepergian menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024	189
Tabel 6.18	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga 40 Persen Terbawah Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024	190
Tabel 6.19	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga 40 Persen Menengah Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024	191
Tabel 6.20	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga 20 Persen Teratas Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024	192
Tabel 6.21	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Memiliki Rekening Tabungan di Lembaga Keuangan Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024	193
Tabel 6.22	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2024	195
Tabel 6.23	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024	197
Tabel 6.24	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia yang Pernah Bepergian Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024	199

PERLINDUNGAN SOSIAL

Tabel 7.1	Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Jenis Bantuan Sosial yang Diterima, 2024	218
Tabel 7.2	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Kredit Pengembangan Usaha Menurut Jenis Kredit dan Klasifikasi Desa, 2024.....	219
Tabel 7.3	Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan, 2024	220
Tabel 7.4	Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis, 2024	221
Tabel 7.5	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat sebagai Penerima Program PKH Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024	222

Tabel 7.6	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima ATENSI LU Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024.....	223
Tabel 7.7	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Program Sembako Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024.....	224
Tabel 7.8	Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 2024	225
Tabel 7.9	Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024	226
Tabel 7.10	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024.....	227
Tabel 7.11	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Jenis Jaminan Sosial, 2024.....	228
Tabel 7.12	<i>Sampling Error</i> Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat sebagai Penerima Program PKH Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024.....	229
Tabel 7.13	<i>Sampling Error</i> Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima ATENSI LU Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024	230
Tabel 7.14	<i>Sampling Error</i> Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Program Sembako Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024	231
Tabel 7.15	<i>Sampling Error</i> Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 2024 ..	232
Tabel 7.16	<i>Sampling Error</i> Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024.....	233
Tabel 7.17	<i>Sampling Error</i> Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Jenis Jaminan Sosial, 2024.....	234



DAFTAR GAMBAR

PENDAHULUAN

Halaman

Gambar 1.1	Persentase Lansia dan Umur Harapan Hidup Penduduk Indonesia, 2015–2024.....	4
------------	---	---

DEMOGRAFI

Gambar 2.1	Piramida Penduduk Indonesia, Tahun 1971, 2020, dan 2050	16
Gambar 2.2	Tren Persentase Lansia dan Rasio Ketergantungan Lansia, 2020–2024.....	17
Gambar 2.3	Persentase Lansia Menurut Karakteristik, 2024	17
Gambar 2.4	Persentase Lansia Menurut Provinsi, 2024	18
Gambar 2.5	Tren Persentase Rumah Tangga Lansia, 2020–2024.....	18
Gambar 2.6	Persentase Lansia Menurut Status Keanggotaan Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, 2024	19
Gambar 2.7	Persentase Lansia Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, 2024	20
Gambar 2.8	Persentase Lansia Menurut Status Tinggal Dalam Rumah Tangga, 2024.....	21

PENDIDIKAN

Gambar 3.1	Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2020–2024	44
Gambar 3.2	Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Karakteristik, 2024	45
Gambar 3.3	Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Provinsi (Persen), 2024	46
Gambar 3.4	Persentase Lansia Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2024	47
Gambar 3.5	Persentase Lansia Menurut Karakteristik dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan (Persen), 2024.....	48
Gambar 3.6	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Lansia (Tahun), 2020–2024.....	49
Gambar 3.7	Rata-Rata Lama Sekolah Lansia Menurut Karakteristik, 2024.....	50

Gambar 3.8	Rata-Rata Lama Sekolah Lansia Menurut Provinsi (Tahun), 2024	51
Gambar 3.9	Persentase Lansia yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Menurut Jenis Fasilitas, 2020–2024	52
Gambar 3.10	Persentase Lansia Terhadap Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Menurut Karakteristik, 2024	53

KESEHATAN

Gambar 4.1	Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Lansia, 2020–2024	74
Gambar 4.2	Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Tindakan Pengobatan dan Distribusi Pengeluaran, 2024	75
Gambar 4.3	Persentase Lansia yang Tidak Rawat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2024	76
Gambar 4.4	Persentase Lansia yang Rawat Jalan Menurut Fasilitas Kesehatan, 2024	77
Gambar 4.5	Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2024	78
Gambar 4.6	Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Fasilitas Kesehatan, 2024	79
Gambar 4.7	Rata-Rata Lama Rawat Inap dari Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2024	80
Gambar 4.8	Persentase Lansia yang Rawat Jalan atau Rawat Inap dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan, 2024	81
Gambar 4.9	Persentase Lansia yang Rawat Jalan dan Rawat Inap dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2024	82
Gambar 4.10	Persentase Lansia Menurut Perilaku Merokok dalam Setahun Terakhir, 2024	83

KETENAGAKERJAAN

Gambar 5.1	Persentase Lansia Bekerja, 2015–2024	114
Gambar 5.2	Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik, 2024	115
Gambar 5.3	Persentase Lansia Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2024	116



Gambar 5.4	Persentase Lansia Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, Tingkat Pendidikan, dan Klasifikasi Desa, 2024	117
Gambar 5.5	Persentase Lansia Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2024.....	118
Gambar 5.6	Persentase Lansia Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan, 2024.....	119
Gambar 5.7	Persentase Lansia Bekerja di Sektor Informal Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan, 2024	120
Gambar 5.8	Persentase Lansia Bekerja Sebagai Pekerja Rentan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2024.....	121
Gambar 5.9	Persentase Lansia Bekerja yang Termasuk <i>Precarious Employment</i> Menurut Karakteristik, 2024.....	122
Gambar 5.10	Persentase Lansia Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruh Pekerjaan dalam Seminggu, 2024	123
Gambar 5.11	Rata-rata Penghasilan Lansia Bekerja dalam Sebulan Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha (000 rupiah), 2024	124
Gambar 5.12	Rata-rata Penghasilan Lansia Bekerja (000 rupiah), 2020–2024	125
Gambar 5.13	Persentase Lansia Bekerja dengan Upah Rendah Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Desa, 2024.....	126

SOSIAL EKONOMI

Gambar 6.1	Persentase Lansia Menurut Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga dan Klasifikasi Desa, 2024.....	164
Gambar 6.2	Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga dan Klasifikasi Desa, 2024	165
Gambar 6.3	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Rekening Tabungan di Lembaga Keuangan Menurut Klasifikasi Desa dan Jenis Kelamin, 2024	166
Gambar 6.4	Persentase Lansia Menurut Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal dan Klasifikasi Desa, 2024	168
Gambar 6.5	Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Klasifikasi Desa dan Distribusi Pengeluaran, 2024	169
Gambar 6.6	Persentase Lansia yang Pernah Bepergian Menurut Klasifikasi Desa dan Jenis Kelamin, 2024	170
Gambar 6.7	Persentase Lansia yang Bepergian Menurut Tujuan Utama Bepergian, 2024	171



Gambar 6.8	Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Klasifikasi Desa dan Jenis Kelamin, 2024	172
------------	---	-----

PERLINDUNGAN SOSIAL

Gambar 7.1	Capaian Indikator Visi Strategi Nasional Kelanjutusiaan.....	204
Gambar 7. 2	Tingkat Kemiskinan Lansia Menurut Karakteristik, 2024	205
Gambar 7.3	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat sebagai Penerima PKH Menurut Klasifikasi Desa dan Distribusi Pengeluaran, 2024.....	208
Gambar 7.4	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Bantuan Sosial dari Program ATENSI Lansia Menurut Klasifikasi Desa, 2022–2024	210
Gambar 7.5	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Pernah Menerima Program Sembako Menurut Klasifikasi Desa dan Distribusi Pengeluaran, 2024.....	215
Gambar 7.6	Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menurut Kelompok Umur, 2024	216



PETUNJUK TEKNIS

Metodologi

Susenas merupakan survei rumah tangga dengan cakupan variabel yang sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. Pengumpulan data Susenas dibagi menjadi Kor (dilaksanakan setiap tahun) dan Modul (3 tahun sekali) yang meliputi Modul Ketahanan Sosial, Modul Kesehatan dan Perumahan, serta Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang dilaksanakan secara bergantian. Pelaksanaan Susenas mulai tahun 2015 dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada bulan Maret dan September.

Susenas Maret Tahun 2024 menghasilkan data yang representatif sampai dengan tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional (BPS 2024). Namun pada publikasi ini secara umum disajikan hanya sampai dengan level provinsi. Unit observasi Susenas adalah rumah tangga, sedangkan yang menjadi unit analisis adalah rumah tangga dan individu. Selain mengumpulkan karakteristik rumah tangga, Susenas juga mengumpulkan karakteristik individu.

Jumlah sampel Susenas Maret tahun 2024 mencakup 345.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Pada setiap blok sensus yang dipilih secara *Probability Proportional to Size* (PPS) dilakukan pemilihan sampel sebanyak 10 rumah tangga dengan *systematic sampling* sehingga jumlah sampel blok sensus untuk Susenas Maret sebanyak 34.500 blok sensus. Stratifikasi dilakukan pada level blok sensus dan pada level rumah tangga di blok sensus terpilih untuk menghasilkan *representative sample*. Stratifikasi blok sensus dilakukan secara eksplisit (seluruh populasi blok sensus biasa Sensus Penduduk 2020 dikelompokkan menurut klasifikasi perkotaan/perdesaan), sedangkan *implicit stratification* dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan kepala rumah tangga.

Relative Standard Error

Nilai-nilai indikator yang diestimasi dari hasil Susenas Maret 2024 dipengaruhi oleh dua jenis kesalahan (*error*), yaitu *nonsampling error* dan *sampling error*. *Nonsampling error* adalah kesalahan yang terjadi ketika proses pengumpulan maupun pengolahan data. Sedangkan *sampling error* adalah kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknik sampling tertentu dalam suatu survei. Secara statistik, besarnya *sampling error* hasil Susenas 2024 ditunjukkan oleh nilai *standard error* (galat baku) dari suatu ukuran statistik (rata-rata, persentase, atau jumlah). Untuk mengukur presisi suatu indikator digunakan nilai *relative standard error* (RSE), yaitu perbandingan nilai *standard error* terhadap estimasi indikatornya, yang dinyatakan dalam persen. *Standard error* juga digunakan untuk menghitung besaran selang kepercayaan (*confidence interval*), yaitu interval nilai yang dapat menggambarkan populasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan (*interval estimation*) dengan batas bawah/atas sebesar nilai estimasi dikurangi/ditambah dua *standard error*. Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan menunjukkan nilai indikator yang semakin baik.

Kualitas hasil estimasi suatu survei bisa diamati dari RSE yang dihasilkan dimana keputusan mengenai keakuratan suatu estimasi bisa diamati dari hasil penghitungan RSE tersebut. Kesalahan sampling dari beberapa estimasi harus digunakan secara hati-hati. Secara umum, besaran SE meningkat seiring dengan meningkatnya besaran estimasi begitu juga sebaliknya. Nilai estimasi dengan $RSE \leq 25\%$ dianggap akurat, sedangkan nilai estimasi dengan $RSE > 25\%$ tetapi $\leq 50\%$ perlu hati-hati jika ingin digunakan, dan estimasi dengan $RSE > 50\%$ dianggap sangat tidak akurat dan seharusnya digabungkan dengan estimasi yang lain untuk memberikan estimasi dengan $RSE \leq 25\%$. Penghitungan tingkat *sampling error* menggunakan paket pemrograman dengan desain yang mengikuti desain sampling Susenas.



Konsep Definisi

Akses lansia terhadap teknologi informasi adalah persentase penduduk lanjut usia yang pernah memiliki akses dan menggunakan fasilitas teknologi informasi dalam tiga bulan terakhir, termasuk menggunakan fasilitas telepon seluler, komputer, atau jaringan internet.

Angka/Umur harapan hidup adalah perkiraan rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh penduduk sejak lahir, dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Angka kesakitan lansia adalah persentase penduduk lanjut usia yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan terganggu aktivitas sehari-harinya akibat dari keluhan kesehatan tersebut.

Angka melek huruf lansia adalah kemampuan seseorang penduduk lanjut usia untuk bisa membaca dan menulis kata-kata atau kalimat sederhana dalam huruf tertentu.

Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerja sama dengan bank.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir, termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam kegiatan ekonomi.

Bepergian adalah pergi/keluar ke tempat/tujuan utama di luar kabupaten/kota tempat tinggal/lingkungan kesehariannya (bukan rutin) dalam wilayah geografis Indonesia kurang dari 12 bulan, baik dilakukan secara perorangan (sendiri) ataupun berkelompok (rombongan) dengan lama berdiam di tempat/tujuan utama paling sedikit 6 jam serta bukan bermaksud untuk sekolah atau bekerja secara rutin. Lama berdiam di tempat/tujuan utama paling sedikit 6 jam dapat merupakan kumulatif beberapa tempat/tujuan, namun tidak termasuk waktu perjalanan.

Distribusi Pengeluaran merupakan *share* pengeluaran dari masing-masing kelompok distribusi pengeluaran (40% penduduk dengan pendapatan rendah; 40% penduduk dengan pendapatan sedang; dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi.) terhadap total pengeluaran.

Fasilitas kesehatan merupakan tempat penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berinteraksi dengan tenaga kesehatan dan menerima pelayanan



kesehatan berupa berobat jalan atau rawat inap. Fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit, praktik dokter, klinik, puskesmas, pengobatan tradisional, dan fasilitas lainnya.

Jam kerja lansia adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan penduduk lanjut usia untuk bekerja, sebagai ukuran tingkat kelayakan waktu kerja. Klasifikasi jam kerja termasuk bekerja secara berlebihan (lebih dari 48 jam seminggu), bekerja secara penuh (35-48 jam seminggu), setengah pengangguran (kurang dari 35 jam seminggu), atau setengah pengangguran kritis (kurang dari 15 jam seminggu).

Jaminan kesehatan adalah fasilitas perlindungan untuk pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi penerima manfaat jika jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Termasuk jaminan kesehatan yang diberikan oleh BPJS PBI, BPJS non-PBI, Jamkesda, asuransi swasta, maupun fasilitas dari tempatnya bekerja.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan kesehatan bisa berasal dari program Penerima Bantuan Iuran (PBI), non-PBI, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), asuransi swasta, dan jaminan kesehatan dari perusahaan tempatnya bekerja.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, yang terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Jenis kelamin dicatat berdasarkan informasi pada dokumen kependudukan resmi yang dimiliki (KTP/KK), atau berdasarkan pengakuan penduduk.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah kartu penanda bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kurang mampu, di antaranya penyandang disabilitas, lanjut usia yang belum memperoleh layanan/ bantuan sosial dan berada di dalam panti/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), gelandangan dan pengemis yang tinggal dikolong jembatan serta tidak memiliki tempat tinggal tetap atau tidak layak huni, korban penyalahgunaan napza dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan.

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu penanda bagi rumah tangga miskin, yang berguna untuk mendapatkan manfaat dari program subsidi beras,



program Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Kebiasaan merokok lansia adalah persentase penduduk lanjut usia yang pernah atau masih merokok dalam sebulan terakhir, termasuk yang merokok setiap hari, tidak setiap hari, atau pernah merokok lebih dari sebulan terakhir.

Kelompok pengeluaran rumah tangga lansia merupakan pengelompokan rumah tangga lansia berdasarkan besaran nilai konsumsi dan pengeluaran rumah tangga per bulan, yang terdiri atas kelompok 40% persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas.

Keluhan kesehatan lansia adalah persentase penduduk lanjut usia yang mengalami gangguan kesehatan fisik maupun psikis dalam sebulan terakhir, baik karena penyakit yang biasa dialami seperti panas, batuk, pilek, diare, sakit kepala, maupun karena penyakit akut atau kronis (meskipun tidak mempunyai keluhan), karena kecelakaan, kriminalitas atau keluhan kesehatan lainnya.

Kepala rumah tangga adalah salah seorang anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga.

Klasifikasi Desa menggambarkan kelompok desa/kelurahan tertentu yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan, berdasarkan indikator komposit yang dibangun dari tiga variabel; kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas umum.

Korban Kejahatan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

Kredit usaha adalah sejumlah dana yang bersifat pinjaman yang diterima untuk membantu menjalankan atau memperbesar kegiatan usaha, yang berasal dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit dari perbankan umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), koperasi, perorangan dengan bunga, pegadaian, perusahaan leasing, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), badan usaha milik desa (BUMDES), atau sumber kredit usaha lainnya.

Lansia bekerja adalah penduduk lanjut usia yang bekerja atau sementara tidak bekerja dalam seminggu terakhir.

Lansia bepergian adalah penduduk lanjut usia yang pernah pergi/keluar ke tempat/tujuan utama di luar kabupaten/kota tempat tinggal/lingkungan kesehariannya (bukan rutin) dalam wilayah geografis Indonesia kurang dari 12 bulan, baik dilakukan secara perorangan (sendiri) ataupun berkelompok (rombongan) dengan lama berdiam di tempat/tujuan utama paling sedikit 6 jam serta bukan bermaksud untuk sekolah atau bekerja secara rutin. Lama



berdiam di tempat/tujuan utama paling sedikit 6 jam dapat merupakan kumulatif beberapa tempat/tujuan, namun tidak termasuk waktu perjalanan.

Lansia korban kejahatan adalah seseorang lansia atau harta bendanya yang dalam setahun terakhir pernah mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha percobaan tindak kejahatan, terdiri atas korban pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, dan kejahatan lainnya.

Lansia mengurus rumah tangga adalah penduduk lanjut usia yang dalam seminggu terakhir melakukan kegiatan lokal mengurus rumah tangga.

Lansia pengangguran adalah penduduk lanjut usia yang dalam seminggu terakhir tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Lansia tinggal bersama keluarga inti artinya lansia tinggal bersama anak/menantu, atau Bersama orangtua/mertua dalam satu rumah tangga.

Lansia tinggal bersama tiga generasi artinya lansia tinggal bersama anak/menantu dan cucunya, atau bersama anak/menantu dan orang tua/mertuanya dalam satu rumah tangga.

Lapangan usaha pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan atau tempat seseorang bekerja, mengikuti Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) dan dapat dikelompokkan menjadi sektor pertanian, manufaktur, dan jasa-jasa.

Penduduk lanjut usia atau lansia adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas, terdiri atas lansia muda (umur 60–69 tahun), lansia madya (umur 70–79 tahun), dan lansia tua (umur 80 tahun ke atas).

Penghasilan lansia bekerja adalah rata-rata penghasilan dari penduduk lanjut usia yang bekerja, mencakup upah, gaji, dan pendapatan lainnya dalam sebulan. Upah Rendah adalah penghasilan yang kurang dari dua per tiga ($2/3$) nilai median penghasilan lansia bekerja.

Precarious Employment adalah penduduk yang bekerja sebagai pekerja bebas, buruh dengan kontrak kerja jangka waktu tertentu, dan buruh dengan kontrak kerja lisan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH, yang mencakup bantuan sosial untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, dan lansia yang berasal dari keluarga miskin.



Rasio ketergantungan lansia adalah perbandingan jumlah penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk usia produktif (15–59 tahun).

Rata-rata lama sekolah lansia adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk lanjut usia untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani.

Rumah layak huni dihitung menggunakan pendekatan fasilitas dan bangunan tempat tinggal dengan kriteria kecukupan luas lantai minimal 7,2 meter persegi per kapita; memiliki akses air minum layak; memiliki sanitasi layak; dan memenuhi kriteria ketahanan bangunan (jenis atap, dinding, dan lantai).

Rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang tinggal bersama dalam satu bangunan tempat tinggal dengan pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu.

Rumah tangga lansia adalah rumah tangga yang minimal salah satu anggota rumah tangganya berumur 60 tahun ke atas.

Status disabilitas adalah status gangguan fungsional yang dialami oleh seorang penduduk, terdiri atas sebagai penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas. Termasuk penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, serta mengalami hambatan dan kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Status ekonomi lansia merupakan pengelompokan penduduk lanjut usia berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangganya, yang terbagi atas 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas.

Status kepemilikan tempat tinggal adalah rumah dengan status penguasaan bangunan milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, dinas, dan status kepemilikan lainnya.

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, yang mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh dibayar, sebagai buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, dan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

Status perkawinan adalah status perkawinan seorang penduduk berdasarkan catatan resmi yang sah secara hukum, termasuk sah secara adat, agama, atau pengakuan masyarakat sekitar. Status perjawinan terdiri atas belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati.



Status tinggal bersama (*living arrangements*) lansia adalah status anggota rumah tangga yang tinggal bersama lansia dalam suatu rumah tangga lansia, yang terdiri atas lansia tinggal sendiri, bersama pasangan (suami atau isteri), bersama keluarga (suami/isteri dan anak), tiga generasi (bersama anak/menantu dan cucu), dan lainnya.

Sumber penghasilan lansia diperkirakan melalui sumber pembiayaan rumah tangga lansia, yaitu sumber utama atau sumber penghasilan terbesar yang digunakan untuk pembiayaan atau pengeluaran rumah tangga lansia, yang terdiri atas anggota rumah tangga yang bekerja, kiriman uang atau barang, pensiunan, dan investasi.

Tindakan pengobatan lansia adalah persentase penduduk lanjut usia yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan melakukan tindakan pengobatan, termasuk mengobati sendiri, berobat jalan kepada tenaga kesehatan, atau rawat inap di fasilitas kesehatan.

Tingkat pendidikan lansia adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk lanjut usia, terdiri atas tidak pernah sekolah, tidak tamat SD sederajat, tamat SD sederajat, SMP sederajat, SMA/SMK sederajat, dan tamat perguruan tinggi (termasuk diploma, sarjana, dan/atau pasca sarjana).

Tujuan utama bepergian merupakan motif atau yang menjadi sebab utama terjadinya perjalanan/bepergian ke tempat/tujuan utama.





BAB 1

PENDAHULUAN

<https://www.pps.go.id>

1 PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mendefinisikan lanjut usia (lansia) sebagai seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Seiring dengan perbaikan pembangunan di bidang kesehatan yang tercermin dari meningkatnya angka harapan hidup, jumlah penduduk lansia pun mengalami peningkatan. Saat ini Indonesia telah memasuki periode penuaan penduduk (*ageing population*). Periode ini memiliki potensi untuk dapat dimanfaatkan sebagai bonus demografi kedua, dengan syarat para lansia tetap produktif dan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian negara, salah satunya dengan mewujudkan penuaan aktif. Untuk mewujudkan lansia yang aktif dan produktif, perlu ada upaya persiapan sejak dini. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam membentuk lansia yang sejahtera dan mandiri. Selain itu, data terkait kelanjutusiaan sangat penting sebagai dasar pemetaan dan pengembangan strategi kebijakan yang tepat guna mencapai kesejahteraan lansia secara menyeluruh.

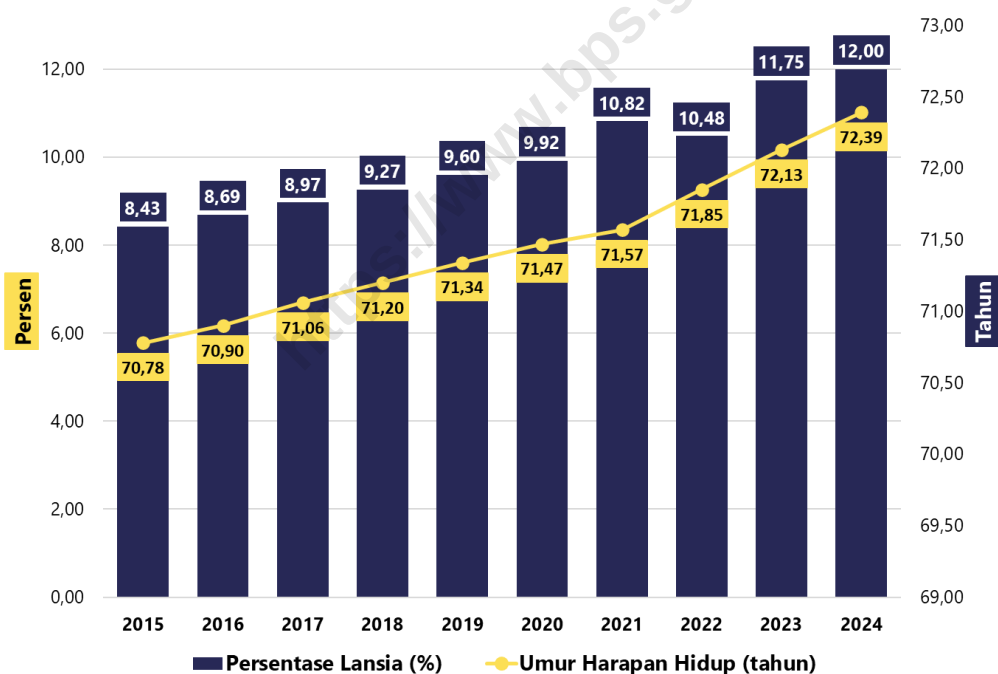
1.1 Penuaan Penduduk (*Ageing Population*)

Penuaan penduduk (*ageing population*) merupakan proses transisi demografi, sebagai hasil dari perubahan angka kelahiran dan kematian yang tinggi menjadi angka kelahiran dan kematian yang rendah. Kemajuan di bidang kesehatan telah berhasil menurunkan angka kematian akibat penyakit menular. Selain itu, peningkatan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat turut berperan dalam memperpanjang angka harapan hidup. Sejalan dengan itu, peningkatan umur harapan hidup berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia.

Laju perkembangan penduduk dunia, termasuk Indonesia, saat ini sedang menuju proses penuaan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah serta proporsi penduduk lansia. Pada tahun 2030, diperkirakan setidaknya 1 dari 6



orang di dunia akan berusia 60 tahun atau lebih (WHO 2024). Saat ini, proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas meningkat dari 1 miliar pada tahun 2020 menjadi 1,4 miliar di tahun 2024 (WHO 2024). Bahkan, berdasarkan hasil proyeksi, jumlah populasi penduduk berusia 60 tahun ke atas di dunia kembali mengalami peningkatan dua kali lipat (2,1 miliar) pada tahun 2050. Selain jumlah dan proporsi lansia secara keseluruhan yang mengalami peningkatan, seiring dengan meningkatnya umur harapan hidup, proporsi lansia tua (80 tahun ke atas) juga mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2020 sampai 2050 jumlahnya diperkirakan meningkat tiga kali lipat hingga mencapai 426 juta jiwa. Dari data tersebut juga diperkirakan bahwa pada tahun 2050, dua pertiga penduduk dunia yang berusia di atas 60 tahun akan tinggal di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah (WHO 2024).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Maret 2015–2024
Badan Pusat Statistik, IPM metode baru 2015–2024 (bps.go.id)

Gambar 1.1 Persentase Lansia dan Umur Harapan Hidup Penduduk Indonesia, 2015–2024

Struktur penduduk dapat dikatakan penduduk tua apabila proporsi lansia 60 tahun ke atas telah mencapai 10 persen atau lebih (Adioetomo 2018). Berdasarkan kriteria tersebut, Indonesia saat ini telah berada pada struktur penduduk tua (*ageing population*), tepatnya Indonesia bahkan telah memasuki *ageing population* sejak tahun 2021 silam. Selama satu dekade terakhir (2015–2024) persentase lansia Indonesia mengalami peningkatan hampir 4 persen sehingga menjadi 12,00 persen. Umur harapan hidup juga menunjukkan tren peningkatan dari 70,78 tahun di tahun 2015 menjadi 72,39 tahun di tahun 2024. Angka ini menggambarkan setidaknya setiap penduduk yang lahir di tahun 2024 berharap memiliki kesempatan hidup sampai dengan usia 72 tahun.

Pada tahun 2045, penduduk lansia diproyeksikan akan berjumlah 65,82 juta atau mencapai 20,31 persen dari total penduduk (BPS 2023). Jika penduduk lansia tetap sehat dan produktif, Indonesia memiliki potensi untuk dapat mengalami bonus demografi kedua. Menurut Bloom, Canning, dan Malaney (1999) dalam Hakim (2020) besarnya populasi lansia tersebut menciptakan peluang untuk bonus demografi kedua. Bonus demografi adalah sebuah kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah penduduk usia nonproduktif. Sementara itu, bonus demografi kedua menggambarkan keadaan suatu negara atau wilayah ketika proporsi dari penduduk yang berusia tua semakin besar, namun masih tetap produktif dan memberikan kontribusi bagi perekonomian negara (Heryanah 2015). Perbedaan antara masa bonus demografi pertama dan kedua terletak pada aktor utamanya. Pada masa bonus demografi pertama, peran utama pembangunan dilakukan oleh penduduk usia produktif, sedangkan pada masa bonus demografi kedua, peran tersebut dipegang oleh penduduk usia nonproduktif yaitu lansia (Rapih 2019) dalam Hakim (2020).

Peningkatan penduduk lanjut usia yang terjadi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari mengingat jumlah mereka yang berusia produktif saat ini berlimpah, namun beberapa tahun yang akan datang mereka akan memasuki usia lanjut atau pensiun.



1.2 Tantangan Penduduk Lanjut Usia

Seperti dua sisi mata uang, jumlah penduduk lanjut usia yang meningkat di satu sisi merupakan prestasi pembangunan, namun di sisi lain juga merupakan tantangan. Bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia dapat memberikan dampak positif jika penduduk lanjut usia berada dalam keadaan sehat, aktif, dan produktif. Namun demikian, penuaan penduduk tersebut juga menimbulkan tantangan yang harus dihadapi, baik oleh lansia itu sendiri, keluarga lansia, masyarakat, dan pemerintah. Tantangan utama saat ini yakni bagaimana mempertahankan kualitas hidup lansia, mengingat bertambahnya usia umumnya disertai dengan penurunan kemampuan fisik dan penurunan status kesehatan yang berakibat pada penurunan kapabilitas bekerja. Selain itu, penuaan penduduk juga diiringi dengan bertambahnya penyakit degeneratif dan disabilitas yang meningkatkan kebutuhan untuk pendampingan dan perawatan jangka panjang bagi lansia (Adioetomo 2018, 295). Jika Indonesia tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut *ageing population*, dikhawatirkan negara akan menanggung beban biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk menyiapkan generasi produktif saat ini dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

Lansia seringkali digambarkan sebagai kelompok penduduk yang rentan. Menurut Bloom, dkk. (2011) dalam TNP2K (2020), terdapat tiga faktor utama yang menjadikan lansia rentan, yaitu tidak lagi produktif secara ekonomi, masalah kesehatan, dan kebutuhan pendamping sebagai pengasuh (*caregiver*). Permasalahan lanjut usia pada umumnya terjadi dengan menurunnya derajat kesehatan dan fungsi-fungsi motorik. Seiring bertambahnya usia, lansia secara alamiah mengalami penurunan fungsi fisiologis dan kognitif yang membuat mereka rentan terhadap berbagai masalah kesehatan. Menurut WHO (2012), beban kesehatan lansia di berbagai negara berpenghasilan rendah dan menengah umumnya berasal dari berbagai penyakit seperti jantung, stroke, gangguan penglihatan, dan gangguan pendengaran.

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengantisipasi peningkatan lansia adalah memastikan angka harapan hidup sehat turut mengalami peningkatan.



Penduduk yang berkualitas diharapkan tidak hanya memiliki umur yang panjang namun juga hidup dalam kondisi sehat, sehingga dapat menjadi modal pembangunan. Pada tahun 2021, angka harapan hidup (*Life Expectancy* atau LE) penduduk meningkat sebesar 71,57 tahun (BPS 2024). Selanjutnya, angka harapan hidup sehat (*Healthy Life Expectancy* atau HALE) di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 60,7 tahun (WHO 2024). Artinya, penduduk Indonesia diperkirakan menjalani hidup sehat selama sekitar 60–61 tahun dari total usia harapan hidup sekitar 71–72 tahun, dengan rata-rata 11 tahun dijalani dalam kondisi sakit. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun capaian pembangunan telah berhasil meningkatkan angka harapan hidup, namun angka harapan hidup sehat di Indonesia masih relatif rendah.

Selain kesehatan, tantangan lain bagi lansia yakni kemandirian finansial. Dengan meningkatnya persentase penduduk lanjut usia, maka angka beban ketergantungan penduduk kelompok usia tidak produktif terhadap kelompok usia produktif juga akan meningkat (Infodatin Kemenkes 2014). Lansia umumnya sudah tidak produktif dan seringkali tidak memiliki kemandirian secara finansial. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, rasio ketergantungan lansia terus meningkat dari 15,16 pada tahun 2020 menjadi 17,76 pada tahun 2024. Tingginya rasio ketergantungan lansia dapat diperparah dengan ketidaksiapan kondisi finansial lansia mengingat tidak semua lansia memiliki jaminan sosial, dana pensiun, atau bahkan sumber pendanaan lainnya yang mampu menopang kebutuhan mereka. Banyak lansia yang tidak mempersiapkan kondisi finansial secara matang untuk hari tua, sehingga dalam satu struktur keluarga, lansia sering kali menggantungkan kebutuhan ekonominya pada anak atau anggota keluarga yang lebih muda.

Fenomena *ageing population* sebenarnya dapat berpotensi menjadi bonus demografi kedua apabila penduduk lansia masih dalam kondisi produktif dan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian negara, salah satunya dengan mencapai penuaan aktif (*active ageing*). Penuaan aktif (*active ageing*) merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh WHO, yang memandang usia tua sebagai kesempatan untuk menjadi sehat, berpartisipasi di masyarakat, dan



aman (termasuk aman secara ekonomi) (Amir 2022). Konsep *active ageing* diharapkan dapat memaksimalkan potensi lansia yang bertujuan menciptakan lansia yang mandiri baik secara fisik maupun finansial dan pada akhirnya meningkatkan jumlah lansia produktif di masa depan. Dorongan untuk menjaga produktivitas lansia sesuai dengan kapasitasnya, terutama melalui integrasi teknologi dan kebijakan demografi, diharapkan dapat menghindarkan penduduk lansia dari menjadi beban keluarga dan masyarakat dan sebaliknya justru dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain memberikan manfaat secara ekonomi, pemberdayaan lansia dimaksudkan agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (UU Nomor 13 Tahun 1998). Untuk itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih untuk mengembangkan pola kebijakan penuaan penduduk yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pembaruan paradigma yang mengintegrasikan aspek kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kreativitas, dan intelektualitas penduduk lansia serta didukung oleh kolaborasi lintas sektor seyogianya dikedepankan sebelum jendela bonus demografi benar-benar tertutup rapat.

1.3 Kebijakan Kesejahteraan Lanjut Usia

Penuaan penduduk merupakan suatu proses alamiah yang saat ini menjadi isu global, termasuk di Indonesia. Untuk itu, pemerintah dan pemangku kebijakan harus memberikan perhatian khusus kepada warga lansia mengingat penduduk lansia di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tantangan ke depan tentunya tidak mudah terutama dalam mempersiapkan agar para lansia tidak menjadi beban, namun harus menjadi potensi yang berkontribusi. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat sebagai antisipasi dini diperlukan agar lansia tetap sehat, mandiri, dan produktif di usia senja mereka.

Pemerintah telah merespon tren penuaan penduduk (*ageing population*) baik melalui berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, maupun



program pembangunan. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat lansia agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomi. Sebagai konsekuensinya, pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomi. Selain itu, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Nomor 13 Tahun 1998) dan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Permensos Nomor 5 Tahun 2018) juga telah disahkan guna memastikan lansia sejahtera dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Secara yuridis, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Potensial mengatur berbagai upaya dalam memperbaiki kesejahteraan lansia antara lain sebagai berikut:

1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. Pelayanan kesehatan;
3. Pelayanan kesempatan kerja;
4. Pelayanan pendidikan dan pelatihan;
5. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
6. Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; serta
7. Bantuan sosial.

Jumlah penduduk lansia yang terus bertambah memberikan tantangan tersendiri yang perlu disikapi dengan kebijakan yang tepat sasaran. Pemerintah telah menetapkan bahwa warga lansia harus diberi peluang untuk berkontribusi dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Hal ini telah diamanatkan dalam



Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Stranas Kelanjutusiaan), pemerintah telah menunjukkan keseriusan dan kesiapan dalam menghadapi fase *ageing population*. Dengan Stranas Kelanjutusiaan ini, pemerintah pusat hingga daerah dapat menetapkan langkah yang sama untuk memastikan agar lanjut usia bisa tetap mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa poin yang menjadi target pembangunan daerah terkait kelanjutusiaan, antara lain: (1) peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu; (2) peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup lanjut usia; (3) pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah lanjut usia; (4) penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan; dan (5) penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia.

1.4 Ketersediaan Data

Dalam rangka pemetaan situasi dan kondisi terkini lansia di Indonesia, serta untuk mendukung perencanaan dan evaluasi kebijakan dan program kesejahteraan lanjut usia, diperlukan data dan informasi terkait kelanjutusiaan, baik pada tingkat nasional maupun regional. Untuk menyikapi kondisi tersebut, BPS menyusun data dan informasi terkait penduduk lanjut usia dan mengemasnya menjadi suatu bentuk buku publikasi “Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024”. Publikasi ini memuat informasi lansia yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial ekonomi, dan program kesejahteraan lanjut usia yang telah dijalankan oleh pemerintah.

Secara keseluruhan, publikasi ini menyajikan data dan informasi tentang lansia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang kelanjutusiaan. Data yang disajikan pada publikasi ini bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus



Penduduk (SP), dan data sekunder dari Kementerian/Lembaga terkait. Publikasi ini disusun secara sistematis menjadi tujuh bagian. Ringkasan di bagian awal publikasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas dari keseluruhan isi publikasi. Metodologi dan penjelasan teknis serta konsep definisi variabel dan indikator yang digunakan pada publikasi dirinci pada bagian awal publikasi. Penyajian data lansia menurut topik disajikan dalam bab-bab.

Bagian pertama (Bab 1) menyajikan bagaimana perjalanan penuaan penduduk Indonesia dari waktu ke waktu dan tantangan yang akan dihadapi serta kebijakan pemerintah terkait kelanjutusiaan. Selanjutnya, Bab 2 membahas potret lansia Indonesia dari sudut pandang demografi. Sementara itu, Bab 3 membahas pendidikan lansia yang di dalamnya mengupas bahwa lansia juga memiliki potensi yang dapat diberdayakan guna menunjang pembangunan nasional. Selanjutnya, Bab 4 membahas kesehatan lansia, pola pengobatan, kepemilikan jaminan kesehatan serta perilaku merokok lansia. Keterlibatan lansia secara nyata dalam menggerakkan perekonomian negeri dibahas pada Bab 5 Ketenagakerjaan. Kondisi sosial ekonomi rumah tangga lansia dijabarkan pada Bab 6. Terakhir, program-program kesejahteraan lanjut usia termasuk perlindungan sosial yang sudah diterima oleh rumah tangga lansia disajikan pada Bab 7.





BAB 2

DEMOGRAFI

<https://www.scribd.com/document/123456789>

Jumlah lansia di Indonesia dipastikan akan terus meningkat seiring dengan selesainya puncak bonus demografi. Hal ini diakibatkan oleh peningkatan penduduk usia produktif selama masa bonus demografi sehingga akan meningkatkan jumlah lansia. Besarnya jumlah lansia akan menjadi tantangan pembangunan karena dapat memberi dampak positif, tetapi bisa juga berdampak negatif. Jika penduduk lansia sehat dan produktif, maka hal tersebut bisa menjadi bonus demografi yang kedua bagi Indonesia (Wahyudi 2019). Oleh karena itu, jumlah penduduk lansia yang besar itu harus disikapi secara bijak untuk memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka.

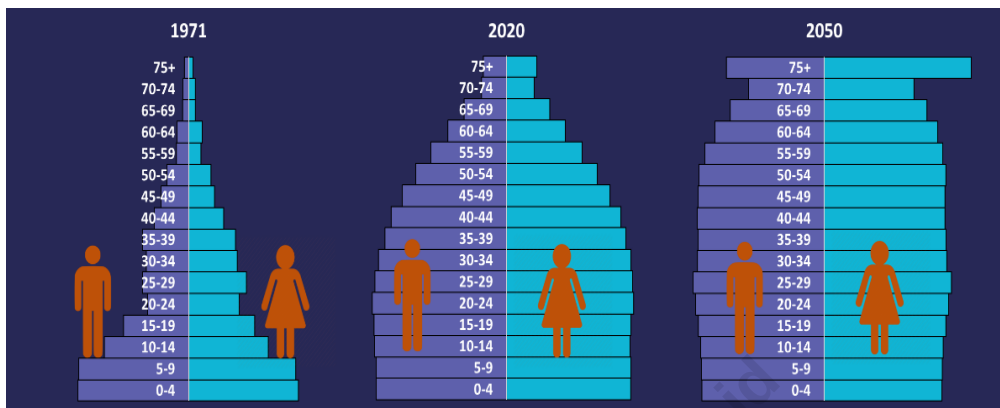
2.1 Komposisi Penduduk Lanjut Usia

Penuaan penduduk adalah pergeseran distribusi penduduk suatu negara menuju usia yang lebih tua. Penuaan penduduk terjadi ketika umur median penduduk di suatu wilayah meningkat akibat bertambahnya tingkat harapan hidup atau menurunnya tingkat kelahiran (Heryanah 2015). Penuaan penduduk ditandai dengan semakin meningkatnya proporsi penduduk usia lanjut (lansia) dan biasanya digambarkan dengan perubahan struktur piramida penduduk dari piramida penduduk muda menjadi piramida penduduk tua (Munawaroh 2021).

Gambar 2.1 memperlihatkan piramida penduduk yang menunjukkan perubahan struktur umur penduduk Indonesia selama periode tahun 1971 s.d. 2050. Pada tahun 1971, piramida penduduk tampak lebar bagi penduduk yang lebih muda. Sedangkan pada piramida penduduk tahun 2020, terjadi peningkatan pada bagian tengah dan puncak piramida, sedangkan bagian dasar piramida mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk dewasa dan penduduk lanjut usia, sedangkan penduduk usia muda mengalami penurunan. Piramida penduduk hasil proyeksi tahun 2050 menunjukkan bagian puncak piramida yang terlihat semakin



melebar, yang berarti Indonesia berada dalam fase menua, dengan struktur umur yang hampir sama dengan tahun 2020.

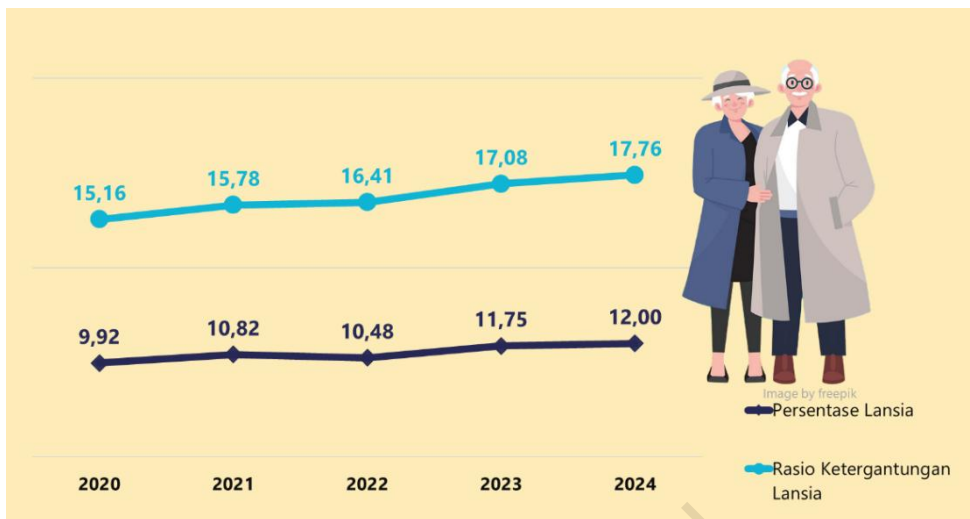


Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 1971, Sensus Penduduk 2020, dan Proyeksi Penduduk 2050

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Indonesia, Tahun 1971, 2020, dan 2050

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase penduduk lansia terus meningkat. Pada tahun 2024, persentase lansia mencapai 12,00 persen. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sudah memasuki fase struktur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk lansia yang sudah melebihi 10 persen dari total penduduk (Cicik 2018).

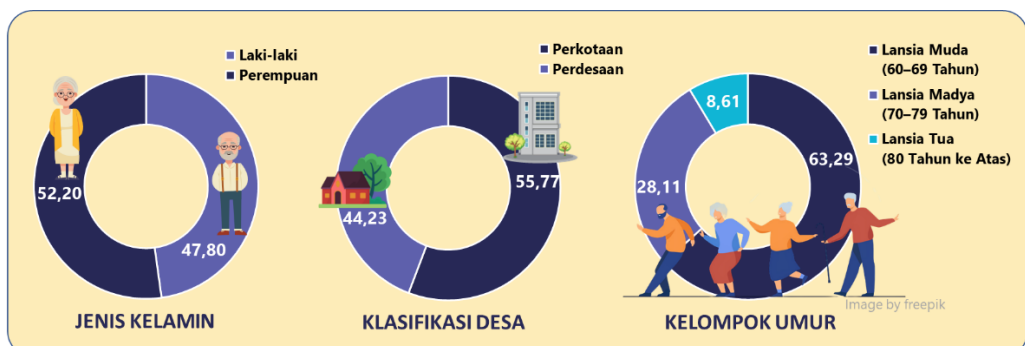
Salah satu permasalahan dari peningkatan jumlah lansia adalah peningkatan rasio ketergantungan lansia. Banyak yang beranggapan bahwa lansia merupakan beban tanggungan bagi anggota rumah tangga yang masih produktif secara ekonomi. Gambar 2.2 menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan persentase lansia, rasio ketergantungan lansia juga mengalami peningkatan. Ketergantungan lansia ini juga menandakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk lansia akan menambah beban ekonomi penduduk usia produktif. Pada tahun 2024, rasio ketergantungan lansia sebesar 17,76. Angka tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (usia 15–59 tahun) harus menanggung setidaknya 17 penduduk lansia.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020–2024 dan Diolah dari Publikasi Proyeksi Penduduk 2020–2050

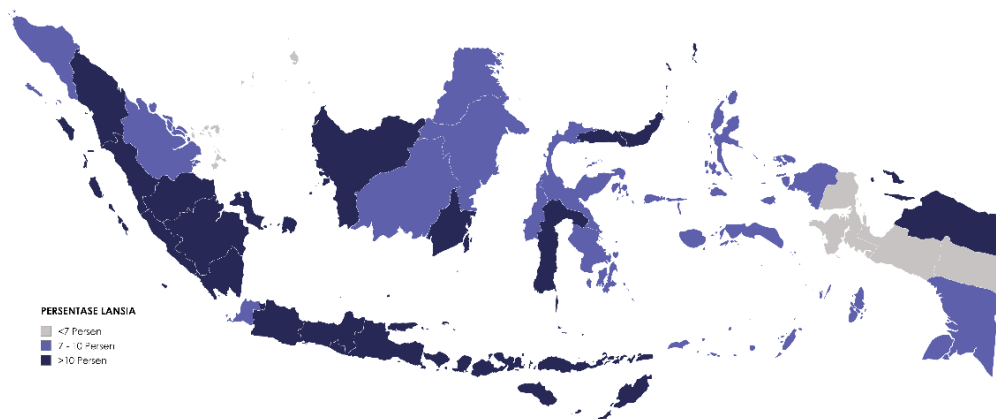
Gambar 2.2 Tren Persentase Lansia dan Rasio Ketergantungan Lansia, 2020–2024

Dilihat persebarannya (Gambar 2.3), berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa persentase lansia perempuan (52,20 persen) lebih besar dibanding laki-laki (47,80 persen). Berdasarkan klasifikasi tempat tinggal, lebih dari separuh lansia tinggal di wilayah perkotaan. Sementara itu, komposisi umur lansia paling besar adalah lansia muda, yakni penduduk yang berumur 60–69 tahun, dengan persentase sebesar 63,29 persen, diikuti oleh lansia madya sebesar 28,11 persen, dan lansia tua sebesar 8,61 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 2.3 Persentase Lansia Menurut Karakteristik, 2024

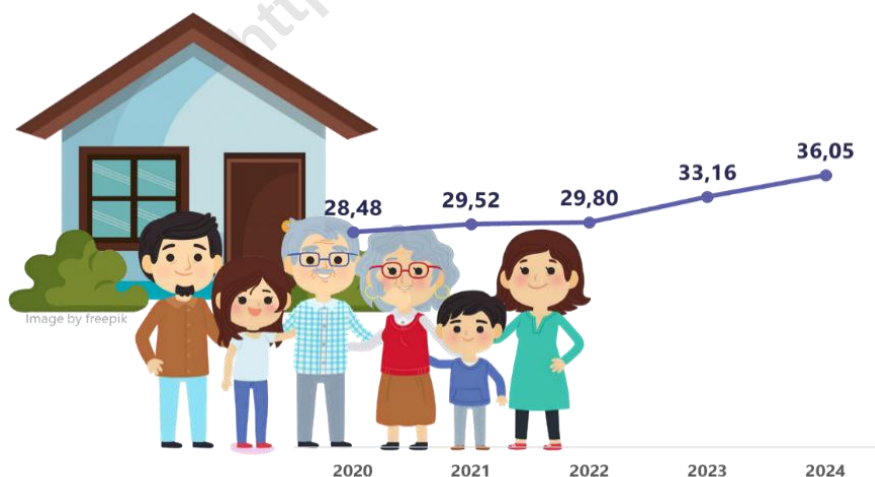


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 2.4 Persentase Lansia Menurut Provinsi, 2024

Sebanyak 21 provinsi telah memasuki fase struktur penduduk tua karena persentase penduduk lansia yang sudah di atas 10 persen. Provinsi DI Yogyakarta menempati posisi teratas dengan persentase lansia sebesar 16,28 persen. Jawa Timur menyusul dengan persentase lansia sebesar 16,02 persen, diikuti oleh Jawa Tengah dengan persentase lansia sekitar 15,46 persen.

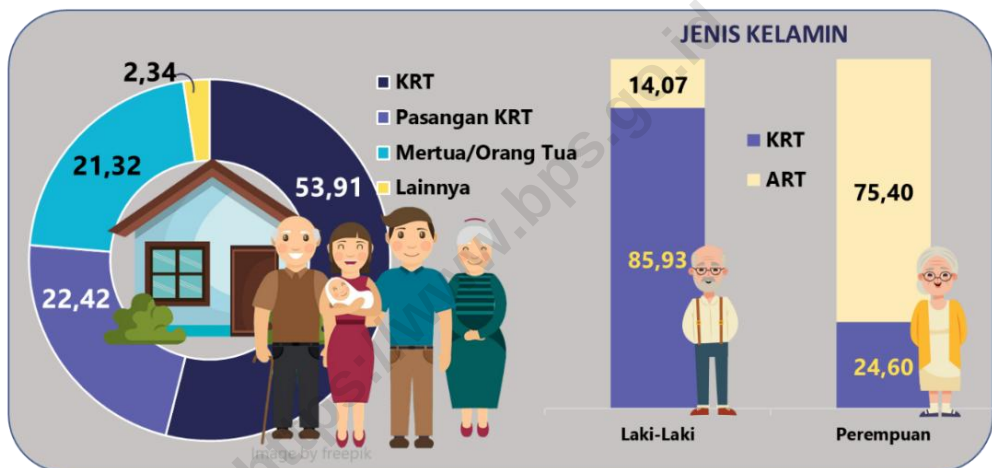
2.2 Lansia di Rumah Tangga



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020–2024

Gambar 2.5 Tren Persentase Rumah Tangga Lansia, 2020–2024

Peranan di dalam rumah tangga dengan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga (KRT) yang sangat besar dari sisi psikologis maupun ekonomis, ternyata masih banyak diemban oleh penduduk lansia yang seharusnya menikmati hari tua tanpa beban berat (Andini *et al.* 2013). Pada tahun 2024, sekitar 53,91 persen lansia merupakan KRT. Sementara itu, sisanya merupakan ART yang meliputi pasangan KRT, mertua/orang tua dari KRT, dan anggota rumah tangga lainnya. Menurut jenis kelamin, terlihat bahwa lansia laki-laki jauh lebih banyak yang menjadi KRT dibandingkan lansia perempuan (85,93 persen berbanding 24,60 persen).



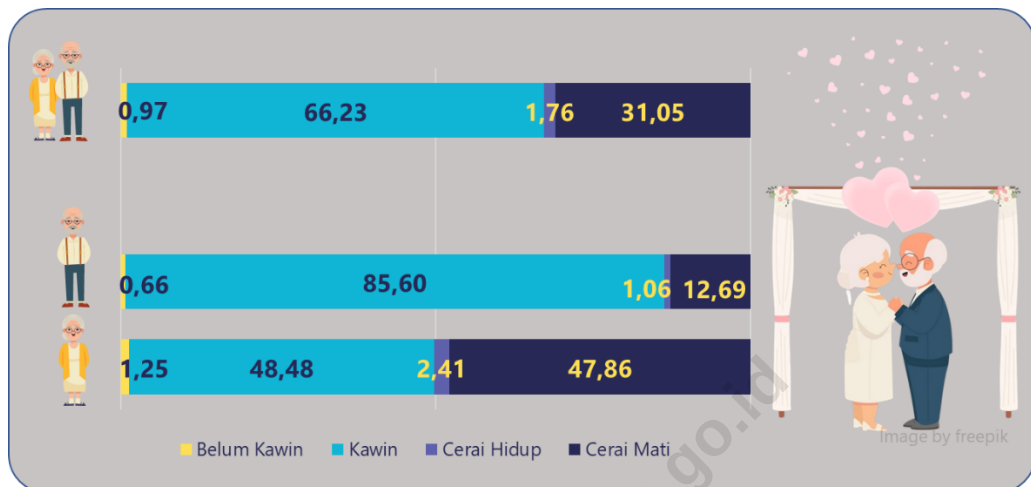
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 2.6 Persentase Lansia Menurut Status Keanggotaan Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, 2024

2.3 Status Tinggal Bersama Lansia

Proses penuaan pada lansia yang merupakan tahapan lanjut dari situasi proses kehidupan, dapat membuat kualitas hidup lansia semakin menurun. Oleh karenanya lansia memerlukan dukungan sehingga dapat meningkatkan kondisi lansia menjadi lebih baik. Dukungan dari pasangan atau keluarga utama akan sangat berarti dibandingkan dengan dukungan dari orang lain yang tidak menjalin hubungan apapun. Pasangan hidup lansia yang selalu berada disampingnya, membuat lansia memiliki teman bicara untuk berkeluh kesah

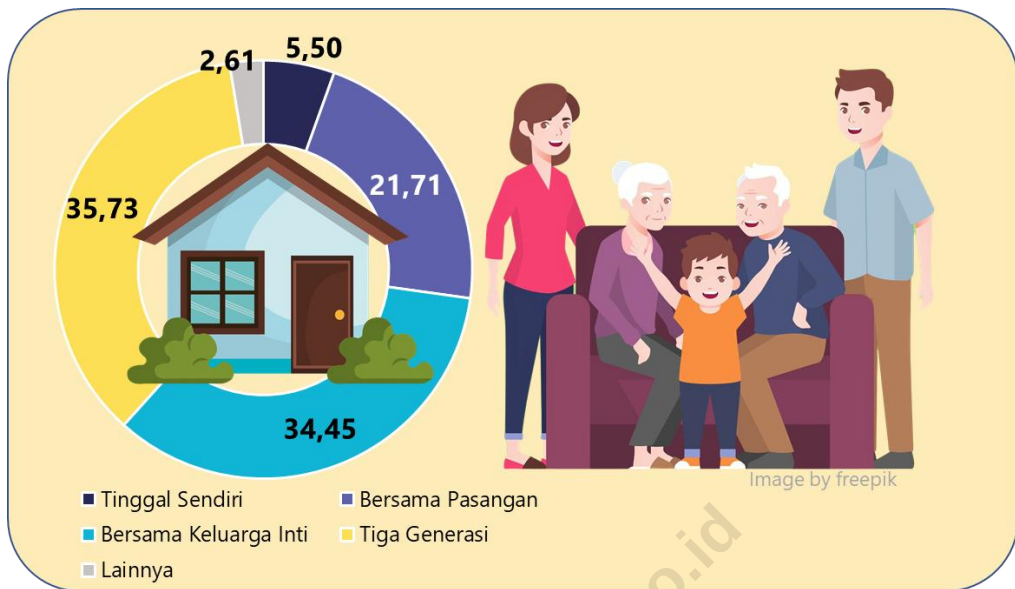
tentang kebahagiaan maupun kesedihan, sehingga dengan dukungan positif dari pasangan akan meningkatkan kualitas hidup lansia (Astuti 2019).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 2.7 Persentase Lansia Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, 2024

Sebagian besar lansia masih memiliki pasangan atau berstatus kawin (66,23 persen), sedangkan sisanya tidak memiliki pasangan baik karena cerai mati (31,05 persen), cerai hidup (1,76 persen), maupun belum kawin (0,97 persen). Apabila dilihat menurut jenis kelamin, pola status perkawinan lansia laki-laki berbeda dengan perempuan, lansia yang berstatus kawin didominasi oleh lansia laki-laki (85,60 persen) dibandingkan lansia perempuan (48,48 persen), sedangkan lansia yang berstatus cerai mati didominasi oleh lansia perempuan (47,86 persen) dibandingkan lansia laki-laki (12,69 persen).



- Catatan:
- 1) Bersama keluarga inti artinya lansia tinggal bersama anak/menantu, atau bersama orang tua/mertua dalam satu rumah tangga
 - 2) Tiga generasi artinya lansia tinggal bersama anak/menantu dan cucunya, atau bersama anak/menantu dan orang tua/mertuanya dalam satu rumah tangga

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 2.8 Persentase Lansia Menurut Status Tinggal Dalam Rumah Tangga, 2024

Pada sebuah tatanan keluarga besar, bertemunya tiga atau bahkan empat generasi dalam satu waktu merupakan hal yang lazim terjadi. Termasuk di dalamnya adalah generasi lansia (Nugroho 2019). Dilihat dari status tempat tinggal dan struktur rumah tangga, lansia lebih banyak tinggal dalam rumah tangga yang berisi tiga generasi yaitu sebesar 35,73 persen. Selain itu, sebesar 34,45 persen lansia tinggal bersama keluarga inti. Meskipun demikian masih ada lansia yang tinggal sendiri dengan persentase sebesar 5,50 persen.

Tabel 2.1 Persentase Lansia Menurut Kelompok Umur, 2024

Karakteristik	Kelompok Umur				
	Pra-Lansia (45–59 Tahun)	Lansia (60 Tahun ke atas)			Jumlah (3)+(4)+(5)
		Lansia Muda (60–69 tahun)	Lansia Madya (70–79 tahun)	Lansia Tua (80 tahun ke atas)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	18,57	63,29	28,11	8,61	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	18,47	65,08	27,52	7,39	100,00
Perempuan	18,66	61,64	28,64	9,72	100,00
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	18,56	64,11	27,87	8,02	100,00
Perdesaan	18,57	62,25	28,41	9,34	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 2.2 Persentase Lansia Menurut Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2024

Karakteristik	Status Keanggotaan Rumah Tangga				Jumlah
	Kepala Rumah Tangga (KRT)	Pasangan KRT	Mertua/Orang Tua	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	53,91	22,42	21,32	2,34	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	85,93	0,59	12,28	1,20	100,00
Perempuan	24,60	42,41	29,60	3,39	100,00
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60–69 tahun)	55,76	27,98	14,50	1,76	100,00
Lansia Madya (70–79 tahun)	53,72	15,34	28,33	2,61	100,00
Lansia Tua (80+ tahun)	40,99	4,69	48,60	5,72	100,00
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	54,75	22,21	20,69	2,34	100,00
Perdesaan	52,85	22,68	22,12	2,35	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 2.3 Persentase Lansia Menurut Status Perkawinan, 2024

Karakteristik	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	0,97	66,23	1,76	31,05	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	0,66	85,60	1,06	12,69	100,00
Perempuan	1,25	48,48	2,41	47,86	100,00
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	1,06	65,12	1,96	31,86	100,00
Perdesaan	0,85	67,62	1,51	30,03	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 2.4 Persentase Lansia Menurut Status Tinggal dalam Rumah Tangga, 2024

Karakteristik	Status Tinggal dalam Rumah Tangga					Jumlah
	Tinggal Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga Inti ¹	Tiga Generasi ²	Lain-nya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indonesia	5,50	21,71	34,45	35,73	2,61	100,00
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	2,01	25,87	39,79	31,02	1,32	100,00
Perempuan	8,69	17,90	29,57	40,05	3,80	100,00
Kelompok Umur						
Lansia Muda (60–69 tahun)	3,62	21,34	40,18	32,92	1,95	100,00
Lansia Madya (70–79 tahun)	8,37	24,33	24,91	39,34	3,04	100,00
Lansia Tua (80+ tahun)	9,96	15,84	23,49	44,63	6,07	100,00
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	5,22	19,94	38,31	33,86	2,68	100,00
Perdesaan	5,85	23,93	29,59	38,09	2,53	100,00

Catatan: 1) Bersama keluarga inti artinya lansia tinggal bersama anak/menantu, atau bersama orang tua/mertua dalam satu rumah tangga

2) Tiga generasi artinya lansia tinggal bersama anak/menantu dan cucunya, atau bersama anak/menantu dan orang tua/mertuanya dalam satu rumah tangga

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 2.5 Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2024

Provinsi	Kelompok Umur		Jumlah
	<60 tahun	≥60 tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	90,99	9,01	100,00
Sumatera Utara	89,84	10,16	100,00
Sumatera Barat	89,33	10,67	100,00
Riau	92,33	7,67	100,00
Jambi	89,30	10,70	100,00
Sumatera Selatan	89,77	10,23	100,00
Bengkulu	89,12	10,88	100,00
Lampung	88,46	11,54	100,00
Kep. Bangka Belitung	89,59	10,41	100,00
Kepulauan Riau	93,38	6,62	100,00
DKI Jakarta	89,36	10,64	100,00
Jawa Barat	88,75	11,25	100,00
Jawa Tengah	84,54	15,46	100,00
DI Yogyakarta	83,72	16,28	100,00
Jawa Timur	83,98	16,02	100,00
Banten	90,44	9,56	100,00
Bali	85,99	14,01	100,00
Nusa Tenggara Barat	89,64	10,36	100,00
Nusa Tenggara Timur	89,84	10,16	100,00
Kalimantan Barat	89,79	10,21	100,00
Kalimantan Tengah	90,90	9,10	100,00
Kalimantan Selatan	88,64	11,36	100,00
Kalimantan Timur	90,51	9,49	100,00
Kalimantan Utara	90,74	9,26	100,00
Sulawesi Utara	85,82	14,18	100,00
Sulawesi Tengah	90,01	9,99	100,00
Sulawesi Selatan	87,64	12,36	100,00
Sulawesi Tenggara	91,07	8,93	100,00
Gorontalo	89,08	10,92	100,00
Sulawesi Barat	91,17	8,83	100,00
Maluku	90,45	9,55	100,00
Maluku Utara	91,06	8,94	100,00
Papua Barat	93,66	6,34	100,00
Papua Barat Daya	92,70	7,30	100,00
Papua	88,98	11,02	100,00
Papua Selatan	91,61	8,39	100,00
Papua Tengah	95,51	4,49	100,00
Papua Pegunungan	96,19	3,81	100,00
Indonesia	88,00	12,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 2.6 Persentase Lansia Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan		Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	32,51	67,49	100,00	47,47	52,53	100,00
Sumatera Utara	55,77	44,23	100,00	46,25	53,75	100,00
Sumatera Barat	48,71	51,29	100,00	46,94	53,06	100,00
Riau	39,55	60,45	100,00	50,52	49,48	100,00
Jambi	32,29	67,71	100,00	49,81	50,19	100,00
Sumatera Selatan	37,41	62,59	100,00	48,34	51,66	100,00
Bengkulu	28,99	71,01	100,00	50,12	49,88	100,00
Lampung	31,37	68,63	100,00	50,77	49,23	100,00
Kep. Bangka Belitung	58,48	41,52	100,00	50,93	49,07	100,00
Kepulauan Riau	80,86	19,14	100,00	51,30	48,70	100,00
DKI Jakarta	100,00	–	100,00	47,61	52,39	100,00
Jawa Barat	74,69	25,31	100,00	48,92	51,08	100,00
Jawa Tengah	51,21	48,79	100,00	46,71	53,29	100,00
DI Yogyakarta	67,46	32,54	100,00	45,88	54,12	100,00
Jawa Timur	53,33	46,67	100,00	46,45	53,55	100,00
Banten	73,67	26,33	100,00	50,59	49,41	100,00
Bali	67,22	32,78	100,00	46,91	53,09	100,00
Nusa Tenggara Barat	51,19	48,81	100,00	45,42	54,58	100,00
Nusa Tenggara Timur	23,63	76,37	100,00	46,78	53,22	100,00
Kalimantan Barat	40,08	59,92	100,00	49,45	50,55	100,00
Kalimantan Tengah	40,67	59,33	100,00	53,84	46,16	100,00
Kalimantan Selatan	47,45	52,55	100,00	48,57	51,43	100,00
Kalimantan Timur	65,81	34,19	100,00	51,93	48,07	100,00
Kalimantan Utara	58,16	41,84	100,00	53,34	46,66	100,00
Sulawesi Utara	53,16	46,84	100,00	48,20	51,80	100,00
Sulawesi Tengah	29,83	70,17	100,00	49,78	50,22	100,00
Sulawesi Selatan	42,55	57,45	100,00	44,83	55,17	100,00
Sulawesi Tenggara	34,03	65,97	100,00	48,10	51,90	100,00
Gorontalo	45,84	54,16	100,00	46,52	53,48	100,00
Sulawesi Barat	21,47	78,53	100,00	46,86	53,14	100,00
Maluku	39,84	60,16	100,00	47,87	52,13	100,00
Maluku Utara	27,38	72,62	100,00	49,92	50,08	100,00
Papua Barat	31,16	68,84	100,00	53,24	46,76	100,00
Papua Barat Daya	47,89	52,11	100,00	51,43	48,57	100,00
Papua	59,53	40,47	100,00	52,48	47,52	100,00
Papua Selatan	37,82	62,18	100,00	53,47	46,53	100,00
Papua Tengah	34,33	65,67	100,00	58,15	41,85	100,00
Papua Pegunungan	7,17	92,83	100,00	62,71	37,29	100,00
Indonesia	55,77	44,23	100,00	47,80	52,20	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 2.7 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2024

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	Lansia Muda (60–69 tahun)	Lansia Madya (70–79 tahun)	Lansia Tua (80+ tahun)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	65,22	26,25	8,54	100,00
Sumatera Utara	65,73	27,90	6,37	100,00
Sumatera Barat	62,09	27,44	10,47	100,00
Riau	70,10	24,46	5,44	100,00
Jambi	67,30	26,79	5,91	100,00
Sumatera Selatan	64,34	26,78	8,88	100,00
Bengkulu	65,55	26,56	7,89	100,00
Lampung	64,66	26,57	8,78	100,00
Kep. Bangka Belitung	66,67	26,23	7,11	100,00
Kepulauan Riau	67,59	26,09	6,31	100,00
DKI Jakarta	66,39	27,96	5,66	100,00
Jawa Barat	63,88	27,81	8,31	100,00
Jawa Tengah	59,61	29,88	10,51	100,00
DI Yogyakarta	57,70	29,96	12,34	100,00
Jawa Timur	60,87	29,33	9,80	100,00
Banten	68,89	24,48	6,63	100,00
Bali	61,18	28,95	9,87	100,00
Nusa Tenggara Barat	64,32	28,64	7,05	100,00
Nusa Tenggara Timur	63,38	28,26	8,36	100,00
Kalimantan Barat	65,55	27,86	6,59	100,00
Kalimantan Tengah	69,67	24,22	6,11	100,00
Kalimantan Selatan	67,13	26,83	6,04	100,00
Kalimantan Timur	71,11	23,45	5,43	100,00
Kalimantan Utara	66,54	27,36	6,10	100,00
Sulawesi Utara	62,56	28,79	8,66	100,00
Sulawesi Tengah	66,52	27,07	6,41	100,00
Sulawesi Selatan	61,72	28,99	9,30	100,00
Sulawesi Tenggara	65,64	28,03	6,33	100,00
Gorontalo	66,11	27,82	6,07	100,00
Sulawesi Barat	64,56	26,78	8,66	100,00
Maluku	64,59	28,98	6,43	100,00
Maluku Utara	66,32	27,07	6,61	100,00
Papua Barat	70,73	22,96	6,31	100,00
Papua Barat Daya	69,66	24,19	6,16	100,00
Papua	72,07	24,95	2,98	100,00
Papua Selatan	73,13	19,83	7,04	100,00
Papua Tengah	81,64	15,10	3,26	100,00
Papua Pegunungan	90,11	9,58	NA	100,00
Indonesia	63,29	28,11	8,61	100,00

Catatan: NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 2.8 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024

Provinsi	Klasifikasi Desa		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	27,23	30,32	29,23
Sumatera Utara	30,90	31,65	31,23
Sumatera Barat	31,56	34,53	33,02
Riau	23,61	24,24	23,99
Jambi	31,31	30,96	31,08
Sumatera Selatan	32,06	29,74	30,59
Bengkulu	27,67	32,60	30,97
Lampung	31,66	33,34	32,79
Kep. Bangka Belitung	28,63	29,27	28,89
Kepulauan Riau	17,56	34,69	19,28
DKI Jakarta	29,35	–	29,35
Jawa Barat	29,17	35,47	30,50
Jawa Tengah	41,35	42,35	41,83
DI Yogyakarta	34,62	51,87	38,68
Jawa Timur	41,60	44,76	43,00
Banten	26,00	37,73	28,29
Bali	33,82	43,00	36,31
Nusa Tenggara Barat	27,76	27,74	27,75
Nusa Tenggara Timur	30,65	35,40	34,11
Kalimantan Barat	32,82	29,95	31,04
Kalimantan Tengah	23,86	26,41	25,30
Kalimantan Selatan	31,01	33,14	32,08
Kalimantan Timur	26,57	31,59	28,13
Kalimantan Utara	27,22	33,31	29,37
Sulawesi Utara	37,30	40,50	38,71
Sulawesi Tengah	28,77	31,95	30,89
Sulawesi Selatan	35,60	41,64	38,80
Sulawesi Tenggara	25,79	31,53	29,27
Gorontalo	34,02	34,30	34,17
Sulawesi Barat	31,67	29,35	29,80
Maluku	30,04	35,02	32,78
Maluku Utara	27,50	30,95	29,90
Papua Barat	21,45	20,19	20,57
Papua Barat Daya	22,19	26,52	24,23
Papua	32,82	33,65	33,15
Papua Selatan	26,19	25,66	25,85
Papua Tengah	18,73	10,35	12,22
Papua Pegunungan	11,66	10,35	10,45
Indonesia	32,54	36,05	33,99

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 2.9 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2024

Provinsi	Status Keanggotaan Rumah Tangga				Jumlah
	Kepala Rumah Tangga	Istri/Suami	Mertua/Orang Tua	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	65,08	18,86	14,64	1,43	100,00
Sumatera Utara	56,45	23,85	18,48	1,22	100,00
Sumatera Barat	51,84	20,51	25,75	1,91	100,00
Riau	58,60	21,55	17,89	1,97	100,00
Jambi	53,89	22,58	21,66	1,87	100,00
Sumatera Selatan	51,36	22,35	24,99	1,30	100,00
Bengkulu	51,98	24,18	22,74	1,10	100,00
Lampung	54,24	23,65	21,08	1,03	100,00
Kep. Bangka Belitung	54,80	23,38	19,28	2,54	100,00
Kepulauan Riau	53,06	17,71	27,37	1,86	100,00
DKI Jakarta	61,12	24,21	12,06	2,61	100,00
Jawa Barat	58,29	24,88	14,96	1,87	100,00
Jawa Tengah	50,14	21,97	25,58	2,30	100,00
DI Yogyakarta	53,55	24,01	19,35	3,10	100,00
Jawa Timur	50,74	20,41	25,91	2,94	100,00
Banten	61,39	23,45	14,87	0,29	100,00
Bali	37,68	19,73	36,53	6,06	100,00
Nusa Tenggara Barat	57,80	24,05	16,50	1,65	100,00
Nusa Tenggara Timur	53,25	20,60	21,60	4,54	100,00
Kalimantan Barat	49,68	20,56	26,31	3,44	100,00
Kalimantan Tengah	54,81	22,99	21,36	0,84	100,00
Kalimantan Selatan	60,62	21,96	15,70	1,72	100,00
Kalimantan Timur	54,52	22,66	20,67	2,15	100,00
Kalimantan Utara	55,12	22,60	19,59	2,69	100,00
Sulawesi Utara	48,64	25,60	22,08	3,68	100,00
Sulawesi Tengah	53,61	22,02	22,05	2,32	100,00
Sulawesi Selatan	50,36	20,63	24,65	4,36	100,00
Sulawesi Tenggara	59,68	21,53	16,83	1,96	100,00
Gorontalo	45,33	20,40	30,36	3,91	100,00
Sulawesi Barat	58,35	20,50	15,89	5,26	100,00
Maluku	52,26	24,44	20,36	2,94	100,00
Maluku Utara	50,31	22,47	23,85	3,37	100,00
Papua Barat	61,91	23,95	13,10	NA	100,00
Papua Barat Daya	57,99	24,07	14,75	3,19	100,00
Papua	61,24	28,23	8,41	2,12	100,00
Papua Selatan	59,82	23,51	15,89	NA	100,00
Papua Tengah	65,57	29,17	4,85	NA	100,00
Papua Pegunungan	67,78	29,17	NA	NA	100,00
Indonesia	53,91	22,42	21,32	2,34	100,00

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 2.10 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2024

Provinsi	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,84	62,61	1,69	34,87	100,00
Sumatera Utara	0,80	65,62	1,26	32,32	100,00
Sumatera Barat	0,41	64,85	2,37	32,37	100,00
Riau	0,74	67,53	2,33	29,40	100,00
Jambi	0,46	70,54	1,48	27,52	100,00
Sumatera Selatan	1,04	67,63	1,03	30,30	100,00
Bengkulu	0,40	70,98	1,37	27,25	100,00
Lampung	0,24	71,25	0,88	27,64	100,00
Kep. Bangka Belitung	2,64	68,39	2,47	26,50	100,00
Kepulauan Riau	1,56	66,45	1,66	30,33	100,00
DKI Jakarta	2,06	67,71	2,09	28,14	100,00
Jawa Barat	0,49	69,17	1,98	28,36	100,00
Jawa Tengah	0,72	65,64	1,61	32,03	100,00
DI Yogyakarta	1,76	64,33	1,93	31,98	100,00
Jawa Timur	0,67	62,49	1,79	35,05	100,00
Banten	NA	70,76	1,24	27,87	100,00
Bali	3,76	66,82	0,78	28,64	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,73	65,73	2,54	30,99	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,92	62,10	1,23	33,75	100,00
Kalimantan Barat	2,20	67,35	1,60	28,85	100,00
Kalimantan Tengah	0,45	73,52	1,65	24,38	100,00
Kalimantan Selatan	1,05	65,35	3,22	30,39	100,00
Kalimantan Timur	0,76	69,60	2,22	27,42	100,00
Kalimantan Utara	NA	69,30	4,75	24,73	100,00
Sulawesi Utara	2,44	66,54	1,47	29,55	100,00
Sulawesi Tengah	1,37	66,94	1,59	30,10	100,00
Sulawesi Selatan	2,98	61,30	2,57	33,15	100,00
Sulawesi Tenggara	1,08	64,30	2,55	32,07	100,00
Gorontalo	1,62	61,89	1,43	35,06	100,00
Sulawesi Barat	3,53	60,48	2,74	33,24	100,00
Maluku	1,17	66,20	1,68	30,96	100,00
Maluku Utara	0,91	68,19	1,77	29,13	100,00
Papua Barat	NA	68,23	1,62	29,39	100,00
Papua Barat Daya	NA	70,23	1,33	26,74	100,00
Papua	1,35	76,66	1,88	20,10	100,00
Papua Selatan	NA	72,58	NA	25,49	100,00
Papua Tengah	NA	81,19	NA	17,44	100,00
Papua Pegunungan	NA	86,47	NA	13,25	100,00
Indonesia	0,97	66,23	1,76	31,05	100,00

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 2.11 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal dalam Rumah Tangga, 2024

Provinsi	Status Tinggal dalam Rumah Tangga					Jumlah
	Tinggal Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga Inti	Tiga Generasi	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	8,33	17,26	47,09	25,96	1,36	100,00
Sumatera Utara	4,22	20,71	42,34	31,31	1,43	100,00
Sumatera Barat	5,79	18,16	31,81	42,05	2,19	100,00
Riau	4,58	19,59	41,65	32,09	2,09	100,00
Jambi	4,16	25,78	32,81	34,75	2,49	100,00
Sumatera Selatan	3,79	19,33	33,02	42,45	1,41	100,00
Bengkulu	2,70	26,18	32,94	37,11	1,07	100,00
Lampung	3,36	20,57	37,83	37,09	1,15	100,00
Kep. Bangka Belitung	5,79	23,44	37,27	30,66	2,84	100,00
Kepulauan Riau	5,20	14,58	42,05	36,49	1,68	100,00
DKI Jakarta	3,01	18,61	56,63	18,30	3,45	100,00
Jawa Barat	6,34	26,22	39,69	25,68	2,07	100,00
Jawa Tengah	6,38	22,62	27,03	41,51	2,47	100,00
DI Yogyakarta	9,55	25,08	28,55	33,55	3,27	100,00
Jawa Timur	6,69	21,82	26,20	42,17	3,12	100,00
Banten	4,06	21,54	46,06	27,95	0,39	100,00
Bali	4,05	19,74	24,41	45,21	6,60	100,00
Nusa Tenggara Barat	7,09	23,65	33,86	33,30	2,10	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,01	8,99	35,34	47,37	5,29	100,00
Kalimantan Barat	2,05	16,93	37,00	39,96	4,07	100,00
Kalimantan Tengah	3,89	28,44	39,96	26,63	1,08	100,00
Kalimantan Selatan	8,69	28,00	35,79	25,46	2,06	100,00
Kalimantan Timur	4,49	21,67	39,35	32,16	2,33	100,00
Kalimantan Utara	2,63	17,58	43,82	33,24	2,74	100,00
Sulawesi Utara	3,29	24,80	31,95	35,61	4,36	100,00
Sulawesi Tengah	4,25	18,25	33,13	41,68	2,69	100,00
Sulawesi Selatan	2,19	13,26	34,63	44,83	5,10	100,00
Sulawesi Tenggara	5,12	16,59	34,25	41,98	2,06	100,00
Gorontalo	3,28	14,96	32,00	45,53	4,23	100,00
Sulawesi Barat	2,67	14,53	36,21	40,43	6,16	100,00
Maluku	1,91	13,00	35,86	45,18	4,05	100,00
Maluku Utara	1,81	11,13	35,67	47,56	3,83	100,00
Papua Barat	4,97	14,02	49,82	29,98	NA	100,00
Papua Barat Daya	2,44	13,39	40,80	39,90	3,47	100,00
Papua	4,54	19,40	49,62	24,01	2,43	100,00
Papua Selatan	6,63	22,60	36,06	32,61	NA	100,00
Papua Tengah	4,71	22,77	61,09	10,98	NA	100,00
Papua Pegunungan	8,50	26,89	59,99	NA	2,37	100,00
Indonesia	5,50	21,71	34,45	35,73	2,61	100,00

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 2.12 *Sampling Error* Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2024

Provinsi	Lansia Muda (Umur 60–69 Tahun)				Lansia Madya (Umur 70–79 Tahun)				Lansia Madya (Umur 80+ Tahun)			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	65,22	63,10	67,34	1,66	26,25	24,30	28,19	3,78	8,54	7,20	9,87	7,97
Sumatera Utara	65,73	63,78	67,67	1,51	27,90	26,04	29,76	3,40	6,37	5,45	7,29	7,34
Sumatera Barat	62,09	59,90	64,28	1,80	27,44	25,51	29,38	3,59	10,47	9,04	11,90	6,96
Riau	70,10	67,55	72,65	1,86	24,46	22,06	26,87	5,02	5,44	4,22	6,66	11,45
Jambi	67,30	64,68	69,92	1,98	26,79	24,31	29,27	4,72	5,91	4,60	7,21	11,26
Sumatera Selatan	64,34	62,18	66,50	1,71	26,78	24,78	28,78	3,81	8,88	7,66	10,10	7,00
Bengkulu	65,55	62,55	68,54	2,33	26,56	23,85	29,28	5,21	7,89	6,27	9,50	10,43
Lampung	64,66	62,51	66,80	1,69	26,57	24,60	28,54	3,79	8,78	7,52	10,03	7,30
Kep. Bangka Belitung	66,67	63,06	70,28	2,76	26,23	22,96	29,49	6,35	7,11	5,08	9,13	14,54
Kepulauan Riau	67,59	62,77	72,41	3,64	26,09	21,49	30,70	9,00	6,31	3,66	8,96	21,40
DKI Jakarta	66,39	63,51	69,26	2,21	27,96	25,26	30,65	4,92	5,66	4,26	7,06	12,62
Jawa Barat	63,88	62,42	65,34	1,17	27,81	26,50	29,13	2,42	8,31	7,44	9,17	5,32
Jawa Tengah	59,61	58,59	60,64	0,88	29,88	28,93	30,82	1,61	10,51	9,87	11,15	3,09
DI Yogyakarta	57,70	55,00	60,40	2,39	29,96	27,52	32,40	4,15	12,34	10,69	13,99	6,82
Jawa Timur	60,87	59,89	61,85	0,82	29,33	28,43	30,23	1,56	9,80	9,21	10,39	3,07
Banten	68,89	65,97	71,81	2,16	24,48	21,80	27,16	5,58	6,63	5,07	8,20	12,06
Bali	61,18	58,87	63,50	1,93	28,95	26,82	31,08	3,75	9,87	8,54	11,20	6,88
Nusa Tenggara Barat	64,32	61,35	67,28	2,35	28,64	25,86	31,41	4,95	7,05	5,68	8,42	9,94
Nusa Tenggara Timur	63,38	61,45	65,31	1,56	28,26	26,48	30,05	3,22	8,36	7,30	9,41	6,43
Kalimantan Barat	65,55	63,04	68,07	1,96	27,86	25,48	30,23	4,35	6,59	5,38	7,80	9,36
Kalimantan Tengah	69,67	66,78	72,56	2,12	24,22	21,70	26,73	5,29	6,11	4,52	7,71	13,30
Kalimantan Selatan	67,13	64,64	69,63	1,90	26,83	24,52	29,14	4,39	6,04	4,70	7,37	11,29
Kalimantan Timur	71,11	68,08	74,15	2,18	23,45	20,65	26,25	6,09	5,43	3,71	7,16	16,16
Kalimantan Utara	66,54	61,67	71,41	3,73	27,36	22,51	32,21	9,05	6,10	3,60	8,59	20,92
Sulawesi Utara	62,56	60,22	64,90	1,91	28,79	26,60	30,97	3,87	8,66	7,33	9,99	7,84
Sulawesi Tengah	66,52	63,80	69,25	2,09	27,07	24,53	29,60	4,77	6,41	5,04	7,78	10,92
Sulawesi Selatan	61,72	59,94	63,50	1,47	28,99	27,33	30,64	2,91	9,30	8,27	10,32	5,63
Sulawesi Tenggara	65,64	63,06	68,22	2,01	28,03	25,65	30,41	4,33	6,33	5,13	7,52	9,62
Gorontalo	66,11	62,35	69,87	2,90	27,82	24,17	31,46	6,68	6,07	4,11	8,03	16,48
Sulawesi Barat	64,56	60,46	68,67	3,24	26,78	23,16	30,40	6,89	8,66	6,14	11,18	14,84
Maluku	64,59	61,39	67,79	2,53	28,98	26,03	31,94	5,20	6,43	4,90	7,96	12,15
Maluku Utara	66,32	63,08	69,56	2,49	27,07	24,15	29,99	5,50	6,61	4,81	8,41	13,86
Papua Barat	70,73	65,35	76,12	3,88	22,96	18,02	27,90	10,98	6,31	3,37	9,25	23,81
Papua Barat Daya	69,66	63,90	75,42	4,22	24,19	18,75	29,62	11,46	6,16	3,80	8,51	19,51
Papua	72,07	68,12	76,03	2,80	24,95	21,08	28,81	7,90	2,98	1,65	4,31	22,78
Papua Selatan	73,13	66,74	79,53	4,46	19,83	14,31	25,34	14,19	7,04	1,90	12,19	37,29
Papua Tengah	81,64	77,28	86,01	2,73	15,10	10,96	19,23	13,96	3,26	1,26	5,25	31,24
Papua Pegunungan	90,11	85,51	94,70	2,60	9,58	5,00	14,17	24,40	NA	NA	NA	55,31
Indonesia	63,29	62,85	63,73	0,35	28,11	27,70	28,51	0,73	8,61	8,35	8,86	1,51

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 2.13 Sampling Error Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	27,23	25,13	29,33	3,93	30,32	28,97	31,66	2,26	29,23	28,09	30,37	1,99
Sumatera Utara	30,90	29,27	32,53	2,69	31,65	30,34	32,97	2,12	31,23	30,14	32,31	1,77
Sumatera Barat	31,56	29,40	33,73	3,50	34,53	33,07	35,99	2,16	33,02	31,70	34,33	2,03
Riau	23,61	21,53	25,68	4,49	24,24	22,71	25,77	3,22	23,99	22,75	25,22	2,63
Jambi	31,31	28,59	34,03	4,43	30,96	29,25	32,67	2,82	31,08	29,62	32,53	2,39
Sumatera Selatan	32,06	29,70	34,43	3,76	29,74	28,38	31,11	2,34	30,59	29,37	31,81	2,04
Bengkulu	27,67	24,86	30,48	5,18	32,60	30,64	34,55	3,06	30,97	29,35	32,58	2,65
Lampung	31,66	29,03	34,29	4,24	33,34	31,87	34,81	2,25	32,79	31,48	34,10	2,04
Kep. Bangka Belitung	28,63	26,11	31,14	4,48	29,27	26,44	32,10	4,94	28,89	27,01	30,77	3,33
Kepulauan Riau	17,56	15,25	19,86	6,70	34,69	28,37	41,01	9,29	19,28	17,11	21,46	5,76
DKI Jakarta	29,35	27,76	30,95	2,77	—	—	—	—	29,35	27,76	30,95	2,77
Jawa Barat	29,17	28,20	30,14	1,70	35,47	34,16	36,77	1,87	30,50	29,69	31,31	1,36
Jawa Tengah	41,35	40,35	42,35	1,23	42,35	41,38	43,32	1,17	41,83	41,13	42,53	0,85
DI Yogyakarta	34,62	32,48	36,75	3,15	51,87	48,48	55,26	3,34	38,68	36,85	40,50	2,41
Jawa Timur	41,60	40,60	42,60	1,23	44,76	43,83	45,69	1,06	43,00	42,31	43,69	0,82
Banten	26,00	24,21	27,79	3,51	37,73	35,07	40,39	3,59	28,29	26,76	29,82	2,76
Bali	33,82	31,91	35,73	2,88	43,00	40,55	45,45	2,91	36,31	34,76	37,86	2,18
Nusa Tenggara Barat	27,76	25,56	29,97	4,06	27,74	25,66	29,81	3,82	27,75	26,23	29,27	2,80
Nusa Tenggara Timur	30,65	27,87	33,43	4,63	35,40	34,17	36,63	1,78	34,11	32,93	35,29	1,76
Kalimantan Barat	32,82	30,25	35,39	3,99	29,95	28,37	31,53	2,69	31,04	29,66	32,42	2,27
Kalimantan Tengah	23,86	21,49	26,22	5,06	26,41	24,59	28,23	3,51	25,30	23,84	26,75	2,93
Kalimantan Selatan	31,01	28,84	33,17	3,56	33,14	31,42	34,86	2,65	32,08	30,70	33,46	2,20
Kalimantan Timur	26,57	24,62	28,52	3,74	31,59	28,42	34,75	5,11	28,13	26,46	29,80	3,03
Kalimantan Utara	27,22	23,77	30,68	6,47	33,31	29,18	37,43	6,32	29,37	26,70	32,04	4,64
Sulawesi Utara	37,30	35,01	39,59	3,14	40,50	38,66	42,34	2,32	38,71	37,19	40,23	2,00
Sulawesi Tengah	28,77	25,65	31,88	5,53	31,95	30,27	33,63	2,68	30,89	29,36	32,41	2,52
Sulawesi Selatan	35,60	33,63	37,57	2,82	41,64	40,28	43,01	1,67	38,80	37,63	39,98	1,55
Sulawesi Tenggara	25,79	23,02	28,55	5,47	31,53	29,91	33,16	2,63	29,27	27,79	30,74	2,57
Gorontalo	34,02	30,23	37,81	5,68	34,30	31,59	37,02	4,04	34,17	31,89	36,46	3,41
Sulawesi Barat	31,67	26,94	36,41	7,63	29,35	27,05	31,65	3,99	29,80	27,74	31,87	3,54
Maluku	30,04	26,85	33,22	5,41	35,02	32,68	37,37	3,41	32,78	30,86	34,71	3,00
Maluku Utara	27,50	23,90	31,11	6,69	30,95	28,86	33,03	3,43	29,90	28,08	31,72	3,10
Papua Barat	21,45	17,46	25,45	9,51	20,19	17,57	22,81	6,61	20,57	18,38	22,76	5,43
Papua Barat Daya	22,19	17,83	26,55	10,03	26,52	23,83	29,21	5,18	24,23	21,60	26,86	5,54
Papua	32,82	29,18	36,46	5,67	33,65	30,88	36,41	4,19	33,15	30,69	35,60	3,78
Papua Selatan	26,19	19,97	32,40	12,11	25,66	22,19	29,14	6,91	25,85	22,70	29,01	6,23
Papua Tengah	18,73	14,60	22,86	11,26	10,35	8,86	11,83	7,32	12,22	10,74	13,70	6,19
Papua Pegunungan	11,66	5,57	17,74	26,63	10,35	8,86	11,84	7,35	10,45	8,99	11,90	7,09
Indonesia	32,54	32,15	32,93	0,61	36,05	35,72	36,37	0,46	33,99	33,72	34,25	0,40

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 2.14 *Sampling Error* Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2024

Provinsi	Kepala Rumah Tangga				Istri/Suami			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	65,08	63,39	66,77	1,33	18,86	17,54	20,17	3,56
Sumatera Utara	56,45	54,99	57,90	1,31	23,85	22,69	25,02	2,49
Sumatera Barat	51,84	50,14	53,54	1,68	20,51	19,13	21,88	3,42
Riau	58,60	56,49	60,71	1,84	21,55	19,84	23,26	4,05
Jambi	53,89	51,92	55,87	1,87	22,58	20,93	24,23	3,73
Sumatera Selatan	51,36	49,63	53,08	1,71	22,35	21,02	23,68	3,04
Bengkulu	51,98	49,91	54,05	2,03	24,18	22,42	25,95	3,72
Lampung	54,24	52,54	55,93	1,60	23,65	22,26	25,05	3,01
Kep. Bangka Belitung	54,80	52,21	57,40	2,42	23,38	21,22	25,53	4,71
Kepulauan Riau	53,06	48,21	57,91	4,66	17,71	14,74	20,68	8,56
DKI Jakarta	61,12	59,04	63,20	1,74	24,21	22,43	25,99	3,75
Jawa Barat	58,29	57,25	59,33	0,91	24,88	23,99	25,76	1,82
Jawa Tengah	50,14	49,37	50,92	0,79	21,97	21,36	22,59	1,43
DI Yogyakarta	53,55	51,72	55,37	1,74	24,01	22,44	25,58	3,33
Jawa Timur	50,74	49,96	51,52	0,78	20,41	19,81	21,01	1,51
Banten	61,39	59,19	63,60	1,83	23,45	21,64	25,26	3,94
Bali	37,68	35,93	39,43	2,37	19,73	18,38	21,07	3,48
Nusa Tenggara Barat	57,80	55,74	59,86	1,82	24,05	22,21	25,89	3,90
Nusa Tenggara Timur	53,25	51,75	54,75	1,44	20,60	19,45	21,76	2,86
Kalimantan Barat	49,68	47,71	51,66	2,03	20,56	19,03	22,10	3,82
Kalimantan Tengah	54,81	52,42	57,21	2,23	22,99	21,04	24,93	4,31
Kalimantan Selatan	60,62	58,76	62,49	1,57	21,96	20,40	23,52	3,62
Kalimantan Timur	54,52	52,01	57,04	2,35	22,66	20,55	24,77	4,76
Kalimantan Utara	55,12	51,18	59,05	3,64	22,60	19,47	25,73	7,06
Sulawesi Utara	48,64	47,01	50,27	1,71	25,60	24,24	26,96	2,71
Sulawesi Tengah	53,61	51,46	55,77	2,05	22,02	20,30	23,73	3,98
Sulawesi Selatan	50,36	48,96	51,76	1,42	20,63	19,55	21,71	2,67
Sulawesi Tenggara	59,68	57,62	61,73	1,76	21,53	19,88	23,19	3,92
Gorontalo	45,33	42,24	48,42	3,48	20,40	18,04	22,77	5,91
Sulawesi Barat	58,35	55,16	61,54	2,79	20,50	17,87	23,12	6,53
Maluku	52,26	49,75	54,76	2,44	24,44	22,38	26,50	4,31
Maluku Utara	50,31	47,69	52,94	2,66	22,47	20,38	24,56	4,75
Papua Barat	61,91	57,87	65,95	3,33	23,95	20,53	27,37	7,29
Papua Barat Daya	57,99	53,77	62,21	3,71	24,07	20,59	27,56	7,38
Papua	61,24	58,41	64,06	2,35	28,23	25,66	30,80	4,65
Papua Selatan	59,82	53,39	66,25	5,48	23,51	19,27	27,74	9,19
Papua Tengah	65,57	61,84	69,29	2,90	29,17	25,63	32,70	6,19
Papua Pegunungan	67,78	63,67	71,90	3,09	29,17	25,30	33,05	6,77
Indonesia	53,91	53,59	54,24	0,31	22,42	22,15	22,69	0,62



Lanjutan Tabel 2.14

Provinsi	Mertua/Orang Tua				Lainnya			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	14,64	12,94	16,33	5,91	1,43	0,84	2,01	20,94
Sumatera Utara	18,48	16,74	20,21	4,80	1,22	0,87	1,58	14,76
Sumatera Barat	25,75	23,62	27,87	4,22	1,91	1,38	2,44	14,21
Riau	17,89	15,52	20,25	6,76	1,97	1,13	2,81	21,79
Jambi	21,66	19,23	24,08	5,71	1,87	1,08	2,66	21,54
Sumatera Selatan	24,99	22,77	27,21	4,53	1,30	0,82	1,78	18,71
Bengkulu	22,74	20,05	25,43	6,04	1,10	0,46	1,74	29,69
Lampung	21,08	19,00	23,16	5,03	1,03	0,56	1,50	23,22
Kep. Bangka Belitung	19,28	16,15	22,41	8,29	2,54	1,47	3,61	21,51
Kepulauan Riau	27,37	21,73	33,01	10,51	1,86	0,54	3,18	36,14
DKI Jakarta	12,06	9,98	14,13	8,77	2,61	1,70	3,52	17,80
Jawa Barat	14,96	13,81	16,10	3,91	1,87	1,43	2,32	12,20
Jawa Tengah	25,58	24,58	26,59	2,00	2,30	1,96	2,64	7,46
DI Yogyakarta	19,35	17,14	21,56	5,83	3,10	2,24	3,96	14,19
Jawa Timur	25,91	24,92	26,90	1,94	2,94	2,59	3,30	6,15
Banten	14,87	12,46	17,28	8,28	0,29	0,03	0,56	46,11
Bali	36,53	34,10	38,97	3,40	6,06	4,91	7,22	9,73
Nusa Tenggara Barat	16,50	14,23	18,77	7,02	1,65	0,91	2,38	22,70
Nusa Tenggara Timur	21,60	19,88	23,32	4,06	4,54	3,76	5,33	8,81
Kalimantan Barat	26,31	23,77	28,85	4,93	3,44	2,49	4,39	14,06
Kalimantan Tengah	21,36	18,38	24,33	7,11	0,84	0,33	1,35	30,82
Kalimantan Selatan	15,70	13,68	17,72	6,57	1,72	1,06	2,38	19,63
Kalimantan Timur	20,67	17,60	23,75	7,58	2,15	1,15	3,15	23,76
Kalimantan Utara	19,59	15,11	24,08	11,68	2,69	0,89	4,50	34,11
Sulawesi Utara	22,08	19,96	24,20	4,90	3,68	2,85	4,50	11,48
Sulawesi Tengah	22,05	19,38	24,71	6,17	2,32	1,51	3,14	17,81
Sulawesi Selatan	24,65	22,92	26,39	3,60	4,36	3,62	5,10	8,66
Sulawesi Tenggara	16,83	14,59	19,06	6,78	1,96	1,23	2,70	19,09
Gorontalo	30,36	26,26	34,46	6,89	3,91	2,49	5,32	18,48
Sulawesi Barat	15,89	12,84	18,94	9,79	5,26	2,99	7,53	22,05
Maluku	20,36	17,31	23,42	7,66	2,94	1,92	3,96	17,63
Maluku Utara	23,85	20,44	27,27	7,30	3,37	2,06	4,67	19,76
Papua Barat	13,10	8,72	17,48	17,07	NA	NA	NA	55,40
Papua Barat Daya	14,75	9,98	19,52	16,49	3,19	0,85	5,54	37,50
Papua	8,41	5,82	11,00	15,70	2,12	0,69	3,55	34,33
Papua Selatan	15,89	8,76	23,03	22,89	NA	NA	NA	91,28
Papua Tengah	4,85	2,15	7,54	28,40	NA	NA	NA	93,63
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	63,08	NA	NA	NA	69,78
Indonesia	21,32	20,93	21,72	0,95	2,34	2,21	2,48	2,98

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 2.15 *Sampling Error* Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2024

Provinsi	Belum Kawin				Kawin			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	0,84	0,49	1,19	21,42	62,61	60,30	64,92	1,88
Sumatera Utara	0,80	0,49	1,11	19,49	65,62	63,65	67,59	1,53
Sumatera Barat	0,41	0,22	0,60	23,73	64,85	62,61	67,10	1,77
Riau	0,74	0,33	1,15	28,50	67,53	64,70	70,36	2,14
Jambi	0,46	0,15	0,76	33,91	70,54	68,03	73,05	1,81
Sumatera Selatan	1,04	0,60	1,48	21,54	67,63	65,47	69,79	1,63
Bengkulu	0,40	0,06	0,74	42,83	70,98	68,24	73,72	1,97
Lampung	0,24	0,05	0,43	40,75	71,25	69,11	73,40	1,54
Kep. Bangka Belitung	2,64	1,46	3,82	22,73	68,39	64,86	71,92	2,64
Kepulauan Riau	1,56	0,42	2,69	37,33	66,45	60,93	71,98	4,24
DKI Jakarta	2,06	1,19	2,93	21,44	67,71	64,77	70,64	2,21
Jawa Barat	0,49	0,29	0,70	21,48	69,17	67,72	70,62	1,07
Jawa Tengah	0,72	0,54	0,90	12,73	65,64	64,61	66,67	0,80
DI Yogyakarta	1,76	1,19	2,32	16,33	64,33	61,70	66,96	2,09
Jawa Timur	0,67	0,53	0,81	10,96	62,49	61,46	63,52	0,84
Banten	NA	NA	NA	78,23	70,76	67,90	73,61	2,06
Bali	3,76	2,94	4,58	11,15	66,82	64,57	69,08	1,72
Nusa Tenggara Barat	0,73	0,30	1,16	29,90	65,73	62,74	68,72	2,32
Nusa Tenggara Timur	2,92	2,32	3,52	10,48	62,10	60,12	64,09	1,63
Kalimantan Barat	2,20	1,43	2,98	17,99	67,35	64,85	69,84	1,89
Kalimantan Tengah	0,45	0,06	0,83	43,91	73,52	70,74	76,30	1,93
Kalimantan Selatan	1,05	0,60	1,49	21,92	65,35	62,79	67,91	2,00
Kalimantan Timur	0,76	0,18	1,34	38,99	69,60	66,44	72,76	2,32
Kalimantan Utara	NA	NA	NA	50,48	69,30	64,40	74,20	3,61
Sulawesi Utara	2,44	1,78	3,10	13,73	66,54	64,27	68,80	1,74
Sulawesi Tengah	1,37	0,84	1,90	19,88	66,94	64,14	69,75	2,14
Sulawesi Selatan	2,98	2,36	3,61	10,70	61,30	59,37	63,23	1,61
Sulawesi Tenggara	1,08	0,53	1,64	26,25	64,30	61,51	67,08	2,21
Gorontalo	1,62	0,79	2,45	26,10	61,89	57,75	66,04	3,42
Sulawesi Barat	3,53	1,59	5,47	28,00	60,48	56,08	64,88	3,71
Maluku	1,17	0,68	1,66	21,35	66,20	62,93	69,47	2,52
Maluku Utara	0,91	0,25	1,57	36,92	68,19	64,84	71,54	2,51
Papua Barat	NA	NA	NA	50,23	68,23	62,74	73,72	4,11
Papua Barat Daya	NA	NA	NA	55,74	70,23	64,43	76,02	4,21
Papua	1,35	0,10	2,60	47,28	76,66	73,06	80,26	2,40
Papua Selatan	NA	NA	NA	89,43	72,58	66,30	78,86	4,41
Papua Tengah	NA	NA	NA	79,69	81,19	76,56	85,82	2,91
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	100,06	86,47	82,16	90,78	2,54
Indonesia	0,97	0,89	1,04	4,06	66,23	65,78	66,67	0,34



Lanjutan Tabel 2.15

Provinsi	Ceraï Hidup				Ceraï Mati			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	1,69	1,18	2,19	15,28	34,87	32,62	37,11	3,28
Sumatera Utara	1,26	0,81	1,70	18,07	32,32	30,40	34,25	3,04
Sumatera Barat	2,37	1,82	2,92	11,87	32,37	30,18	34,55	3,44
Riau	2,33	1,46	3,20	19,00	29,40	26,75	32,05	4,60
Jambi	1,48	0,95	2,01	18,13	27,52	25,07	29,97	4,54
Sumatera Selatan	1,03	0,66	1,39	18,02	30,30	28,20	32,41	3,54
Bengkulu	1,37	0,71	2,02	24,40	27,25	24,58	29,92	4,99
Lampung	0,88	0,54	1,21	19,31	27,64	25,52	29,75	3,90
Kep. Bangka Belitung	2,47	1,41	3,54	21,88	26,50	23,30	29,69	6,16
Kepulauan Riau	1,66	0,57	2,76	33,63	30,33	25,06	35,60	8,87
DKI Jakarta	2,09	1,33	2,86	18,69	28,14	25,41	30,87	4,95
Jawa Barat	1,98	1,58	2,37	10,19	28,36	26,96	29,75	2,51
Jawa Tengah	1,61	1,36	1,86	7,96	32,03	31,03	33,03	1,59
DI Yogyakarta	1,93	1,29	2,57	16,82	31,98	29,46	34,51	4,03
Jawa Timur	1,79	1,54	2,04	7,11	35,05	34,05	36,05	1,45
Banten	1,24	0,57	1,90	27,35	27,87	25,07	30,67	5,12
Bali	0,78	0,45	1,11	21,62	28,64	26,51	30,76	3,79
Nusa Tenggara Barat	2,54	1,74	3,34	16,02	30,99	28,12	33,86	4,73
Nusa Tenggara Timur	1,23	0,84	1,61	15,90	33,75	31,85	35,65	2,87
Kalimantan Barat	1,60	0,98	2,22	19,90	28,85	26,52	31,19	4,12
Kalimantan Tengah	1,65	1,00	2,31	20,13	24,38	21,67	27,09	5,67
Kalimantan Selatan	3,22	2,40	4,04	12,95	30,39	27,97	32,81	4,06
Kalimantan Timur	2,22	1,45	2,99	17,73	27,42	24,34	30,51	5,74
Kalimantan Utara	4,75	2,53	6,97	23,87	24,73	20,32	29,15	9,12
Sulawesi Utara	1,47	1,00	1,94	16,37	29,55	27,39	31,72	3,74
Sulawesi Tengah	1,59	1,01	2,17	18,53	30,10	27,39	32,80	4,59
Sulawesi Selatan	2,57	2,08	3,06	9,76	33,15	31,36	34,93	2,75
Sulawesi Tenggara	2,55	1,72	3,38	16,54	32,07	29,41	34,73	4,23
Gorontalo	1,43	0,64	2,21	28,00	35,06	31,00	39,12	5,91
Sulawesi Barat	2,74	1,62	3,86	20,90	33,24	29,40	37,09	5,91
Maluku	1,68	0,89	2,46	23,95	30,96	27,77	34,15	5,26
Maluku Utara	1,77	1,01	2,53	22,00	29,13	25,90	32,36	5,66
Papua Barat	1,62	0,34	2,90	40,36	29,39	24,11	34,68	9,18
Papua Barat Daya	1,33	0,35	2,31	37,54	26,74	21,49	31,99	10,02
Papua	1,88	0,95	2,82	25,25	20,10	16,73	23,48	8,57
Papua Selatan	NA	NA	NA	57,49	25,49	19,43	31,55	12,12
Papua Tengah	NA	NA	NA	67,62	17,44	12,96	21,91	13,09
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	68,14	13,25	8,95	17,54	16,54
Indonesia	1,76	1,65	1,87	3,23	31,05	30,62	31,48	0,71

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 2.16 *Sampling Error* Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal Dalam Rumah Tangga, 2024

Provinsi	Tinggal Sendiri				Bersama Pasangan				Bersama Keluarga Inti			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	8,33	7,34	9,32	6,04	17,26	15,31	19,21	5,76	47,09	44,57	49,61	2,73
Sumatera Utara	4,22	3,75	4,69	5,71	20,71	19,09	22,33	3,99	42,34	40,09	44,59	2,72
Sumatera Barat	5,79	4,92	6,66	7,67	18,16	15,93	20,39	6,26	31,81	29,40	34,22	3,87
Riau	4,58	3,62	5,54	10,68	19,59	17,17	22,00	6,29	41,65	38,48	44,82	3,89
Jambi	4,16	3,28	5,05	10,85	25,78	23,05	28,52	5,41	32,81	29,88	35,75	4,56
Sumatera Selatan	3,79	3,19	4,39	8,11	19,33	17,58	21,09	4,63	33,02	30,60	35,44	3,74
Bengkulu	2,70	2,15	3,26	10,50	26,18	23,26	29,10	5,69	32,94	29,65	36,22	5,09
Lampung	3,36	2,72	4,01	9,84	20,57	18,62	22,52	4,84	37,83	35,23	40,43	3,51
Kep. Bangka Belitung	5,79	4,32	7,27	12,97	23,44	19,88	26,99	7,74	37,27	33,28	41,26	5,46
Kepulauan Riau	5,20	2,92	7,49	22,38	14,58	11,62	17,54	10,35	42,05	36,06	48,04	7,27
DKI Jakarta	3,01	2,44	3,57	9,65	18,61	16,22	21,00	6,55	56,63	53,22	60,04	3,07
Jawa Barat	6,34	5,77	6,90	4,53	26,22	24,77	27,68	2,83	39,69	37,98	41,40	2,20
Jawa Tengah	6,38	6,00	6,76	3,05	22,62	21,66	23,58	2,16	27,03	25,95	28,10	2,03
DI Yogyakarta	9,55	8,15	10,95	7,46	25,08	22,38	27,79	5,50	28,55	25,77	31,33	4,97
Jawa Timur	6,69	6,32	7,07	2,86	21,82	20,90	22,74	2,15	26,20	25,17	27,23	2,00
Banten	4,06	2,97	5,14	13,67	21,54	18,70	24,38	6,73	46,06	42,63	49,50	3,80
Bali	4,05	3,29	4,81	9,58	19,74	17,82	21,66	4,95	24,41	22,02	26,79	4,99
Nusa Tenggara Barat	7,09	5,90	8,27	8,51	23,65	20,73	26,57	6,30	33,86	30,44	37,28	5,15
Nusa Tenggara Timur	3,01	2,43	3,59	9,82	8,99	7,91	10,07	6,15	35,34	33,21	37,46	3,07
Kalimantan Barat	2,05	1,55	2,56	12,58	16,93	14,78	19,07	6,48	37,00	34,12	39,87	3,96
Kalimantan Tengah	3,89	3,05	4,73	10,99	28,44	25,29	31,58	5,64	39,96	36,38	43,54	4,57
Kalimantan Selatan	8,69	7,53	9,86	6,83	28,00	25,41	30,60	4,73	35,79	32,97	38,61	4,03
Kalimantan Timur	4,49	3,53	5,46	10,98	21,67	18,55	24,78	7,33	39,35	35,49	43,21	5,01
Kalimantan Utara	2,63	1,26	4,00	26,54	17,58	13,21	21,95	12,69	43,82	37,87	49,77	6,92
Sulawesi Utara	3,29	2,73	3,84	8,57	24,80	22,59	27,02	4,55	31,95	29,45	34,45	3,99
Sulawesi Tengah	4,25	3,32	5,18	11,16	18,25	15,78	20,72	6,91	33,13	30,08	36,18	4,70
Sulawesi Selatan	2,19	1,90	2,48	6,80	13,26	12,09	14,43	4,49	34,63	32,64	36,61	2,92
Sulawesi Tenggara	5,12	4,07	6,17	10,44	16,59	14,34	18,83	6,91	34,25	31,24	37,26	4,48
Gorontalo	3,28	2,20	4,36	16,80	14,96	11,91	18,01	10,41	32,00	27,79	36,22	6,72
Sulawesi Barat	2,67	1,99	3,35	12,97	14,53	11,47	17,58	10,73	36,21	31,79	40,63	6,23
Maluku	1,91	1,41	2,41	13,33	13,00	10,59	15,41	9,46	35,86	32,26	39,47	5,13
Maluku Utara	1,81	1,19	2,43	17,48	11,13	9,02	13,24	9,66	35,67	31,91	39,44	5,39
Papua Barat	4,97	3,22	6,72	17,98	14,02	9,43	18,61	16,71	49,82	43,01	56,63	6,98
Papua Barat Daya	2,44	1,64	3,24	16,79	13,39	9,32	17,46	15,52	40,80	34,28	47,33	8,16
Papua	4,54	3,18	5,90	15,24	19,40	15,57	23,22	10,06	49,62	44,52	54,73	5,25
Papua Selatan	6,63	3,96	9,30	20,55	22,60	15,86	29,34	15,22	36,06	28,22	43,91	11,09
Papua Tengah	4,71	2,51	6,91	23,85	22,77	17,32	28,22	12,21	61,09	54,57	67,61	5,44
Papua Pegunungan	8,50	5,12	11,89	20,31	26,89	19,78	34,00	13,49	59,99	52,34	67,64	6,51
Indonesia	5,50	5,34	5,66	1,47	21,71	21,29	22,12	0,98	34,45	33,95	34,95	0,74



Lanjutan Tabel 2.16

Provinsi	Tiga Generasi				Lainnya			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	25,96	23,74	28,18	4,36	1,36	0,81	1,90	20,60
Sumatera Utara	31,31	29,12	33,49	3,56	1,43	1,04	1,82	13,77
Sumatera Barat	42,05	39,53	44,57	3,06	2,19	1,59	2,79	13,90
Riau	32,09	28,94	35,24	5,01	2,09	1,23	2,95	20,95
Jambi	34,75	31,67	37,82	4,51	2,49	1,50	3,48	20,28
Sumatera Selatan	42,45	39,80	45,11	3,19	1,41	0,90	1,93	18,56
Bengkulu	37,11	33,76	40,46	4,61	1,07	0,53	1,61	25,78
Lampung	37,09	34,48	39,70	3,59	1,15	0,66	1,65	21,99
Kep. Bangka Belitung	30,66	26,72	34,60	6,56	2,84	1,67	4,01	21,10
Kepulauan Riau	36,49	30,10	42,87	8,93	1,68	0,38	2,98	39,38
DKI Jakarta	18,30	15,58	21,01	7,57	3,45	2,35	4,55	16,27
Jawa Barat	25,68	24,11	27,26	3,13	2,07	1,54	2,60	13,05
Jawa Tengah	41,51	40,31	42,71	1,48	2,47	2,11	2,83	7,39
DI Yogyakarta	33,55	30,63	36,46	4,43	3,27	2,33	4,22	14,71
Jawa Timur	42,17	40,99	43,34	1,42	3,12	2,75	3,50	6,10
Banten	27,95	24,75	31,14	5,83	0,39	0,11	0,68	36,93
Bali	45,21	42,58	47,84	2,96	6,60	5,39	7,80	9,33
Nusa Tenggara Barat	33,30	29,93	36,68	5,17	2,10	1,19	3,02	22,15
Nusa Tenggara Timur	47,37	45,20	49,54	2,34	5,29	4,41	6,17	8,47
Kalimantan Barat	39,96	37,10	42,82	3,65	4,07	2,96	5,17	13,82
Kalimantan Tengah	26,63	23,23	30,02	6,50	1,08	0,45	1,72	29,89
Kalimantan Selatan	25,46	22,79	28,13	5,36	2,06	1,32	2,80	18,37
Kalimantan Timur	32,16	28,32	36,00	6,09	2,33	1,31	3,35	22,34
Kalimantan Utara	33,24	27,56	38,91	8,71	2,74	0,92	4,55	33,88
Sulawesi Utara	35,61	33,04	38,18	3,68	4,36	3,37	5,34	11,56
Sulawesi Tengah	41,68	38,43	44,93	3,98	2,69	1,76	3,63	17,69
Sulawesi Selatan	44,83	42,74	46,91	2,38	5,10	4,28	5,93	8,26
Sulawesi Tenggara	41,98	38,75	45,21	3,93	2,06	1,32	2,81	18,46
Gorontalo	45,53	41,00	50,05	5,07	4,23	2,75	5,71	17,85
Sulawesi Barat	40,43	35,82	45,03	5,81	6,16	3,62	8,71	21,08
Maluku	45,18	41,37	48,99	4,30	4,05	2,76	5,34	16,25
Maluku Utara	47,56	43,52	51,59	4,33	3,83	2,38	5,29	19,38
Papua Barat	29,98	23,80	36,17	10,53	NA	NA	NA	50,80
Papua Barat Daya	39,90	33,39	46,41	8,33	3,47	1,10	5,83	34,80
Papua	24,01	19,47	28,54	9,63	2,43	0,77	4,10	34,95
Papua Selatan	32,61	24,00	41,22	13,47	NA	NA	NA	71,48
Papua Tengah	10,98	6,82	15,13	19,32	NA	NA	NA	88,06
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	57,35	2,37	0,18	4,56	47,22
Indonesia	35,73	35,23	36,23	0,71	2,61	2,46	2,76	2,98

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



BAB 3

PENDIDIKAN

<https://www.pps.go.id>

Tingkat pendidikan lansia menjadi salah satu faktor yang menentukan kondisi ekonomi mereka saat ini. Selain itu, tingkat pendidikan lansia juga dapat mengindikasikan kemampuan lansia dalam mengakses informasi terkait dengan kesehatan dan layanan kesehatan. Capaian pendidikan penduduk lansia saat ini merupakan hasil dari program pendidikan terdahulu dimana fasilitas banyak yang kurang memadai dan akses sekolah yang jauh sehingga masih banyak lansia yang berpendidikan rendah. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mewujudkan pembangunan manusia dimana tidak boleh ada satu orang pun tertinggal dalam kemajuan Indonesia. Pada bab ini, akan disajikan beberapa indikator terkait pendidikan lansia, seperti kemampuan baca tulis dan rata-rata lama sekolah. Selain itu, juga disajikan informasi akses lansia terhadap teknologi informasi dan komunikasi saat ini.

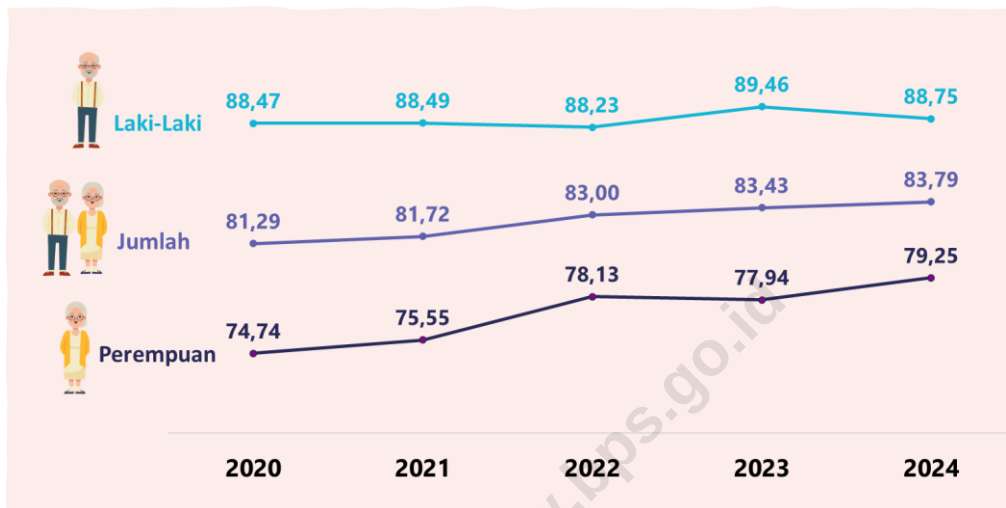
3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis

Pendidikan merupakan salah satu modal pembangunan manusia. Salah satu pendidikan pertama yang harus dituntaskan oleh masyarakat Indonesia yakni pendidikan keaksaraan karena berkaitan erat dengan kemampuan dasar yang bermanfaat untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Keaksaraan atau melek aksara didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis kalimat sederhana yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari (Syukri 2008). Kemampuan membaca dan menulis tersebut merupakan dasar pendidikan yang penting untuk komunikasi dan pengembangan kualitas setiap individu, termasuk penduduk lansia.

Tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat diukur melalui tingkat keaksaraan penduduknya (Rosadi 2017). Indikator keaksaraan tersebut dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH) pada Susenas. Berdasarkan hasil Susenas, terlihat bahwa AMH lansia terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dengan capaian AMH nasional sebesar 83,79 persen



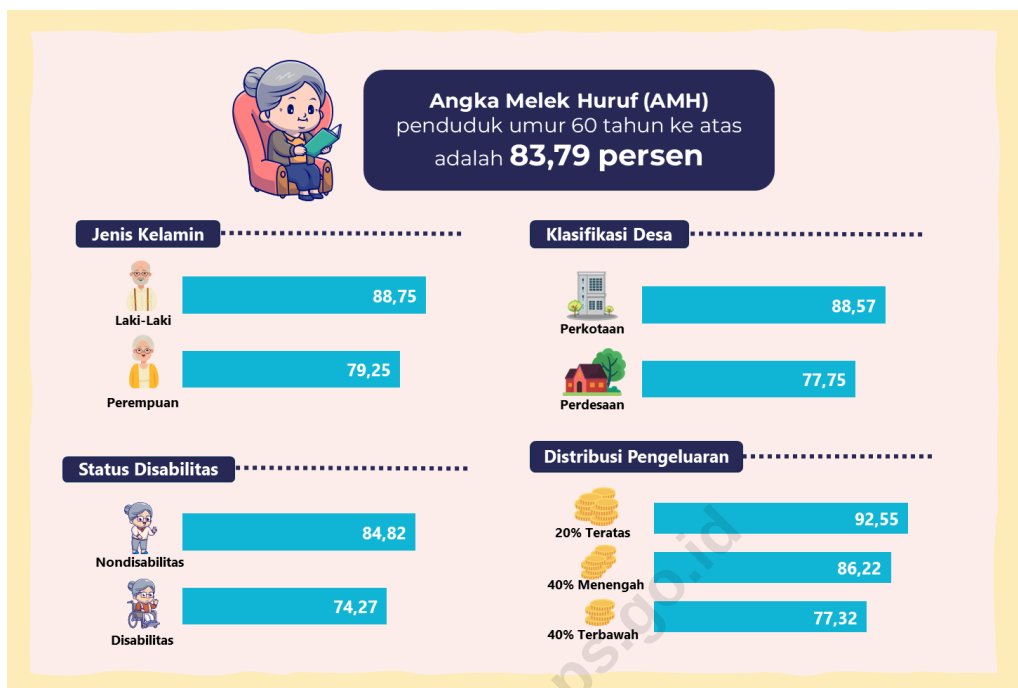
pada tahun 2024. Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa capaian AMH pada lansia laki-laki lebih tinggi dibanding lansia perempuan. Namun demikian, capaian AMH lansia perempuan menunjukkan peningkatan di tahun 2024. Sebaliknya, untuk AMH lansia laki-laki justru mengalami penurunan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020–2024

Gambar 3.1 Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2020–2024

Selanjutnya disajikan informasi mengenai kemampuan baca tulis lansia berdasarkan beberapa karakteristik. Pada Gambar 3.2 terlihat bahwa masih terdapat disparitas kemampuan baca tulis lansia dimana AMH lansia yang bukan penyandang disabilitas lebih tinggi dibandingkan lansia penyandang disabilitas, yakni 84,82 persen berbanding 74,27 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih dibutuhkan peran pemerintah untuk meningkatkan capaian AMH penyandang disabilitas.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

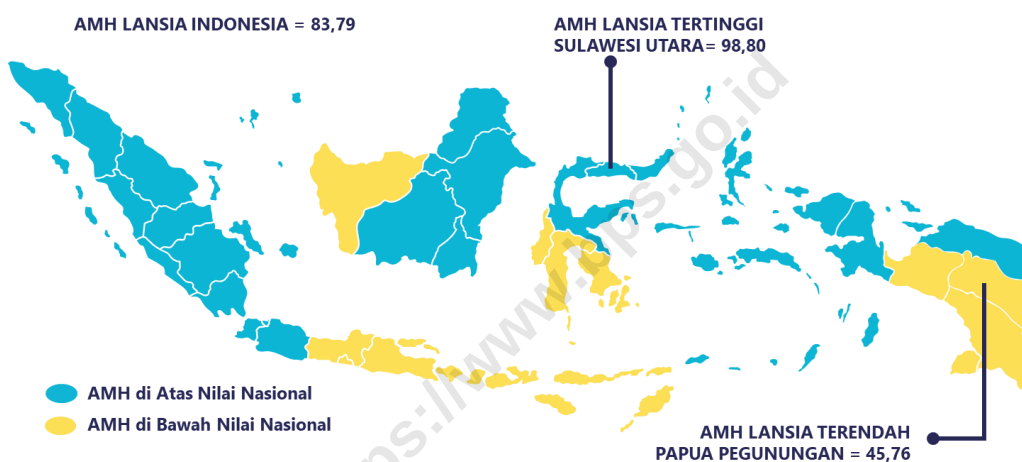
Gambar 3.2 Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Karakteristik, 2024

Kondisi ekonomi rumah tangga lansia pada Susenas 2024 diukur menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita rumah tangga sebulan. Semakin tinggi pengeluaran per kapita rumah tangga sebulan mengindikasikan kondisi ekonomi yang tinggi juga. Pada Gambar 3.2 terlihat bahwa capaian AMH lansia pada rumah tangga kelompok pengeluaran 20 persen teratas (92,55 persen) lebih besar dibandingkan dengan kelompok pengeluaran 40 persen menengah (86,22 persen) dan 40 persen kelompok pengeluaran terbawah (77,32 persen). Sementara itu, jika dilihat berdasarkan kewilayahan, AMH lansia di perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan (88,57 persen berbanding 77,75 persen). Tidak meratanya pendidikan hingga ke seluruh pelosok desa masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia yang semakin memprihatinkan sehingga terjadinya ketidakmerataan pendidikan (Zulkarnaen dan Ari Dwi Handoyo 2019).

Gambar 3.3 merepresentasikan AMH lansia menurut provinsi di wilayah Indonesia. Warna biru menunjukkan nilai AMH lansia yang berada di atas AMH



lansia Indonesia (83,79 persen). Terlihat bahwa keseluruhan Pulau Sumatera berwarna biru, yang berarti bahwa semua provinsi di Pulau Sumatera telah memiliki AMH lansia di atas angka nasional. Sementara itu, provinsi Papua Pegunungan memiliki nilai AMH lansia yang paling rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, yaitu sebesar 45,76 persen. Terakhir, meskipun Pulau Jawa selama ini dipandang sebagai wilayah yang paling lengkap infrastruktur pendidikannya, namun Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta masih memiliki capaian AMH lansia di bawah angka nasional.



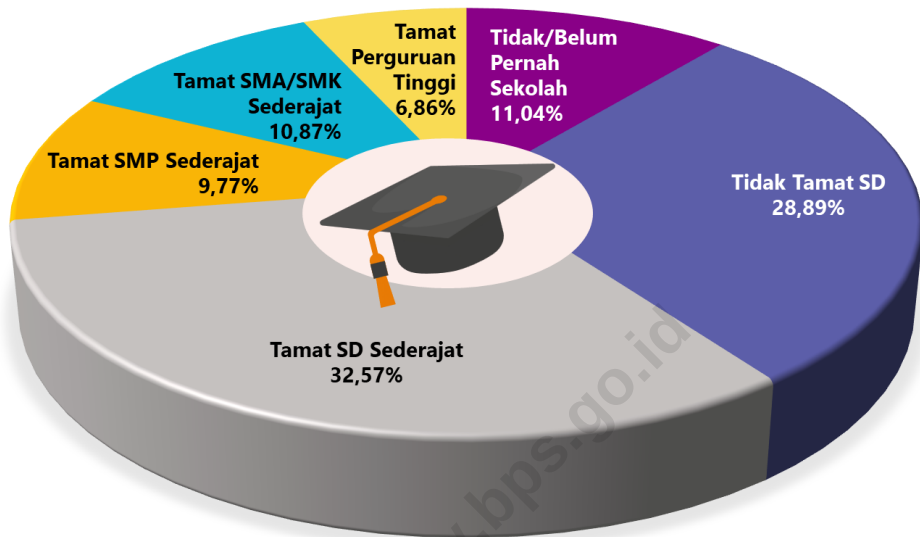
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 3.3 Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Provinsi (Persen), 2024

3.2 Tingkat Pendidikan

Perkembangan kualitas sumber daya manusia dalam suatu negara dapat ditingkatkan melalui pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan teori *human capital* yakni setiap tahun yang digunakan seseorang untuk bersekolah (peningkatan lama sekolah) akan meningkatkan upah yang diterimanya (Mankiw dkk. 2012). Peningkatan upah pada waktunya akan mendorong tingkat kesejahteraan seseorang dan menjauhkannya dari jerat kemiskinan. Namun sayangnya hal tersebut mungkin kurang menguntungkan bagi lansia mengingat akses terhadap fasilitas pendidikan di masa lalu yang masih terbatas. Saat ini, lansia di Indonesia masih didominasi oleh kelompok lansia yang memiliki latar pendidikan rendah yakni 28,89 persen tidak tamat SD dan

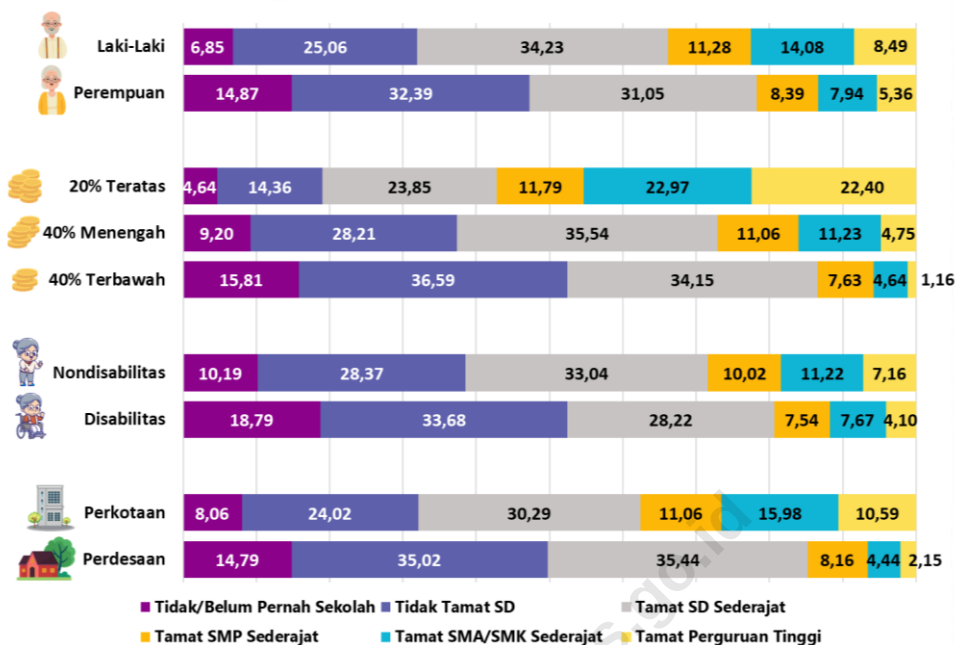
sebanyak 11,04 persen lansia tidak/belum pernah sekolah. Sementara itu, hanya ada sekitar 17,73 persen lansia yang memiliki pendidikan SMA/SMK sederajat ke atas.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenat) Maret 2024

Gambar 3.4 Persentase Lansia Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2024

Berdasarkan Gambar 3.5, terlihat bahwa terdapat kesenjangan tingkat pendidikan antara lansia laki-laki dan perempuan yang cukup lebar. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender sejak usia muda berkontribusi pada kesenjangan di usia lansia (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010). Hal ini tercermin dari persentase lansia perempuan tidak/belum pernah sekolah yang lebih dari dua kali lipat persentase lansia laki-laki yang tidak/belum pernah sekolah (14,87 persen berbanding 6,85 persen). Di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, angka persentase lansia laki-laki yang tamat SMA/SMK sederajat dan tamat perguruan tinggi juga jauh lebih besar daripada lansia perempuan, yaitu 14,08 persen dan 8,49 persen berbanding 7,94 persen dan 5,36 persen.

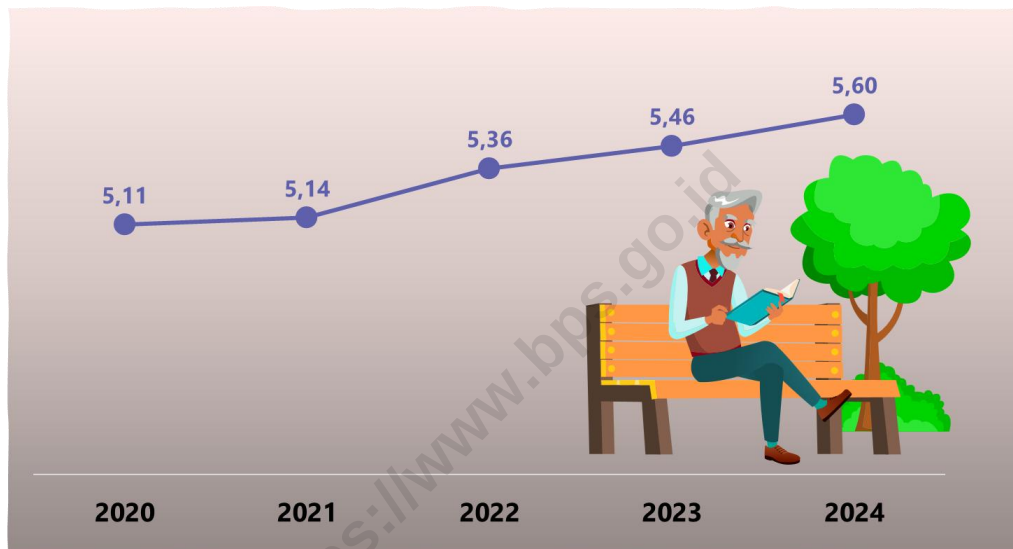


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 3.5 Persentase Lansia Menurut Karakteristik dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan (Persen), 2024

Berdasarkan gambar tersebut juga terlihat adanya pola hubungan antara kesenjangan tingkat pendidikan dan distribusi pengeluaran rumah tangga. Tinggi rendahnya ekonomi rumah tangga akan memengaruhi kualitas pendidikan dan proses pelaksanaan pendidikan (Muhammad dkk. 2017). Rumah tangga dengan ekonomi yang memadai cenderung dapat memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebaliknya, rumah tangga dengan ekonomi yang rendah sering mengalami kendala untuk melanjutkan pendidikan. Kondisi tersebut ditambah biaya untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi cenderung semakin besar sehingga dapat menyebabkan orang miskin semakin sulit mengakses pendidikan. Pada tahun 2024, terdapat sekitar 45,37 persen lansia pada rumah tangga kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang tamat SMA/SMK sederajat ke atas. Sebaliknya, hanya 5,80 persen lansia dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang menamatkan pendidikan SMA/SMK sederajat ke atas.

Pola keterkaitan juga terlihat antara karakteristik wilayah tempat tinggal dan tingkat pendidikan lansia. Lansia yang tinggal di perkotaan cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik daripada mereka yang tinggal di perdesaan (Gambar 3.5). Di perkotaan, 26,57 persen lansia menamatkan pendidikan SMA/SMK sederajat dan perguruan tinggi, sedangkan di perdesaan persentasenya hanya sebesar 6,59 persen.

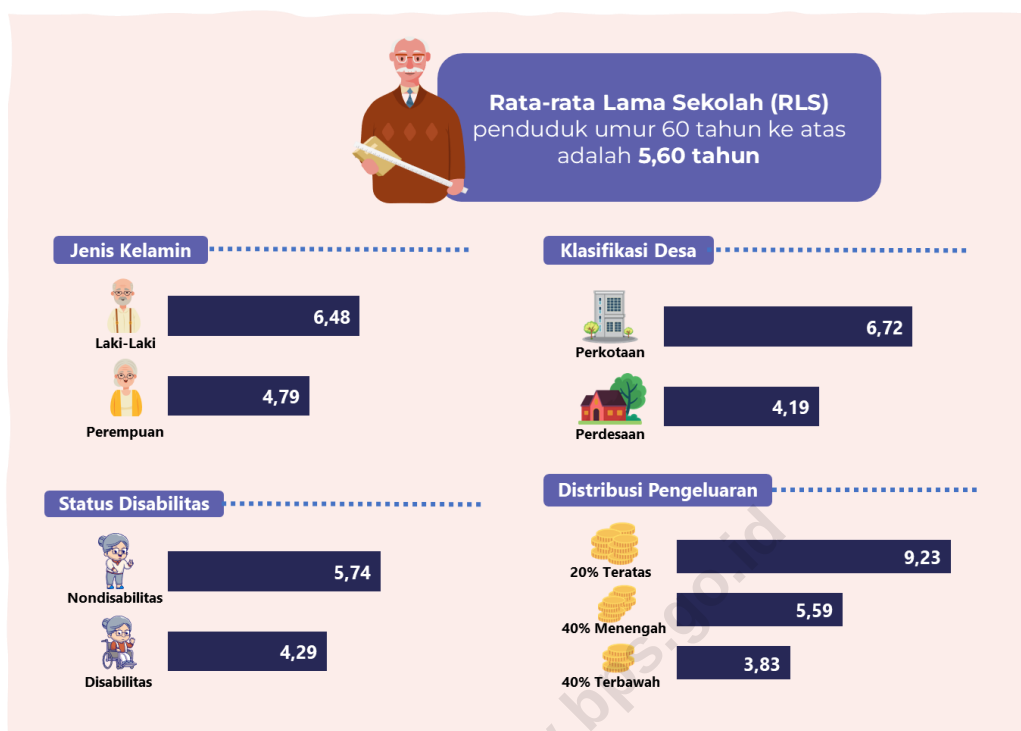


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020–2024

Gambar 3.6 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Lansia (Tahun), 2020–2024

Masih rendahnya tingkat pendidikan lansia berbanding lurus dengan rendahnya rata-rata lama sekolah lansia. Selama lima tahun terakhir, rata-rata lama sekolah lansia mengalami peningkatan dari 5,11 tahun pada tahun 2020 menjadi 5,60 tahun pada tahun 2024. Artinya rata-rata lansia pernah bersekolah sampai kelas 5 SD atau setara dengan belum tamat SD sederajat. Peningkatan tersebut diasumsikan terjadi karena banyaknya penduduk usia pralansia yang berpendidikan lebih baik memasuki usia lansia selama lima tahun terakhir, sehingga berpengaruh pada penghitungan indikator rata-rata lama sekolah lansia.





Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 3.7 Rata-Rata Lama Sekolah Lansia Menurut Karakteristik, 2024

Berdasarkan jenis kelamin, terlihat adanya ketimpangan angka rata-rata lama sekolah lansia. Rata-rata lama sekolah lansia laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan lansia perempuan, yaitu 6,48 tahun berbanding 4,79 tahun. Adapun menurut status disabilitas, lansia bukan penyandang disabilitas memiliki rata-rata lama sekolah lebih lama dibandingkan lansia penyandang disabilitas, yaitu 5,74 tahun berbanding 4,29 tahun. Selain itu, kesenjangan rata-rata lama sekolah lansia juga terlihat berdasarkan status ekonomi rumah tangga lansia yakni semakin tinggi status ekonomi lansia maka semakin lama rata-rata lama sekolahnya.

Selain itu, capaian pendidikan lansia juga menunjukkan perbedaan yang signifikan berdasarkan klasifikasi desa atau kota tempat tinggal. Lansia yang tinggal di perkotaan cenderung lebih lama mengenyam pendidikan dibandingkan mereka yang tinggal di perdesaan, yaitu 6,72 tahun berbanding 4,19 tahun. Salah satu hal yang mungkin menyebabkan ini terjadi adalah karena

lebih lengkapnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan di perkotaan dibandingkan di perdesaan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 3.8 Rata-Rata Lama Sekolah Lansia Menurut Provinsi (Tahun), 2024

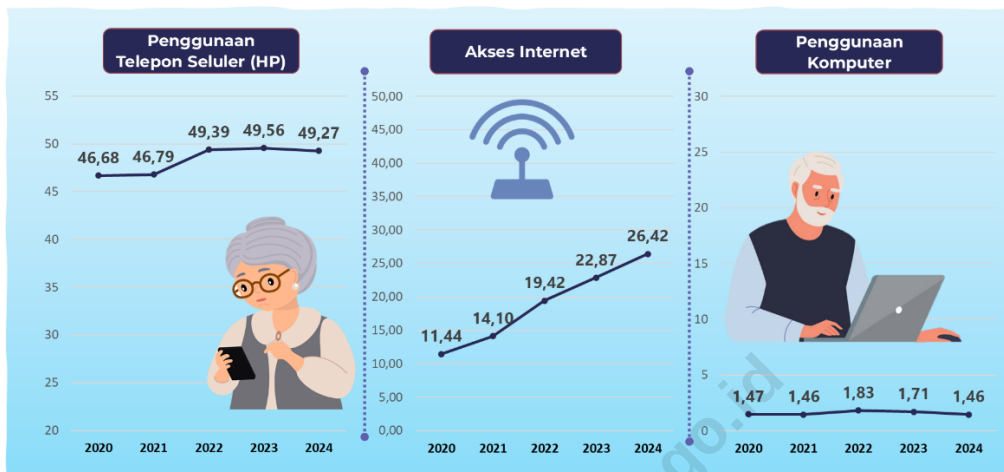
Analisis mendalam berdasarkan letak geografis menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah lansia masih tidak merata di wilayah Indonesia. DKI Jakarta memiliki angka rata rata lama sekolah lansia yang tertinggi yakni 9,80 tahun yang menunjukkan bahwa rata-rata lansia mampu bersekolah sampai dengan lulus SMP sederajat. Angka tersebut hampir dua kali lipat angka rata-rata nasional. Sebaliknya, nilai rata-rata lama sekolah yang paling rendah berada di Provinsi Papua Pegunungan dimana rata-rata lama sekolah penduduk lansia hanya 2,24 tahun atau tidak sampai tamat SD sederajat. Perbedaan tersebut menggarisbawahi masih adanya kesenjangan dalam akses pendidikan terutama di wilayah Pulau Papua.

3.3 Akses Teknologi Informasi dan Telekomunikasi

Pola interaksi dan kehidupan masyarakat kini telah bergeser ke era digital, termasuk lansia. Setelah era pandemi Covid-19 usai hendaknya menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas hidup lansia melalui penguasaan teknologi digital. Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan lansia untuk lebih mendekatkan diri pada keluarga dan



memberikan kesempatan untuk menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.



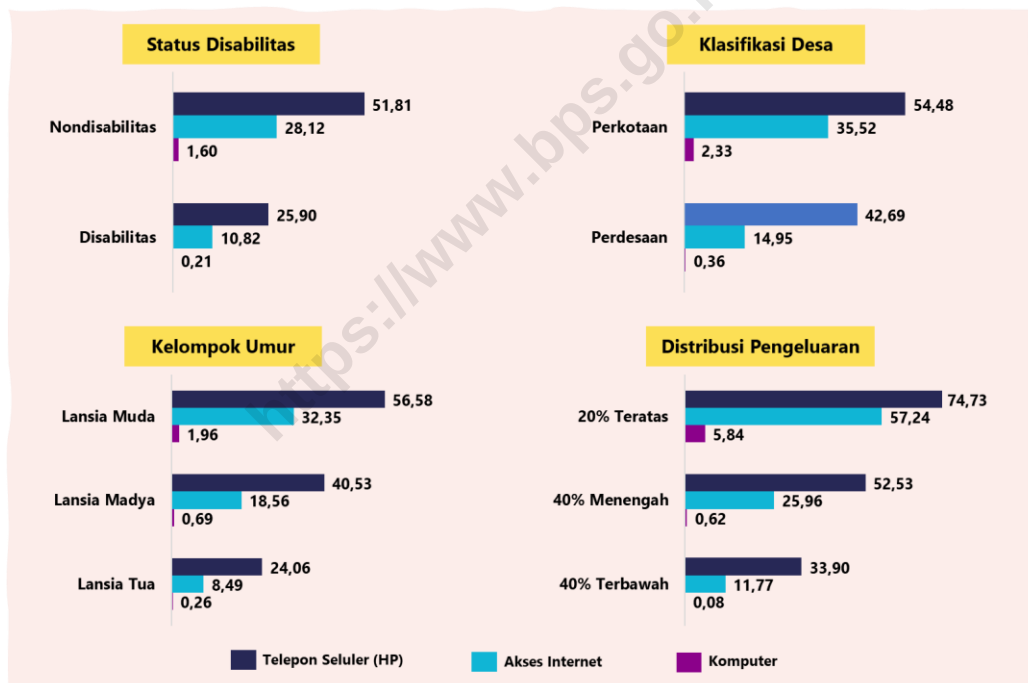
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020–2024

Gambar 3.9 Persentase Lansia yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Menurut Jenis Fasilitas, 2020–2024

Dalam Susenas 2024, akses masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi didapatkan dari informasi apakah masyarakat tersebut menggunakan telepon seluler (HP), menggunakan internet, dan menggunakan komputer dalam tiga bulan terakhir. Dari ketiga akses teknologi informasi dan komunikasi tersebut, telepon seluler (HP) menjadi hal yang paling sering digunakan. Hampir separuh lansia atau 49,27 persen lansia menggunakan telepon seluler, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023, angka ini menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir.

Selanjutnya, akses internet oleh lansia juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, sebesar 26,42 persen lansia pernah mengakses internet. Angka tersebut meningkat signifikan dibanding tahun 2020, di mana hanya terdapat sebesar 11,44 persen lansia yang mengakses internet. Sementara itu, penggunaan komputer oleh lansia relatif stabil dalam lima tahun terakhir dengan capaian hingga tahun 2024 yang tidak lebih dari dua persen, meskipun tren pada tahun 2022 hingga 2024 persentase lansia yang menggunakan komputer mengalami penurunan.

Gambar 3.10 memberikan gambaran akses lansia terhadap TIK yang dilihat berdasarkan beberapa karakteristik. Jika dilihat dari status disabilitas lansia, lansia disabilitas cenderung lebih tidak terpapar teknologi informasi dan komunikasi. Analisis lebih lanjut berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa semakin bertambah umur lansia maka semakin kecil kemungkinan mereka terpapar teknologi informasi dan komunikasi. Persentase lansia muda yang menggunakan HP (56,58 persen) lebih banyak dibandingkan lansia madya (40,53 persen) dan lansia tua (24,06 persen). Bahkan, lansia muda yang mengakses internet hampir empat kali lebih besar dari lansia tua (32,35 persen berbanding 8,49 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 3.10 Persentase Lansia Terhadap Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Menurut Karakteristik, 2024



Status ekonomi rumah tangga juga memiliki pengaruh signifikan terhadap akses teknologi informasi dan komunikasi lansia, baik itu dalam penggunaan telepon seluler, komputer, maupun akses internet. Hanya sekitar 33,90 persen lansia pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang menggunakan telepon seluler, sementara lansia pada rumah tangga kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang menggunakan telepon seluler telah mencapai 74,73 persen. Bahkan, persentase lansia yang mengakses internet pada rumah tangga kelompok pengeluaran 20 persen teratas lima kali lansia pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah (57,24 persen berbanding 11,77 persen).

Memperluas literasi digital dan akses teknologi bagi lansia perlu menjadi prioritas untuk mengatasi kesenjangan ini. Upaya tersebut tidak hanya menyasar lansia saat ini, namun juga calon lansia di masa depan. Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk mempersiapkan masa tua yang lebih sehat, berpendidikan, dan berwawasan teknologi digital sangat penting agar mereka dapat menjadi lansia yang aktif, mandiri, dan berkontribusi positif dalam masyarakat.



Tabel 3.1 Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2024

Karakteristik	Klasifikasi Desa		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	88,57	77,75	83,79
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	92,60	83,89	88,75
Perempuan	84,89	72,12	79,25
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60–69 tahun)	91,29	81,67	87,10
Lansia Madya (70–79 tahun)	86,31	74,62	81,08
Lansia Tua (80+ tahun)	74,75	61,20	68,24
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	89,44	78,99	84,82
Disabilitas	80,56	66,49	74,27
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	95,24	84,59	92,55
40% Menengah	90,95	80,48	86,22
40% Terbawah	82,86	71,98	77,32

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 3.2 Persentase Lansia Menurut Karakteristik dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2024

Karakteristik	Tidak/ belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	Tamat SD sederajat	Tamat SMP sederajat	Tamat SMA/ SMK sederajat	Tamat Perguruan Tinggi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	11,04	28,89	32,57	9,77	10,87	6,86	100,00
Jenis Kelamin							
Laki-Laki	6,85	25,06	34,23	11,28	14,08	8,49	100,00
Perempuan	14,87	32,39	31,05	8,39	7,94	5,36	100,00
Kelompok Umur							
Lansia Muda (60–69 tahun)	8,14	26,86	34,07	10,65	12,27	8,00	100,00
Lansia Madya (70–79 tahun)	13,41	31,14	31,46	8,98	9,51	5,49	100,00
Lansia Tua (80+ tahun)	24,56	36,39	25,13	5,91	5,09	2,91	100,00
Status Disabilitas							
Nondisabilitas	10,19	28,37	33,04	10,02	11,22	7,16	100,00
Disabilitas	18,79	33,68	28,22	7,54	7,67	4,10	100,00
Distribusi Pengeluaran							
20% Teratas	4,64	14,36	23,85	11,79	22,97	22,40	100,00
40% Menengah	9,20	28,21	35,54	11,06	11,23	4,75	100,00
40% Terbawah	15,81	36,59	34,15	7,63	4,64	1,16	100,00
Klasifikasi Desa							
Perkotaan	8,06	24,02	30,29	11,06	15,98	10,59	100,00
Perdesaan	14,79	35,02	35,44	8,16	4,44	2,15	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 3.3 Rata-Rata Lama Sekolah Lansia Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2024

Karakteristik	Klasifikasi Desa		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	6,72	4,19	5,60
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	7,68	4,97	6,48
Perempuan	5,83	3,48	4,79
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60–69 tahun)	7,27	4,64	6,13
Lansia Madya (70–79 tahun)	6,14	3,73	5,06
Lansia Tua (80+ tahun)	4,27	2,57	3,45
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	6,88	4,31	5,74
Disabilitas	5,24	3,12	4,29
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	10,79	5,56	9,23
40% Menengah	6,87	4,33	5,59
40% Terbawah	4,39	3,40	3,83

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 3.4 Persentase Lansia yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Karakteristik dan Jenis Fasilitas, 2024

Karakteristik	Jenis Fasilitas		
	Menggunakan Telepon Seluler (HP)	Menggunakan Komputer/Laptop	Akses Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	49,27	1,46	26,42
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	57,11	2,15	32,05
Perempuan	42,09	0,83	21,26
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60–69 tahun)	56,58	1,96	32,35
Lansia Madya (70–79 tahun)	40,53	0,69	18,56
Lansia Tua (80+ tahun)	24,06	0,26	8,49
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	51,81	1,60	28,12
Disabilitas	25,90	0,21	10,82
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	74,73	5,84	57,24
40% Menengah	52,53	0,62	25,96
40% Terbawah	33,90	0,08	11,77
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	54,48	2,33	35,52
Perdesaan	42,69	0,36	14,95

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 3.5 Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2024

Provinsi	Jenis Kelamin		Klasifikasi Desa		Total
	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	92,79	86,49	93,99	87,31	89,48
Sumatera Utara	97,12	93,69	97,26	92,77	95,28
Sumatera Barat	97,52	94,82	97,72	94,54	96,09
Riau	95,73	89,75	96,00	90,66	92,77
Jambi	93,22	82,31	92,97	85,25	87,74
Sumatera Selatan	95,22	91,04	95,73	91,46	93,06
Bengkulu	92,49	80,11	92,69	83,71	86,31
Lampung	90,62	80,63	91,46	83,07	85,70
Kep. Bangka Belitung	95,83	86,62	94,54	86,75	91,31
Kepulauan Riau	95,20	88,82	94,00	84,04	92,10
DKI Jakarta	99,03	96,76	97,84	–	97,84
Jawa Barat	93,80	89,02	91,94	89,62	91,36
Jawa Tengah	84,80	69,72	81,34	71,95	76,76
DI Yogyakarta	90,42	75,07	85,47	75,16	82,11
Jawa Timur	81,90	69,56	83,76	65,61	75,29
Banten	91,64	83,80	89,85	81,93	87,77
Bali	88,31	69,95	82,76	69,94	78,56
Nusa Tenggara Barat	66,92	49,34	60,62	53,87	57,33
Nusa Tenggara Timur	81,89	76,15	82,34	77,75	78,84
Kalimantan Barat	79,70	66,85	82,05	67,29	73,20
Kalimantan Tengah	94,94	89,92	95,23	90,84	92,63
Kalimantan Selatan	93,82	85,35	92,91	86,35	89,46
Kalimantan Timur	93,89	91,95	95,16	88,71	92,96
Kalimantan Utara	91,23	83,74	95,13	77,46	87,73
Sulawesi Utara	99,31	98,32	99,22	98,32	98,80
Sulawesi Tengah	94,69	89,16	95,72	90,29	91,91
Sulawesi Selatan	79,53	71,66	85,71	67,40	75,19
Sulawesi Tenggara	84,10	71,86	81,25	75,95	77,75
Gorontalo	94,62	93,51	97,42	91,15	94,03
Sulawesi Barat	81,50	68,06	86,60	71,01	74,36
Maluku	98,84	96,02	98,65	96,52	97,37
Maluku Utara	93,05	88,59	95,40	89,09	90,82
Papua Barat	91,75	88,22	98,39	86,35	90,10
Papua Barat Daya	92,81	86,19	97,16	82,64	89,59
Papua	96,36	90,52	95,46	90,83	93,59
Papua Selatan	82,65	77,10	93,41	71,95	80,07
Papua Tengah	73,68	66,18	91,78	59,44	70,54
Papua Pegunungan	46,71	44,16	53,06	45,20	45,76
Indonesia	88,75	79,25	88,57	77,75	83,79

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 3.6 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2024

Provinsi	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD Sede- rajat	Tamat SMP Sede- rajat	Tamat SMA/SMK Sederajat	Tamat Perguruan Tinggi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	3,38	23,66	44,36	15,15	8,50	4,96	100,00
Sumatera Utara	3,39	19,83	35,61	16,07	18,35	6,75	100,00
Sumatera Barat	2,38	29,21	27,35	15,79	15,74	9,54	100,00
Riau	8,34	24,32	35,80	15,31	10,58	5,65	100,00
Jambi	11,30	30,47	30,81	11,04	13,31	3,07	100,00
Sumatera Selatan	6,02	29,88	40,72	7,63	10,70	5,03	100,00
Bengkulu	6,46	32,70	29,58	9,02	15,77	6,46	100,00
Lampung	5,97	43,40	30,66	8,52	7,21	4,24	100,00
Kep. Bangka Belitung	5,81	30,93	38,41	11,35	10,94	2,56	100,00
Kepulauan Riau	4,01	24,89	32,08	10,55	21,67	6,80	100,00
DKI Jakarta	2,71	8,43	24,26	18,12	27,64	18,83	100,00
Jawa Barat	6,37	27,80	41,51	7,51	10,01	6,80	100,00
Jawa Tengah	13,80	34,99	30,12	7,78	8,16	5,15	100,00
DI Yogyakarta	12,13	32,16	24,41	10,88	12,29	8,12	100,00
Jawa Timur	16,97	31,89	28,03	8,63	7,66	6,82	100,00
Banten	9,94	22,39	35,34	11,33	13,25	7,75	100,00
Bali	19,04	17,87	33,12	7,59	12,33	10,04	100,00
Nusa Tenggara Barat	31,82	33,74	19,66	3,77	6,33	4,68	100,00
Nusa Tenggara Timur	12,57	33,19	32,38	6,03	10,43	5,40	100,00
Kalimantan Barat	18,95	32,30	24,33	11,53	9,14	3,76	100,00
Kalimantan Tengah	4,12	19,81	41,75	12,87	10,53	10,92	100,00
Kalimantan Selatan	3,13	33,81	32,35	9,55	11,27	9,90	100,00
Kalimantan Timur	4,02	27,91	37,56	14,29	12,55	3,67	100,00
Kalimantan Utara	4,08	22,11	32,90	21,17	17,21	2,53	100,00
Sulawesi Utara	1,84	23,36	30,33	15,51	22,39	6,58	100,00
Sulawesi Tengah	8,39	15,72	39,09	13,55	13,83	9,43	100,00
Sulawesi Selatan	15,16	28,17	27,32	8,98	11,75	8,63	100,00
Sulawesi Tenggara	12,94	24,85	36,76	9,47	7,87	8,10	100,00
Gorontalo	17,40	39,53	27,39	7,76	4,65	3,27	100,00
Sulawesi Barat	13,61	25,18	35,58	7,42	9,86	8,35	100,00
Maluku	2,11	19,89	40,30	17,64	16,09	3,98	100,00
Maluku Utara	4,84	28,65	38,31	12,86	12,58	2,75	100,00
Papua Barat	12,44	25,92	30,51	10,30	13,36	7,47	100,00
Papua Barat Daya	10,01	17,18	30,71	14,37	21,69	6,04	100,00
Papua	17,42	9,29	27,85	21,71	13,68	10,05	100,00
Papua Selatan	32,62	18,95	22,66	16,05	7,13	2,58	100,00
Papua Tengah	45,73	5,17	24,48	12,61	8,23	3,78	100,00
Papua Pegunungan	74,24	4,26	6,63	7,58	5,08	2,21	100,00
Indonesia	11,04	28,89	32,57	9,77	10,87	6,86	100,00

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 3.7 Rata-Rata Lama Sekolah Lansia (Tahun) Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2024

Provinsi	Jenis Kelamin		Klasifikasi Desa		Total
	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	6,76	5,40	7,87	5,17	6,05
Sumatera Utara	7,87	6,51	8,23	5,75	7,14
Sumatera Barat	7,47	6,33	8,01	5,78	6,87
Riau	6,71	5,14	7,78	4,73	5,94
Jambi	5,88	3,99	7,11	3,89	4,93
Sumatera Selatan	6,19	4,81	7,91	4,02	5,48
Bengkulu	6,71	4,86	8,43	4,71	5,79
Lampung	5,25	3,69	6,28	3,66	4,48
Kep. Bangka Belitung	6,21	4,35	6,64	3,41	5,30
Kepulauan Riau	8,09	6,61	8,04	4,52	7,37
DKI Jakarta	10,72	8,97	9,80	–	9,80
Jawa Barat	6,42	4,95	6,06	4,51	5,67
Jawa Tengah	5,68	3,79	5,54	3,75	4,67
DI Yogyakarta	7,16	5,45	7,16	4,31	6,23
Jawa Timur	5,83	3,94	5,91	3,57	4,82
Banten	7,46	5,52	7,31	4,24	6,50
Bali	7,48	5,06	6,98	4,59	6,19
Nusa Tenggara Barat	4,11	2,16	4,00	2,04	3,05
Nusa Tenggara Timur	6,07	4,62	8,07	4,44	5,30
Kalimantan Barat	5,37	3,41	6,31	3,09	4,38
Kalimantan Tengah	7,77	6,40	8,88	5,94	7,14
Kalimantan Selatan	7,40	5,58	8,34	4,76	6,46
Kalimantan Timur	6,76	5,30	7,05	4,15	6,06
Kalimantan Utara	7,68	6,12	7,66	5,96	6,95
Sulawesi Utara	7,60	7,32	8,51	6,25	7,45
Sulawesi Tengah	7,76	6,25	8,93	6,18	7,00
Sulawesi Selatan	6,60	5,11	7,86	4,23	5,78
Sulawesi Tenggara	7,01	4,92	7,88	4,92	5,93
Gorontalo	4,44	4,93	5,98	3,62	4,70
Sulawesi Barat	6,61	4,88	8,21	5,00	5,69
Maluku	7,71	6,82	8,85	6,19	7,25
Maluku Utara	7,11	5,44	8,92	5,28	6,27
Papua Barat	7,89	5,67	9,77	5,53	6,85
Papua Barat Daya	8,25	6,79	9,33	5,90	7,54
Papua	8,29	6,48	9,24	4,77	7,43
Papua Selatan	5,85	4,09	7,20	3,71	5,03
Papua Tengah	4,86	3,90	8,35	2,43	4,46
Papua Pegunungan	2,59	1,64	4,72	2,05	2,24
Indonesia	6,48	4,79	6,72	4,19	5,60

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 3.8 Persentase Lansia yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2024

Provinsi	Jenis Kelamin		Klasifikasi Desa		Total
	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	61,93	43,32	62,53	47,15	52,15
Sumatera Utara	78,18	67,88	74,49	70,33	72,65
Sumatera Barat	76,66	63,75	75,54	64,36	69,81
Riau	76,16	54,66	75,16	59,22	65,52
Jambi	71,56	48,30	72,42	53,90	59,88
Sumatera Selatan	66,96	46,24	66,18	50,32	56,25
Bengkulu	63,35	43,62	72,26	45,85	53,51
Lampung	64,48	50,13	62,12	55,27	57,42
Kep. Bangka Belitung	63,53	51,44	65,42	46,59	57,60
Kepulauan Riau	84,88	70,03	82,52	57,07	77,65
DKI Jakarta	80,87	67,29	73,76	–	73,76
Jawa Barat	52,64	37,59	47,91	36,23	44,95
Jawa Tengah	43,05	30,85	41,35	31,51	36,55
DI Yogyakarta	51,46	42,82	52,28	35,38	46,78
Jawa Timur	48,18	31,67	44,53	33,40	39,34
Banten	53,50	31,96	50,89	20,40	42,86
Bali	58,15	32,77	49,72	34,33	44,67
Nusa Tenggara Barat	66,20	53,55	68,30	49,85	59,30
Nusa Tenggara Timur	66,88	57,63	79,01	56,68	61,96
Kalimantan Barat	58,09	40,17	69,59	35,29	49,03
Kalimantan Tengah	68,01	48,24	74,26	48,35	58,89
Kalimantan Selatan	63,67	41,49	61,58	43,85	52,26
Kalimantan Timur	78,65	62,65	74,54	64,06	70,96
Kalimantan Utara	77,85	62,52	80,29	57,37	70,70
Sulawesi Utara	63,15	58,03	70,91	48,68	60,50
Sulawesi Tengah	58,06	47,91	64,46	48,07	52,96
Sulawesi Selatan	67,77	57,20	69,81	56,11	61,94
Sulawesi Tenggara	77,82	65,59	75,12	69,59	71,47
Gorontalo	63,11	52,41	62,68	52,90	57,39
Sulawesi Barat	67,57	56,41	71,64	58,91	61,64
Maluku	70,81	62,59	80,11	57,53	66,53
Maluku Utara	60,54	43,26	67,54	45,98	51,89
Papua Barat	59,61	44,63	78,22	41,02	52,61
Papua Barat Daya	66,27	55,91	74,10	49,42	61,24
Papua	68,97	62,36	79,79	45,30	65,83
Papua Selatan	58,89	44,84	68,19	42,72	52,35
Papua Tengah	43,34	39,32	85,75	18,61	41,66
Papua Pegunungan	14,49	8,10	47,04	9,41	12,11
Indonesia	57,11	42,09	54,48	42,69	49,27

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 3.9 Persentase Lansia yang Mengakses Internet Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2024

Provinsi	Jenis Kelamin		Klasifikasi Desa		Total
	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	22,10	11,60	29,23	10,50	16,59
Sumatera Utara	40,06	32,20	41,69	28,45	35,84
Sumatera Barat	35,58	24,42	37,55	22,16	29,66
Riau	37,69	22,86	45,68	20,32	30,35
Jambi	30,25	16,05	37,24	16,39	23,12
Sumatera Selatan	28,42	18,35	39,96	13,22	23,22
Bengkulu	30,38	18,88	43,49	16,94	24,64
Lampung	29,32	20,81	35,01	20,61	25,13
Kep. Bangka Belitung	31,76	21,32	35,04	14,80	26,64
Kepulauan Riau	55,47	42,27	55,97	19,76	49,04
DKI Jakarta	72,50	57,66	64,73	–	64,73
Jawa Barat	33,76	23,19	33,19	14,10	28,36
Jawa Tengah	26,01	16,74	26,42	15,46	21,07
DI Yogyakarta	38,32	29,47	40,54	19,01	33,53
Jawa Timur	26,81	15,91	28,38	12,51	20,97
Banten	40,82	22,77	40,57	7,65	31,90
Bali	39,27	18,99	34,35	16,51	28,50
Nusa Tenggara Barat	21,69	14,65	25,78	9,53	17,85
Nusa Tenggara Timur	17,43	12,25	37,26	7,68	14,67
Kalimantan Barat	34,04	22,23	49,01	14,06	28,07
Kalimantan Tengah	38,38	23,56	51,76	17,69	31,54
Kalimantan Selatan	35,40	21,12	39,86	17,39	28,05
Kalimantan Timur	50,62	33,17	50,22	26,86	42,23
Kalimantan Utara	41,27	33,53	47,95	23,36	37,66
Sulawesi Utara	26,17	22,06	33,43	13,38	24,04
Sulawesi Tengah	20,35	14,24	31,83	11,10	17,28
Sulawesi Selatan	28,66	20,20	38,36	13,35	23,99
Sulawesi Tenggara	23,99	15,38	31,16	13,52	19,52
Gorontalo	13,54	14,14	20,67	8,10	13,86
Sulawesi Barat	18,45	14,49	31,81	12,12	16,35
Maluku	22,56	18,02	34,75	10,56	20,19
Maluku Utara	20,74	12,01	34,95	9,36	16,37
Papua Barat	34,65	19,11	52,17	16,17	27,39
Papua Barat Daya	37,92	22,42	46,79	15,32	30,39
Papua	40,66	34,78	54,41	13,53	37,87
Papua Selatan	30,00	17,68	38,18	15,80	24,26
Papua Tengah	24,50	20,38	55,31	5,77	22,78
Papua Pegunungan	2,91	NA	23,58	NA	3,04
Indonesia	32,05	21,26	35,52	14,95	26,42

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 3.10 Sampling Error Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2024

Provinsi	Tidak/belum pernah sekolah				Tidak tamat SD				Tamat SD sederajat			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	3,38	2,62	4,14	11,50	23,66	21,79	25,52	4,02	44,36	42,07	46,65	2,64
Sumatera Utara	3,39	2,75	4,03	9,62	19,83	18,32	21,33	3,88	35,61	33,67	37,54	2,77
Sumatera Barat	2,38	1,60	3,16	16,73	29,21	27,20	31,21	3,50	27,35	25,40	29,29	3,63
Riau	8,34	6,81	9,86	9,32	24,32	21,83	26,80	5,22	35,80	32,97	38,63	4,03
Jambi	11,30	9,54	13,06	7,95	30,47	27,88	33,06	4,34	30,81	28,24	33,38	4,26
Sumatera Selatan	6,02	4,87	7,18	9,80	29,88	27,83	31,94	3,51	40,72	38,41	43,03	2,90
Bengkulu	6,46	5,11	7,81	10,64	32,70	29,90	35,50	4,37	29,58	26,90	32,26	4,62
Lampung	5,97	4,89	7,06	9,29	43,40	40,96	45,83	2,86	30,66	28,44	32,88	3,69
Kep. Bangka Belitung	5,81	4,21	7,42	14,09	30,93	27,59	34,27	5,51	38,41	34,91	41,90	4,65
Kepulauan Riau	4,01	2,32	5,70	21,55	24,89	20,37	29,41	9,27	32,08	26,78	37,39	8,44
DKI Jakarta	2,71	1,73	3,68	18,40	8,43	6,70	10,17	10,47	24,26	21,53	26,99	5,75
Jawa Barat	6,37	5,59	7,15	6,26	27,80	26,39	29,22	2,59	41,51	39,98	43,04	1,88
Jawa Tengah	13,80	13,05	14,55	2,77	34,99	33,96	36,02	1,50	30,12	29,18	31,07	1,60
DI Yogyakarta	12,13	10,32	13,94	7,61	32,16	29,79	34,54	3,76	24,41	22,29	26,52	4,42
Jawa Timur	16,97	16,19	17,74	2,33	31,89	30,94	32,84	1,52	28,03	27,12	28,95	1,67
Banten	9,94	7,95	11,93	10,20	22,39	19,69	25,09	6,15	35,34	32,33	38,36	4,35
Bali	19,04	17,41	20,67	4,36	17,87	16,16	19,58	4,88	33,12	30,89	35,35	3,44
Nusa Tenggara Barat	31,82	28,89	34,75	4,70	33,74	30,83	36,66	4,41	19,66	17,32	22,00	6,07
Nusa Tenggara Timur	12,57	11,35	13,79	4,94	33,19	31,36	35,02	2,81	32,38	30,54	34,21	2,89
Kalimantan Barat	18,95	16,97	20,93	5,33	32,30	29,80	34,80	3,95	24,33	22,11	26,55	4,66
Kalimantan Tengah	4,12	2,84	5,40	15,82	19,81	17,14	22,48	6,88	41,75	38,71	44,79	3,71
Kalimantan Selatan	3,13	2,24	4,01	14,45	33,81	31,40	36,21	3,63	32,35	30,00	34,70	3,70
Kalimantan Timur	4,02	2,39	5,65	20,69	27,91	24,67	31,15	5,93	37,56	34,02	41,10	4,81
Kalimantan Utara	4,08	2,15	6,01	24,11	22,11	17,97	26,25	9,55	32,90	27,99	37,81	7,62
Sulawesi Utara	1,84	1,16	2,53	18,90	23,36	21,37	25,35	4,35	30,33	28,22	32,43	3,54
Sulawesi Tengah	8,39	6,67	10,10	10,46	15,72	13,56	17,88	7,01	39,09	36,37	41,81	3,55
Sulawesi Selatan	15,16	13,91	16,42	4,22	28,17	26,59	29,74	2,85	27,32	25,67	28,97	3,09
Sulawesi Tenggara	12,94	11,13	14,76	7,14	24,85	22,52	27,17	4,78	36,76	34,02	39,50	3,80
Gorontalo	17,40	14,66	20,14	8,03	39,53	35,72	43,33	4,91	27,39	23,80	30,98	6,69
Sulawesi Barat	13,61	10,44	16,79	11,91	25,18	21,64	28,72	7,17	35,58	31,78	39,38	5,45
Maluku	2,11	1,07	3,14	24,99	19,89	17,38	22,39	6,43	40,30	36,98	43,61	4,20
Maluku Utara	4,84	3,24	6,43	16,81	28,65	25,48	31,83	5,65	38,31	34,77	41,86	4,72
Papua Barat	12,44	8,95	15,93	14,32	25,92	20,09	31,74	11,46	30,51	25,23	35,80	8,84
Papua Barat Daya	10,01	7,32	12,70	13,71	17,18	12,98	21,38	12,47	30,71	25,44	35,97	8,74
Papua	17,42	14,48	20,36	8,61	9,29	6,93	11,66	12,99	27,85	24,12	31,57	6,83
Papua Selatan	32,62	25,99	39,25	10,37	18,95	12,75	25,15	16,70	22,66	16,77	28,55	13,26
Papua Tengah	45,73	40,31	51,15	6,05	5,17	2,47	7,87	26,63	24,48	19,52	29,44	10,34
Papua Pegunungan	74,24	67,73	80,75	4,47	4,26	1,55	6,98	32,51	6,63	3,34	9,92	25,30
Indonesia	11,04	10,76	11,32	1,30	28,89	28,47	29,31	0,74	32,57	32,13	33,01	0,68

Lanjutan Tabel 3.10

Provinsi	Tamat SMP sederajat				Tamat SMA/SMK sederajat				Tamat Perguruan Tinggi			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Aceh	15,15	13,54	16,75	5,40	8,50	7,34	9,66	6,99	4,96	3,99	5,93	9,96
Sumatera Utara	16,07	14,57	17,57	4,76	18,35	16,74	19,96	4,47	6,75	5,67	7,83	8,16
Sumatera Barat	15,79	14,06	17,52	5,60	15,74	14,13	17,34	5,20	9,54	8,23	10,85	7,01
Riau	15,31	13,30	17,33	6,72	10,58	8,86	12,31	8,32	5,65	4,41	6,89	11,23
Jambi	11,04	9,35	12,73	7,81	13,31	11,64	14,99	6,42	3,07	2,13	4,01	15,61
Sumatera Selatan	7,63	6,39	8,87	8,29	10,70	9,15	12,25	7,38	5,03	3,95	6,12	10,99
Bengkulu	9,02	7,24	10,80	10,06	15,77	13,65	17,90	6,88	6,46	5,02	7,90	11,36
Lampung	8,52	7,26	9,78	7,54	7,21	6,12	8,30	7,71	4,24	3,26	5,22	11,79
Kep. Bangka Belitung	11,35	9,09	13,60	10,14	10,94	8,85	13,03	9,73	2,56	1,62	3,51	18,78
Kepulauan Riau	10,55	7,58	13,51	14,33	21,67	16,87	26,47	11,30	6,80	3,44	10,17	25,22
DKI Jakarta	18,12	15,82	20,43	6,50	27,64	25,00	30,28	4,87	18,83	16,34	21,33	6,77
Jawa Barat	7,51	6,75	8,26	5,15	10,01	9,10	10,92	4,64	6,80	6,07	7,53	5,47
Jawa Tengah	7,78	7,26	8,30	3,43	8,16	7,62	8,70	3,39	5,15	4,70	5,61	4,51
DI Yogyakarta	10,88	9,36	12,41	7,14	12,29	10,42	14,16	7,76	8,12	6,54	9,71	9,97
Jawa Timur	8,63	8,09	9,17	3,17	7,66	7,12	8,19	3,58	6,82	6,26	7,38	4,17
Banten	11,33	9,50	13,17	8,26	13,25	11,23	15,26	7,77	7,75	5,97	9,52	11,70
Bali	7,59	6,39	8,80	8,08	12,33	10,78	13,89	6,44	10,04	8,54	11,54	7,62
Nusa Tenggara Barat	3,77	2,74	4,81	13,97	6,33	4,82	7,84	12,14	4,68	3,07	6,28	17,55
Nusa Tenggara Timur	6,03	5,12	6,94	7,70	10,43	9,12	11,75	6,42	5,40	4,44	6,36	9,08
Kalimantan Barat	11,53	9,81	13,24	7,58	9,14	7,49	10,79	9,22	3,76	2,78	4,73	13,27
Kalimantan Tengah	12,87	10,65	15,09	8,80	10,53	8,51	12,55	9,78	10,92	9,00	12,84	8,98
Kalimantan Selatan	9,55	7,99	11,11	8,35	11,27	9,64	12,89	7,34	9,90	8,35	11,45	7,97
Kalimantan Timur	14,29	12,26	16,32	7,26	12,55	10,09	15,02	10,01	3,67	2,58	4,77	15,21
Kalimantan Utara	21,17	16,70	25,64	10,78	17,21	13,40	21,01	11,29	2,53	1,09	3,97	29,03
Sulawesi Utara	15,51	13,86	17,15	5,40	22,39	20,27	24,50	4,82	6,58	5,43	7,72	8,88
Sulawesi Tengah	13,55	11,77	15,33	6,70	13,83	11,86	15,81	7,29	9,43	7,68	11,17	9,45
Sulawesi Selatan	8,98	7,95	10,01	5,85	11,75	10,58	12,91	5,05	8,63	7,38	9,87	7,35
Sulawesi Tenggara	9,47	7,83	11,11	8,83	7,87	6,20	9,55	10,82	8,10	6,37	9,83	10,89
Gorontalo	7,76	5,63	9,89	14,02	4,65	2,96	6,34	18,58	3,27	1,80	4,75	22,97
Sulawesi Barat	7,42	5,53	9,31	12,99	9,86	7,65	12,07	11,44	8,35	5,94	10,75	14,72
Maluku	17,64	15,19	20,10	7,09	16,09	13,52	18,66	8,15	3,98	2,42	5,54	20,04
Maluku Utara	12,86	10,37	15,36	9,90	12,58	10,03	15,12	10,32	2,75	1,45	4,06	24,21
Papua Barat	10,30	7,30	13,30	14,85	13,36	9,70	17,03	13,99	7,47	5,00	9,94	16,86
Papua Barat Daya	14,37	9,83	18,91	16,13	21,69	16,79	26,60	11,54	6,04	3,46	8,62	21,76
Papua	21,71	18,06	25,35	8,57	13,68	10,67	16,69	11,22	10,05	6,79	13,32	16,57
Papua Selatan	16,05	10,82	21,29	16,64	7,13	3,64	10,63	25,00	2,58	0,19	4,97	47,27
Papua Tengah	12,61	8,57	16,65	16,35	8,23	5,12	11,34	19,29	3,78	1,22	6,35	34,55
Papua Pegunungan	7,58	3,87	11,28	24,96	5,08	1,75	8,41	33,47	2,21	0,32	4,10	43,56
Indonesia	9,77	9,52	10,03	1,33	10,87	10,59	11,16	1,32	6,86	6,62	7,10	1,80

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 3.11 Sampling Error Rata-Rata Lama Sekolah Lansia (Tahun) Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	7,87	7,47	8,28	2,62	5,17	4,97	5,37	2,01	6,05	5,85	6,24	1,65
Sumatera Utara	8,23	7,94	8,53	1,82	5,75	5,55	5,96	1,84	7,14	6,95	7,33	1,37
Sumatera Barat	8,01	7,56	8,46	2,86	5,78	5,55	6,02	2,06	6,87	6,62	7,12	1,87
Riau	7,78	7,27	8,29	3,34	4,73	4,43	5,03	3,23	5,94	5,66	6,21	2,37
Jambi	7,11	6,61	7,61	3,58	3,89	3,61	4,18	3,79	4,93	4,67	5,19	2,69
Sumatera Selatan	7,91	7,47	8,35	2,86	4,02	3,82	4,22	2,54	5,48	5,25	5,70	2,10
Bengkulu	8,43	7,78	9,08	3,92	4,71	4,37	5,04	3,66	5,79	5,47	6,10	2,81
Lampung	6,28	5,72	6,84	4,52	3,66	3,45	3,87	2,92	4,48	4,25	4,71	2,63
Kep. Bangka Belitung	6,64	6,23	7,04	3,13	3,41	2,98	3,84	6,40	5,30	4,99	5,60	2,96
Kepulauan Riau	8,04	7,49	8,60	3,51	4,52	3,99	5,05	5,96	7,37	6,90	7,84	3,26
DKI Jakarta	9,80	9,48	10,12	1,65	—	—	—	—	9,80	9,48	10,12	1,65
Jawa Barat	6,06	5,86	6,26	1,68	4,51	4,35	4,67	1,83	5,67	5,52	5,83	1,39
Jawa Tengah	5,54	5,37	5,71	1,57	3,75	3,64	3,87	1,58	4,67	4,56	4,77	1,14
DI Yogyakarta	7,16	6,78	7,53	2,68	4,31	4,04	4,59	3,26	6,23	5,96	6,50	2,23
Jawa Timur	5,91	5,73	6,09	1,53	3,57	3,46	3,68	1,57	4,82	4,71	4,93	1,15
Banten	7,31	6,91	7,71	2,81	4,24	3,96	4,53	3,42	6,50	6,19	6,81	2,44
Bali	6,98	6,64	7,32	2,51	4,59	4,30	4,87	3,19	6,19	5,94	6,45	2,08
Nusa Tenggara Barat	4,00	3,45	4,55	6,96	2,04	1,69	2,39	8,75	3,05	2,72	3,38	5,53
Nusa Tenggara Timur	8,07	7,52	8,62	3,49	4,44	4,28	4,61	1,88	5,30	5,11	5,49	1,84
Kalimantan Barat	6,31	5,79	6,83	4,20	3,09	2,83	3,35	4,34	4,38	4,11	4,65	3,18
Kalimantan Tengah	8,88	8,26	9,50	3,57	5,94	5,66	6,23	2,42	7,14	6,83	7,45	2,24
Kalimantan Selatan	8,34	7,89	8,79	2,75	4,76	4,51	5,01	2,65	6,46	6,20	6,72	2,03
Kalimantan Timur	7,05	6,67	7,43	2,76	4,15	3,71	4,58	5,36	6,06	5,75	6,36	2,59
Kalimantan Utara	7,66	7,11	8,21	3,66	5,96	5,37	6,55	5,04	6,95	6,54	7,36	3,02
Sulawesi Utara	8,51	8,13	8,89	2,29	6,25	6,01	6,50	2,01	7,45	7,22	7,69	1,62
Sulawesi Tengah	8,93	8,21	9,65	4,14	6,18	5,91	6,46	2,26	7,00	6,71	7,30	2,14
Sulawesi Selatan	7,86	7,48	8,24	2,48	4,23	4,04	4,42	2,27	5,78	5,57	5,98	1,82
Sulawesi Tenggara	7,88	7,28	8,48	3,89	4,92	4,66	5,18	2,67	5,93	5,65	6,21	2,40
Gorontalo	5,98	5,40	6,56	4,93	3,62	3,33	3,92	4,17	4,70	4,39	5,01	3,37
Sulawesi Barat	8,21	7,11	9,31	6,83	5,00	4,55	5,45	4,59	5,69	5,26	6,13	3,89
Maluku	8,85	8,41	9,30	2,57	6,19	5,93	6,44	2,11	7,25	7,00	7,50	1,77
Maluku Utara	8,92	8,33	9,51	3,37	5,28	5,03	5,53	2,41	6,27	6,00	6,54	2,20
Papua Barat	9,77	8,86	10,67	4,74	5,53	5,10	5,97	4,02	6,85	6,41	7,30	3,30
Papua Barat Daya	9,33	8,61	10,05	3,94	5,90	5,46	6,34	3,81	7,54	7,11	7,96	2,88
Papua	9,24	8,56	9,92	3,73	4,77	4,35	5,18	4,45	7,43	6,97	7,89	3,13
Papua Selatan	7,20	5,75	8,65	10,30	3,71	3,18	4,23	7,24	5,03	4,43	5,63	6,08
Papua Tengah	8,35	7,40	9,29	5,77	2,43	1,93	2,93	10,57	4,46	3,92	5,00	6,16
Papua Pegunungan	4,72	1,77	7,68	31,94	2,05	1,39	2,70	16,30	2,24	1,60	2,88	14,58
Indonesia	6,72	6,64	6,79	0,58	4,19	4,15	4,24	0,54	5,60	5,55	5,65	0,43

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 3.12 *Sampling Error* Persentase Lansia yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	62,53	57,94	67,12	3,75	47,15	44,46	49,85	2,92	52,15	49,80	54,51	2,30
Sumatera Utara	74,49	71,82	77,16	1,83	70,33	68,06	72,59	1,64	72,65	70,86	74,44	1,26
Sumatera Barat	75,54	72,04	79,05	2,37	64,36	61,81	66,90	2,02	69,81	67,64	71,97	1,58
Riau	75,16	70,99	79,32	2,83	59,22	55,54	62,89	3,17	65,52	62,72	68,32	2,18
Jambi	72,42	68,07	76,78	3,07	53,90	50,45	57,36	3,27	59,88	57,11	62,65	2,36
Sumatera Selatan	66,18	62,05	70,30	3,18	50,32	47,55	53,09	2,81	56,25	53,92	58,58	2,11
Bengkulu	72,26	67,25	77,28	3,54	45,85	42,20	49,51	4,06	53,51	50,45	56,57	2,92
Lampung	62,12	57,38	66,87	3,90	55,27	52,43	58,11	2,62	57,42	54,97	59,87	2,18
Kep. Bangka Belitung	65,42	60,41	70,43	3,91	46,59	40,93	52,25	6,20	57,60	53,87	61,33	3,31
Kepulauan Riau	82,52	78,42	86,62	2,53	57,07	47,69	66,45	8,39	77,65	73,77	81,53	2,55
DKI Jakarta	73,76	70,88	76,64	1,99	—	—	—	—	73,76	70,88	76,64	1,99
Jawa Barat	47,91	45,94	49,88	2,10	36,23	33,93	38,52	3,23	44,95	43,37	46,54	1,80
Jawa Tengah	41,35	39,74	42,95	1,98	31,51	30,12	32,89	2,25	36,55	35,48	37,61	1,49
DI Yogyakarta	52,28	48,54	56,03	3,65	35,38	31,30	39,47	5,89	46,78	43,92	49,64	3,12
Jawa Timur	44,53	42,95	46,12	1,82	33,40	32,12	34,69	1,97	39,34	38,30	40,38	1,35
Banten	50,89	46,95	54,82	3,95	20,40	16,74	24,06	9,14	42,86	39,76	45,96	3,69
Bali	49,72	46,54	52,90	3,27	34,33	31,06	37,59	4,86	44,67	42,26	47,09	2,76
Nusa Tenggara Barat	68,30	63,90	72,71	3,29	49,85	45,55	54,15	4,40	59,30	56,14	62,45	2,71
Nusa Tenggara Timur	79,01	74,65	83,36	2,81	56,68	54,47	58,89	1,99	61,96	59,98	63,93	1,63
Kalimantan Barat	69,59	65,26	73,91	3,17	35,29	32,23	38,35	4,42	49,03	46,38	51,69	2,77
Kalimantan Tengah	74,26	69,12	79,40	3,53	48,35	44,18	52,52	4,40	58,89	55,57	62,20	2,87
Kalimantan Selatan	61,58	57,27	65,89	3,57	43,85	40,52	47,18	3,88	52,26	49,57	54,95	2,62
Kalimantan Timur	74,54	70,71	78,37	2,62	64,06	58,21	69,92	4,66	70,96	67,75	74,17	2,31
Kalimantan Utara	80,29	74,69	85,88	3,55	57,37	49,20	65,54	7,27	70,70	65,86	75,53	3,49
Sulawesi Utara	70,91	67,58	74,24	2,40	48,68	45,68	51,69	3,15	60,50	58,21	62,79	1,93
Sulawesi Tengah	64,46	58,36	70,57	4,83	48,07	44,71	51,43	3,56	52,96	49,98	55,94	2,87
Sulawesi Selatan	69,81	66,69	72,92	2,28	56,11	53,91	58,31	2,00	61,94	60,08	63,79	1,53
Sulawesi Tenggara	75,12	69,89	80,36	3,56	69,59	66,64	72,53	2,16	71,47	68,83	74,12	1,89
Gorontalo	62,68	56,33	69,04	5,17	52,90	47,92	57,89	4,81	57,39	53,40	61,38	3,55
Sulawesi Barat	71,64	62,75	80,53	6,33	58,91	54,00	63,81	4,25	61,64	57,35	65,93	3,55
Maluku	80,11	75,53	84,68	2,91	57,53	53,40	61,67	3,67	66,53	63,34	69,71	2,44
Maluku Utara	67,54	60,28	74,81	5,49	45,98	41,76	50,21	4,69	51,89	48,19	55,59	3,64
Papua Barat	78,22	69,95	86,48	5,39	41,02	33,76	48,27	9,03	52,61	46,44	58,78	5,99
Papua Barat Daya	74,10	63,97	84,22	6,97	49,42	43,09	55,75	6,53	61,24	55,08	67,40	5,13
Papua	79,79	74,78	84,80	3,20	45,30	39,85	50,74	6,13	65,83	61,96	69,70	3,00
Papua Selatan	68,19	54,58	81,79	10,18	42,72	33,99	51,46	10,43	52,35	45,12	59,59	7,05
Papua Tengah	85,75	76,51	94,98	5,49	18,61	13,41	23,80	14,25	41,66	36,04	47,28	6,88
Papua Pegunungan	47,04	20,42	73,66	28,88	9,41	4,87	13,95	24,63	12,11	7,52	16,69	19,34
Indonesia	54,48	53,76	55,21	0,68	42,69	42,13	43,25	0,67	49,27	48,79	49,74	0,49

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 3.13 Sampling Error Persentase Lansia yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) Menurut Provins dan Jenis Kelamin, 2024

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	61,93	58,91	64,96	2,49	43,32	40,55	46,08	3,26	52,15	49,80	54,51	2,30
Sumatera Utara	78,18	75,86	80,51	1,52	67,88	65,53	70,24	1,77	72,65	70,86	74,44	1,26
Sumatera Barat	76,66	74,14	79,17	1,68	63,75	61,03	66,46	2,17	69,81	67,64	71,97	1,58
Riau	76,16	72,94	79,38	2,16	54,66	51,05	58,27	3,37	65,52	62,72	68,32	2,18
Jambi	71,56	68,43	74,68	2,23	48,30	44,72	51,87	3,78	59,88	57,11	62,65	2,36
Sumatera Selatan	66,96	64,15	69,77	2,14	46,24	43,33	49,14	3,21	56,25	53,92	58,58	2,11
Bengkulu	63,35	59,63	67,08	3,00	43,62	39,92	47,31	4,32	53,51	50,45	56,57	2,92
Lampung	64,48	61,59	67,38	2,29	50,13	47,04	53,22	3,15	57,42	54,97	59,87	2,18
Kep. Bangka Belitung	63,53	58,91	68,15	3,71	51,44	46,84	56,05	4,56	57,60	53,87	61,33	3,31
Kepulauan Riau	84,88	81,45	88,32	2,06	70,03	63,96	76,10	4,43	77,65	73,77	81,53	2,55
DKI Jakarta	80,87	77,60	84,15	2,06	67,29	63,48	71,09	2,88	73,76	70,88	76,64	1,99
Jawa Barat	52,64	50,68	54,60	1,90	37,59	35,73	39,46	2,53	44,95	43,37	46,54	1,80
Jawa Tengah	43,05	41,70	44,40	1,60	30,85	29,63	32,06	2,01	36,55	35,48	37,61	1,49
DI Yogyakarta	51,46	47,86	55,05	3,57	42,82	39,66	45,98	3,77	46,78	43,92	49,64	3,12
Jawa Timur	48,18	46,84	49,51	1,42	31,67	30,51	32,84	1,87	39,34	38,30	40,38	1,35
Banten	53,50	49,74	57,27	3,59	31,96	28,39	35,53	5,70	42,86	39,76	45,96	3,69
Bali	58,15	55,13	61,17	2,65	32,77	30,03	35,51	4,26	44,67	42,26	47,09	2,76
Nusa Tenggara Barat	66,20	62,31	70,08	2,99	53,55	49,74	57,37	3,63	59,30	56,14	62,45	2,71
Nusa Tenggara Timur	66,88	64,48	69,27	1,83	57,63	55,22	60,04	2,13	61,96	59,98	63,93	1,63
Kalimantan Barat	58,09	55,00	61,18	2,72	40,17	36,99	43,36	4,04	49,03	46,38	51,69	2,77
Kalimantan Tengah	68,01	64,38	71,65	2,73	48,24	43,91	52,57	4,58	58,89	55,57	62,20	2,87
Kalimantan Selatan	63,67	60,43	66,91	2,60	41,49	38,22	44,76	4,02	52,26	49,57	54,95	2,62
Kalimantan Timur	78,65	74,94	82,37	2,41	62,65	58,20	67,09	3,62	70,96	67,75	74,17	2,31
Kalimantan Utara	77,85	72,58	83,11	3,45	62,52	56,00	69,05	5,33	70,70	65,86	75,53	3,49
Sulawesi Utara	63,15	60,33	65,98	2,28	58,03	55,17	60,90	2,52	60,50	58,21	62,79	1,93
Sulawesi Tengah	58,06	54,46	61,66	3,17	47,91	44,20	51,63	3,96	52,96	49,98	55,94	2,87
Sulawesi Selatan	67,77	65,47	70,07	1,73	57,20	54,95	59,44	2,00	61,94	60,08	63,79	1,53
Sulawesi Tenggara	77,82	74,81	80,83	1,97	65,59	62,12	69,05	2,70	71,47	68,83	74,12	1,89
Gorontalo	63,11	57,89	68,33	4,22	52,41	47,16	57,67	5,11	57,39	53,40	61,38	3,55
Sulawesi Barat	67,57	62,46	72,68	3,86	56,41	51,10	61,73	4,80	61,64	57,35	65,93	3,55
Maluku	70,81	67,05	74,57	2,71	62,59	58,60	66,59	3,26	66,53	63,34	69,71	2,44
Maluku Utara	60,54	56,17	64,91	3,68	43,26	38,90	47,63	5,14	51,89	48,19	55,59	3,64
Papua Barat	59,61	52,54	66,69	6,06	44,63	36,98	52,28	8,75	52,61	46,44	58,78	5,99
Papua Barat Daya	66,27	59,28	73,27	5,39	55,91	47,97	63,84	7,24	61,24	55,08	67,40	5,13
Papua	68,97	64,30	73,64	3,46	62,36	57,19	67,54	4,23	65,83	61,96	69,70	3,00
Papua Selatan	58,89	51,01	66,78	6,83	44,84	34,81	54,86	11,41	52,35	45,12	59,59	7,05
Papua Tengah	43,34	37,14	49,54	7,30	39,32	32,66	45,98	8,64	41,66	36,04	47,28	6,88
Papua Pegunungan	14,49	8,54	20,44	20,95	8,10	2,95	13,25	32,42	12,11	7,52	16,69	19,34
Indonesia	57,11	56,52	57,69	0,52	42,09	41,53	42,64	0,67	49,27	48,79	49,74	0,49

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

**Tabel 3.14 Sampling Error Persentase Lansia yang Mengakses Internet
Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024**

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	29,23	25,35	33,12	6,77	10,50	8,88	12,12	7,88	16,59	14,89	18,28	5,21
Sumatera Utara	41,69	38,63	44,76	3,75	28,45	26,05	30,86	4,31	35,84	33,83	37,85	2,86
Sumatera Barat	37,55	33,56	41,55	5,43	22,16	19,95	24,38	5,10	29,66	27,40	31,92	3,89
Riau	45,68	40,49	50,87	5,80	20,32	17,38	23,27	7,39	30,35	27,57	33,13	4,67
Jambi	37,24	32,63	41,85	6,32	16,39	13,93	18,85	7,67	23,12	20,88	25,37	4,96
Sumatera Selatan	39,96	35,78	44,14	5,33	13,22	11,31	15,13	7,37	23,22	21,19	25,25	4,46
Bengkulu	43,49	37,65	49,34	6,86	16,94	14,22	19,66	8,19	24,64	22,02	27,27	5,44
Lampung	35,01	30,27	39,76	6,91	20,61	18,37	22,85	5,54	25,13	22,99	27,27	4,35
Kep. Bangka Belitung	35,04	30,23	39,85	7,00	14,80	10,83	18,78	13,70	26,64	23,36	29,92	6,28
Kepulauan Riau	55,97	49,66	62,28	5,75	19,76	12,10	27,42	19,77	49,04	43,54	54,54	5,72
DKI Jakarta	64,73	61,64	67,81	2,43	–	–	–	–	64,73	61,64	67,81	2,43
Jawa Barat	33,19	31,39	34,99	2,76	14,10	12,40	15,80	6,14	28,36	26,95	29,77	2,53
Jawa Tengah	26,42	25,06	27,78	2,63	15,46	14,40	16,53	3,50	21,07	20,21	21,94	2,10
DI Yogyakarta	40,54	36,95	44,13	4,52	19,01	16,04	21,97	7,95	33,53	30,91	36,15	3,98
Jawa Timur	28,38	26,97	29,79	2,53	12,51	11,62	13,39	3,62	20,97	20,11	21,84	2,10
Banten	40,57	36,81	44,33	4,73	7,65	5,15	10,16	16,70	31,90	29,01	34,79	4,62
Bali	34,35	31,27	37,43	4,58	16,51	14,00	19,02	7,76	28,50	26,23	30,78	4,07
Nusa Tenggara Barat	25,78	21,45	30,11	8,56	9,53	7,26	11,81	12,16	17,85	15,31	20,39	7,27
Nusa Tenggara Timur	37,26	32,68	41,84	6,27	7,68	6,57	8,80	7,42	14,67	13,21	16,13	5,07
Kalimantan Barat	49,01	44,08	53,93	5,13	14,06	12,07	16,05	7,22	28,07	25,60	30,54	4,49
Kalimantan Tengah	51,76	45,78	57,74	5,89	17,69	14,70	20,67	8,62	31,54	28,35	34,73	5,16
Kalimantan Selatan	39,86	35,70	44,02	5,32	17,39	14,89	19,90	7,36	28,05	25,67	30,44	4,33
Kalimantan Timur	50,22	45,74	54,69	4,55	26,86	21,35	32,37	10,47	42,23	38,68	45,78	4,29
Kalimantan Utara	47,95	40,16	55,74	8,29	23,36	16,40	30,32	15,20	37,66	32,20	43,13	7,40
Sulawesi Utara	33,43	29,95	36,92	5,32	13,38	11,45	15,32	7,38	24,04	21,95	26,14	4,44
Sulawesi Tengah	31,83	25,57	38,09	10,03	11,10	9,13	13,06	9,03	17,28	14,90	19,66	7,03
Sulawesi Selatan	38,36	34,97	41,76	4,52	13,35	11,97	14,73	5,28	23,99	22,28	25,71	3,65
Sulawesi Tenggara	31,16	25,50	36,81	9,26	13,52	11,22	15,81	8,66	19,52	17,04	22,00	6,48
Gorontalo	20,67	15,60	25,75	12,53	8,10	5,68	10,51	15,22	13,86	11,21	16,51	9,76
Sulawesi Barat	31,81	22,54	41,08	14,86	12,12	8,55	15,70	15,05	16,35	12,87	19,82	10,85
Maluku	34,75	28,70	40,79	8,87	10,56	8,12	12,99	11,78	20,19	17,27	23,12	7,39
Maluku Utara	34,95	26,85	43,05	11,82	9,36	7,16	11,56	11,98	16,37	13,45	19,29	9,10
Papua Barat	52,17	41,11	63,24	10,82	16,17	11,13	21,21	15,90	27,39	22,01	32,77	10,02
Papua Barat Daya	46,79	35,69	57,89	12,10	15,32	10,98	19,66	14,47	30,39	24,44	36,34	9,98
Papua	54,41	47,49	61,34	6,50	13,53	9,65	17,41	14,63	37,87	33,24	42,50	6,24
Papua Selatan	38,18	22,83	53,53	20,51	15,80	9,42	22,19	20,62	24,26	17,32	31,21	14,60
Papua Tengah	55,31	42,97	67,64	11,38	5,77	2,38	9,17	30,01	22,78	17,29	28,27	12,30
Papua Pegunungan	23,58	1,07	46,09	48,70	NA	NA	NA	89,79	3,04	0,17	5,91	48,20
Indonesia	35,52	34,84	36,19	0,97	14,95	14,54	15,35	1,38	26,42	26,00	26,84	0,81

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

**Tabel 3.15 Sampling Error Persentase Lansia yang Mengakses Internet
Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024**

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	22,10	19,62	24,58	5,73	11,60	9,92	13,28	7,39	16,59	14,89	18,28	5,21
Sumatera Utara	40,06	37,49	42,64	3,28	32,20	29,88	34,52	3,68	35,84	33,83	37,85	2,86
Sumatera Barat	35,58	32,58	38,58	4,30	24,42	21,90	26,94	5,26	29,66	27,40	31,92	3,89
Riau	37,69	34,14	41,24	4,80	22,86	19,78	25,94	6,87	30,35	27,57	33,13	4,67
Jambi	30,25	27,24	33,27	5,09	16,05	13,50	18,60	8,10	23,12	20,88	25,37	4,96
Sumatera Selatan	28,42	25,78	31,07	4,75	18,35	16,02	20,69	6,49	23,22	21,19	25,25	4,46
Bengkulu	30,38	26,90	33,85	5,83	18,88	15,94	21,82	7,94	24,64	22,02	27,27	5,44
Lampung	29,32	26,61	32,02	4,72	20,81	18,35	23,28	6,05	25,13	22,99	27,27	4,35
Kep. Bangka Belitung	31,76	27,50	36,03	6,85	21,32	17,63	25,00	8,82	26,64	23,36	29,92	6,28
Kepulauan Riau	55,47	48,11	62,83	6,77	42,27	34,83	49,70	8,98	49,04	43,54	54,54	5,72
DKI Jakarta	72,50	68,79	76,21	2,61	57,66	53,74	61,59	3,47	64,73	61,64	67,81	2,43
Jawa Barat	33,76	31,96	35,56	2,72	23,19	21,60	24,78	3,50	28,36	26,95	29,77	2,53
Jawa Tengah	26,01	24,84	27,19	2,30	16,74	15,78	17,71	2,95	21,07	20,21	21,94	2,10
DI Yogyakarta	38,32	34,91	41,72	4,53	29,47	26,62	32,33	4,94	33,53	30,91	36,15	3,98
Jawa Timur	26,81	25,61	28,01	2,28	15,91	14,99	16,83	2,94	20,97	20,11	21,84	2,10
Banten	40,82	37,16	44,47	4,57	22,77	19,57	25,98	7,18	31,90	29,01	34,79	4,62
Bali	39,27	36,24	42,29	3,93	18,99	16,64	21,35	6,33	28,50	26,23	30,78	4,07
Nusa Tenggara Barat	21,69	18,26	25,13	8,07	14,65	12,05	17,25	9,05	17,85	15,31	20,39	7,27
Nusa Tenggara Timur	17,43	15,41	19,45	5,92	12,25	10,57	13,92	6,97	14,67	13,21	16,13	5,07
Kalimantan Barat	34,04	30,98	37,09	4,58	22,23	19,49	24,96	6,28	28,07	25,60	30,54	4,49
Kalimantan Tengah	38,38	34,67	42,10	4,93	23,56	19,88	27,23	7,96	31,54	28,35	34,73	5,16
Kalimantan Selatan	35,40	32,25	38,56	4,55	21,12	18,44	23,79	6,46	28,05	25,67	30,44	4,33
Kalimantan Timur	50,62	46,35	54,88	4,30	33,17	28,92	37,42	6,54	42,23	38,68	45,78	4,29
Kalimantan Utara	41,27	34,78	47,76	8,02	33,53	26,82	40,25	10,21	37,66	32,20	43,13	7,40
Sulawesi Utara	26,17	23,54	28,81	5,13	22,06	19,59	24,53	5,71	24,04	21,95	26,14	4,44
Sulawesi Tengah	20,35	17,30	23,40	7,65	14,24	11,47	17,02	9,94	17,28	14,90	19,66	7,03
Sulawesi Selatan	28,66	26,38	30,94	4,06	20,20	18,28	22,11	4,84	23,99	22,28	25,71	3,65
Sulawesi Tenggara	23,99	20,59	27,39	7,23	15,38	12,66	18,10	9,01	19,52	17,04	22,00	6,48
Gorontalo	13,54	10,28	16,80	12,28	14,14	10,65	17,62	12,58	13,86	11,21	16,51	9,76
Sulawesi Barat	18,45	14,38	22,53	11,27	14,49	10,41	18,57	14,37	16,35	12,87	19,82	10,85
Maluku	22,56	18,77	26,35	8,57	18,02	14,40	21,64	10,25	20,19	17,27	23,12	7,39
Maluku Utara	20,74	17,03	24,45	9,12	12,01	9,05	14,97	12,57	16,37	13,45	19,29	9,10
Papua Barat	34,65	28,10	41,20	9,64	19,11	12,86	25,36	16,68	27,39	22,01	32,77	10,02
Papua Barat Daya	37,92	30,45	45,39	10,05	22,42	15,44	29,40	15,89	30,39	24,44	36,34	9,98
Papua	40,66	35,10	46,23	6,98	34,78	29,18	40,38	8,21	37,87	33,24	42,50	6,24
Papua Selatan	30,00	21,61	38,39	14,27	17,68	9,57	25,79	23,41	24,26	17,32	31,21	14,60
Papua Tengah	24,50	18,39	30,62	12,73	20,38	13,77	27,00	16,55	22,78	17,29	28,27	12,30
Papua Pegunungan	2,91	0,16	5,67	48,26	NA	NA	NA	68,29	3,04	0,17	5,91	48,20
Indonesia	32,05	31,50	32,60	0,87	21,26	20,79	21,73	1,12	26,42	26,00	26,84	0,81

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



BAB 4

KESEHATAN

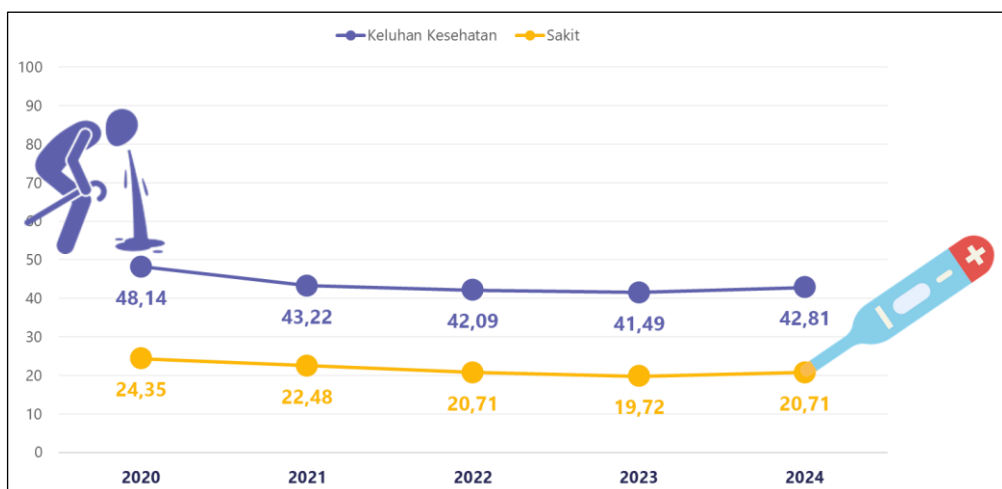
<https://www.wps.go.id>

Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) memperkenalkan istilah "*Active Ageing*". *Active ageing* adalah proses mengoptimalisasi kesempatan dari kesehatan, partisipasi, dan keamanan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup seiring bertambahnya usia seseorang (WHO, 2002). Dengan konsep "*Active Ageing*", penduduk yang berusia lanjut masih dapat terus berpartisipasi dalam urusan sosial, ekonomi, budaya, spiritual dan kewarganegaraan, bukan hanya kemampuan untuk beraktivitas fisik atau berpartisipasi dalam angkatan kerja (WHO 2002). Aspek dasar terwujudnya *Active Ageing* adalah kesehatan. Bab ini akan membahas aspek kesehatan lansia yang mencakup kondisi kesehatan lansia, tindakan pengobatan, pemanfaatan jaminan kesehatan, serta kebiasaan merokok.

4.1 Kondisi Kesehatan

Indikator kesehatan yang dihasilkan Susenas dalam menggambarkan kesehatan lansia secara umum di Indonesia adalah persentase lansia yang mengalami keluhan kesehatan dan angka kesakitan (morbiditas) lansia. Persentase lansia yang mengalami keluhan kesehatan, yakni keadaan seorang lansia yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami seperti panas, batuk, pilek, diare, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit karena kecelakaan, kriminalitas atau keluhan kesehatan lainnya. Keluhan yang dicatat adalah keluhan fisik maupun psikis yang dialami lansia selama kurun waktu sebulan terakhir. Adapun angka kesakitan lansia, yaitu kondisi ketika seseorang lansia mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Keluhan kesehatan dan angka kesakitan dari Susenas diukur dengan pendekatan pengakuan dari responden.





Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 4.1 Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Lansia, 2020–2024

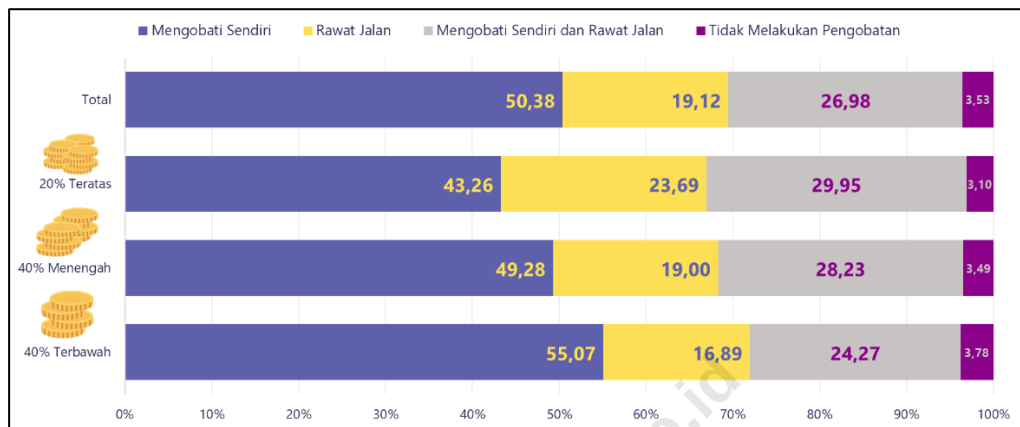
Hasil Susenas Maret 2024 menunjukkan persentase lansia yang mengalami keluhan kesehatan relatif menurun dibandingkan dengan lima tahun yang lalu. Sekitar 42,81 persen penduduk lansia mengalami keluhan kesehatan. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2021–2024), pergerakan persentase lansia yang mengalami keluhan kesehatan cenderung kecil.

Sejalan dengan itu, angka kesakitan penduduk lansia sebesar 20,71 persen pada tahun 2024. Dengan kata lain, satu dari lima penduduk lansia mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya dalam sebulan terakhir. Dibandingkan dengan tahun 2020, angka kesakitan lansia tahun 2024 mengalami penurunan (24,35 persen menjadi 20,71 persen).

4.2 Tindakan Pengobatan

Pada pengumpulan data Susenas, responden yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir akan ditanyakan apakah melakukan rawat jalan atau tidak. Segala bentuk keluhan kesehatan, baik yang mengganggu aktivitas sehari-hari maupun tidak, seharusnya segera diobati sehingga tidak berlarut dan lansia dapat beraktivitas kembali secara normal. Tindakan

pengobatan yang ditangkap oleh Susenas Maret adalah mengobati sendiri atau dengan mengunjungi tempat pelayanan kesehatan (rawat jalan).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 4.2 Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Tindakan Pengobatan dan Distribusi Pengeluaran, 2024

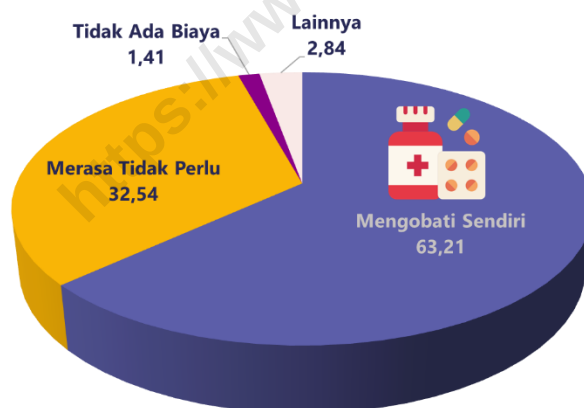
Hasil Susenas Maret 2024 menunjukkan bahwa mayoritas lansia yang mengalami keluhan kesehatan sudah berupaya melakukan tindakan pengobatan atas keluhan kesehatan yang mereka alami, baik dengan cara mengobati sendiri maupun rawat jalan. Pada tahun 2024, setengah dari lansia yang mengalami keluhan kesehatan hanya mengobati sendiri keluhan kesehatan yang dialami, misalnya dengan minum obat yang dibeli dari warung atau apotek tanpa resep dokter, kerokan saat masuk angin, dan pijat yang dilakukan oleh anggota rumah tangga sendiri. Dilihat dari distribusi pengeluaran, semakin rendah kelompok pengeluaran, semakin besar persentase lansia yang mengalami keluhan kesehatan dan hanya mengandalkan pengobatan sendiri.

Sementara itu, pada tahun 2024, sekitar seperlima lansia yang mengalami keluhan kesehatan hanya melakukan rawat jalan. Rawat jalan adalah upaya seseorang yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan



petugas kesehatan ke rumah. Berbeda dari pola mengobati sendiri, dilihat dari distribusi pengeluaran, semakin rendah kelompok pengeluaran, semakin kecil persentase lansia yang mengalami keluhan kesehatan dan melakukan rawat jalan.

Di sisi lain, lansia yang tidak melakukan pengobatan sekitar 3,53 persen. Meskipun tidak tampak berbeda jauh, persentase lansia yang mengalami keluhan kesehatan namun tidak berobat cenderung meningkat seiring penurunan distribusi pengeluaran. Sejalan dengan itu, sekitar 1,41 persen lansia yang tidak rawat jalan mengakui bahwa alasan utama tidak rawat jalan adalah tidak ada biaya. Alasan utama terbesar lansia yang tidak melakukan rawat jalan ketika mengalami keluhan kesehatan, selain karena mengobati sendiri, adalah karena merasa tidak perlu. Sebesar 32,54 persen penduduk lansia yang tidak melakukan tindak pengobatan karena merasa keluhan kesehatan yang dideritanya tidak perlu diobati dan dapat sembuh sendiri tanpa berobat.



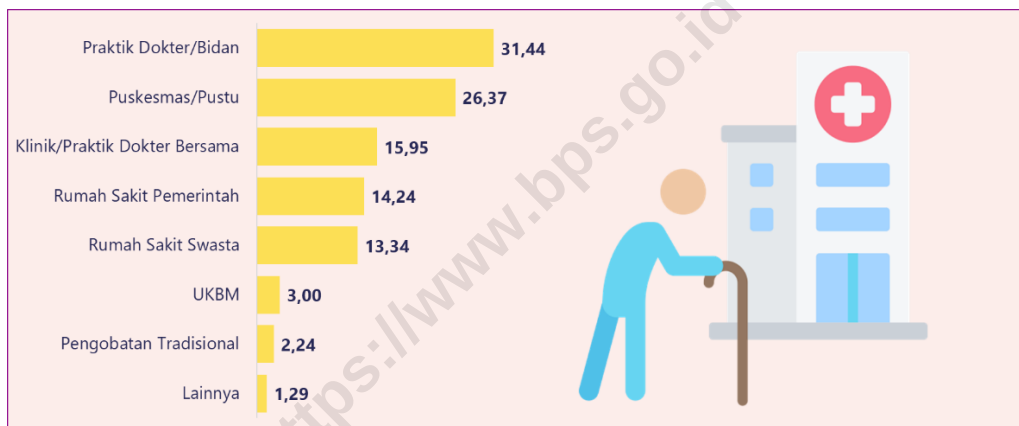
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 4.3 Persentase Lansia yang Tidak Rawat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2024

Lebih jauh mengenai lansia yang rawat jalan, Susenas juga mengumpulkan informasi fasilitas kesehatan yang dikunjungi oleh lansia. Sebagian besar lansia yang rawat jalan pergi berobat ke fasilitas kesehatan

modern, terutama ke praktik dokter/bidan dan puskesmas/pustu. Sebesar 31,44 persen mengunjungi praktik dokter/bidan, sedangkan sebesar 26,37 persen mengunjungi puskesmas/pustu.

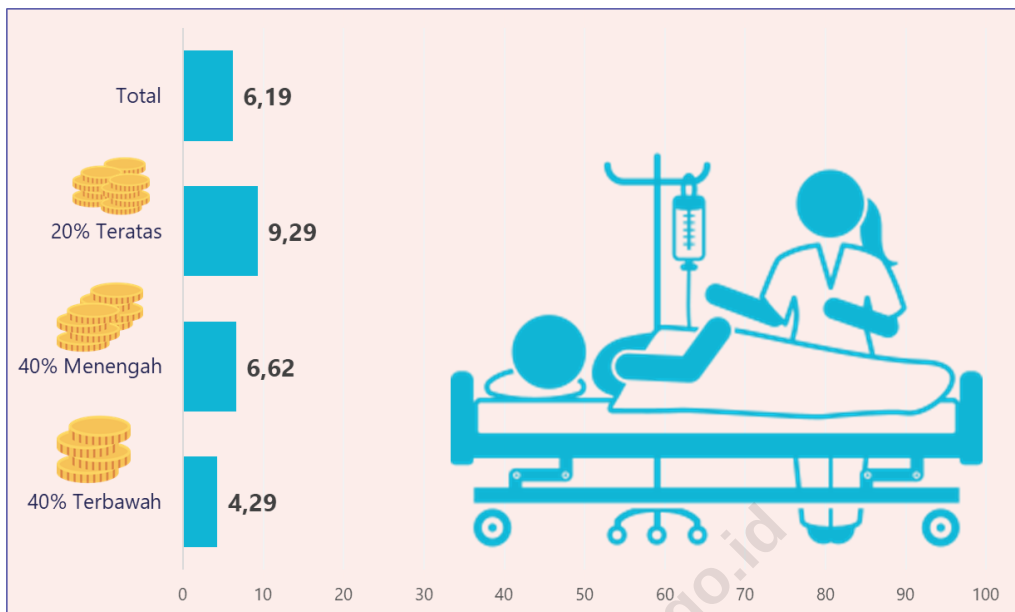
Sementara itu, sekitar 15,95 persen lansia yang rawat jalan berobat ke klinik/praktik dokter bersama, sebesar 14,24 persen rawat jalan ke rumah sakit pemerintah, dan 13,34 persen mengunjungi rumah sakit swasta. Sebesar 3 persen lansia rawat jalan ke UKBM seperti poskesdes, polindes, posyandu, dan balai pengobatan. Di sisi lain, sekitar 2,24 persen lansia yang rawat jalan ke tempat pengobatan tradisional.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 4.4 Persentase Lansia yang Rawat Jalan Menurut Fasilitas Kesehatan, 2024

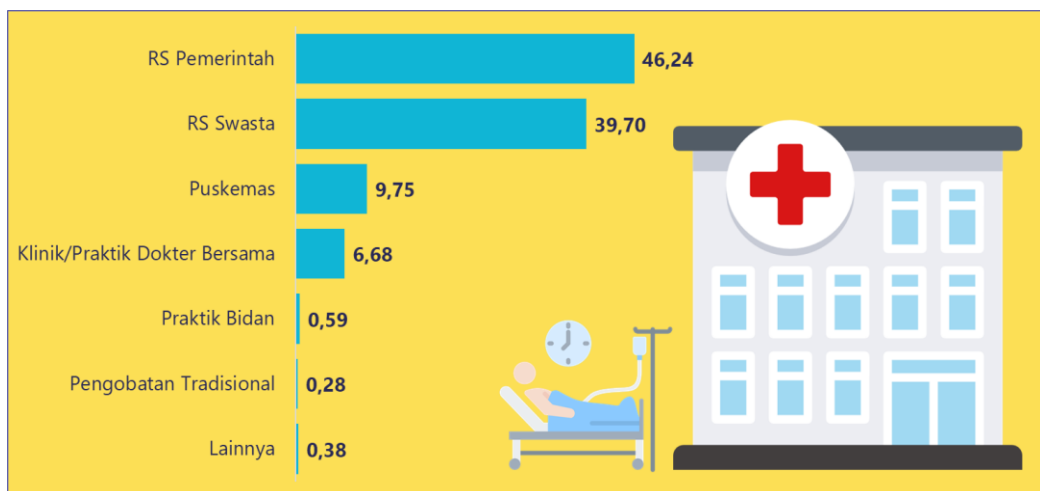
Selain rawat jalan, lansia yang mengalami keluhan kesehatan juga bisa mengalami kondisi yang mengharuskan diri mereka dirawat inap. Informasi mengenai lansia yang pernah rawat inap ini juga tersedia dalam Susenas, namun dengan referensi waktu yang lebih lebar dibanding keluhan kesehatan, yakni setahun terakhir. Artinya, pengalaman keluhan kesehatan yang sudah dijabarkan sebelumnya tidak berkaitan dengan pengalaman rawat inap dalam setahun terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 4.5 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2024

Pada tahun 2024, sekitar 6 dari 100 penduduk lansia pernah dirawat inap dalam setahun terakhir (Gambar 4.5). Rawat inap yang dicakup dalam Susenas adalah upaya penyembuhan dengan menginap satu malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional, termasuk rawat inap untuk persalinan. Dilihat dari distribusi pengeluaran, persentase lansia yang pernah rawat inap lebih besar pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas.



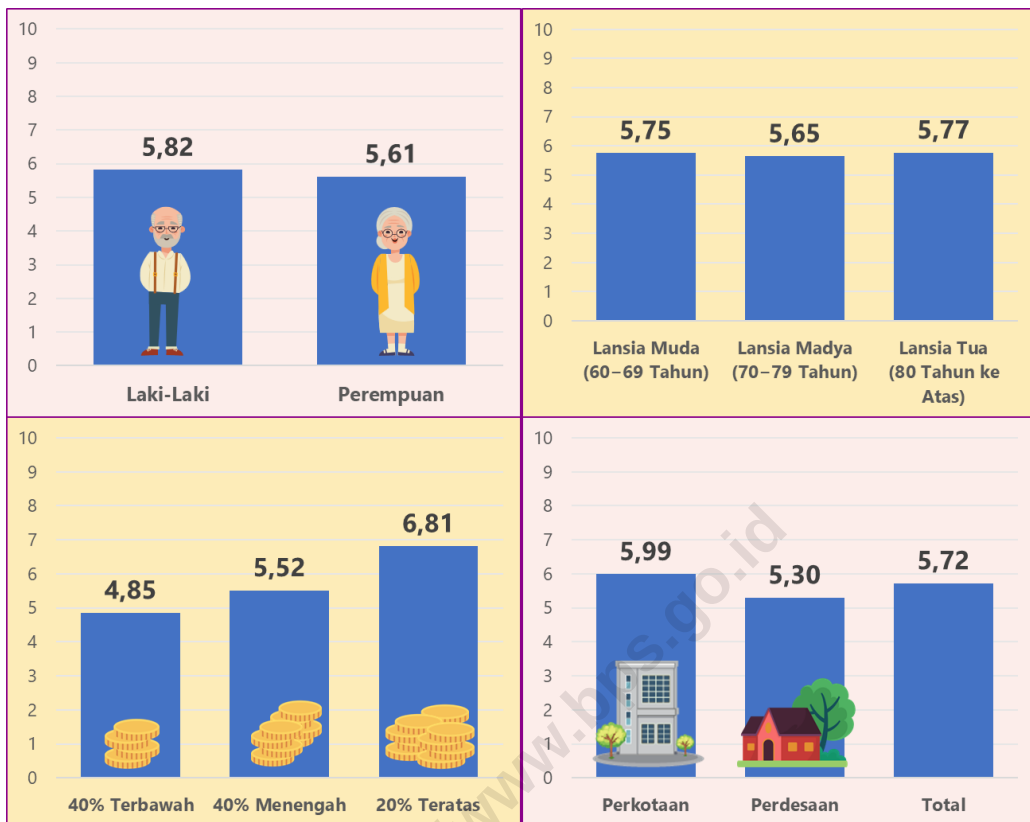
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 4.6 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Fasilitas Kesehatan, 2024

Kemudian, apabila dilihat lebih rinci dimana lansia pernah dirawat inap (Gambar 4.6), hampir separuh dari total lansia yang pernah dirawat inap menjalani rawat inap di rumah sakit pemerintah. Fasilitas kesehatan lainnya yang menjadi tempat rawat inap lansia terbesar adalah rumah sakit swasta. Adapun lansia yang rawat inap di pengobatan tradisional relatif kecil, yakni kurang dari setengah persen.

Masih terkait lansia yang pernah rawat inap, secara umum, rata-rata lama rawat inap lansia sekitar 5–6 hari (5,72 hari). Dilihat dari klasifikasi desa, rata-rata lama rawat inap lansia di perkotaan lebih besar daripada lansia di perdesaan. Sementara itu, rata-rata lama rawat inap lansia semakin besar seiring kenaikan distribusi pengeluaran (Gambar 4.7)



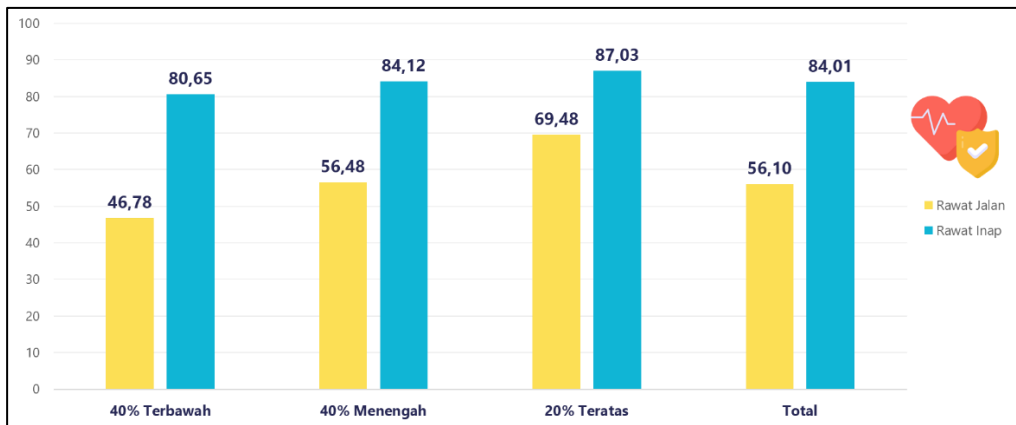


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 4.7 Rata-Rata Lama Rawat Inap dari Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2024

4.3 Pemanfaatan Jaminan Kesehatan

Lansia sakit adalah suatu keniscayaan. Upaya yang bisa dilakukan untuk meringankan beban lansia adalah penjaminan kesehatan. Lansia diberikan kebebasan untuk mendapat pengobatan yang sesuai dan dibekali jaminan kesehatan yang sewaktu-waktu bisa digunakan.

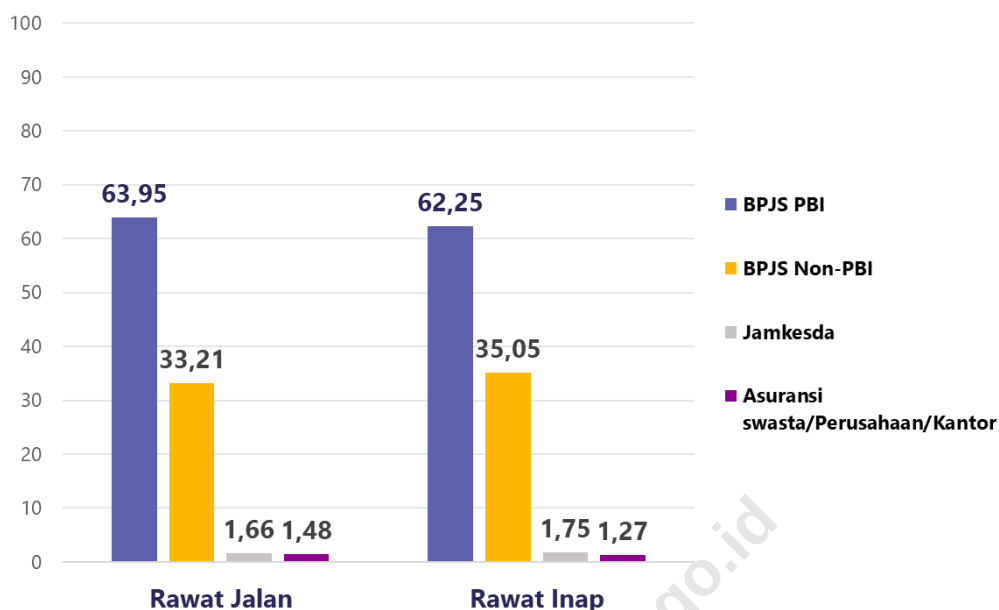


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 4.8 Persentase Lansia yang Rawat Jalan atau Rawat Inap dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan, 2024

Pemanfaatan jaminan kesehatan terlihat dari sikap lansia yang rawat jalan dan rawat inap. Sekitar 56,10 persen lansia yang rawat jalan dalam sebulan terakhir menggunakan jaminan kesehatan. Angka ini lebih rendah dibandingkan pemanfaatan jaminan kesehatan untuk lansia yang rawat inap. Sekitar 84,01 persen lansia yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir menggunakan jaminan kesehatan.

Dilihat dari distribusi pengeluaran, semakin tinggi kelompok pengeluaran, semakin besar pemanfaatan jaminan kesehatan. Artinya, pada kelompok pengeluaran tertinggi, persentase lansia, baik yang pernah rawat jalan maupun rawat inap, cenderung menggunakan jaminan kesehatan. *Gap* penggunaan jaminan kesehatan antarkelompok pengeluaran untuk rawat jalan lebih besar dibandingkan rawat inap.



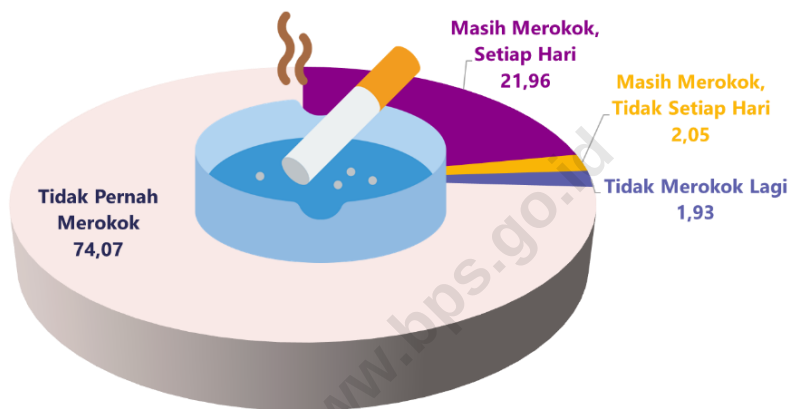
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenat) Maret 2024

Gambar 4.9 Persentase Lansia yang Rawat Jalan dan Rawat Inap dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2024

Lebih jauh, baik rawat jalan maupun rawat inap, jenis jaminan kesehatan yang paling banyak digunakan lansia adalah BPJS PBI. Sebesar 63,95 persen lansia yang rawat jalan dan sebesar 62,25 persen lansia yang rawat inap dengan jaminan kesehatan menggunakan BPJS PBI. Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan adalah masyarakat yang memiliki jaminan pembiayaan kesehatan dari pemerintah di mana iurannya ditanggung pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, jenis jaminan kesehatan yang juga banyak digunakan lansia untuk rawat jalan dan rawat inap adalah BPJS Non-PBI. BPJS Kesehatan Non-PBI adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.

4.4 Kebiasaan Merokok

Active Ageing dapat diwujudkan bergantung pada beragam pengaruh atau determinan (WHO 2002). Salah satu determinan *Active Ageing* adalah perilaku hidup sehat, misalnya aktivitas fisik atau olahraga, konsumsi makanan, dan perilaku merokok (WHO 2002). Informasi mengenai perilaku merokok lansia dapat diperoleh dari Susenas.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 4.10 Persentase Lansia Menurut Perilaku Merokok dalam Sebulan Terakhir, 2024

Hasil Susenas Maret 2024 menunjukkan hampir tiga per empat lansia tidak pernah merokok. Sekitar seperlima lansia aktif merokok setiap hari. Sebesar 2,05 persen lansia masih merokok dalam sebulan terakhir, meski tidak setiap hari. Merokok yang dicakup dalam publikasi ini adalah merokok tembakau dan tidak termasuk merokok elektrik.



Tabel 4.1 Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Angka Kesakitan Lansia Menurut Karakteristik, 2024

Karakteristik	Keluhan Kesehatan	Angka Kesakitan
(1)	(2)	(3)
Total	42,81	20,71
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	40,74	20,09
Perempuan	44,71	21,28
Kelompok Umur		
Lansia Muda (60–69 tahun)	40,30	18,60
Lansia Madya (70–79 tahun)	46,47	23,58
Lansia Tua (80+ tahun)	49,31	26,86
Status Disabilitas		
Nondisabilitas	40,86	18,45
Disabilitas	60,74	41,43
Distribusi Pengeluaran		
20% Teratas	43,24	19,67
40% Menengah	44,22	21,25
40% Terbawah	41,33	20,73
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	42,49	19,81
Perdesaan	43,22	21,84

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 4.2 Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Tindakan Pengobatan, 2024

Karakteristik	Tindakan Pengobatan				Jumlah
	Mengobati Sendiri	Rawat Jalan	Mengobati Sendiri dan Rawat Jalan	Tidak Melakukan Pengobatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	50,38	19,12	26,98	3,53	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	51,05	18,76	26,71	3,48	100,00
Perempuan	49,81	19,41	27,21	3,57	100,00
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60–69 tahun)	51,24	18,47	26,95	3,34	100,00
Lansia Madya (70–79 tahun)	49,46	20,24	26,86	3,43	100,00
Lansia Tua (80+ tahun)	47,99	19,52	27,53	4,97	100,00
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	51,49	18,71	26,63	3,16	100,00
Disabilitas	43,49	21,61	29,12	5,79	100,00
Distribusi Pengeluaran					
20% Teratas	43,26	23,69	29,95	3,10	100,00
40% Menengah	49,28	19,00	28,23	3,49	100,00
40% Terbawah	55,07	16,89	24,27	3,78	100,00
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	47,21	21,51	27,99	3,29	100,00
Perdesaan	54,30	16,15	25,73	3,82	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 4.3 Persentase Lansia yang Tidak Rawat Jalan Menurut Karakteristik dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2024

Karakteristik	Alasan Utama Tidak Rawat Jalan				Jumlah
	Mengobati Sendiri	Merasa Tidak Perlu	Tidak Ada Biaya	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	63,21	32,54	1,41	2,84	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	62,90	33,07	1,34	2,70	100,00
Perempuan	63,48	32,08	1,47	2,97	100,00
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60–69 tahun)	63,42	32,92	1,19	2,46	100,00
Lansia Madya (70–79 tahun)	63,27	32,22	1,59	2,93	100,00
Lansia Tua (80+ tahun)	61,73	31,11	2,23	4,93	100,00
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	63,96	32,82	1,06	2,15	100,00
Disabilitas	58,07	30,56	3,80	7,57	100,00
Distribusi Pengeluaran					
20% Teratas	62,82	33,34	0,72	3,12	100,00
40% Menengah	62,68	33,46	1,05	2,81	100,00
40% Terbawah	63,83	31,41	2,00	2,76	100,00
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	64,01	31,35	1,46	3,18	100,00
Perdesaan	62,35	33,81	1,36	2,48	100,00

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 4.4 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik, 2024

Karakteristik	Pernah Dirawat Inap		Jumlah
	Pernah	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	6,19	93,81	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	6,81	93,19	100,00
Perempuan	5,63	94,37	100,00
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60–69 tahun)	5,84	94,16	100,00
Lansia Madya (70–79 tahun)	6,90	93,10	100,00
Lansia Tua (80+ tahun)	6,50	93,50	100,00
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	5,55	94,45	100,00
Disabilitas	12,08	87,92	100,00
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	9,29	90,71	100,00
40% Menengah	6,62	93,38	100,00
40% Terbawah	4,29	95,71	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	6,80	93,20	100,00
Perdesaan	5,43	94,57	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 4.5 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Lamanya Rawat Inap, 2024

Karakteristik	Lamanya Dirawat Inap			Rata-rata Lama Rawat Inap
	≤3 Hari	4–6 Hari	≥7 Hari	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	40,65	32,23	27,12	5,72
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	39,63	32,41	27,96	5,82
Perempuan	41,78	32,04	26,19	5,61
Kelompok Umur				
Lansia Muda (60–69 tahun)	40,30	32,52	27,17	5,75
Lansia Madya (70–79 tahun)	40,88	31,31	27,81	5,65
Lansia Tua (80+ tahun)	42,15	33,52	24,33	5,77
Status Disabilitas				
Nondisabilitas	42,42	32,80	24,78	5,51
Disabilitas	33,16	29,84	37,00	6,62
Distribusi Pengeluaran				
20% Teratas	36,44	30,75	32,81	6,81
40% Menengah	39,96	32,71	27,32	5,52
40% Terbawah	46,05	33,14	20,81	4,85
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	38,36	32,99	28,65	5,99
Perdesaan	44,26	31,04	24,70	5,30

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 4.6 Persentase Lansia yang Rawat Jalan atau Rawat Inap dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik, 2024

Karakteristik	Memanfaatkan Jaminan Kesehatan	
	Rawat Jalan	Rawat Inap
(1)	(2)	(3)
Total	56,10	84,01
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	57,70	85,62
Perempuan	54,80	82,22
Kelompok Umur		
Lansia Muda (60–69 tahun)	57,98	84,77
Lansia Madya (70–79 tahun)	55,46	83,35
Lansia Tua (80+ tahun)	47,18	81,21
Status Disabilitas		
Nondisabilitas	55,65	83,52
Disabilitas	58,62	86,07
Distribusi Pengeluaran		
20% Teratas	69,48	87,03
40% Menengah	56,48	84,12
40% Terbawah	46,78	80,65
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	63,95	88,70
Perdesaan	44,60	76,59

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 4.7 Persentase Lansia yang Pernah Rawat Jalan dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2024

Karakteristik	Jenis Jaminan Kesehatan			
	BPJS PBI	BPJS Non-PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta/ Perusahaan/ Kantor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	63,95	33,21	1,66	1,48
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	61,98	35,31	1,38	1,72
Perempuan	65,64	31,42	1,90	1,28
Kelompok Umur				
Lansia Muda (60–69 tahun)	64,64	32,64	1,48	1,49
Lansia Madya (70–79 tahun)	62,47	34,96	1,52	1,44
Lansia Tua (80+ tahun)	64,39	30,97	3,41	1,56
Status Disabilitas				
Nondisabilitas	64,11	33,03	1,71	1,45
Disabilitas	63,11	34,18	1,37	1,67
Distribusi Pengeluaran				
20% Teratas	37,39	58,26	1,25	3,34
40% Menengah	68,19	29,23	1,81	1,14
40% Terbawah	84,57	13,76	1,86	NA
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	57,14	39,90	1,19	2,00
Perdesaan	78,25	19,17	2,65	0,40

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 4.8 Persentase Lansia yang Pernah Rawat Inap dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2024

Karakteristik	Jenis Jaminan Kesehatan			
	BPJS PBI	BPJS Non-PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta/ Perusahaan/ Kantor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	62,25	35,05	1,75	1,27
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	60,50	36,90	1,62	1,37
Perempuan	64,27	32,91	1,90	1,16
Kelompok Umur				
Lansia Muda (60–69 tahun)	62,98	34,28	1,82	1,23
Lansia Madya (70–79 tahun)	60,95	36,21	1,55	1,65
Lansia Tua (80+ tahun)	61,79	36,21	NA	NA
Status Disabilitas				
Nondisabilitas	62,84	34,53	1,75	1,24
Disabilitas	59,83	37,16	1,73	1,41
Distribusi Pengeluaran				
20% Teratas	37,60	58,12	1,66	2,91
40% Menengah	67,43	30,69	1,64	0,50
40% Terbawah	82,86	15,04	2,01	NA
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	56,03	40,81	1,63	1,78
Perdesaan	73,60	24,51	1,97	0,34

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 4.9 Persentase Lansia menurut Perilaku Merokok dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2024

Karakteristik	Merokok			Tidak Merokok Lagi	Tidak Pernah Merokok	Jumlah (4)+(5)+(6)
	Setiap Hari	Tidak Setiap Hari	Masih Merokok (2)+(3)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	21,96	2,05	24,01	1,93	74,07	100,00
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	44,36	4,08	48,44	3,46	48,11	100,00
Perempuan	1,45	0,19	1,64	0,53	97,84	100,00
Kelompok Umur						
Lansia Muda (60–69 tahun)	24,66	2,15	26,81	1,84	71,35	100,00
Lansia Madya (70–79 tahun)	18,64	1,97	20,61	2,06	77,33	100,00
Lansia Tua (80+ tahun)	12,94	1,58	14,52	2,12	83,37	100,00
Status Disabilitas						
Nondisabilitas	23,17	2,07	25,24	1,88	72,89	100,00
Disabilitas	10,82	1,90	12,73	2,38	84,89	100,00
Distribusi Pengeluaran						
20% Teratas	18,74	1,65	20,39	1,84	77,77	100,00
40% Menengah	24,35	1,94	26,29	2,00	71,71	100,00
40% Terbawah	21,38	2,34	23,72	1,91	74,37	100,00
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	19,91	1,87	21,78	1,95	76,27	100,00
Perdesaan	24,54	2,27	26,81	1,90	71,28	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 4.10 Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	48,00	52,00	46,49	54,51	50,70
Sumatera Utara	40,56	43,15	41,01	42,31	41,71
Sumatera Barat	44,49	47,83	44,38	47,81	46,20
Riau	40,43	47,37	43,24	46,05	44,63
Jambi	37,84	41,73	39,15	41,79	40,47
Sumatera Selatan	40,02	47,88	42,29	47,42	44,94
Bengkulu	42,05	43,08	41,43	44,14	42,78
Lampung	43,62	45,38	40,85	48,92	44,83
Kep. Bangka Belitung	45,50	51,45	44,16	51,93	47,97
Kepulauan Riau	39,79	42,40	42,28	38,20	40,29
DKI Jakarta	40,54	–	40,58	40,50	40,54
Jawa Barat	46,21	49,46	44,70	49,27	47,03
Jawa Tengah	45,81	42,53	41,73	46,38	44,21
DI Yogyakarta	44,65	36,12	40,95	42,66	41,87
Jawa Timur	39,91	40,66	38,07	42,16	40,26
Banten	40,56	43,30	36,43	46,25	41,28
Bali	29,41	37,36	30,82	33,07	32,01
Nusa Tenggara Barat	55,38	61,91	57,49	59,46	58,57
Nusa Tenggara Timur	51,84	44,16	44,37	47,39	45,98
Kalimantan Barat	36,61	41,90	38,64	40,88	39,78
Kalimantan Tengah	33,50	36,19	34,01	36,36	35,09
Kalimantan Selatan	42,52	49,30	42,91	49,08	46,08
Kalimantan Timur	39,59	30,49	36,60	36,35	36,48
Kalimantan Utara	38,75	33,66	35,94	37,40	36,62
Sulawesi Utara	37,16	39,05	39,02	37,14	38,05
Sulawesi Tengah	43,45	36,32	38,31	38,59	38,45
Sulawesi Selatan	35,63	38,86	35,16	39,37	37,49
Sulawesi Tenggara	38,85	40,67	38,91	41,11	40,05
Gorontalo	48,38	52,81	47,62	53,53	50,78
Sulawesi Barat	30,69	41,37	36,96	40,94	39,07
Maluku	27,48	27,76	28,74	26,65	27,65
Maluku Utara	26,55	29,51	28,92	28,49	28,70
Papua Barat	19,74	31,39	28,21	27,24	27,76
Papua Barat Daya	28,20	37,96	28,92	37,91	33,29
Papua	27,62	25,36	26,38	27,06	26,70
Papua Selatan	38,86	34,16	34,90	37,13	35,94
Papua Tengah	30,50	14,52	20,75	18,98	20,01
Papua Pegunungan	NA	23,00	23,95	17,22	21,44
Indonesia	42,49	43,22	40,74	44,71	42,81

Catatan: NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 4.11 Angka Kesakitan Lansia Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	24,01	31,97	27,75	30,85	29,38
Sumatera Utara	18,58	23,52	20,19	21,26	20,76
Sumatera Barat	21,55	27,23	23,24	25,55	24,47
Riau	19,20	22,77	22,08	20,61	21,35
Jambi	15,19	19,32	19,02	16,96	17,99
Sumatera Selatan	15,85	20,56	18,00	19,55	18,80
Bengkulu	19,01	21,83	22,00	20,02	21,01
Lampung	20,89	22,43	19,80	24,16	21,95
Kep. Bangka Belitung	16,69	21,29	17,55	19,68	18,60
Kepulauan Riau	17,42	18,97	20,28	15,02	17,72
DKI Jakarta	15,41	–	14,98	15,81	15,41
Jawa Barat	24,04	27,98	24,39	25,65	25,03
Jawa Tengah	20,10	20,10	19,35	20,75	20,10
DI Yogyakarta	20,25	16,75	19,45	18,83	19,11
Jawa Timur	17,11	19,17	17,57	18,51	18,07
Banten	21,38	20,65	18,99	23,44	21,19
Bali	17,64	24,87	18,71	21,16	20,01
Nusa Tenggara Barat	30,38	36,98	33,75	33,48	33,60
Nusa Tenggara Timur	25,47	24,40	25,12	24,24	24,65
Kalimantan Barat	18,14	19,41	18,48	19,32	18,90
Kalimantan Tengah	13,27	15,32	14,64	14,30	14,49
Kalimantan Selatan	14,12	20,21	15,51	19,03	17,32
Kalimantan Timur	17,76	14,77	15,62	17,94	16,74
Kalimantan Utara	13,23	16,87	15,23	14,21	14,76
Sulawesi Utara	16,28	21,87	20,25	17,64	18,90
Sulawesi Tengah	22,01	21,35	20,98	22,10	21,54
Sulawesi Selatan	16,23	19,71	17,41	18,89	18,23
Sulawesi Tenggara	18,48	23,45	20,93	22,53	21,76
Gorontalo	19,61	28,89	25,22	24,13	24,64
Sulawesi Barat	17,49	20,96	19,65	20,72	20,22
Maluku	12,73	15,26	15,62	12,99	14,25
Maluku Utara	13,56	19,03	17,61	17,46	17,53
Papua Barat	7,96	14,04	14,99	8,90	12,14
Papua Barat Daya	14,31	20,06	16,06	18,63	17,30
Papua	12,00	16,90	13,72	14,27	13,98
Papua Selatan	20,49	23,04	21,05	23,26	22,08
Papua Tengah	18,38	3,76	9,21	8,18	8,78
Papua Pegunungan	NA	13,48	13,68	10,79	12,60
Indonesia	19,81	21,84	20,09	21,28	20,71

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 4.12 Persentase Lansia yang Mengobati Sendiri Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	73,46	69,62	71,92	69,94	70,80
Sumatera Utara	78,41	79,71	77,97	79,87	79,01
Sumatera Barat	62,64	65,67	66,05	62,77	64,25
Riau	77,08	86,57	83,44	82,90	83,17
Jambi	64,33	79,39	75,13	74,57	74,84
Sumatera Selatan	80,25	86,30	84,24	84,32	84,29
Bengkulu	68,22	78,90	76,05	75,68	75,86
Lampung	70,65	81,07	78,36	77,49	77,89
Kep. Bangka Belitung	69,78	78,47	72,33	74,82	73,65
Kepulauan Riau	75,83	56,99	75,33	68,19	72,04
DKI Jakarta	73,65	–	73,64	73,67	73,65
Jawa Barat	78,73	83,80	81,27	79,05	80,08
Jawa Tengah	72,41	77,11	75,11	74,23	74,62
DI Yogyakarta	65,39	59,03	63,97	63,31	63,61
Jawa Timur	74,48	82,57	78,05	78,48	78,29
Banten	82,47	87,82	84,24	83,71	83,95
Bali	56,94	59,11	57,12	58,31	57,77
Nusa Tenggara Barat	79,06	82,99	79,79	82,13	81,09
Nusa Tenggara Timur	72,55	78,83	77,55	76,83	77,16
Kalimantan Barat	79,44	86,79	86,15	82,16	84,08
Kalimantan Tengah	81,75	91,49	90,56	84,60	87,71
Kalimantan Selatan	85,48	88,08	88,25	85,86	86,94
Kalimantan Timur	65,48	75,81	70,89	65,76	68,43
Kalimantan Utara	64,56	62,02	62,01	65,31	63,58
Sulawesi Utara	69,91	71,99	71,02	70,80	70,91
Sulawesi Tengah	86,13	79,15	83,85	79,20	81,50
Sulawesi Selatan	73,75	76,90	73,75	76,99	75,63
Sulawesi Tenggara	78,23	84,77	81,38	83,69	82,61
Gorontalo	81,66	75,78	79,10	77,77	78,35
Sulawesi Barat	68,47	79,16	83,04	72,83	77,36
Maluku	74,77	81,63	80,26	77,58	78,92
Maluku Utara	75,63	81,66	79,72	80,54	80,13
Papua Barat	78,55	80,99	84,42	75,76	80,45
Papua Barat Daya	69,55	66,86	70,74	65,70	67,95
Papua	80,70	76,99	74,41	84,52	79,28
Papua Selatan	77,54	81,36	79,53	80,09	79,80
Papua Tengah	75,70	53,49	61,82	70,13	65,12
Papua Pegunungan	100,00	82,52	83,93	79,48	82,59
Indonesia	75,20	80,03	77,76	77,02	77,36

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) Maret 2024



Tabel 4.13 Persentase Lansia yang Rawat Jalan ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	56,45	60,51	60,00	58,70	59,26
Sumatera Utara	46,95	41,67	44,83	44,30	44,54
Sumatera Barat	60,93	56,93	58,15	59,35	58,81
Riau	51,27	35,58	42,48	39,97	41,20
Jambi	58,81	32,21	40,89	39,63	40,24
Sumatera Selatan	42,94	35,50	38,75	37,34	37,98
Bengkulu	53,67	40,77	45,62	43,34	44,45
Lampung	49,14	39,12	37,67	46,06	42,18
Kep. Bangka Belitung	51,85	41,07	46,06	47,93	47,05
Kepulauan Riau	47,50	54,71	39,22	60,29	48,95
DKI Jakarta	55,42	–	55,37	55,46	55,42
Jawa Barat	51,50	42,04	48,32	49,56	48,98
Jawa Tengah	46,85	44,08	44,86	46,09	45,55
DI Yogyakarta	62,91	56,74	59,41	62,61	61,18
Jawa Timur	47,61	44,59	45,89	46,42	46,19
Banten	47,41	30,50	40,23	44,76	42,74
Bali	71,46	67,47	68,34	71,25	69,93
Nusa Tenggara Barat	52,75	49,40	50,09	51,77	51,02
Nusa Tenggara Timur	38,37	37,20	39,63	35,76	37,51
Kalimantan Barat	42,41	29,41	31,12	37,06	34,21
Kalimantan Tengah	38,77	22,62	29,13	28,63	28,89
Kalimantan Selatan	33,01	29,91	32,48	30,26	31,27
Kalimantan Timur	57,40	29,34	47,78	51,13	49,38
Kalimantan Utara	49,81	48,03	48,72	49,56	49,12
Sulawesi Utara	52,40	48,84	50,53	50,84	50,69
Sulawesi Tengah	31,26	34,17	31,75	34,60	33,19
Sulawesi Selatan	37,98	33,33	35,84	34,75	35,21
Sulawesi Tenggara	33,09	29,85	31,63	30,30	30,92
Gorontalo	35,49	42,77	38,20	40,67	39,59
Sulawesi Barat	39,46	35,23	35,59	36,22	35,94
Maluku	37,12	28,60	30,62	33,32	31,98
Maluku Utara	33,31	36,68	35,70	35,95	35,83
Papua Barat	28,85	25,19	25,58	26,50	26,00
Papua Barat Daya	56,94	47,90	49,65	53,11	51,57
Papua	38,38	46,81	40,57	42,75	41,62
Papua Selatan	31,68	47,24	39,72	42,12	40,87
Papua Tengah	43,64	14,10	30,41	28,27	29,56
Papua Pegunungan	NA	45,43	48,32	38,00	45,23
Indonesia	49,50	41,88	45,47	46,62	46,10

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 4.14 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	12,53	10,55	12,08	10,39	11,19
Sumatera Utara	7,76	4,83	7,05	5,96	6,46
Sumatera Barat	5,58	4,72	5,09	5,18	5,14
Riau	6,02	5,52	5,97	5,45	5,71
Jambi	5,18	5,77	6,49	4,67	5,58
Sumatera Selatan	6,14	4,62	5,69	4,72	5,19
Bengkulu	8,77	5,59	7,27	5,75	6,51
Lampung	7,45	5,67	6,07	6,40	6,23
Kep. Bangka Belitung	6,67	5,81	7,39	5,19	6,31
Kepulauan Riau	5,83	7,12	6,07	6,09	6,08
DKI Jakarta	7,18	–	7,52	6,88	7,18
Jawa Barat	6,86	7,60	7,88	6,25	7,05
Jawa Tengah	7,51	5,60	7,23	6,01	6,58
DI Yogyakarta	6,84	6,84	6,40	7,22	6,84
Jawa Timur	5,86	4,60	6,07	4,57	5,27
Banten	5,81	3,31	5,50	4,78	5,15
Bali	3,71	4,81	4,48	3,70	4,07
Nusa Tenggara Barat	10,46	11,06	12,48	9,31	10,75
Nusa Tenggara Timur	8,37	3,63	5,66	3,96	4,75
Kalimantan Barat	5,08	2,61	4,49	2,73	3,60
Kalimantan Tengah	6,11	2,67	4,99	3,00	4,07
Kalimantan Selatan	3,80	3,59	3,82	3,57	3,69
Kalimantan Timur	6,10	4,22	5,64	5,26	5,46
Kalimantan Utara	5,91	4,79	6,83	3,86	5,44
Sulawesi Utara	10,26	7,75	10,42	7,85	9,09
Sulawesi Tengah	13,01	5,71	7,94	7,83	7,89
Sulawesi Selatan	7,55	5,70	7,37	5,78	6,49
Sulawesi Tenggara	8,54	4,68	6,60	5,44	6,00
Gorontalo	8,84	7,58	8,38	7,96	8,16
Sulawesi Barat	6,74	5,69	6,81	5,13	5,92
Maluku	5,15	2,02	3,55	3,00	3,27
Maluku Utara	4,82	3,70	4,51	3,50	4,00
Papua Barat	5,99	2,62	3,58	3,77	3,67
Papua Barat Daya	16,74	3,54	7,10	12,79	9,86
Papua	6,28	2,08	4,62	4,53	4,58
Papua Selatan	10,27	5,97	6,31	9,07	7,59
Papua Tengah	3,20	NA	1,55	NA	1,49
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA	NA
Indonesia	6,80	5,43	6,81	5,63	6,19

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 4.15 Persentase Lansia yang Rawat Jalan atau Rawat Inap dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Pemanfaatan Jaminan Kesehatan	
	Rawat Jalan	Rawat Inap
(1)	(2)	(3)
Aceh	76,34	97,46
Sumatera Utara	58,16	86,97
Sumatera Barat	62,41	89,87
Riau	65,01	80,02
Jambi	52,62	79,61
Sumatera Selatan	51,86	76,97
Bengkulu	47,62	85,17
Lampung	39,54	80,24
Kep. Bangka Belitung	68,71	94,12
Kepulauan Riau	77,91	99,59
DKI Jakarta	83,79	97,38
Jawa Barat	52,42	81,46
Jawa Tengah	53,62	82,46
DI Yogyakarta	65,31	91,67
Jawa Timur	45,00	77,48
Banten	52,79	79,08
Bali	51,09	96,11
Nusa Tenggara Barat	44,58	72,59
Nusa Tenggara Timur	80,03	94,68
Kalimantan Barat	50,04	79,91
Kalimantan Tengah	54,42	81,94
Kalimantan Selatan	70,33	83,15
Kalimantan Timur	87,22	88,51
Kalimantan Utara	85,48	96,56
Sulawesi Utara	77,87	94,03
Sulawesi Tengah	78,23	96,70
Sulawesi Selatan	73,99	95,44
Sulawesi Tenggara	72,57	90,11
Gorontalo	62,06	98,96
Sulawesi Barat	84,87	96,33
Maluku	78,26	88,49
Maluku Utara	79,43	91,97
Papua Barat	85,66	88,66
Papua Barat Daya	87,59	96,91
Papua	86,41	99,56
Papua Selatan	95,20	85,70
Papua Tengah	62,11	75,28
Papua Pegunungan	100,00	100,00
Indonesia	56,10	84,01

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 4.16 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Perilaku Merokok, 2024

Provinsi	Merokok dalam Sebulan Terakhir			Tidak Merokok Lagi	Tidak Pernah Merokok	Jumlah (4) + (5) + (6)
	Merokok Setiap Hari	Merokok Tidak Setiap Hari	Masih Merokok (2) + (3)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	19,45	3,35	22,79	1,58	75,63	100,00
Sumatera Utara	19,73	1,86	21,59	2,02	76,39	100,00
Sumatera Barat	23,92	1,60	25,51	2,75	71,73	100,00
Riau	21,05	1,85	22,89	1,95	75,15	100,00
Jambi	22,41	1,02	23,42	1,21	75,37	100,00
Sumatera Selatan	22,96	2,09	25,05	1,33	73,62	100,00
Bengkulu	25,81	1,29	27,09	2,64	70,27	100,00
Lampung	27,98	1,32	29,30	3,15	67,55	100,00
Kep. Bangka Belitung	17,92	1,66	19,58	1,78	78,64	100,00
Kepulauan Riau	18,72	0,91	19,63	2,63	77,74	100,00
DKI Jakarta	12,38	1,80	14,18	0,91	84,90	100,00
Jawa Barat	26,33	2,55	28,88	2,41	68,71	100,00
Jawa Tengah	22,12	2,23	24,35	2,10	73,55	100,00
DI Yogyakarta	17,21	1,12	18,33	3,55	78,12	100,00
Jawa Timur	22,56	1,69	24,25	1,25	74,50	100,00
Banten	27,16	1,46	28,62	1,11	70,28	100,00
Bali	11,23	0,62	11,85	1,02	87,13	100,00
Nusa Tenggara Barat	26,06	1,12	27,17	3,23	69,60	100,00
Nusa Tenggara Timur	14,30	5,20	19,50	1,89	78,62	100,00
Kalimantan Barat	20,49	1,82	22,31	2,38	75,30	100,00
Kalimantan Tengah	20,62	2,13	22,75	1,40	75,85	100,00
Kalimantan Selatan	15,20	1,22	16,42	2,03	81,54	100,00
Kalimantan Timur	17,98	1,49	19,47	1,61	78,92	100,00
Kalimantan Utara	19,46	1,56	21,03	0,94	78,04	100,00
Sulawesi Utara	16,95	3,24	20,20	3,03	76,77	100,00
Sulawesi Tengah	22,03	2,42	24,45	1,58	73,97	100,00
Sulawesi Selatan	17,59	1,33	18,92	1,96	79,12	100,00
Sulawesi Tenggara	19,85	1,79	21,63	4,15	74,22	100,00
Gorontalo	24,35	4,85	29,20	1,34	69,45	100,00
Sulawesi Barat	17,41	1,88	19,29	1,26	79,45	100,00
Maluku	20,28	5,54	25,82	2,46	71,71	100,00
Maluku Utara	20,66	4,72	25,38	1,59	73,02	100,00
Papua Barat	16,48	4,88	21,36	1,61	77,03	100,00
Papua Barat Daya	13,34	5,80	19,14	1,12	79,73	100,00
Papua	11,25	7,20	18,44	1,54	80,02	100,00
Papua Selatan	23,61	4,35	27,97	NA	71,44	100,00
Papua Tengah	11,90	4,75	16,65	NA	83,06	100,00
Papua Pegunungan	14,70	5,63	20,33	1,46	78,21	100,00
Indonesia	21,96	2,05	24,01	1,93	74,07	100,00

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 4.17 Sampling Error Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	48,00	43,66	52,35	4,61	52,00	49,36	54,63	2,59	50,70	48,43	52,97	2,29
Sumatera Utara	40,56	37,60	43,53	3,73	43,15	40,77	45,52	2,81	41,71	39,75	43,66	2,40
Sumatera Barat	44,49	40,39	48,59	4,70	47,83	45,32	50,34	2,68	46,20	43,83	48,58	2,62
Riau	40,43	35,68	45,18	5,99	47,37	43,64	51,11	4,03	44,63	41,68	47,58	3,37
Jambi	37,84	33,18	42,49	6,28	41,73	38,39	45,06	4,08	40,47	37,75	43,19	3,43
Sumatera Selatan	40,02	35,84	44,19	5,32	47,88	45,18	50,57	2,87	44,94	42,63	47,25	2,62
Bengkulu	42,05	36,39	47,72	6,87	43,08	39,41	46,75	4,35	42,78	39,70	45,87	3,68
Lampung	43,62	38,84	48,40	5,59	45,38	42,72	48,04	2,99	44,83	42,46	47,19	2,69
Kep. Bangka Belitung	45,50	40,67	50,34	5,42	51,45	45,78	57,13	5,63	47,97	44,28	51,67	3,93
Kepulauan Riau	39,79	33,52	46,06	8,04	42,40	32,71	52,09	11,66	40,29	34,89	45,69	6,84
DKI Jakarta	40,54	37,47	43,60	3,86	—	—	—	—	40,54	37,47	43,60	3,86
Jawa Barat	46,21	44,34	48,08	2,06	49,46	47,18	51,75	2,36	47,03	45,52	48,54	1,64
Jawa Tengah	45,81	44,25	47,38	1,74	42,53	41,10	43,96	1,72	44,21	43,15	45,28	1,23
DI Yogyakarta	44,65	41,22	48,08	3,92	36,12	31,93	40,31	5,92	41,87	39,19	44,56	3,28
Jawa Timur	39,91	38,39	41,42	1,93	40,66	39,34	41,99	1,67	40,26	39,24	41,28	1,29
Banten	40,56	36,64	44,47	4,93	43,30	38,75	47,85	5,36	41,28	38,15	44,40	3,86
Bali	29,41	26,56	32,26	4,95	37,36	34,18	40,54	4,35	32,01	29,83	34,20	3,48
Nusa Tenggara Barat	55,38	50,86	59,90	4,17	61,91	58,04	65,78	3,19	58,57	55,58	61,56	2,61
Nusa Tenggara Timur	51,84	46,55	57,13	5,21	44,16	42,09	46,23	2,40	45,98	43,95	48,01	2,25
Kalimantan Barat	36,61	32,32	40,89	5,97	41,90	38,72	45,07	3,86	39,78	37,21	42,34	3,29
Kalimantan Tengah	33,50	28,23	38,77	8,03	36,19	32,23	40,15	5,58	35,09	31,92	38,27	4,62
Kalimantan Selatan	42,52	38,40	46,64	4,94	49,30	45,91	52,68	3,50	46,08	43,44	48,73	2,93
Kalimantan Timur	39,59	35,35	43,84	5,47	30,49	24,70	36,27	9,69	36,48	33,04	39,92	4,81
Kalimantan Utara	38,75	31,30	46,19	9,80	33,66	26,79	40,54	10,42	36,62	31,41	41,83	7,26
Sulawesi Utara	37,16	33,63	40,69	4,84	39,05	36,33	41,77	3,56	38,05	35,78	40,31	3,04
Sulawesi Tengah	43,45	37,31	49,58	7,20	36,32	33,23	39,42	4,35	38,45	35,60	41,30	3,78
Sulawesi Selatan	35,63	32,47	38,79	4,53	38,86	36,81	40,91	2,69	37,49	35,70	39,28	2,44
Sulawesi Tenggara	38,85	32,91	44,79	7,80	40,67	37,61	43,73	3,84	40,05	37,20	42,90	3,64
Gorontalo	48,38	41,40	55,36	7,36	52,81	47,60	58,02	5,03	50,78	46,51	55,05	4,29
Sulawesi Barat	30,69	23,05	38,33	12,70	41,37	36,34	46,39	6,19	39,07	34,78	43,37	5,61
Maluku	27,48	22,31	32,66	9,61	27,76	24,04	31,48	6,84	27,65	24,60	30,69	5,62
Maluku Utara	26,55	20,13	32,97	12,34	29,51	25,79	33,24	6,44	28,70	25,47	31,93	5,75
Papua Barat	19,74	11,94	27,53	20,16	31,39	24,78	37,99	10,73	27,76	22,54	32,97	9,58
Papua Barat Daya	28,20	19,63	36,78	15,51	37,96	32,84	43,07	6,87	33,29	28,39	38,19	7,51
Papua	27,62	21,50	33,73	11,30	25,36	21,00	29,71	8,76	26,70	22,66	30,75	7,73
Papua Selatan	38,86	25,86	51,86	17,07	34,16	25,75	42,57	12,56	35,94	28,77	43,11	10,18
Papua Tengah	30,50	19,20	41,81	18,91	14,52	9,75	19,29	16,76	20,01	14,96	25,06	12,88
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	97,08	23,00	16,80	29,20	13,75	21,44	15,66	27,22	13,75
Indonesia	42,49	41,79	43,18	0,83	43,22	42,66	43,77	0,65	42,81	42,35	43,27	0,55

Catatan: Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 4.18 *Sampling Error* Angka Kesakitan Lansia Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	24,01	20,36	27,65	7,75	31,97	29,62	34,31	3,75	29,38	27,39	31,36	3,45
Sumatera Utara	18,58	16,27	20,89	6,35	23,52	21,44	25,59	4,49	20,76	19,18	22,35	3,89
Sumatera Barat	21,55	18,39	24,72	7,50	27,23	25,02	29,44	4,14	24,47	22,55	26,38	4,00
Riau	19,20	15,53	22,86	9,74	22,77	19,54	25,99	7,24	21,35	18,92	23,79	5,82
Jambi	15,19	11,82	18,57	11,34	19,32	16,73	21,91	6,84	17,99	15,92	20,05	5,86
Sumatera Selatan	15,85	12,73	18,96	10,02	20,56	18,51	22,62	5,09	18,80	17,06	20,53	4,71
Bengkulu	19,01	14,75	23,28	11,43	21,83	18,81	24,84	7,05	21,01	18,54	23,48	6,00
Lampung	20,89	16,81	24,97	9,96	22,43	20,28	24,58	4,90	21,95	19,99	23,90	4,54
Kep. Bangka Belitung	16,69	13,33	20,05	10,26	21,29	16,68	25,89	11,04	18,60	15,84	21,35	7,55
Kepulauan Riau	17,42	12,45	22,39	14,55	18,97	12,27	25,66	18,01	17,72	13,50	21,93	12,13
DKI Jakarta	15,41	13,15	17,68	7,50	–	–	–	–	15,41	13,15	17,68	7,50
Jawa Barat	24,04	22,40	25,67	3,47	27,98	25,98	29,97	3,64	25,03	23,71	26,36	2,69
Jawa Tengah	20,10	18,84	21,35	3,19	20,10	18,95	21,25	2,92	20,10	19,24	20,95	2,17
DI Yogyakarta	20,25	17,55	22,95	6,80	16,75	13,92	19,57	8,62	19,11	17,07	21,16	5,45
Jawa Timur	17,11	15,99	18,23	3,35	19,17	18,11	20,23	2,81	18,07	17,30	18,85	2,19
Banten	21,38	18,06	24,70	7,92	20,65	17,02	24,28	8,98	21,19	18,56	23,81	6,32
Bali	17,64	15,23	20,05	6,97	24,87	22,02	27,72	5,84	20,01	18,14	21,88	4,78
Nusa Tenggara Barat	30,38	25,98	34,77	7,38	36,98	33,03	40,93	5,45	33,60	30,63	36,57	4,51
Nusa Tenggara Timur	25,47	20,81	30,12	9,32	24,40	22,60	26,19	3,75	24,65	22,89	26,41	3,63
Kalimantan Barat	18,14	14,76	21,51	9,49	19,41	16,91	21,91	6,56	18,90	16,88	20,92	5,44
Kalimantan Tengah	13,27	9,69	16,86	13,80	15,32	12,59	18,04	9,07	14,49	12,31	16,66	7,67
Kalimantan Selatan	14,12	11,05	17,18	11,08	20,21	17,48	22,95	6,90	17,32	15,27	19,37	6,04
Kalimantan Timur	17,76	14,46	21,06	9,48	14,77	9,95	19,59	16,65	16,74	14,01	19,46	8,30
Kalimantan Utara	13,23	8,23	18,24	19,30	16,87	12,11	21,63	14,40	14,76	11,23	18,28	12,18
Sulawesi Utara	16,28	13,85	18,71	7,62	21,87	19,53	24,20	5,45	18,90	17,20	20,60	4,59
Sulawesi Tengah	22,01	16,74	27,28	12,22	21,35	18,79	23,90	6,10	21,54	19,16	23,93	5,65
Sulawesi Selatan	16,23	13,69	18,77	7,98	19,71	18,06	21,36	4,27	18,23	16,79	19,66	4,02
Sulawesi Tenggara	18,48	13,59	23,37	13,51	23,45	20,75	26,15	5,87	21,76	19,33	24,19	5,70
Gorontalo	19,61	14,40	24,82	13,56	28,89	24,45	33,33	7,84	24,64	21,24	28,04	7,04
Sulawesi Barat	17,49	11,50	23,49	17,49	20,96	17,03	24,89	9,57	20,22	16,86	23,57	8,46
Maluku	12,73	8,81	16,64	15,69	15,26	12,50	18,02	9,23	14,25	11,97	16,53	8,18
Maluku Utara	13,56	8,77	18,35	18,03	19,03	15,85	22,21	8,52	17,53	14,87	20,20	7,75
Papua Barat	7,96	3,11	12,81	31,11	14,04	9,52	18,55	16,41	12,14	8,65	15,64	14,68
Papua Barat Daya	14,31	7,10	21,52	25,72	20,06	15,57	24,54	11,40	17,30	13,10	21,51	12,39
Papua	12,00	7,70	16,31	18,30	16,90	13,18	20,62	11,23	13,98	11,01	16,95	10,84
Papua Selatan	20,49	9,74	31,25	26,78	23,04	15,38	30,70	16,97	22,08	15,81	28,35	14,49
Papua Tengah	18,38	8,04	28,72	28,70	3,76	1,29	6,23	33,56	8,78	4,76	12,80	23,37
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	105,42	13,48	8,45	18,52	19,06	12,60	7,91	17,30	19,00
Indonesia	19,81	19,24	20,38	1,47	21,84	21,39	22,30	1,07	20,71	20,33	21,09	0,93

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 4.19 Sampling Error Angka Kesakitan Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2024

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	27,75	25,09	30,41	4,89	30,85	28,21	33,49	4,37	29,38	27,39	31,36	3,45
Sumatera Utara	20,19	18,05	22,33	5,40	21,26	19,23	23,29	4,87	20,76	19,18	22,35	3,89
Sumatera Barat	23,24	20,70	25,78	5,58	25,55	23,15	27,95	4,79	24,47	22,55	26,38	4,00
Riau	22,08	18,89	25,27	7,38	20,61	17,56	23,66	7,55	21,35	18,92	23,79	5,82
Jambi	19,02	16,25	21,79	7,44	16,96	14,36	19,55	7,80	17,99	15,92	20,05	5,86
Sumatera Selatan	18,00	15,78	20,22	6,30	19,55	17,19	21,91	6,16	18,80	17,06	20,53	4,71
Bengkulu	22,00	18,78	25,22	7,46	20,02	16,98	23,05	7,73	21,01	18,54	23,48	6,00
Lampung	19,80	17,42	22,19	6,15	24,16	21,45	26,87	5,73	21,95	19,99	23,90	4,54
Kep. Bangka Belitung	17,55	14,02	21,08	10,26	19,68	15,86	23,51	9,90	18,60	15,84	21,35	7,55
Kepulauan Riau	20,28	13,22	27,33	17,75	15,02	10,36	19,68	15,84	17,72	13,50	21,93	12,13
DKI Jakarta	14,98	12,01	17,95	10,12	15,81	12,95	18,66	9,23	15,41	13,15	17,68	7,50
Jawa Barat	24,39	22,68	26,10	3,58	25,65	23,93	27,37	3,42	25,03	23,71	26,36	2,69
Jawa Tengah	19,35	18,27	20,44	2,86	20,75	19,65	21,86	2,72	20,10	19,24	20,95	2,17
DI Yogyakarta	19,45	16,51	22,38	7,71	18,83	16,21	21,45	7,10	19,11	17,07	21,16	5,45
Jawa Timur	17,57	16,53	18,61	3,01	18,51	17,50	19,51	2,77	18,07	17,30	18,85	2,19
Banten	18,99	15,96	22,02	8,13	23,44	19,94	26,93	7,61	21,19	18,56	23,81	6,32
Bali	18,71	16,37	21,06	6,40	21,16	18,73	23,58	5,85	20,01	18,14	21,88	4,78
Nusa Tenggara Barat	33,75	29,72	37,77	6,09	33,48	29,86	37,09	5,51	33,60	30,63	36,57	4,51
Nusa Tenggara Timur	25,12	22,76	27,48	4,80	24,24	22,10	26,37	4,49	24,65	22,89	26,41	3,63
Kalimantan Barat	18,48	15,89	21,06	7,13	19,32	16,69	21,94	6,93	18,90	16,88	20,92	5,44
Kalimantan Tengah	14,64	11,99	17,29	9,23	14,30	11,43	17,17	10,24	14,49	12,31	16,66	7,67
Kalimantan Selatan	15,51	13,13	17,88	7,81	19,03	16,43	21,64	6,98	17,32	15,27	19,37	6,04
Kalimantan Timur	15,62	12,37	18,87	10,62	17,94	14,41	21,47	10,05	16,74	14,01	19,46	8,30
Kalimantan Utara	15,23	10,92	19,54	14,44	14,21	9,61	18,81	16,53	14,76	11,23	18,28	12,18
Sulawesi Utara	20,25	17,99	22,51	5,69	17,64	15,50	19,78	6,19	18,90	17,20	20,60	4,59
Sulawesi Tengah	20,98	17,93	24,04	7,44	22,10	19,08	25,12	6,98	21,54	19,16	23,93	5,65
Sulawesi Selatan	17,41	15,57	19,26	5,41	18,89	17,02	20,77	5,06	18,23	16,79	19,66	4,02
Sulawesi Tenggara	20,93	17,80	24,06	7,62	22,53	19,36	25,70	7,17	21,76	19,33	24,19	5,70
Gorontalo	25,22	20,80	29,65	8,95	24,13	19,93	28,32	8,86	24,64	21,24	28,04	7,04
Sulawesi Barat	19,65	15,28	24,01	11,33	20,72	16,36	25,08	10,74	20,22	16,86	23,57	8,46
Maluku	15,62	12,51	18,73	10,16	12,99	10,27	15,71	10,69	14,25	11,97	16,53	8,18
Maluku Utara	17,61	14,05	21,17	10,30	17,46	13,92	20,99	10,33	17,53	14,87	20,20	7,75
Papua Barat	14,99	9,51	20,46	18,63	8,90	5,40	12,41	20,06	12,14	8,65	15,64	14,68
Papua Barat Daya	16,06	11,02	21,09	16,01	18,63	11,70	25,56	18,98	17,30	13,10	21,51	12,39
Papua	13,72	9,94	17,50	14,05	14,27	10,59	17,96	13,18	13,98	11,01	16,95	10,84
Papua Selatan	21,05	13,74	28,35	17,72	23,26	14,06	32,46	20,17	22,08	15,81	28,35	14,49
Papua Tengah	9,21	4,83	13,59	24,27	8,18	3,43	12,93	29,62	8,78	4,76	12,80	23,37
Papua Pegunungan	13,68	8,00	19,37	21,19	10,79	5,06	16,52	27,08	12,60	7,91	17,30	19,00
Indonesia	20,09	19,60	20,58	1,24	21,28	20,79	21,76	1,17	20,71	20,33	21,09	0,93

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 4.20 Sampling Error Persentase Lansia yang Rawat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	56,45	50,09	62,82	5,75	60,51	56,90	64,13	3,05	59,26	56,09	62,44	2,73
Sumatera Utara	46,95	42,16	51,75	5,21	41,67	38,03	45,32	4,46	44,54	41,45	47,62	3,53
Sumatera Barat	60,93	54,84	67,03	5,10	56,93	53,39	60,47	3,17	58,81	55,39	62,22	2,96
Riau	51,27	43,70	58,84	7,53	35,58	30,35	40,80	7,49	41,20	36,87	45,53	5,36
Jambi	58,81	50,95	66,68	6,82	32,21	27,31	37,11	7,76	40,24	36,02	44,46	5,35
Sumatera Selatan	42,94	36,44	49,44	7,72	35,50	32,07	38,92	4,92	37,98	34,83	41,13	4,23
Bengkulu	53,67	45,65	61,70	7,63	40,77	35,25	46,30	6,91	44,45	39,85	49,05	5,28
Lampung	49,14	41,74	56,54	7,68	39,12	35,51	42,73	4,71	42,18	38,79	45,56	4,10
Kep. Bangka Belitung	51,85	44,86	58,84	6,88	41,07	33,17	48,98	9,82	47,05	41,75	52,36	5,75
Kepulauan Riau	47,50	36,74	58,25	11,55	54,71	38,88	70,54	14,76	48,95	39,73	58,17	9,61
DKI Jakarta	55,42	50,51	60,32	4,51	—	—	—	—	55,42	50,51	60,32	4,51
Jawa Barat	51,50	48,74	54,27	2,74	42,04	39,02	45,06	3,67	48,98	46,79	51,18	2,28
Jawa Tengah	46,85	44,60	49,11	2,45	44,08	41,95	46,21	2,47	45,55	43,99	47,11	1,75
DI Yogyakarta	62,91	57,76	68,06	4,17	56,74	49,04	64,44	6,92	61,18	56,89	65,47	3,58
Jawa Timur	47,61	45,24	49,98	2,54	44,59	42,55	46,63	2,33	46,19	44,61	47,76	1,74
Banten	47,41	41,69	53,12	6,15	30,50	23,87	37,12	11,08	42,74	38,18	47,29	5,44
Bali	71,46	66,44	76,47	3,58	67,47	62,51	72,44	3,75	69,93	66,30	73,56	2,65
Nusa Tenggara Barat	52,75	46,93	58,58	5,63	49,40	44,16	54,63	5,41	51,02	47,12	54,92	3,90
Nusa Tenggara Timur	38,37	31,06	45,67	9,72	37,20	34,25	40,14	4,04	37,51	34,60	40,41	3,95
Kalimantan Barat	42,41	35,29	49,54	8,57	29,41	25,44	33,38	6,89	34,21	30,57	37,84	5,42
Kalimantan Tengah	38,77	29,31	48,23	12,45	22,62	17,22	28,03	12,19	28,89	23,80	33,99	9,00
Kalimantan Selatan	33,01	26,85	39,16	9,51	29,91	25,63	34,19	7,30	31,27	27,65	34,88	5,90
Kalimantan Timur	57,40	50,45	64,35	6,18	29,34	18,99	39,68	17,99	49,38	43,51	55,26	6,07
Kalimantan Utara	49,81	37,04	62,57	13,08	48,03	35,18	60,88	13,65	49,12	39,81	58,43	9,67
Sulawesi Utara	52,40	46,67	58,14	5,58	48,84	44,50	53,18	4,53	50,69	47,06	54,32	3,66
Sulawesi Tengah	31,26	22,79	39,73	13,82	34,17	29,29	39,04	7,28	33,19	28,87	37,50	6,63
Sulawesi Selatan	37,98	33,04	42,92	6,64	33,33	30,28	36,38	4,67	35,21	32,51	37,91	3,91
Sulawesi Tenggara	33,09	23,65	42,53	14,55	29,85	25,52	34,18	7,40	30,92	26,65	35,19	7,04
Gorontalo	35,49	26,26	44,72	13,27	42,77	36,20	49,34	7,84	39,59	34,08	45,10	7,10
Sulawesi Barat	39,46	25,19	53,74	18,46	35,23	27,84	42,62	10,70	35,94	29,34	42,55	9,37
Maluku	37,12	26,55	47,70	14,53	28,60	22,24	34,96	11,35	31,98	26,23	37,72	9,16
Maluku Utara	33,31	20,08	46,55	20,27	36,68	29,02	44,33	10,65	35,83	29,18	42,47	9,46
Papua Barat	28,85	11,29	46,41	31,06	25,19	15,24	35,14	20,15	26,00	17,30	34,69	17,06
Papua Barat Daya	56,94	38,34	75,54	16,66	47,90	38,53	57,26	9,97	51,57	42,12	61,01	9,34
Papua	38,38	25,96	50,80	16,51	46,81	37,35	56,28	10,31	41,62	33,10	50,14	10,44
Papua Selatan	31,68	10,26	53,09	34,49	47,24	33,06	61,41	15,31	40,87	28,90	52,85	14,94
Papua Tengah	43,64	22,33	64,95	24,91	14,10	1,60	26,60	45,22	29,56	16,40	42,73	22,73
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA	45,43	30,97	59,90	16,24	45,23	30,83	59,62	16,24
Indonesia	49,50	48,43	50,57	1,10	41,88	41,06	42,69	0,99	46,10	45,40	46,79	0,77

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 4.21 Sampling Error Persentase Lansia yang Rawat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2024

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	60,00	55,72	64,28	3,64	58,70	54,79	62,60	3,39	59,26	56,09	62,44	2,73
Sumatera Utara	44,83	40,61	49,05	4,80	44,30	40,47	48,12	4,40	44,54	41,45	47,62	3,53
Sumatera Barat	58,15	53,48	62,81	4,09	59,35	55,34	63,36	3,44	58,81	55,39	62,22	2,96
Riau	42,48	36,83	48,13	6,79	39,97	34,62	45,33	6,83	41,20	36,87	45,53	5,36
Jambi	40,89	35,61	46,18	6,59	39,63	34,36	44,91	6,79	40,24	36,02	44,46	5,35
Sumatera Selatan	38,75	34,40	43,09	5,72	37,34	33,27	41,40	5,56	37,98	34,83	41,13	4,23
Bengkulu	45,62	39,71	51,54	6,62	43,34	37,56	49,13	6,81	44,45	39,85	49,05	5,28
Lampung	37,67	33,38	41,95	5,81	46,06	41,54	50,59	5,01	42,18	38,79	45,56	4,10
Kep. Bangka Belitung	46,06	38,95	53,16	7,87	47,93	41,35	54,51	7,01	47,05	41,75	52,36	5,75
Kepulauan Riau	39,22	26,89	51,55	16,04	60,29	48,74	71,84	9,78	48,95	39,73	58,17	9,61
DKI Jakarta	55,37	48,86	61,88	6,00	55,46	49,40	61,51	5,57	55,42	50,51	60,32	4,51
Jawa Barat	48,32	45,37	51,26	3,11	49,56	46,77	52,36	2,88	48,98	46,79	51,18	2,28
Jawa Tengah	44,86	42,74	46,99	2,41	46,09	44,13	48,05	2,17	45,55	43,99	47,11	1,75
DI Yogyakarta	59,41	53,59	65,23	5,00	62,61	57,50	67,73	4,17	61,18	56,89	65,47	3,58
Jawa Timur	45,89	43,71	48,07	2,42	46,42	44,47	48,37	2,14	46,19	44,61	47,76	1,74
Banten	40,23	33,95	46,50	7,96	44,76	38,78	50,74	6,82	42,74	38,18	47,29	5,44
Bali	68,34	63,34	73,33	3,73	71,25	67,07	75,42	2,99	69,93	66,30	73,56	2,65
Nusa Tenggara Barat	50,09	44,41	55,77	5,79	51,77	46,89	56,65	4,81	51,02	47,12	54,92	3,90
Nusa Tenggara Timur	39,63	35,51	43,75	5,30	35,76	32,42	39,11	4,77	37,51	34,60	40,41	3,95
Kalimantan Barat	31,12	26,34	35,91	7,84	37,06	32,35	41,76	6,48	34,21	30,57	37,84	5,42
Kalimantan Tengah	29,13	22,87	35,39	10,96	28,63	22,15	35,12	11,56	28,89	23,80	33,99	9,00
Kalimantan Selatan	32,48	27,74	37,21	7,44	30,26	25,93	34,60	7,31	31,27	27,65	34,88	5,90
Kalimantan Timur	47,78	40,55	55,01	7,72	51,13	43,91	58,35	7,21	49,38	43,51	55,26	6,07
Kalimantan Utara	48,72	37,54	59,91	11,71	49,56	37,48	61,65	12,44	49,12	39,81	58,43	9,67
Sulawesi Utara	50,53	45,91	55,16	4,67	50,84	46,17	55,52	4,69	50,69	47,06	54,32	3,66
Sulawesi Tengah	31,75	26,20	37,30	8,92	34,60	29,07	40,13	8,15	33,19	28,87	37,50	6,63
Sulawesi Selatan	35,84	32,14	39,53	5,26	34,75	31,23	38,27	5,17	35,21	32,51	37,91	3,91
Sulawesi Tenggara	31,63	26,06	37,20	8,99	30,30	24,80	35,80	9,26	30,92	26,65	35,19	7,04
Gorontalo	38,20	30,96	45,44	9,67	40,67	33,85	47,48	8,55	39,59	34,08	45,10	7,10
Sulawesi Barat	35,59	26,98	44,21	12,34	36,22	28,34	44,10	11,10	35,94	29,34	42,55	9,37
Maluku	30,62	23,38	37,86	12,06	33,32	25,61	41,04	11,81	31,98	26,23	37,72	9,16
Maluku Utara	35,70	27,08	44,32	12,32	35,95	26,97	44,93	12,74	35,83	29,18	42,47	9,46
Papua Barat	25,58	14,30	36,86	22,50	26,50	15,17	37,83	21,81	26,00	17,30	34,69	17,06
Papua Barat Daya	49,65	37,66	61,64	12,32	53,11	40,41	65,82	12,20	51,57	42,12	61,01	9,34
Papua	40,57	29,97	51,17	13,33	42,75	32,27	53,22	12,50	41,62	33,10	50,14	10,44
Papua Selatan	39,72	25,79	53,66	17,89	42,12	26,62	57,61	18,77	40,87	28,90	52,85	14,94
Papua Tengah	30,41	16,52	44,30	23,30	28,27	11,71	44,84	29,89	29,56	16,40	42,73	22,73
Papua Pegunungan	48,32	33,17	63,47	16,00	38,00	13,20	62,81	33,30	45,23	30,83	59,62	16,24
Indonesia	45,47	44,52	46,41	1,06	46,62	45,74	47,50	0,96	46,10	45,40	46,79	0,77

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 4.22 *Sampling Error* Persentase Lansia yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	12,53	9,89	15,17	10,76	10,55	9,06	12,03	7,18	11,19	9,87	12,51	6,02
Sumatera Utara	7,76	6,06	9,47	11,20	4,83	3,82	5,83	10,64	6,46	5,41	7,52	8,32
Sumatera Barat	5,58	4,12	7,04	13,36	4,72	3,71	5,74	10,94	5,14	4,26	6,02	8,73
Riau	6,02	3,91	8,12	17,89	5,52	4,02	7,01	13,82	5,71	4,48	6,94	10,98
Jambi	5,18	3,13	7,23	20,23	5,77	4,34	7,20	12,68	5,58	4,40	6,76	10,76
Sumatera Selatan	6,14	4,07	8,21	17,20	4,62	3,58	5,66	11,46	5,19	4,18	6,20	9,94
Bengkulu	8,77	5,76	11,77	17,50	5,59	4,13	7,06	13,36	6,51	5,16	7,87	10,64
Lampung	7,45	5,15	9,74	15,75	5,67	4,58	6,77	9,83	6,23	5,19	7,27	8,52
Kep. Bangka Belitung	6,67	4,70	8,64	15,08	5,81	3,31	8,31	21,99	6,31	4,76	7,86	12,54
Kepulauan Riau	5,83	3,35	8,32	21,73	7,12	2,27	11,97	34,73	6,08	3,87	8,29	18,57
DKI Jakarta	7,18	5,61	8,76	11,21	–	–	–	–	7,18	5,61	8,76	11,21
Jawa Barat	6,86	6,01	7,71	6,30	7,60	6,53	8,68	7,20	7,05	6,36	7,74	4,98
Jawa Tengah	7,51	6,76	8,27	5,14	5,60	5,01	6,19	5,37	6,58	6,10	7,06	3,75
DI Yogyakarta	6,84	5,23	8,45	11,99	6,84	4,83	8,86	15,04	6,84	5,57	8,11	9,46
Jawa Timur	5,86	5,21	6,50	5,64	4,60	4,08	5,12	5,74	5,27	4,85	5,69	4,08
Banten	5,81	4,24	7,37	13,76	3,31	1,59	5,03	26,51	5,15	3,91	6,39	12,27
Bali	3,71	2,63	4,78	14,86	4,81	3,54	6,09	13,52	4,07	3,23	4,90	10,49
Nusa Tenggara Barat	10,46	7,92	13,00	12,39	11,06	8,51	13,60	11,75	10,75	8,95	12,55	8,54
Nusa Tenggara Timur	8,37	5,53	11,20	17,30	3,63	2,96	4,30	9,41	4,75	3,90	5,60	9,11
Kalimantan Barat	5,08	3,55	6,61	15,34	2,61	1,81	3,40	15,55	3,60	2,83	4,38	10,98
Kalimantan Tengah	6,11	3,40	8,82	22,66	2,67	1,72	3,63	18,23	4,07	2,82	5,32	15,72
Kalimantan Selatan	3,80	2,53	5,07	17,11	3,59	2,60	4,59	14,10	3,69	2,89	4,49	11,04
Kalimantan Timur	6,10	4,45	7,75	13,80	4,22	2,00	6,44	26,88	5,46	4,13	6,79	12,39
Kalimantan Utara	5,91	3,14	8,69	23,93	4,79	2,33	7,24	26,15	5,44	3,53	7,35	17,90
Sulawesi Utara	10,26	8,16	12,36	10,45	7,75	6,34	9,16	9,26	9,09	7,79	10,39	7,30
Sulawesi Tengah	13,01	9,35	16,67	14,36	5,71	4,38	7,04	11,91	7,89	6,44	9,34	9,40
Sulawesi Selatan	7,55	5,99	9,12	10,56	5,70	4,89	6,52	7,30	6,49	5,68	7,31	6,40
Sulawesi Tenggara	8,54	4,94	12,14	21,50	4,68	3,57	5,80	12,12	6,00	4,56	7,43	12,20
Gorontalo	8,84	5,08	12,59	21,67	7,58	5,47	9,70	14,25	8,16	6,09	10,23	12,94
Sulawesi Barat	6,74	2,98	10,50	28,46	5,69	3,75	7,64	17,46	5,92	4,19	7,65	14,92
Maluku	5,15	3,03	7,27	21,01	2,02	1,16	2,88	21,69	3,27	2,28	4,25	15,42
Maluku Utara	4,82	2,16	7,47	28,11	3,70	2,29	5,10	19,43	4,00	2,75	5,26	15,97
Papua Barat	5,99	2,08	9,90	33,28	2,62	1,06	4,17	30,25	3,67	2,05	5,28	22,47
Papua Barat Daya	16,74	7,70	25,79	27,57	3,54	1,59	5,48	28,06	9,86	5,23	14,49	23,94
Papua	6,28	3,42	9,13	23,23	2,08	0,78	3,37	31,87	4,58	2,81	6,35	19,74
Papua Selatan	10,27	3,01	17,52	36,06	5,97	2,44	9,50	30,18	7,59	4,10	11,08	23,45
Papua Tengah	3,20	0,78	5,62	38,64	NA	NA	NA	61,35	1,49	0,55	2,43	32,22
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	93,96	NA	NA	NA	93,94
Indonesia	6,80	6,48	7,12	2,40	5,43	5,20	5,66	2,17	6,19	5,99	6,40	1,69

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

**Tabel 4.23 Sampling Error Persentase Lansia yang Pernah Rawat Inap dalam
Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2024**

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	12,08	10,11	14,05	8,31	10,39	8,70	12,08	8,31	11,19	9,87	12,51	6,02
Sumatera Utara	7,05	5,54	8,57	10,93	5,96	4,62	7,30	11,47	6,46	5,41	7,52	8,32
Sumatera Barat	5,09	3,83	6,36	12,66	5,18	4,00	6,37	11,66	5,14	4,26	6,02	8,73
Riau	5,97	4,21	7,73	15,05	5,45	3,66	7,24	16,73	5,71	4,48	6,94	10,98
Jambi	6,49	4,65	8,33	14,45	4,67	3,15	6,20	16,67	5,58	4,40	6,76	10,76
Sumatera Selatan	5,69	4,07	7,31	14,49	4,72	3,48	5,95	13,32	5,19	4,18	6,20	9,94
Bengkulu	7,27	5,24	9,31	14,29	5,75	3,98	7,52	15,73	6,51	5,16	7,87	10,64
Lampung	6,07	4,63	7,51	12,12	6,40	4,89	7,90	12,00	6,23	5,19	7,27	8,52
Kep. Bangka Belitung	7,39	4,92	9,86	17,06	5,19	3,29	7,09	18,64	6,31	4,76	7,86	12,54
Kepulauan Riau	6,07	3,14	9,01	24,68	6,09	2,76	9,41	27,88	6,08	3,87	8,29	18,57
DKI Jakarta	7,52	5,19	9,85	15,83	6,88	4,87	8,89	14,89	7,18	5,61	8,76	11,21
Jawa Barat	7,88	6,83	8,94	6,82	6,25	5,38	7,12	7,12	7,05	6,36	7,74	4,98
Jawa Tengah	7,23	6,53	7,94	4,99	6,01	5,37	6,64	5,39	6,58	6,10	7,06	3,75
DI Yogyakarta	6,40	4,69	8,10	13,60	7,22	5,36	9,08	13,15	6,84	5,57	8,11	9,46
Jawa Timur	6,07	5,42	6,72	5,48	4,57	4,04	5,11	6,01	5,27	4,85	5,69	4,08
Banten	5,50	3,87	7,14	15,19	4,78	2,95	6,61	19,51	5,15	3,91	6,39	12,27
Bali	4,48	3,27	5,70	13,81	3,70	2,62	4,78	14,84	4,07	3,23	4,90	10,49
Nusa Tenggara Barat	12,48	9,56	15,41	11,97	9,31	6,99	11,63	12,73	10,75	8,95	12,55	8,54
Nusa Tenggara Timur	5,66	4,30	7,02	12,30	3,96	2,96	4,95	12,80	4,75	3,90	5,60	9,11
Kalimantan Barat	4,49	3,24	5,74	14,23	2,73	1,81	3,66	17,28	3,60	2,83	4,38	10,98
Kalimantan Tengah	4,99	3,22	6,75	18,04	3,00	1,64	4,37	23,21	4,07	2,82	5,32	15,72
Kalimantan Selatan	3,82	2,73	4,90	14,52	3,57	2,42	4,72	16,40	3,69	2,89	4,49	11,04
Kalimantan Timur	5,64	3,83	7,46	16,40	5,26	3,32	7,20	18,77	5,46	4,13	6,79	12,39
Kalimantan Utara	6,83	3,82	9,83	22,44	3,86	1,68	6,04	28,85	5,44	3,53	7,35	17,90
Sulawesi Utara	10,42	8,48	12,35	9,49	7,85	6,16	9,53	10,96	9,09	7,79	10,39	7,30
Sulawesi Tengah	7,94	5,90	9,99	13,15	7,83	5,77	9,90	13,47	7,89	6,44	9,34	9,40
Sulawesi Selatan	7,37	6,15	8,59	8,46	5,78	4,67	6,88	9,74	6,49	5,68	7,31	6,40
Sulawesi Tenggara	6,60	4,48	8,73	16,41	5,44	3,47	7,40	18,42	6,00	4,56	7,43	12,20
Gorontalo	8,38	5,72	11,04	16,18	7,96	5,23	10,70	17,50	8,16	6,09	10,23	12,94
Sulawesi Barat	6,81	4,04	9,58	20,75	5,13	2,87	7,39	22,49	5,92	4,19	7,65	14,92
Maluku	3,55	2,13	4,98	20,45	3,00	1,61	4,39	23,63	3,27	2,28	4,25	15,42
Maluku Utara	4,51	2,80	6,23	19,42	3,50	1,85	5,15	24,09	4,00	2,75	5,26	15,97
Papua Barat	3,58	1,51	5,64	29,42	3,77	1,21	6,33	34,66	3,67	2,05	5,28	22,47
Papua Barat Daya	7,10	2,35	11,84	34,11	12,79	5,85	19,73	27,69	9,86	5,23	14,49	23,94
Papua	4,62	2,17	7,06	27,06	4,53	1,93	7,14	29,35	4,58	2,81	6,35	19,74
Papua Selatan	6,31	2,14	10,47	33,68	9,07	2,99	15,15	34,19	7,59	4,10	11,08	23,45
Papua Tengah	1,55	0,29	2,82	41,51	NA	NA	NA	51,36	1,49	0,55	2,43	32,22
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	100,38	NA	NA	NA	100,03	NA	NA	NA	93,94
Indonesia	6,81	6,50	7,12	2,31	5,63	5,36	5,89	2,42	6,19	5,99	6,40	1,69

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 4.24 Sampling Error Persentase Lansia yang Rawat Jalan dan Rawat Inap dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Rawat Jalan				Rawat Inap			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	76,34	72,83	79,85	17,83	97,46	95,81	99,10	17,83
Sumatera Utara	58,16	53,83	62,49	18,36	86,97	80,86	93,08	18,36
Sumatera Barat	62,41	58,55	66,26	22,18	89,87	84,90	94,84	22,18
Riau	65,01	58,63	71,39	18,96	80,02	71,63	88,41	18,96
Jambi	52,62	46,16	59,08	20,41	79,61	71,13	88,08	20,41
Sumatera Selatan	51,86	46,71	57,01	21,30	76,97	70,33	83,60	21,30
Bengkulu	47,62	40,85	54,39	23,61	85,17	76,55	93,79	23,61
Lampung	39,54	34,20	44,87	26,24	80,24	73,93	86,54	26,24
Kep. Bangka Belitung	68,71	61,78	75,64	15,27	94,12	89,12	99,12	15,27
Kepulauan Riau	77,91	65,84	89,98	14,37	99,59	98,94	100,00	14,37
DKI Jakarta	83,79	79,54	88,04	10,56	97,38	94,75	100,00	10,56
Jawa Barat	52,42	49,26	55,57	25,19	81,46	77,55	85,38	25,19
Jawa Tengah	53,62	51,38	55,85	21,39	82,46	79,75	85,18	21,39
DI Yogyakarta	65,31	59,84	70,78	15,52	91,67	84,71	98,62	15,52
Jawa Timur	45,00	42,84	47,17	21,84	77,48	74,22	80,74	21,84
Banten	52,79	45,38	60,19	24,84	79,08	68,41	89,75	24,84
Bali	51,09	46,29	55,88	9,93	96,11	92,28	99,94	9,93
Nusa Tenggara Barat	44,58	39,08	50,08	23,83	72,59	63,69	81,48	23,83
Nusa Tenggara Timur	80,03	76,40	83,65	13,14	94,68	91,39	97,97	13,14
Kalimantan Barat	50,04	43,68	56,39	18,64	79,91	71,36	88,46	18,64
Kalimantan Tengah	54,42	43,38	65,46	18,35	81,94	72,34	91,53	18,35
Kalimantan Selatan	70,33	64,22	76,44	13,59	83,15	74,53	91,77	13,59
Kalimantan Timur	87,22	82,01	92,43	15,65	88,51	79,50	97,51	15,65
Kalimantan Utara	85,48	77,11	93,85	15,65	96,56	91,41	100,00	15,65
Sulawesi Utara	77,87	73,78	81,96	15,41	94,03	89,95	98,10	15,41
Sulawesi Tengah	78,23	72,07	84,39	19,95	96,70	93,85	99,56	19,95
Sulawesi Selatan	73,99	69,74	78,23	16,34	95,44	93,18	97,71	16,34
Sulawesi Tenggara	72,57	64,55	80,58	17,79	90,11	78,84	100,00	17,79
Gorontalo	62,06	53,55	70,56	21,37	98,96	97,48	100,00	21,37
Sulawesi Barat	84,87	77,85	91,90	14,56	96,33	92,72	99,94	14,56
Maluku	78,26	69,79	86,73	17,89	88,49	80,41	96,56	17,89
Maluku Utara	79,43	71,23	87,64	18,18	91,97	81,68	100,00	18,18
Papua Barat	85,66	74,24	97,07	12,51	88,66	71,82	100,00	12,51
Papua Barat Daya	87,59	78,08	97,11	9,75	96,91	92,28	100,00	9,75
Papua	86,41	78,92	93,90	8,96	99,56	98,68	100,00	8,96
Papua Selatan	95,20	87,08	100,00	17,60	85,70	68,85	100,00	17,60
Papua Tengah	62,11	35,01	89,20	8,40	75,28	50,31	100,00	8,40
Papua Pegunungan	100,00	100,00	100,00	9,82	100,00	100,00	100,00	9,82
Indonesia	56,10	55,09	57,11	21,63	84,01	82,75	85,26	21,63

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 4.25 Sampling Error Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Perilaku Merokok dalam Sebulan Terakhir, 2024

Provinsi	Setiap Hari				Tidak Setiap Hari				Masih Merokok			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	19,45	17,83	21,06	4,23	3,35	2,50	4,20	12,93	22,79	21,07	24,52	3,86
Sumatera Utara	19,73	18,36	21,10	3,54	1,86	1,35	2,37	13,91	21,59	20,17	23,01	3,35
Sumatera Barat	23,92	22,18	25,66	3,71	1,60	1,13	2,06	14,82	25,51	23,76	27,27	3,50
Riau	21,05	18,96	23,14	5,06	1,85	1,15	2,54	19,27	22,89	20,73	25,05	4,81
Jambi	22,41	20,41	24,40	4,54	1,02	0,54	1,49	23,66	23,42	21,39	25,46	4,43
Sumatera Selatan	22,96	21,30	24,62	3,68	2,09	1,52	2,66	13,95	25,05	23,36	26,73	3,44
Bengkulu	25,81	23,61	28,01	4,35	1,29	0,64	1,93	25,44	27,09	24,88	29,31	4,17
Lampung	27,98	26,24	29,72	3,17	1,32	0,91	1,72	15,77	29,30	27,55	31,05	3,05
Kep. Bangka Belitung	17,92	15,27	20,57	7,55	1,66	0,81	2,51	26,09	19,58	16,86	22,29	7,08
Kepulauan Riau	18,72	14,37	23,08	11,86	0,91	0,29	1,53	34,54	19,63	15,24	24,02	11,40
DKI Jakarta	12,38	10,56	14,20	7,50	1,80	1,10	2,50	19,75	14,18	12,28	16,08	6,84
Jawa Barat	26,33	25,19	27,46	2,20	2,55	2,15	2,96	8,03	28,88	27,73	30,03	2,03
Jawa Tengah	22,12	21,39	22,86	1,69	2,23	1,96	2,50	6,24	24,35	23,60	25,10	1,57
DI Yogyakarta	17,21	15,52	18,90	5,02	1,12	0,66	1,58	20,96	18,33	16,61	20,05	4,79
Jawa Timur	22,56	21,84	23,28	1,63	1,69	1,45	1,92	6,99	24,25	23,51	24,98	1,55
Banten	27,16	24,84	29,47	4,35	1,46	0,82	2,10	22,52	28,62	26,28	30,95	4,17
Bali	11,23	9,93	12,53	5,89	0,62	0,32	0,91	24,34	11,85	10,53	13,17	5,68
Nusa Tenggara Barat	26,06	23,83	28,29	4,37	1,12	0,68	1,55	19,95	27,17	24,94	29,41	4,20
Nusa Tenggara Timur	14,30	13,14	15,46	4,14	5,20	4,44	5,96	7,50	19,50	18,19	20,80	3,42
Kalimantan Barat	20,49	18,64	22,34	4,62	1,82	1,08	2,57	20,83	22,31	20,36	24,26	4,46
Kalimantan Tengah	20,62	18,35	22,89	5,61	2,13	1,21	3,04	21,97	22,75	20,40	25,09	5,26
Kalimantan Selatan	15,20	13,59	16,81	5,41	1,22	0,68	1,76	22,47	16,42	14,75	18,10	5,21
Kalimantan Timur	17,98	15,65	20,31	6,62	1,49	0,76	2,23	25,24	19,47	17,07	21,87	6,28
Kalimantan Utara	19,46	15,65	23,28	10,00	1,56	0,41	2,72	37,73	21,03	17,12	24,93	9,47
Sulawesi Utara	16,95	15,41	18,50	4,65	3,24	2,55	3,94	10,97	20,20	18,56	21,83	4,13
Sulawesi Tengah	22,03	19,95	24,11	4,82	2,42	1,68	3,17	15,72	24,45	22,33	26,58	4,43
Sulawesi Selatan	17,59	16,34	18,84	3,62	1,33	0,96	1,70	14,08	18,92	17,65	20,20	3,44
Sulawesi Tenggara	19,85	17,79	21,90	5,28	1,79	0,93	2,64	24,56	21,63	19,50	23,77	5,04
Gorontalo	24,35	21,37	27,33	6,24	4,85	3,30	6,41	16,38	29,20	26,13	32,28	5,38
Sulawesi Barat	17,41	14,56	20,25	8,35	1,88	0,86	2,91	27,79	19,29	16,38	22,20	7,71
Maluku	20,28	17,89	22,68	6,03	5,54	4,14	6,95	12,95	25,82	23,36	28,29	4,87
Maluku Utara	20,66	18,18	23,14	6,12	4,72	3,44	6,00	13,83	25,38	22,81	27,96	5,18
Papua Barat	16,48	12,51	20,45	12,29	4,88	2,76	6,99	22,12	21,36	17,16	25,56	10,03
Papua Barat Daya	13,34	9,75	16,93	13,73	5,80	3,65	7,96	18,98	19,14	15,22	23,07	10,45
Papua	11,25	8,96	13,54	10,40	7,20	5,19	9,20	14,19	18,44	15,62	21,27	7,81
Papua Selatan	23,61	17,60	29,63	13,00	4,35	2,23	6,48	24,89	27,97	21,84	34,09	11,18
Papua Tengah	11,90	8,40	15,41	15,02	4,75	2,06	7,43	28,84	16,65	12,53	20,78	12,65
Papua Pegunungan	14,70	9,82	19,59	16,94	5,63	3,06	8,20	23,31	20,33	15,27	25,39	12,69
Indonesia	21,96	21,63	22,29	0,76	2,05	1,94	2,16	2,80	24,01	23,67	24,34	0,71

Lanjutan Tabel 4.25

Provinsi	Tidak Merokok Lagi				Tidak Pernah Merokok			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	1,58	0,98	2,18	19,40	75,63	73,86	77,39	1,19
Sumatera Utara	2,02	1,51	2,52	12,80	76,39	74,91	77,88	0,99
Sumatera Barat	2,75	2,17	3,33	10,76	71,73	69,95	73,51	1,27
Riau	1,95	1,33	2,58	16,33	75,15	72,96	77,35	1,49
Jambi	1,21	0,73	1,68	20,11	75,37	73,32	77,42	1,39
Sumatera Selatan	1,33	0,94	1,72	15,00	73,62	71,92	75,33	1,18
Bengkulu	2,64	1,71	3,56	17,84	70,27	67,95	72,59	1,69
Lampung	3,15	2,47	3,83	11,07	67,55	65,78	69,32	1,34
Kep. Bangka Belitung	1,78	1,00	2,55	22,20	78,64	75,86	81,43	1,81
Kepulauan Riau	2,63	0,64	4,62	38,58	77,74	73,15	82,33	3,01
DKI Jakarta	0,91	0,46	1,37	25,24	84,90	82,97	86,84	1,16
Jawa Barat	2,41	1,93	2,88	10,05	68,71	67,53	69,89	0,88
Jawa Tengah	2,10	1,84	2,37	6,49	73,55	72,78	74,31	0,53
DI Yogyakarta	3,55	2,55	4,55	14,33	78,12	76,26	79,98	1,21
Jawa Timur	1,25	1,06	1,44	7,93	74,50	73,76	75,25	0,51
Banten	1,11	0,11	2,10	45,80	70,28	67,85	72,70	1,76
Bali	1,02	0,60	1,44	20,79	87,13	85,75	88,51	0,81
Nusa Tenggara Barat	3,23	2,06	4,40	18,55	69,60	67,21	71,98	1,75
Nusa Tenggara Timur	1,89	1,42	2,35	12,53	78,62	77,28	79,96	0,87
Kalimantan Barat	2,38	1,65	3,12	15,75	75,30	73,30	77,31	1,36
Kalimantan Tengah	1,40	0,79	2,01	22,34	75,85	73,48	78,23	1,60
Kalimantan Selatan	2,03	1,38	2,69	16,36	81,54	79,81	83,28	1,08
Kalimantan Timur	1,61	0,86	2,36	23,78	78,92	76,48	81,36	1,58
Kalimantan Utara	0,94	0,29	1,59	35,29	78,04	74,08	81,99	2,59
Sulawesi Utara	3,03	2,23	3,84	13,50	76,77	75,06	78,47	1,13
Sulawesi Tengah	1,58	0,98	2,18	19,38	73,97	71,81	76,12	1,49
Sulawesi Selatan	1,96	1,54	2,38	10,93	79,12	77,81	80,43	0,85
Sulawesi Tenggara	4,15	2,96	5,33	14,54	74,22	72,02	76,42	1,51
Gorontalo	1,34	0,58	2,11	29,12	69,45	66,35	72,56	2,28
Sulawesi Barat	1,26	0,59	1,93	26,99	79,45	76,49	82,41	1,90
Maluku	2,46	1,44	3,49	21,22	71,71	69,21	74,21	1,78
Maluku Utara	1,59	0,77	2,42	26,40	73,02	70,43	75,61	1,81
Papua Barat	1,61	0,66	2,55	29,98	77,03	72,79	81,26	2,80
Papua Barat Daya	1,12	0,21	2,04	41,68	79,73	75,73	83,73	2,56
Papua	1,54	0,70	2,37	27,69	80,02	77,10	82,93	1,86
Papua Selatan	NA	NA	NA	72,00	71,44	65,29	77,60	4,39
Papua Tengah	NA	NA	NA	58,60	83,06	78,92	87,20	2,54
Papua Pegunungan	1,46	0,24	2,67	42,55	78,21	73,07	83,35	3,35
Indonesia	1,93	1,80	2,05	3,25	74,07	73,72	74,41	0,24

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



BAB 5

KETENAGAKERJAAN

<https://www.pps.go.id>

KETENAGAKERJAAN

Penduduk lanjut usia selama ini identik dengan penurunan tingkat kesehatan dan tingkat partisipasi di pasar kerja. Namun demikian, masih terdapat banyak lansia potensial yang mampu berdaya guna. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut usia dikatakan potensial jika masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Di sisi lain, keberadaan lansia dalam pasar kerja tidak hanya mencerminkan kemampuan lansia untuk tetap bekerja, namun dapat juga dimaknai sebagai rendahnya tingkat kesejahteraan lansia sehingga mereka terpaksa masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan lansia potensial dalam berbagai aktivitas produktif merupakan salah satu upaya untuk menunjang kemandirian lansia, baik dari aspek ekonomi, psikologi, sosial, budaya, dan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya informasi ketenagakerjaan lansia untuk penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang tepat, sehingga upaya pemberdayaan lansia potensial dapat terlaksana dengan baik.

5.1 Lansia Bekerja

Menurut Ehrenberg dan Smith (2012) pengalokasian waktu untuk memilih bekerja atau waktu luang (*leisure*) dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu biaya kesempatan, tingkat kesejahteraan, dan preferensi. Keputusan seseorang masuk dalam pasar tenaga kerja atau tidak sangat bergantung pada *reservation wage* yang dimiliki (Borjas 2016). Jika tingkat upah yang ditawarkan melebihi tingkat upah minimum yang diharapkan (*reservation wage*), maka seseorang akan masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Selanjutnya, Becker (1965) mengaitkan keputusan bekerja dengan teori alokasi waktu yakni ketika tenaga kerja memutuskan untuk bekerja, maka harus mengorbankan waktu luangnya untuk bekerja.



Terdapat banyak alasan yang melatarbelakangi lansia untuk tetap bekerja, salah satunya adalah keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketidaktersediaan *non-labor income* seperti jaminan pensiun menuntut lansia untuk tetap bekerja (Jamalludin 2021). Lebih jauh, Wirakartakusumah dan Anwar (1994) dalam Junaidi *et al.* (2017) menjelaskan beberapa faktor yang memengaruhi lansia tetap bekerja antara lain masih kuat secara fisik dan mental, adanya desakan ekonomi, serta motif aktualisasi diri atau emosi.

Menjadi lansia yang sehat dan aktif merupakan dambaan semua orang. Dengan bekerja, seorang lansia dapat dianggap mandiri dan berdaya guna. Dalam beberapa tahun terakhir, persentase lansia bekerja cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun 2015 hingga tahun 2024. Dalam kurun waktu satu dekade tersebut, persentase lansia yang bekerja naik sebesar 8,79 persen poin, dari 46,53 persen di tahun 2015 menjadi 55,32 persen pada tahun 2024 (Gambar 5.1).

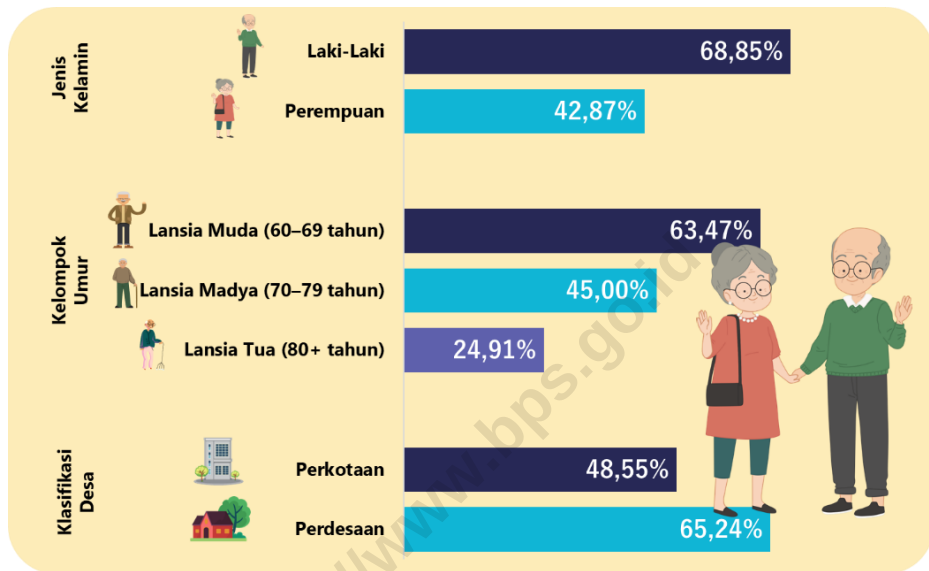


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2015–2024

Gambar 5.1 Persentase Lansia Bekerja, 2015–2024

Idealnya, lansia yang bekerja memiliki pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi fisiknya. Hal tersebut erat kaitannya dengan pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-3 yaitu menjamin kehidupan yang

sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk dari semua usia termasuk salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk usia lanjut. Lansia aktif atau *active ageing* tidak hanya mencakup lansia yang masih bekerja, namun juga termasuk lansia yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan (Adioetomo dkk. 2018, 298).

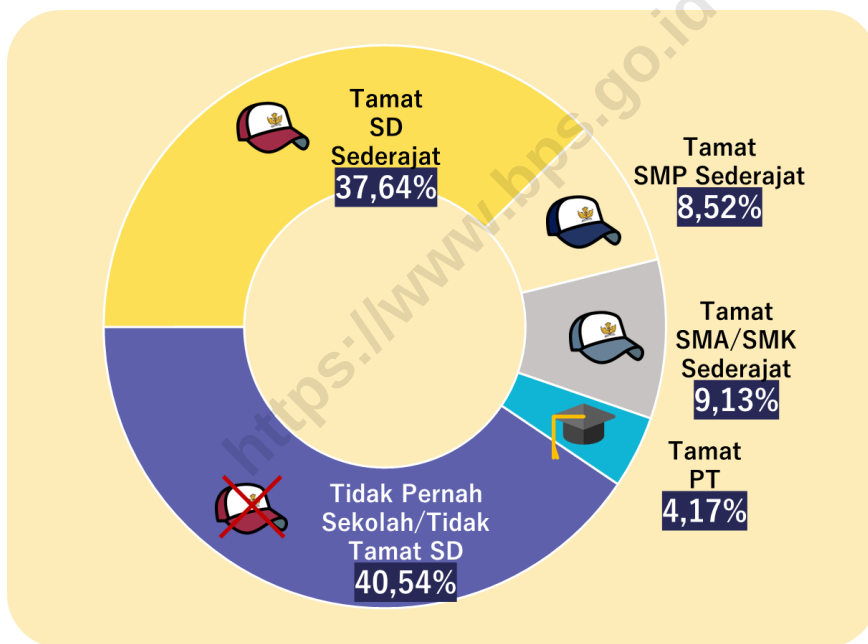


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

Gambar 5.2 Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik, 2024

Berdasarkan karakteristiknya, Gambar 5.2 menunjukkan bahwa persentase lansia laki-laki yang bekerja jauh lebih besar daripada lansia perempuan, yaitu 68,85 persen berbanding 42,87 persen. Selanjutnya, menurut klasifikasi desa, persentase lansia di perdesaan yang bekerja lebih besar dibandingkan dengan lansia di perkotaan, yaitu 65,24 persen berbanding 48,55 persen. Proses menjadi tua bersifat alami yang pada umumnya antara lain diiringi dengan kemunduran kapasitas fisik (Brown 1996 dalam Adioetomo dkk. 2018). Hal tersebut menyebabkan produktivitas lansia akan cenderung menurun seiring dengan bertambahnya usia. Lansia tua (kelompok umur 80 tahun ke atas) yang bekerja mempunyai persentase terkecil di antara kelompok umur yang lain. Faktor kesehatan dan kondisi fisik dapat menjadi penyebab utama dari penurunan produktivitas lansia.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin tinggi tingkat pendidikan lansia maka persentase lansia yang bekerja cenderung semakin rendah. Hal tersebut mengingat lansia yang berpendidikan rendah umumnya terpaksa harus bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu saja, tanpa memikirkan adanya jaminan hari tua (Affandi 2009). Terlihat dari Gambar 5.3 bahwa tingkat pendidikan lansia bekerja didominasi oleh lansia tidak tamat SD sederajat dan tamat SD sederajat. Data Sakernas Agustus 2024 tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 40,54 persen lansia bekerja tidak tamat SD sederajat (termasuk juga lansia yang tidak pernah sekolah), dan 37,64 persen lansia bekerja tamat SD sederajat.



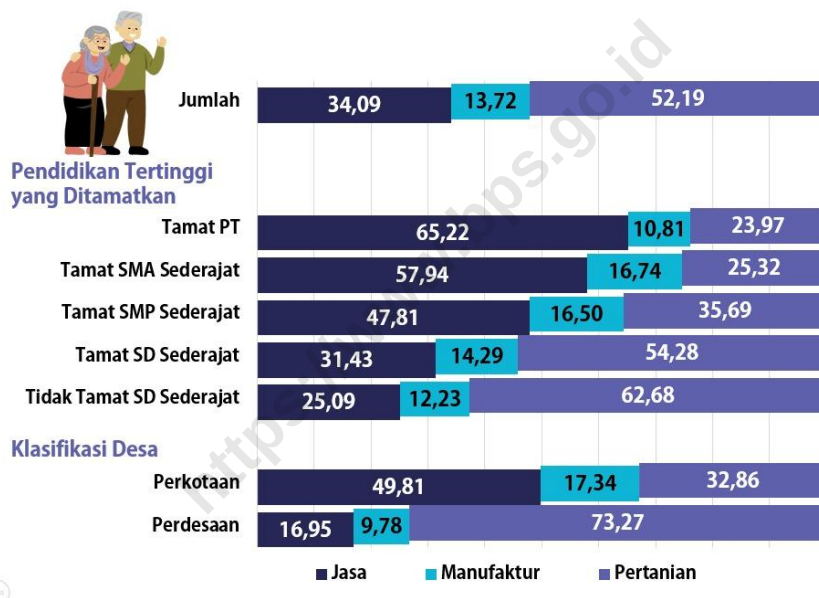
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

Gambar 5.3 Persentase Lansia Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2024

5.2 Karakteristik Pekerja Lansia

Gambar 5.4 menunjukkan pada tahun 2024, lapangan usaha sektor pertanian menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja lansia, yaitu sebesar 52,19 persen. Sektor tersebut cenderung membutuhkan kekuatan fisik dan sedikit konsentrasi, serta tidak mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu, sehingga lebih banyak lansia yang berpendidikan rendah terserap

pada lapangan usaha ini. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Jamalludin (2021) yang menyebutkan bahwa lansia yang tetap bekerja cenderung berasal dari pekerja yang sebelumnya bekerja dengan jenis pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik dan sedikit konsentrasi. Mayoritas lansia di perdesaan bekerja di sektor pertanian, sedangkan lansia di perkotaan lebih banyak yang bekerja di sektor jasa dan manufaktur. Lebih lanjut, berdasarkan tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan lansia maka semakin tinggi pula tingkat partisipasinya di sektor jasa dan semakin rendah tingkat partisipasi di sektor pertanian (Gambar 5.4).

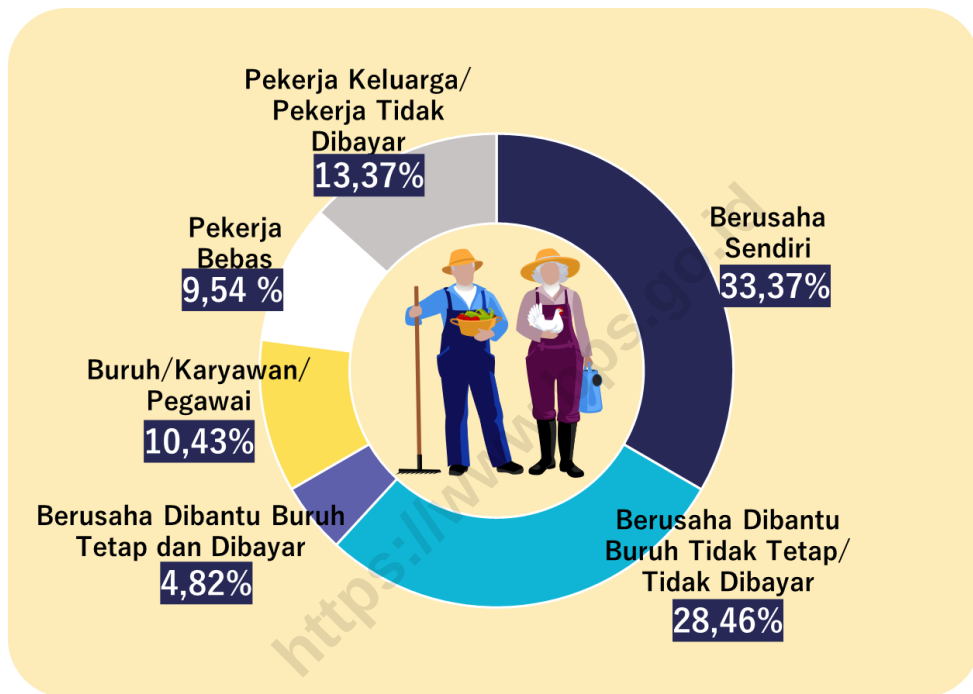


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

Gambar 5.4 Persentase Lansia Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, Tingkat Pendidikan, dan Klasifikasi Desa, 2024

Status pekerjaan dari lansia bekerja memberikan gambaran tentang kedudukan lansia dalam pekerjaan dan seberapa besar peran aktifnya dalam kegiatan ekonomi. Hasil Sakernas Agustus 2024 menunjukkan bahwa persentase lansia yang bekerja dengan status berusaha sendiri sebesar 33,37 persen, berusaha/bekerja dibantu buruh tidak dibayar sebesar 28,46 persen, dan dibantu buruh dibayar sebesar 4,82 persen (Gambar 5.5). Komposisi status pekerjaan lansia tersebut mencerminkan bahwa sekitar 60 dari 100 lansia

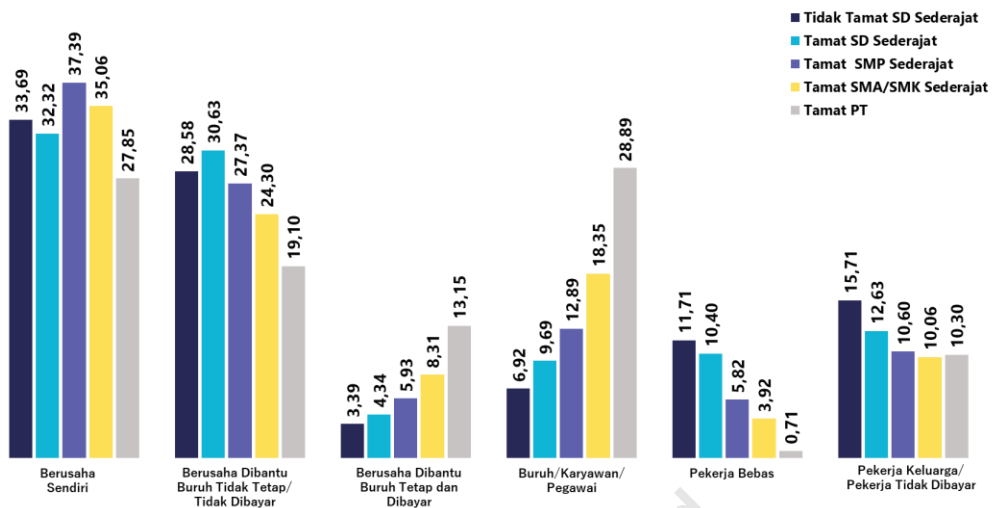
memiliki tingkat kemandirian dalam kegiatan ekonomi dengan berusaha sendiri baik dengan atau tanpa buruh. Namun kondisi ini juga mencerminkan bahwa pekerjaan lansia memiliki risiko yang harus dia tanggung sendiri dalam posisinya sebagai pengusaha. Di sisi lain, persentase lansia yang bekerja sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar juga tidak sedikit, yaitu sebesar 13,37 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

Gambar 5.5 Persentase Lansia Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2024

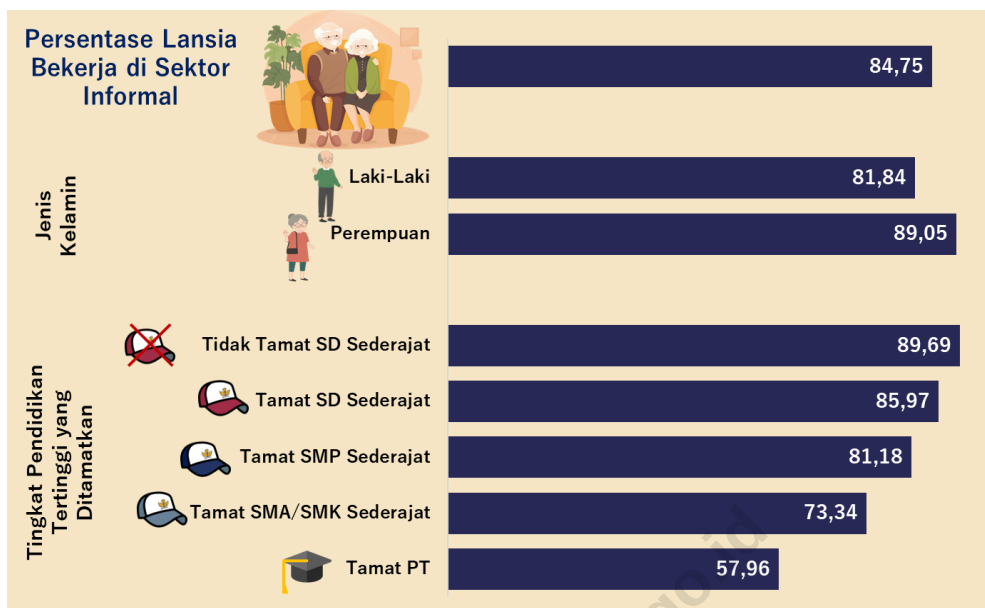
Selanjutnya, pada Gambar 5.6 menunjukkan bahwa pada status pekerjaan berusaha sendiri diisi oleh lansia dengan karakteristik pendidikan yang beragam. Sementara itu, pada status pekerjaan buruh/karyawan lebih banyak menyerap tenaga kerja lansia berpendidikan menengah ke atas, demikian pula untuk status pekerjaan berusaha dibantu buruh dibayar. Sedangkan status berusaha dibantu buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar lebih banyak didominasi oleh lansia berpendidikan SMP ke bawah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

Gambar 5.6 Persentase Lansia Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan, 2024

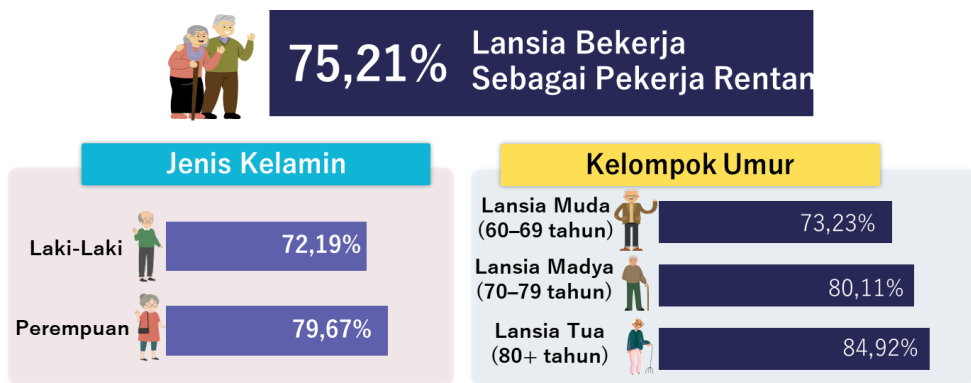
Pekerja informal mencakup mereka yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Mayoritas lansia yang bekerja terserap dalam sektor informal tersebut. Kondisi tersebut terlihat dari hasil Sakernas Agustus 2024 yang menunjukkan sebanyak 84,75 persen pekerja lansia bekerja di sektor informal, dan didominasi oleh lansia berpendidikan rendah (Gambar 5.7). Hal tersebut menggambarkan bahwa sektor informal yang banyak digeluti oleh pekerja lansia tidak mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu yang juga menjadi gambaran bahwa sebagian besar lansia bekerja sebagai pekerja yang rentan, tanpa perlindungan ketenagakerjaan, kontrak pekerjaan, maupun keuntungan atau imbalan yang layak.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

Gambar 5.7 Persentase Lansia Bekerja di Sektor Informal Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan, 2024

Jenis pekerjaan rentan mencakup mereka yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, dan pekerja keluarga. Lansia sebagai pekerja rentan memiliki risiko tinggi terhadap kerentanan ekonomi (*high economic risk*) dan berada dalam *decent work deficit*, yaitu tidak cukupnya kesempatan kerja, tidak memadainya perlindungan sosial, penyangkalan hak atas pekerjaan, dan kekurangan dalam dialog sosial. Partisipasi pekerja rentan dalam pasar tenaga kerja menjadikan kesejahteraannya terancam karena sulitnya akses ke pekerjaan yang layak dan memenuhi persyaratan ke norma sosial dasar, bukan karena kurangnya kapasitas mereka atau kemauan untuk memperbaikinya (Saunders 2006).

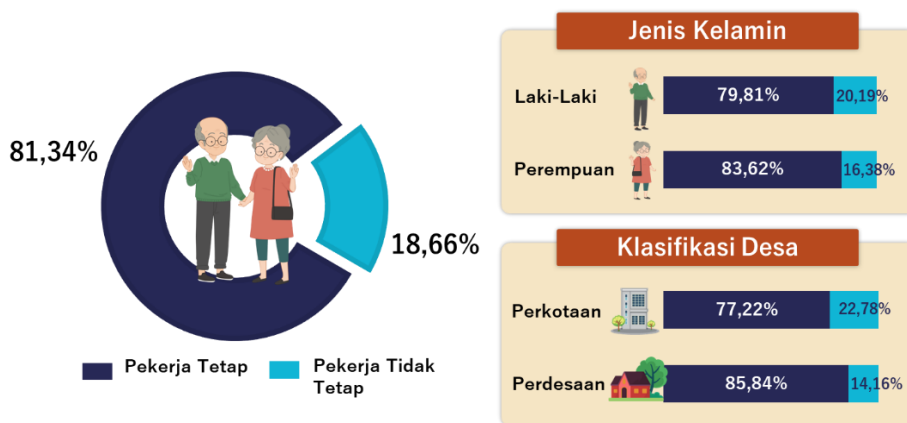


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

Gambar 5.8 Persentase Lansia Bekerja Sebagai Pekerja Rentan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2024

Sakernas Agustus 2024 mencatat sebesar 75,21 persen lansia bekerja sebagai pekerja rentan (Gambar 5.8). Artinya, sekitar tiga dari empat lansia bekerja dengan risiko tinggi untuk mengalami kerentanan ekonomi. Persentase lansia perempuan yang bekerja sebagai pekerja rentan lebih tinggi daripada lansia laki-laki. Berdasarkan kelompok umur, semakin bertambah usia pekerja lansia, semakin banyak juga lansia yang bekerja sebagai pekerja rentan. Hal yang sebenarnya ironis mengingat kondisi fisik lansia semakin membutuhkan perhatian khusus seiring penambahan usianya.

Pekerja tidak tetap (*precarious employment*) mencakup mereka yang bekerja sebagai pekerja bebas pertanian/nonpertanian, buruh dengan kontrak kerja jangka waktu tertentu, dan buruh dengan kontrak kerja lisan. Umumnya, *precarious employment* bekerja dalam jangka waktu pendek dan tidak terlindungi oleh jaminan sosial. Dari gambar di bawah tampak bahwa persentase pekerja lansia yang termasuk *precarious employment* sebesar 18,66 persen, di mana *precarious employment* pada pekerja lansia laki-laki lebih tinggi daripada pekerja lansia perempuan (Gambar 5.9).



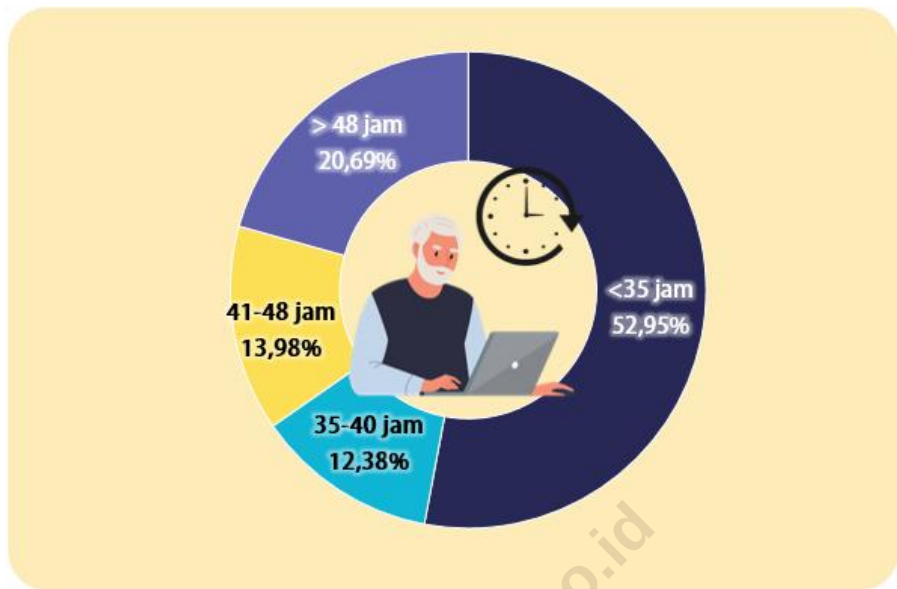
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

Gambar 5.9 Persentase Lansia Bekerja yang Termasuk *Precarious Employment* Menurut Karakteristik, 2024

5.3 Jam Kerja Lansia

Selain lapangan usaha dan status pekerjaan, jam kerja juga menjadi aspek penting berikutnya dalam pekerjaan layak (ILO 2013). Namun seiring dengan penurunan kondisi fisik, lansia selayaknya tidak bekerja secara berlebihan dari segi waktu. Jam kerja yang berlebih juga akan menurunkan produktivitas pekerjaan (ILO 2011). Menurut ILO, jumlah jam kerja maksimal dalam seminggu adalah 48 jam. Apabila melebihi batas tersebut, maka pekerjaan dianggap tidak layak dari segi jam kerja.

Jam kerja berlebih dapat diamati melalui dua pendekatan. Menurut Konvensi *International Labour Organization* (ILO), jam kerja berlebih didefinisikan sebagai bekerja lebih dari 48 jam per minggu. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jam kerja maksimum adalah selama 40 jam per minggu. Pada tahun 2024, sebanyak 20,69 persen pekerja lansia bekerja dengan jam kerja berlebih (*excessive hours*) menurut konsep ILO. Adapun pekerja lansia yang bekerja dengan jam kerja berlebih menurut konsep 40 jam per minggu adalah sebesar 34,67 persen. Lansia tentu tidak sepatutnya bekerja berlebihan. Selain itu, jam kerja berlebih akan mengancam kondisi fisik dan mental lansia dalam jangka panjang, serta menurunkan produktivitas dalam bekerja (Anker dkk. 2002).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

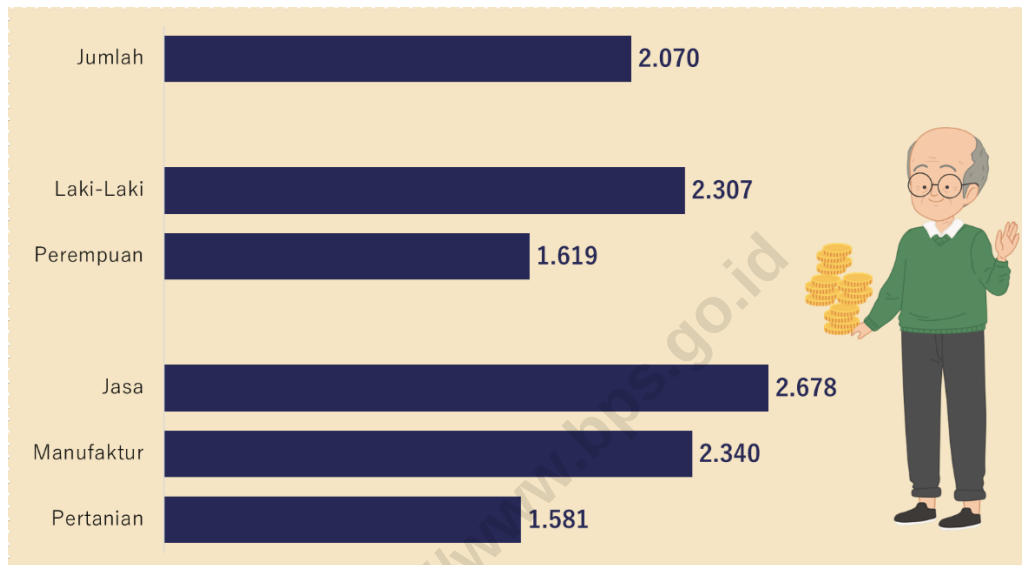
Gambar 5.10 Persentase Lansia Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruh Pekerjaan dalam Seminggu, 2024

5.4 Penghasilan Lansia

Lansia memiliki hak untuk memperoleh pendapatan/upah/gaji yang layak guna menjamin kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ditambah lagi, lansia memerlukan biaya untuk perawatan kesehatan dikarenakan kondisi fisik mereka yang menurun. Pendapatan yang mencukupi adalah hal penting dalam memastikan kesejahteraan para pekerja dan merupakan komponen penting dalam pekerjaan layak, termasuk bagi lansia.

Pada tahun 2024, rata-rata penghasilan dari lansia bekerja sebesar 2,070 juta rupiah per bulan (Gambar 5.11). Rata-rata penghasilan lansia bekerja dihitung dari penghasilan lansia yang bekerja dengan status berusaha sendiri, buruh/karyawan, dan pekerja bebas baik di pertanian maupun nonpertanian. Apabila menilik dari lapangan usahanya, lansia yang bekerja pada lapangan usaha sektor pertanian memiliki penghasilan paling rendah dibanding lapangan usaha lainnya, yaitu sebesar 1,581 juta rupiah per bulan. Analisis berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa rata-rata penghasilan lansia laki-laki bekerja lebih besar daripada lansia perempuan, yaitu 2,307 juta rupiah

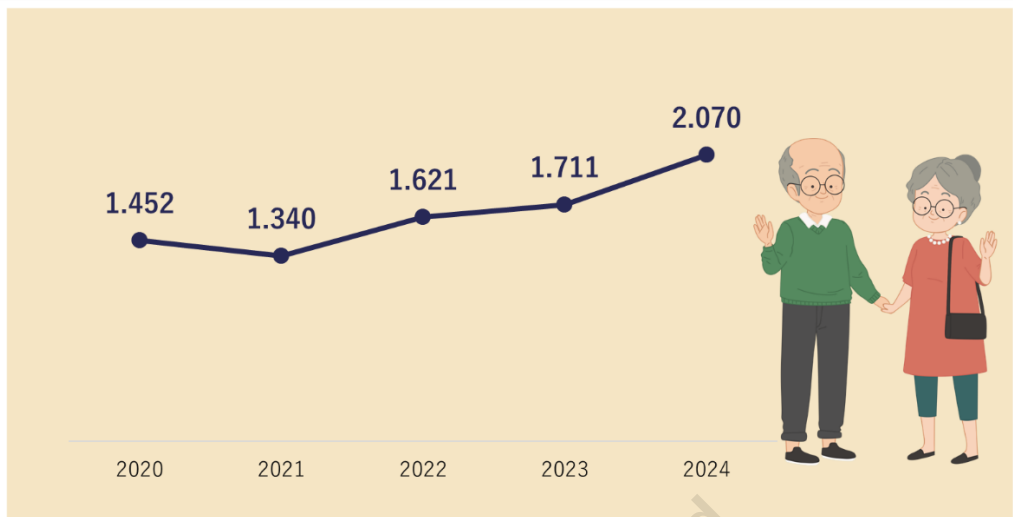
berbanding 1,619 juta rupiah per bulan. Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan masih menjadi isu yang penting. Kondisi tersebut sejalan dengan laporan pada artikel CNBCIndonesia.com, yang menyebutkan bahwa persentase kesenjangan upah menurut jenis kelamin (*gender wage gap*) di Indonesia sebesar 22,09 persen pada 2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

Gambar 5.11 Rata-rata Penghasilan Lansia Bekerja dalam Sebulan Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha (000 rupiah), 2024

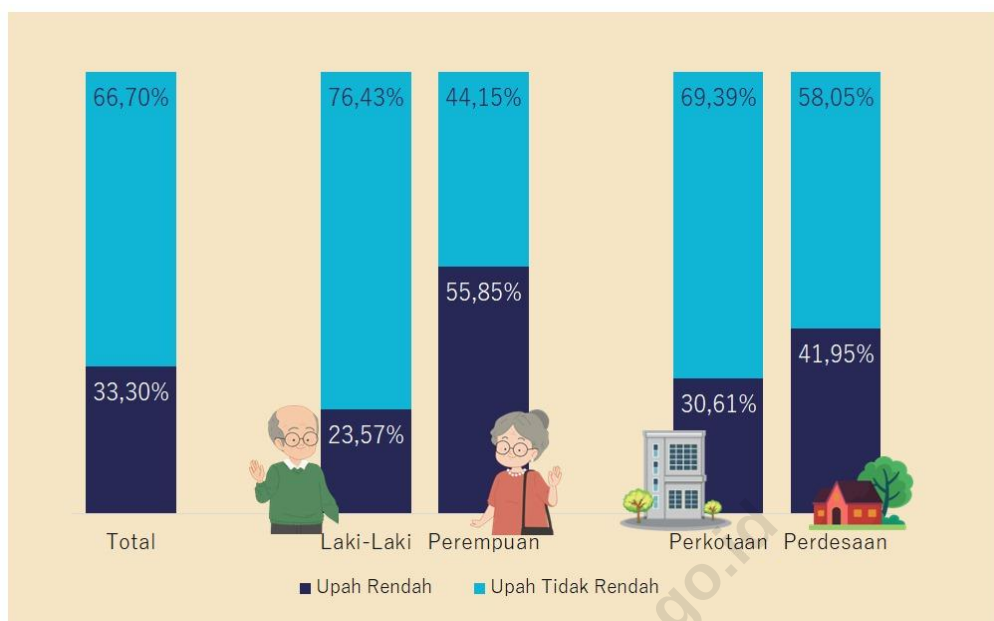
Apabila melihat tren angkanya, rata-rata penghasilan lansia bekerja mengalami fluktuatif selama periode tahun 2020–2024. Rata-rata penghasilan lansia bekerja sebesar 1,452 juta rupiah per bulan pada tahun 2020, kemudian menurun di tahun 2021 menjadi 1,340 juta rupiah per bulan, angka tersebut naik kembali di tahun 2022, 2023, dan 2024 menjadi 1,621 juta rupiah, 1,711 juta rupiah, dan 2,070 juta rupiah (Gambar 5.12).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020–2024

Gambar 5.12 Rata-rata Penghasilan Lansia Bekerja (000 rupiah), 2020–2024

Upah rendah ditentukan sebagai upah yang kurang dari dua per tiga nilai median upah dari seluruh pekerja (ILO 2011). Upah rendah yang disajikan pada publikasi ini terbatas untuk status pekerjaan buruh/karyawan. Hasil Sakernas Agustus 2024 menunjukkan bahwa sekitar 33,30 persen pekerja lansia memiliki upah yang rendah. Analisis lebih lanjut memperlihatkan upah rendah ini banyak dialami oleh pekerja lansia perempuan dan pekerja lansia di perdesaan. Lebih dari separuh pekerja lansia perempuan (55,85 persen) bekerja dengan upah rendah dan sekitar dua dari lima pekerja lansia di perdesaan (41,95 persen) yang bekerja dengan upah rendah (Gambar 5.13).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

Gambar 5.13 Persentase Lansia Bekerja dengan Upah Rendah Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Desa, 2024

Tabel 5.1 Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2024

Karakteristik	Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Jumlah
	Tidak Tamat SD Sederajat	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA/SMK Sederajat	Perguruan Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	40,54	37,64	8,52	9,13	4,17	100,00
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	34,27	39,12	9,90	11,59	5,11	100,00
Perempuan	49,82	35,45	6,46	5,50	2,78	100,00
Kelompok Umur						
Lansia Muda (60–69 tahun)	36,97	38,51	9,31	10,38	4,84	100,00
Lansia Madya (70–79 tahun)	48,28	36,34	6,70	6,20	2,49	100,00
Lansia Tua (80+ tahun)	65,64	27,58	3,65	2,04	1,09	100,00
Status Disabilitas						
Nondisabilitas	40,24	37,74	8,57	9,23	4,22	100,00
Disabilitas	53,59	33,28	6,14	5,19	1,80	100,00
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	33,50	35,94	10,75	13,48	6,33	100,00
Perdesaan	48,22	39,48	6,08	4,39	1,82	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024



Tabel 5.2 Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Lapangan Usaha Utama, 2024

Karakteristik	Lapangan Usaha Utama			Jumlah
	Jasa	Manufaktur	Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	34,09	13,72	52,19	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	29,73	14,21	56,06	100,00
Perempuan	40,52	13,00	46,48	100,00
Kelompok Umur				
Lansia Muda (60–69 tahun)	35,78	14,48	49,75	100,00
Lansia Madya (70–79 tahun)	30,42	11,58	58,00	100,00
Lansia Tua (80+ tahun)	22,30	11,85	65,85	100,00
Status Disabilitas				
Nondisabilitas	34,10	13,74	52,16	100,00
Disabilitas	33,39	12,84	53,77	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Perguruan Tinggi	65,22	10,81	23,97	100,00
SMA/SMK Sederajat	57,94	16,74	25,32	100,00
SMP Sederajat	47,81	16,50	35,69	100,00
SD Sederajat	31,43	14,29	54,28	100,00
Tidak Tamat SD Sederajat	25,09	12,23	62,68	100,00
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	49,81	17,34	32,86	100,00
Perdesaan	16,95	9,78	73,27	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024



Tabel 5.3 Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Status Pekerjaan Utama, 2024

Karakteristik	Status Pekerjaan Utama		
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar	Berusaha Dibantu Buruh Tetap dan Dibayar
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	33,37	28,46	4,82
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	31,78	35,65	5,94
Perempuan	35,73	17,83	3,16
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60–69 tahun)	32,34	27,09	4,76
Lansia Madya (70–79 tahun)	35,79	32,05	4,99
Lansia Tua (80+ tahun)	39,33	33,97	4,92
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	33,22	28,44	4,83
Disabilitas	39,96	29,40	4,51
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Perguruan Tinggi	27,85	19,10	13,15
SMA/SMK Sederajat	35,06	24,30	8,31
SMP Sederajat	37,39	27,37	5,93
SD Sederajat	32,32	30,63	4,34
Tidak Tamat SD Sederajat	33,69	28,58	3,39
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	36,37	22,17	5,39
Perdesaan	30,10	35,32	4,20



Lanjutan Tabel 5.3

Karakteristik	Status Pekerjaan Utama			Jumlah
	Buruh/ Karyawan/ Pegawai	Pekerja Bebas ¹	Pekerja Keluarga/ Pekerja Tidak Dibayar	
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	10,43	9,54	13,37	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	12,22	9,65	4,76	100,00
Perempuan	7,79	9,38	26,11	100,00
Kelompok Umur				
Lansia Muda (60–69 tahun)	12,00	10,01	13,80	100,00
Lansia Madya (70–79 tahun)	6,40	8,50	12,27	100,00
Lansia Tua (80+ tahun)	3,73	6,43	11,61	100,00
Status Disabilitas				
Nondisabilitas	10,57	9,58	13,36	100,00
Disabilitas	4,32	7,84	13,97	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Perguruan Tinggi	28,89	0,71	10,30	100,00
SMA/SMK Sederajat	18,35	3,92	10,06	100,00
SMP Sederajat	12,89	5,82	10,60	100,00
SD Sederajat	9,69	10,40	12,63	100,00
Tidak Tamat SD Sederajat	6,92	11,71	15,71	100,00
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	15,26	9,64	11,18	100,00
Perdesaan	5,17	9,44	15,77	100,00

Catatan:

¹ Pekerja Bebas mencakup pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024



Tabel 5.4 Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Lapangan Usaha Utama, 2024

Karakteristik	Lapangan Usaha Utama		Jumlah
	Formal ¹	Informal ²	
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	15,25	84,75	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	18,16	81,84	100,00
Perempuan	10,95	89,05	100,00
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60–69 tahun)	16,76	83,24	100,00
Lansia Madya (70–79 tahun)	11,39	88,61	100,00
Lansia Tua (80+ tahun)	8,65	91,35	100,00
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	15,40	84,60	100,00
Disabilitas	8,83	91,17	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Perguruan Tinggi	42,04	57,96	100,00
SMA/SMK Sederajat	26,66	73,34	100,00
SMP Sederajat	18,82	81,18	100,00
SD Sederajat	14,03	85,97	100,00
Tidak Tamat SD Sederajat	10,31	89,69	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	20,64	79,36	100,00
Perdesaan	9,37	90,63	100,00

Catatan:

¹ Pekerja Formal: seseorang yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai.

² Pekerja Informal: seseorang yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, serta pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024



Tabel 5.5 Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Status Pekerjaan, 2024

Karakteristik	Status Pekerjaan		Jumlah
	Pekerja Tetap	Pekerja Tidak Tetap	
(1)	(2)	(3)	(5)
Total	81,34	18,66	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	79,81	20,19	100,00
Perempuan	83,62	16,38	100,00
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60–69 tahun)	79,57	20,43	100,00
Lansia Madya (70–79 tahun)	85,75	14,25	100,00
Lansia Tua (80+ tahun)	89,99	10,01	100,00
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	81,18	18,82	100,00
Disabilitas	88,42	11,58	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Perguruan Tinggi	83,41	16,59	100,00
SMA/SMK Sederajat	80,83	19,17	100,00
SMP Sederajat	82,78	17,22	100,00
SD Sederajat	80,54	19,46	100,00
Tidak Tamat SD Sederajat	81,70	18,30	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	77,22	22,78	100,00
Perdesaan	85,84	14,16	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024



Tabel 5.6 Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Jam Kerja Seluruh Pekerjaan dalam Seminggu, 2024

Karakteristik	Jam Kerja Seluruh Pekerjaan				Rata-Rata Jam Kerja
	< 35 Jam	35–40 Jam	41–48 Jam	> 48 Jam	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	52,95	12,38	13,98	20,69	32,82
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	47,26	13,24	16,61	22,89	34,81
Perempuan	61,37	11,11	10,09	17,42	29,87
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60–69 tahun)	49,55	12,61	15,20	22,65	34,38
Lansia Madya (70–79 tahun)	60,83	11,79	11,12	16,26	29,24
Lansia Tua (80+ tahun)	73,41	11,46	7,03	8,09	23,25
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	52,51	12,47	14,13	20,89	33,03
Disabilitas	71,98	8,38	7,52	12,12	23,52
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Perguruan Tinggi	55,60	16,19	11,20	17,00	30,56
SMA/SMK Sederajat	44,33	12,93	16,46	26,27	36,11
SMP Sederajat	46,38	11,55	16,42	25,65	35,71
SD Sederajat	50,40	12,09	15,28	22,23	33,95
Tidak Tamat SD Sederajat	58,38	12,30	11,99	17,33	30,64
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	47,31	12,69	15,37	24,63	35,07
Perdesaan	59,10	12,04	12,46	16,39	30,35

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024



Tabel 5.7 Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Penghasilan dalam Sebulan, 2024

Karakteristik	Penghasilan ¹ dalam Sebulan				Rata-Rata Penghasilan
	< 1.000.000	1.000.000–1.999.999	2.000.000–2.999.999	≥ 3.000.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	36,40	28,50	14,88	20,23	2.070.193
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	29,61	28,42	17,52	24,44	2.306.997
Perempuan	49,33	28,63	9,85	12,19	1.618.920
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60–69 tahun)	32,80	29,28	16,02	21,90	2.185.048
Lansia Madya (70–79 tahun)	44,49	27,01	12,38	16,11	1.820.464
Lansia Tua (80+ tahun)	58,04	21,92	7,65	12,39	1.323.268
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	36,03	28,58	15,00	20,39	2.073.787
Disabilitas	52,30	24,92	9,79	12,99	1.915.067
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Perguruan Tinggi	15,84	16,62	11,65	55,89	6.061.451
SMA/SMK Sederajat	19,41	23,66	18,04	38,89	3.472.771
SMP Sederajat	26,26	27,64	18,26	27,84	2.521.119
SD Sederajat	35,14	29,84	16,50	18,52	1.803.833
Tidak Tamat SD Sederajat	46,20	29,85	12,17	11,78	1.452.079
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	31,33	28,47	15,37	24,83	2.475.195
Perdesaan	42,22	28,52	14,32	14,93	1.604.698
Lapangan Usaha Utama					
Jasa	29,06	29,01	15,09	26,84	2.678.134
Manufaktur	33,83	23,48	17,48	25,21	2.339.653
Pertanian	42,10	29,56	14,00	14,33	1.581.377

Catatan:

¹ Penghasilan diperoleh dari penduduk lanjut usia yang bekerja dengan status:

1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar
4. Buruh/karyawan/pegawai
5. Pekerja bebas

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024



Tabel 5.8 Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Median Upah, 2024

Karakteristik	Median Upah ¹		Jumlah
	< $\frac{2}{3}$ Median	$\geq \frac{2}{3}$ Median	
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	33,30	66,70	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	23,57	76,43	100,00
Perempuan	55,85	44,15	100,00
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60–69 tahun)	30,52	69,48	100,00
Lansia Madya (70–79 tahun)	48,42	51,58	100,00
Lansia Tua (80+ tahun)	51,90	48,10	100,00
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	33,02	66,98	100,00
Disabilitas	62,27	37,73	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Perguruan Tinggi	14,14	85,86	100,00
SMA/SMK Sederajat	22,21	77,79	100,00
SMP Sederajat	23,98	76,02	100,00
SD Sederajat	36,03	63,97	100,00
Tidak Tamat SD Sederajat	48,25	51,75	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	30,61	69,39	100,00
Perdesaan	41,95	58,05	100,00
Lapangan Usaha Utama			
Jasa	36,18	63,82	100,00
Manufaktur	21,94	78,06	100,00
Pertanian	45,31	54,69	100,00

Catatan:

¹ Upah diperoleh dari penduduk lanjut usia yang bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024



Tabel 5.9 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2024

Provinsi	Tidak Tamat SD Sederajat	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA/SMK Sederajat	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	28,14	39,20	13,98	14,26	4,41
Sumatera Utara	26,69	37,15	15,54	15,37	5,24
Sumatera Barat	39,00	29,73	14,31	12,18	4,78
Riau	32,95	39,84	9,43	13,47	4,31
Jambi	41,72	36,60	8,32	10,57	2,79
Sumatera Selatan	42,06	38,45	8,18	8,11	3,20
Bengkulu	45,05	29,98	8,81	10,46	5,70
Lampung	43,96	39,29	7,89	5,99	2,86
Kep. Bangka Belitung	38,95	35,39	10,44	10,40	4,83
Kepulauan Riau	27,05	33,42	11,80	19,22	8,52
DKI Jakarta	13,42	33,95	19,89	21,25	11,49
Jawa Barat	33,19	47,23	7,40	7,94	4,25
Jawa Tengah	47,68	36,62	6,79	6,03	2,87
DI Yogyakarta	36,54	31,71	11,41	13,33	7,02
Jawa Timur	44,91	39,65	6,35	6,40	2,70
Banten	32,54	37,74	8,60	14,25	6,88
Bali	46,06	33,07	6,13	9,66	5,08
Nusa Tenggara Barat	65,70	18,54	3,47	7,42	4,87
Nusa Tenggara Timur	44,20	35,11	6,56	8,68	5,46
Kalimantan Barat	57,98	24,00	7,56	7,98	2,48
Kalimantan Tengah	34,92	36,40	10,04	11,99	6,64
Kalimantan Selatan	45,61	33,15	6,90	10,21	4,13
Kalimantan Timur	31,21	34,34	11,88	15,38	7,19
Kalimantan Utara	36,23	27,35	16,09	13,62	6,71
Sulawesi Utara	21,15	32,59	20,96	19,27	6,03
Sulawesi Tengah	28,97	45,44	10,86	9,99	4,74
Sulawesi Selatan	43,73	28,32	8,84	12,49	6,62
Sulawesi Tenggara	41,34	32,38	9,10	10,79	6,39
Gorontalo	47,32	30,92	6,48	10,84	4,44
Sulawesi Barat	55,70	25,64	7,55	7,19	3,92
Maluku	24,57	42,03	13,74	14,43	5,23
Maluku Utara	34,71	35,33	14,39	12,01	3,56
Papua Barat	45,52	24,76	9,60	15,55	4,58
Papua Barat Daya	38,98	27,75	13,95	14,06	5,26
Papua	32,29	28,19	15,30	18,19	6,04
Papua Selatan	48,56	30,79	7,61	9,16	3,89
Papua Tengah	59,41	20,35	11,63	7,22	1,39
Papua Pegunungan	78,87	11,09	4,03	4,97	NA
Indonesia	40,54	37,64	8,52	9,13	4,17

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024



Tabel 5.10 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama, 2024

Provinsi	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah
	Jasa	Manufaktur	Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	27,66	13,16	59,18	100,00
Sumatera Utara	35,81	11,12	53,07	100,00
Sumatera Barat	29,82	11,64	58,54	100,00
Riau	32,98	10,75	56,27	100,00
Jambi	24,36	7,28	68,36	100,00
Sumatera Selatan	27,09	8,12	64,79	100,00
Bengkulu	23,69	8,40	67,91	100,00
Lampung	24,88	9,97	65,14	100,00
Kep. Bangka Belitung	32,00	23,73	44,27	100,00
Kepulauan Riau	52,41	25,21	22,39	100,00
DKI Jakarta	83,01	16,37	NA	100,00
Jawa Barat	44,19	15,57	40,24	100,00
Jawa Tengah	28,97	14,53	56,50	100,00
DI Yogyakarta	36,06	15,68	48,25	100,00
Jawa Timur	30,16	12,70	57,14	100,00
Banten	45,85	17,37	36,78	100,00
Bali	33,90	26,76	39,34	100,00
Nusa Tenggara Barat	31,22	12,37	56,41	100,00
Nusa Tenggara Timur	15,78	13,17	71,05	100,00
Kalimantan Barat	21,71	7,49	70,80	100,00
Kalimantan Tengah	29,39	14,84	55,76	100,00
Kalimantan Selatan	36,00	10,56	53,44	100,00
Kalimantan Timur	48,02	16,45	35,52	100,00
Kalimantan Utara	35,57	16,15	48,28	100,00
Sulawesi Utara	40,65	16,19	43,16	100,00
Sulawesi Tengah	29,02	13,00	57,97	100,00
Sulawesi Selatan	32,95	11,49	55,56	100,00
Sulawesi Tenggara	28,22	12,69	59,08	100,00
Gorontalo	36,25	17,15	46,61	100,00
Sulawesi Barat	21,08	11,03	67,89	100,00
Maluku	32,31	18,57	49,12	100,00
Maluku Utara	22,08	31,51	46,41	100,00
Papua Barat	28,99	5,00	66,01	100,00
Papua Barat Daya	35,89	18,17	45,94	100,00
Papua	38,96	13,25	47,79	100,00
Papua Selatan	27,69	10,21	62,10	100,00
Papua Tengah	19,31	4,57	76,12	100,00
Papua Pegunungan	13,00	NA	86,57	100,00
Indonesia	34,09	13,72	52,19	100,00

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024



Tabel 5.11 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2024

Provinsi	Status Pekerjaan Utama		
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar	Berusaha Dibantu Buruh Tetap dan Dibayar
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	42,75	24,16	7,47
Sumatera Utara	35,13	25,76	9,29
Sumatera Barat	36,56	31,96	5,52
Riau	34,63	22,78	18,37
Jambi	34,79	27,73	13,42
Sumatera Selatan	31,65	32,66	4,57
Bengkulu	28,23	34,94	7,43
Lampung	31,78	36,12	4,99
Kep. Bangka Belitung	41,80	22,25	7,83
Kepulauan Riau	42,65	12,23	4,70
DKI Jakarta	44,08	11,79	7,40
Jawa Barat	31,67	26,18	4,84
Jawa Tengah	32,10	29,76	3,26
DI Yogyakarta	29,27	31,13	3,57
Jawa Timur	29,93	29,34	3,96
Banten	34,33	21,72	4,04
Bali	32,00	27,54	2,81
Nusa Tenggara Barat	33,69	34,86	2,43
Nusa Tenggara Timur	35,30	39,54	2,08
Kalimantan Barat	34,72	31,31	4,94
Kalimantan Tengah	47,12	22,06	6,31
Kalimantan Selatan	38,16	29,02	5,02
Kalimantan Timur	43,38	17,44	7,67
Kalimantan Utara	37,03	25,18	6,02
Sulawesi Utara	45,33	18,60	6,75
Sulawesi Tengah	37,81	32,63	5,76
Sulawesi Selatan	36,33	32,31	4,89
Sulawesi Tenggara	40,36	31,68	4,48
Gorontalo	38,60	29,14	3,21
Sulawesi Barat	34,65	41,15	1,89
Maluku	46,26	25,66	2,72
Maluku Utara	39,73	31,97	4,42
Papua Barat	42,76	24,49	1,75
Papua Barat Daya	46,79	28,29	NA
Papua	51,61	19,66	1,29
Papua Selatan	51,44	22,83	NA
Papua Tengah	31,08	33,11	0,62
Papua Pegunungan	23,66	46,63	NA
Indonesia	33,37	28,46	4,82



Lanjutan Tabel 5.11

Provinsi	Status Pekerjaan Utama		
	Buruh/Karyawan/ Pegawai	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga/ Pekerja Tidak Dibayar
(1)	(5)	(6)	(7)
Aceh	10,68	7,93	7,01
Sumatera Utara	12,69	4,86	12,27
Sumatera Barat	6,77	7,73	11,45
Riau	11,12	6,41	6,68
Jambi	8,77	5,64	9,65
Sumatera Selatan	11,15	3,68	16,29
Bengkulu	7,41	6,24	15,76
Lampung	6,59	7,89	12,63
Kep. Bangka Belitung	15,08	2,66	10,37
Kepulauan Riau	26,24	2,54	11,64
DKI Jakarta	25,15	3,57	8,01
Jawa Barat	11,99	15,95	9,38
Jawa Tengah	9,14	9,93	15,81
DI Yogyakarta	11,59	4,46	19,98
Jawa Timur	9,16	13,21	14,40
Banten	16,86	12,34	10,71
Bali	11,57	6,75	19,33
Nusa Tenggara Barat	7,20	7,07	14,77
Nusa Tenggara Timur	3,44	1,31	18,33
Kalimantan Barat	8,29	4,79	15,95
Kalimantan Tengah	11,42	4,96	8,14
Kalimantan Selatan	12,87	3,03	11,89
Kalimantan Timur	17,39	3,05	11,07
Kalimantan Utara	14,93	4,07	12,78
Sulawesi Utara	10,68	8,04	10,61
Sulawesi Tengah	7,11	5,43	11,27
Sulawesi Selatan	8,41	4,42	13,64
Sulawesi Tenggara	6,46	2,29	14,73
Gorontalo	10,39	6,05	12,60
Sulawesi Barat	5,35	3,31	13,64
Maluku	8,09	2,26	15,01
Maluku Utara	7,34	2,71	13,83
Papua Barat	13,79	NA	16,47
Papua Barat Daya	9,07	1,05	13,06
Papua	8,77	NA	18,51
Papua Selatan	10,06	3,05	10,25
Papua Tengah	1,42	1,44	32,34
Papua Pegunungan	2,36	NA	26,90
Indonesia	10,43	9,54	13,37

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

Tabel 5.12 Persentase Lansia Bekerja dengan Status Pekerja Tidak Tetap Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Pekerja Tidak Tetap
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	21,85	15,52	19,57	13,82	17,46
Sumatera Utara	21,26	10,05	18,65	12,48	15,92
Sumatera Barat	17,26	11,26	14,93	12,60	13,99
Riau	20,20	13,43	19,43	8,47	15,91
Jambi	19,52	11,17	15,91	9,19	13,66
Sumatera Selatan	20,33	10,97	16,01	10,16	13,81
Bengkulu	19,47	10,06	13,76	11,00	12,76
Lampung	18,55	11,48	14,67	11,52	13,61
Kep. Bangka Belitung	19,27	13,53	18,23	13,88	16,81
Kepulauan Riau	29,32	21,97	32,63	15,81	28,22
DKI Jakarta	24,94	–	29,61	18,20	24,94
Jawa Barat	27,93	23,38	27,11	26,11	26,74
Jawa Tengah	23,18	13,52	19,13	16,96	18,22
DI Yogyakarta	18,51	7,51	16,97	11,97	14,54
Jawa Timur	23,00	19,30	22,40	19,62	21,19
Banten	23,23	23,96	26,66	17,93	23,46
Bali	18,93	15,93	20,99	14,07	17,79
Nusa Tenggara Barat	12,84	14,01	14,13	12,59	13,44
Nusa Tenggara Timur	8,12	2,48	5,10	2,05	3,67
Kalimantan Barat	20,76	8,86	14,22	9,05	12,40
Kalimantan Tengah	16,86	14,77	18,23	10,48	15,63
Kalimantan Selatan	19,23	11,08	14,48	14,53	14,50
Kalimantan Timur	20,38	14,53	23,66	7,55	18,39
Kalimantan Utara	19,99	13,41	19,64	13,77	17,58
Sulawesi Utara	18,09	15,96	19,18	13,41	17,08
Sulawesi Tengah	15,61	9,86	13,38	8,20	11,52
Sulawesi Selatan	17,46	7,47	12,87	9,19	11,43
Sulawesi Tenggara	8,47	7,92	8,66	7,25	8,09
Gorontalo	19,59	12,51	16,89	14,10	15,79
Sulawesi Barat	14,80	6,81	8,54	8,07	8,35
Maluku	11,77	5,16	8,73	5,38	7,33
Maluku Utara	11,59	7,33	11,01	3,44	8,23
Papua Barat	13,75	11,15	12,16	NA	11,97
Papua Barat Daya	8,59	8,83	13,37	NA	8,72
Papua	7,85	3,44	10,09	NA	5,99
Papua Selatan	22,65	7,75	18,16	4,56	12,29
Papua Tengah	10,11	NA	3,44	NA	2,48
Papua Pegunungan	NA	1,28	1,97	NA	1,26
Indonesia	22,78	14,16	20,19	16,38	18,66

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024



Tabel 5.13 Persentase Lansia Bekerja di Sektor Formal Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Sektor Formal
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	25,25	15,01	20,50	14,09	18,15
Sumatera Utara	29,07	14,19	26,48	16,32	21,98
Sumatera Barat	17,24	8,15	14,47	9,06	12,29
Riau	28,98	29,79	31,83	24,55	29,49
Jambi	24,73	21,11	25,67	15,28	22,19
Sumatera Selatan	27,59	10,54	18,49	11,11	15,72
Bengkulu	22,06	11,92	16,97	11,06	14,83
Lampung	18,93	8,42	13,68	7,45	11,59
Kep. Bangka Belitung	26,22	18,52	26,63	15,24	22,92
Kepulauan Riau	33,34	17,28	35,90	16,97	30,94
DKI Jakarta	32,55	–	36,80	26,42	32,55
Jawa Barat	19,26	9,90	20,33	10,84	16,82
Jawa Tengah	18,49	6,61	14,12	10,00	12,39
DI Yogyakarta	20,98	4,85	17,29	12,90	15,16
Jawa Timur	17,53	8,52	15,41	10,15	13,12
Banten	25,87	9,87	25,05	13,74	20,90
Bali	17,09	9,94	18,14	10,00	14,38
Nusa Tenggara Barat	13,08	6,35	11,43	7,36	9,62
Nusa Tenggara Timur	16,23	2,66	7,43	3,37	5,52
Kalimantan Barat	23,14	9,04	17,08	6,17	13,23
Kalimantan Tengah	19,56	16,44	20,95	11,33	17,72
Kalimantan Selatan	25,67	12,26	19,83	14,96	17,89
Kalimantan Timur	27,72	19,92	31,16	12,52	25,06
Kalimantan Utara	21,36	20,23	25,12	13,19	20,94
Sulawesi Utara	19,96	14,60	19,81	13,24	17,43
Sulawesi Tengah	23,60	8,51	15,86	7,52	12,86
Sulawesi Selatan	21,96	7,61	16,83	7,81	13,30
Sulawesi Tenggara	14,65	9,22	12,78	8,25	10,94
Gorontalo	18,43	9,43	14,80	11,75	13,60
Sulawesi Barat	17,66	4,74	9,43	NA	7,25
Maluku	18,64	6,99	14,73	5,36	10,81
Maluku Utara	16,36	10,54	15,57	5,20	11,76
Papua Barat	21,07	13,00	17,05	NA	15,54
Papua Barat Daya	13,73	8,60	15,73	3,96	10,81
Papua	13,19	5,76	17,05	1,00	10,06
Papua Selatan	24,93	6,95	18,69	4,17	12,43
Papua Tengah	5,84	0,98	2,52	NA	2,03
Papua Pegunungan	NA	2,47	3,88	NA	2,73
Indonesia	20,64	9,37	18,16	10,95	15,25

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

Tabel 5.14 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Seluruh Pekerjaan dalam Seminggu, 2024

Provinsi	Jam Kerja dalam Seminggu				Rata-Rata Jam Kerja
	< 35 Jam	35–40 Jam	41–48 Jam	> 48 Jam	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	62,08	13,22	11,47	13,22	28,88
Sumatera Utara	56,87	12,21	14,36	16,56	30,43
Sumatera Barat	55,30	12,86	12,63	19,21	32,08
Riau	63,72	9,71	11,45	15,11	27,60
Jambi	58,90	13,47	11,95	15,68	29,91
Sumatera Selatan	55,97	11,58	12,37	20,08	32,27
Bengkulu	60,43	15,23	12,32	12,02	28,59
Lampung	59,16	11,11	12,67	17,05	30,33
Kep. Bangka Belitung	54,07	10,14	16,10	19,70	32,37
Kepulauan Riau	37,20	10,22	22,49	30,09	39,54
DKI Jakarta	42,61	13,84	11,96	31,58	37,02
Jawa Barat	50,61	12,94	14,98	21,47	33,94
Jawa Tengah	50,19	11,83	15,80	22,17	33,73
DI Yogyakarta	51,01	12,62	12,94	23,43	33,09
Jawa Timur	52,38	12,10	14,02	21,50	33,11
Banten	49,34	15,83	14,30	20,53	33,61
Bali	49,81	14,61	12,32	23,26	34,15
Nusa Tenggara Barat	57,73	10,14	9,95	22,18	31,04
Nusa Tenggara Timur	65,94	11,15	10,23	12,67	27,71
Kalimantan Barat	60,07	11,30	11,97	16,66	30,85
Kalimantan Tengah	54,40	13,55	14,23	17,82	32,09
Kalimantan Selatan	56,19	11,90	13,42	18,48	31,17
Kalimantan Timur	46,60	10,90	16,83	25,68	35,48
Kalimantan Utara	54,78	11,04	8,95	25,24	32,21
Sulawesi Utara	46,68	15,62	18,98	18,72	34,97
Sulawesi Tengah	49,61	12,32	16,65	21,41	34,05
Sulawesi Selatan	55,49	11,67	10,94	21,90	32,16
Sulawesi Tenggara	54,33	10,86	13,32	21,49	32,73
Gorontalo	46,98	13,83	13,65	25,54	35,07
Sulawesi Barat	62,80	10,34	9,93	16,93	28,61
Maluku	52,92	11,48	12,89	22,70	33,65
Maluku Utara	54,57	11,02	15,31	19,10	32,54
Papua Barat	48,49	19,49	11,95	20,07	35,07
Papua Barat Daya	44,96	11,36	16,55	27,13	37,09
Papua	57,56	11,09	14,11	17,24	34,33
Papua Selatan	61,49	14,49	11,45	12,56	31,03
Papua Tengah	57,18	16,01	18,88	7,93	32,49
Papua Pegunungan	72,34	19,04	7,88	0,74	28,69
Indonesia	52,95	12,38	13,98	20,69	32,82

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024



Tabel 5.15 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Penghasilan dalam Sebulan, 2024

Provinsi	Penghasilan dalam Sebulan				Rata-Rata Penghasilan
	< 1.000.000	1.000.000– 1.999.999	2.000.000– 2.999.999	≥ 3.000.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	30,46	27,98	18,69	22,88	2.020.015
Sumatera Utara	30,16	29,41	17,54	22,90	2.045.750
Sumatera Barat	36,21	28,31	16,97	18,51	1.827.136
Riau	18,91	24,43	19,87	36,79	2.933.496
Jambi	20,73	30,03	20,82	28,42	2.302.394
Sumatera Selatan	27,14	30,58	19,76	22,52	2.092.520
Bengkulu	27,95	28,43	17,30	26,32	2.152.607
Lampung	34,62	32,26	18,05	15,07	1.698.685
Kep. Bangka Belitung	21,00	30,13	21,07	27,81	2.696.373
Kepulauan Riau	12,61	22,60	16,77	48,02	3.737.963
DKI Jakarta	8,28	17,74	14,81	59,17	7.290.716
Jawa Barat	34,99	30,89	14,57	19,55	1.978.667
Jawa Tengah	45,88	28,96	13,33	11,83	1.454.146
DI Yogyakarta	56,41	21,63	10,21	11,74	1.346.351
Jawa Timur	41,24	29,04	13,39	16,33	1.781.782
Banten	28,07	25,42	13,96	32,55	2.985.183
Bali	30,87	31,55	14,51	23,07	1.978.473
Nusa Tenggara Barat	41,52	25,02	14,02	19,44	1.787.402
Nusa Tenggara Timur	58,29	21,40	8,77	11,54	1.311.652
Kalimantan Barat	37,70	26,51	16,54	19,25	1.959.555
Kalimantan Tengah	23,88	30,11	19,57	26,44	2.247.147
Kalimantan Selatan	32,78	31,47	16,76	18,99	1.959.947
Kalimantan Timur	11,81	23,98	16,23	47,99	4.161.878
Kalimantan Utara	28,47	25,46	12,66	33,41	2.555.989
Sulawesi Utara	18,22	30,86	20,71	30,21	2.616.217
Sulawesi Tengah	31,19	28,30	17,01	23,50	3.239.447
Sulawesi Selatan	34,40	26,03	15,65	23,92	2.068.921
Sulawesi Tenggara	36,60	27,76	14,24	21,40	2.040.671
Gorontalo	36,29	35,04	12,79	15,88	1.614.152
Sulawesi Barat	38,18	24,37	16,36	21,09	1.908.869
Maluku	47,98	22,47	15,17	14,39	1.771.768
Maluku Utara	29,23	29,94	15,80	25,04	2.070.087
Papua Barat	28,22	31,23	20,92	19,63	2.521.766
Papua Barat Daya	23,44	27,31	21,47	27,79	2.617.277
Papua	30,66	29,95	13,78	25,61	2.328.182
Papua Selatan	29,20	34,11	13,91	22,78	2.504.738
Papua Tengah	21,61	31,44	15,14	31,81	2.242.642
Papua Pegunungan	24,33	31,59	19,45	24,63	2.279.960
Indonesia	36,40	28,50	14,88	20,23	2.070.193

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024



Tabel 5.16 Persentase Lansia Bekerja dengan Status Upah Rendah Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Upah Rendah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	50,72	41,35	38,30	67,45	45,71
Sumatera Utara	30,39	49,75	19,83	63,32	35,05
Sumatera Barat	29,67	41,31	20,76	67,44	33,14
Riau	20,07	45,73	20,57	67,73	31,84
Jambi	21,09	27,12	16,42	54,84	24,16
Sumatera Selatan	42,39	48,45	33,45	81,10	45,17
Bengkulu	34,74	37,46	27,47	61,62	35,80
Lampung	27,88	34,33	23,94	55,35	30,55
Kep. Bangka Belitung	19,25	26,85	15,62	40,12	21,52
Kepulauan Riau	NA	47,80	13,24	NA	13,72
DKI Jakarta	19,46	–	18,56	21,34	19,46
Jawa Barat	27,34	36,85	19,91	52,90	28,36
Jawa Tengah	42,27	41,60	29,53	65,28	42,11
DI Yogyakarta	36,41	48,20	23,32	56,41	37,72
Jawa Timur	34,80	47,55	26,98	58,39	38,38
Banten	20,97	40,37	14,05	53,23	23,15
Bali	19,42	16,89	14,60	27,19	18,75
Nusa Tenggara Barat	52,37	53,15	45,78	64,34	52,66
Nusa Tenggara Timur	16,43	62,98	34,79	36,23	35,04
Kalimantan Barat	20,51	38,09	21,67	54,05	28,07
Kalimantan Tengah	19,85	23,24	16,92	37,34	21,57
Kalimantan Selatan	40,87	30,17	22,27	60,06	36,92
Kalimantan Timur	16,48	15,30	12,60	40,84	16,20
Kalimantan Utara	22,94	50,04	21,93	51,21	29,04
Sulawesi Utara	14,09	53,00	16,11	45,27	25,94
Sulawesi Tengah	43,11	40,46	36,58	62,29	42,22
Sulawesi Selatan	30,15	54,75	28,29	64,66	35,94
Sulawesi Tenggara	31,36	56,54	36,65	61,35	45,01
Gorontalo	58,35	39,81	40,45	69,42	52,23
Sulawesi Barat	48,64	78,74	53,28	93,59	63,66
Maluku	51,89	38,54	37,17	76,63	46,82
Maluku Utara	NA	37,00	19,87	NA	23,31
Papua Barat	11,12	51,80	11,82	80,80	34,85
Papua Barat Daya	46,52	NA	31,54	NA	29,51
Papua	16,45	NA	13,03	NA	13,06
Papua Selatan	NA	21,81	8,40	NA	11,50
Papua Tengah	NA	NA	NA	NA	NA
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA	NA
Indonesia	30,61	41,95	23,57	55,85	33,30

Catatan: Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024



Tabel 5.17 *Sampling Error* Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, 2024

Provinsi	Perguruan Tinggi				SMA/SMK Sederajat				SMP Sederajat			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	4,41	3,49	5,57	11,97	14,26	12,41	16,34	7,03	13,98	12,21	15,96	6,83
Sumatera Utara	5,24	4,07	6,72	12,78	15,37	13,56	17,38	6,34	15,54	13,92	17,31	5,56
Sumatera Barat	4,78	3,56	6,38	14,92	12,18	10,53	14,05	7,35	14,31	12,58	16,23	6,50
Riau	4,31	3,12	5,95	16,51	13,47	11,22	16,09	9,21	9,43	7,73	11,47	10,08
Jambi	2,79	1,75	4,42	23,69	10,57	8,76	12,71	9,51	8,32	6,61	10,42	11,63
Sumatera Selatan	3,20	2,34	4,36	15,87	8,11	6,53	10,03	10,93	8,18	6,74	9,88	9,75
Bengkulu	5,70	4,18	7,73	15,70	10,46	8,58	12,69	9,97	8,81	7,04	10,98	11,35
Lampung	2,86	2,08	3,92	16,18	5,99	4,88	7,33	10,38	7,89	6,52	9,52	9,66
Kep. Bangka Belitung	4,83	3,17	7,29	21,30	10,40	7,78	13,79	14,63	10,44	8,07	13,40	12,95
Kepulauan Riau	8,52	4,01	17,19	37,41	19,22	13,23	27,06	18,32	11,80	8,21	16,67	18,10
DKI Jakarta	11,49	8,42	15,49	15,57	21,25	17,31	25,81	10,21	19,89	16,03	24,41	10,75
Jawa Barat	4,25	3,56	5,07	9,03	7,94	6,93	9,08	6,90	7,40	6,46	8,45	6,85
Jawa Tengah	2,87	2,47	3,34	7,71	6,03	5,43	6,69	5,32	6,79	6,13	7,52	5,19
DI Yogyakarta	7,02	5,41	9,04	13,10	13,33	11,17	15,82	8,89	11,41	9,32	13,90	10,19
Jawa Timur	2,70	2,26	3,21	8,92	6,40	5,74	7,11	5,46	6,35	5,76	7,01	5,02
Banten	6,88	5,07	9,28	15,43	14,25	11,25	17,88	11,84	8,60	6,67	11,02	12,83
Bali	5,08	3,89	6,60	13,46	9,66	8,03	11,57	9,32	6,13	4,78	7,83	12,59
Nusa Tenggara Barat	4,87	3,57	6,60	15,70	7,42	5,54	9,88	14,75	3,47	2,48	4,84	17,02
Nusa Tenggara Timur	5,46	4,27	6,96	12,51	8,68	7,49	10,03	7,47	6,56	5,46	7,86	9,32
Kalimantan Barat	2,48	1,70	3,60	19,15	7,98	6,45	9,83	10,74	7,56	6,00	9,50	11,75
Kalimantan Tengah	6,64	4,73	9,25	17,14	11,99	9,60	14,89	11,21	10,04	8,01	12,53	11,42
Kalimantan Selatan	4,13	2,98	5,70	16,52	10,21	8,23	12,61	10,88	6,90	5,42	8,76	12,25
Kalimantan Timur	7,19	4,87	10,49	19,60	15,38	12,29	19,08	11,24	11,88	9,21	15,20	12,81
Kalimantan Utara	6,71	4,07	10,86	25,08	13,62	9,87	18,50	16,06	16,09	11,71	21,69	15,75
Sulawesi Utara	6,03	4,61	7,85	13,57	19,27	16,79	22,01	6,91	20,96	18,68	23,44	5,80
Sulawesi Tengah	4,74	3,51	6,36	15,19	9,99	8,10	12,26	10,58	10,86	8,91	13,17	9,96
Sulawesi Selatan	6,62	5,41	8,07	10,19	12,49	10,88	14,29	6,96	8,84	7,48	10,42	8,48
Sulawesi Tenggara	6,39	4,99	8,15	12,52	10,79	8,93	12,99	9,57	9,10	6,85	11,99	14,28
Gorontalo	4,44	2,74	7,11	24,39	10,84	6,79	16,88	23,31	6,48	4,80	8,70	15,19
Sulawesi Barat	3,92	2,52	6,04	22,32	7,19	4,95	10,34	18,80	7,55	5,15	10,94	19,22
Maluku	5,23	3,66	7,41	18,02	14,43	11,99	17,27	9,33	13,74	11,11	16,88	10,67
Maluku Utara	3,56	2,23	5,62	23,57	12,01	9,56	14,98	11,48	14,39	11,58	17,76	10,92
Papua Barat	4,58	2,52	8,18	30,14	15,55	10,52	22,36	19,29	9,60	6,68	13,62	18,21
Papua Barat Daya	5,26	2,64	10,23	34,73	14,06	9,95	19,48	17,17	13,95	9,00	21,01	21,73
Papua	6,04	3,94	9,14	21,47	18,19	12,59	25,55	18,11	15,30	9,65	23,39	22,70
Papua Selatan	3,89	1,82	8,11	38,28	9,16	5,67	14,48	23,99	7,61	4,53	12,49	25,96
Papua Tengah	1,39	0,68	2,80	35,97	7,22	5,17	10,00	16,86	11,63	8,58	15,58	15,25
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	55,52	4,97	3,14	7,79	23,23	4,03	2,29	7,00	28,57
Indonesia	4,17	3,94	4,42	2,93	9,13	8,80	9,48	1,91	8,52	8,20	8,84	1,89



Lanjutan Tabel 5.17

Provinsi	SD Sederajat				Tidak Mempunyai Ijazah			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	39,20	36,46	42,02	3,62	28,14	25,55	30,88	4,84
Sumatera Utara	37,15	34,46	39,93	3,75	26,69	24,50	29,01	4,30
Sumatera Barat	29,73	27,15	32,45	4,55	39,00	35,92	42,17	4,09
Riau	39,84	36,02	43,79	4,99	32,95	29,31	36,79	5,80
Jambi	36,60	33,05	40,31	5,07	41,72	37,91	45,63	4,73
Sumatera Selatan	38,45	35,25	41,75	4,32	42,06	38,74	45,46	4,08
Bengkulu	29,98	26,03	34,24	7,00	45,05	40,81	49,37	4,86
Lampung	39,29	36,20	42,47	4,08	43,96	40,71	47,27	3,81
Kep. Bangka Belitung	35,39	30,81	40,25	6,82	38,95	34,10	44,03	6,52
Kepulauan Riau	33,42	26,35	41,33	11,51	27,05	20,77	34,40	12,90
DKI Jakarta	33,95	28,79	39,52	8,10	13,42	9,05	19,45	19,59
Jawa Barat	47,23	45,02	49,44	2,39	33,19	31,01	35,44	3,41
Jawa Tengah	36,62	35,03	38,25	2,24	47,68	45,91	49,46	1,90
DI Yogyakarta	31,71	28,58	35,01	5,17	36,54	32,52	40,75	5,76
Jawa Timur	39,65	38,05	41,27	2,07	44,91	43,20	46,62	1,94
Banten	37,74	33,29	42,40	6,18	32,54	27,79	37,67	7,77
Bali	33,07	29,94	36,35	4,95	46,06	42,65	49,50	3,80
Nusa Tenggara Barat	18,54	15,33	22,25	9,52	65,70	61,32	69,83	3,31
Nusa Tenggara Timur	35,11	32,92	37,36	3,23	44,20	41,67	46,76	2,93
Kalimantan Barat	24,00	20,97	27,32	6,76	57,98	54,15	61,72	3,34
Kalimantan Tengah	36,40	32,42	40,58	5,73	34,92	30,87	39,21	6,11
Kalimantan Selatan	33,15	29,79	36,68	5,31	45,61	41,65	49,62	4,47
Kalimantan Timur	34,34	29,66	39,34	7,22	31,21	26,05	36,88	8,88
Kalimantan Utara	27,35	22,27	33,10	10,12	36,23	30,29	42,63	8,73
Sulawesi Utara	32,59	29,60	35,73	4,81	21,15	18,53	24,03	6,63
Sulawesi Tengah	45,44	41,88	49,05	4,03	28,97	25,67	32,52	6,04
Sulawesi Selatan	28,32	25,89	30,89	4,50	43,73	41,00	46,50	3,21
Sulawesi Tenggara	32,38	29,25	35,68	5,08	41,34	37,66	45,13	4,62
Gorontalo	30,92	26,22	36,04	8,13	47,32	41,25	53,48	6,63
Sulawesi Barat	25,64	21,23	30,61	9,35	55,70	49,41	61,81	5,71
Maluku	42,03	37,99	46,18	4,98	24,57	20,75	28,83	8,40
Maluku Utara	35,33	30,75	40,20	6,84	34,71	29,86	39,91	7,41
Papua Barat	24,76	19,25	31,24	12,38	45,52	37,57	53,70	9,12
Papua Barat Daya	27,75	22,10	34,20	11,15	38,98	31,36	47,18	10,43
Papua	28,19	22,94	34,10	10,12	32,29	25,52	39,89	11,42
Papua Selatan	30,79	24,39	38,02	11,35	48,56	40,86	56,32	8,19
Papua Tengah	20,35	15,13	26,82	14,65	59,41	51,97	66,43	6,25
Papua Pegunungan	11,09	8,43	14,46	13,79	78,87	73,45	83,44	3,23
Indonesia	37,64	36,97	38,30	0,90	40,54	39,85	41,24	0,88

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

Tabel 5.18 *Sampling Error* Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama, 2024

Provinsi	Jasa				Manufaktur				Pertanian			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	27,66	25,27	30,18	4,54	13,16	11,48	15,04	6,91	59,18	56,40	61,91	2,38
Sumatera Utara	35,81	33,33	38,36	3,59	11,12	9,49	13,00	8,03	53,07	50,45	55,67	2,51
Sumatera Barat	29,82	27,42	32,34	4,21	11,64	10,10	13,38	7,17	58,54	55,90	61,13	2,28
Riau	32,98	29,54	36,60	5,47	10,75	8,64	13,30	11,00	56,27	52,61	59,87	3,30
Jambi	24,36	21,53	27,42	6,17	7,28	5,80	9,11	11,52	68,36	65,13	71,42	2,35
Sumatera Selatan	27,09	24,37	30,00	5,31	8,12	6,74	9,74	9,41	64,79	61,57	67,88	2,49
Bengkulu	23,69	20,73	26,94	6,69	8,40	6,73	10,43	11,19	67,91	64,38	71,24	2,58
Lampung	24,88	22,24	27,73	5,63	9,97	8,33	11,89	9,09	65,14	62,15	68,03	2,30
Kep. Bangka Belitung	32,00	27,69	36,65	7,16	23,73	20,01	27,90	8,49	44,27	39,40	49,24	5,69
Kepulauan Riau	52,41	42,09	62,52	10,08	25,21	17,20	35,35	18,47	22,39	17,99	27,50	10,85
DKI Jakarta	83,01	78,27	86,90	2,64	16,37	12,65	20,91	12,84	NA	NA	NA	66,16
Jawa Barat	44,19	42,18	46,22	2,33	15,57	14,20	17,05	4,67	40,24	38,15	42,36	2,67
Jawa Tengah	28,97	27,68	30,30	2,31	14,53	13,47	15,66	3,83	56,50	54,93	58,06	1,41
DI Yogyakarta	36,06	32,78	39,48	4,75	15,68	12,95	18,87	9,62	48,25	44,33	52,20	4,17
Jawa Timur	30,16	28,83	31,53	2,29	12,70	11,71	13,76	4,11	57,14	55,59	58,68	1,38
Banten	45,85	41,70	50,05	4,66	17,37	14,37	20,85	9,51	36,78	32,91	40,84	5,51
Bali	33,90	31,01	36,91	4,45	26,76	24,19	29,51	5,08	39,34	36,10	42,67	4,27
Nusa Tenggara Barat	31,22	27,41	35,30	6,46	12,37	9,62	15,76	12,62	56,41	51,66	61,05	4,26
Nusa Tenggara Timur	15,78	14,01	17,74	6,03	13,17	11,56	14,95	6,57	71,05	68,80	73,20	1,58
Kalimantan Barat	21,71	18,93	24,78	6,88	7,49	5,87	9,50	12,28	70,80	67,33	74,05	2,43
Kalimantan Tengah	29,39	25,75	33,33	6,59	14,84	12,38	17,70	9,12	55,76	51,64	59,80	3,74
Kalimantan Selatan	36,00	32,63	39,51	4,88	10,56	8,66	12,82	10,02	53,44	49,88	56,97	3,39
Kalimantan Timur	48,02	43,16	52,92	5,20	16,45	12,15	21,90	15,07	35,52	30,92	40,41	6,83
Kalimantan Utara	35,57	29,14	42,56	9,67	16,15	11,65	21,95	16,21	48,28	41,78	54,85	6,95
Sulawesi Utara	40,65	37,42	43,97	4,12	16,19	14,01	18,64	7,28	43,16	39,97	46,41	3,81
Sulawesi Tengah	29,02	25,94	32,31	5,60	13,00	10,98	15,34	8,54	57,97	54,68	61,20	2,87
Sulawesi Selatan	32,95	30,54	35,45	3,81	11,49	9,96	13,22	7,24	55,56	52,91	58,18	2,43
Sulawesi Tenggara	28,22	24,90	31,80	6,24	12,69	10,76	14,91	8,32	59,08	55,49	62,58	3,07
Gorontalo	36,25	30,59	42,31	8,29	17,15	13,52	21,50	11,86	46,61	40,72	52,59	6,52
Sulawesi Barat	21,08	17,29	25,45	9,86	11,03	7,51	15,92	19,22	67,89	62,43	72,90	3,95
Maluku	32,31	28,41	36,47	6,38	18,57	15,26	22,40	9,79	49,12	45,28	52,98	4,01
Maluku Utara	22,08	18,75	25,82	8,18	31,51	26,97	36,43	7,68	46,41	41,63	51,26	5,31
Papua Barat	28,99	22,35	36,67	12,65	5,00	2,93	8,43	27,03	66,01	57,54	73,56	6,24
Papua Barat Daya	35,89	28,51	43,99	11,08	18,17	13,32	24,30	15,39	45,94	39,56	52,46	7,20
Papua	38,96	31,72	46,72	9,89	13,25	7,60	22,08	27,38	47,79	41,70	53,95	6,57
Papua Selatan	27,69	21,34	35,08	12,71	10,21	6,03	16,77	26,21	62,10	54,69	68,99	5,92
Papua Tengah	19,31	14,75	24,88	13,36	4,57	2,61	7,87	28,22	76,12	70,08	81,27	3,76
Papua Pegunungan	13,00	9,41	17,70	16,15	NA	NA	NA	63,70	86,57	81,94	90,16	2,41
Indonesia	34,09	33,49	34,69	0,90	13,72	13,29	14,17	1,64	52,19	51,55	52,84	0,63

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

Tabel 5.19 Sampling Error Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2024

Provinsi	Berusaha Sendiri				Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar				Berusaha Dibantu Buruh Tetap dan Dibayar			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	42,75	39,71	45,84	3,66	24,16	21,76	26,73	5,24	7,47	5,94	9,36	11,63
Sumatera Utara	35,13	32,70	37,63	3,58	25,76	23,79	27,84	4,01	9,29	7,82	11,01	8,72
Sumatera Barat	36,56	33,84	39,37	3,86	31,96	29,69	34,32	3,70	5,52	4,35	6,97	12,02
Riau	34,63	31,04	38,42	5,45	22,78	20,02	25,79	6,46	18,37	15,42	21,75	8,79
Jambi	34,79	31,39	38,35	5,11	27,73	24,80	30,88	5,59	13,42	11,08	16,16	9,62
Sumatera Selatan	31,65	28,89	34,56	4,57	32,66	30,25	35,16	3,83	4,57	3,45	6,02	14,22
Bengkulu	28,23	24,93	31,79	6,21	34,94	31,91	38,10	4,52	7,43	5,67	9,67	13,62
Lampung	31,78	28,93	34,77	4,69	36,12	33,42	38,91	3,88	4,99	3,83	6,48	13,38
Kep. Bangka Belitung	41,80	37,24	46,51	5,67	22,25	18,67	26,30	8,74	7,83	5,78	10,53	15,30
Kepulauan Riau	42,65	33,58	52,24	11,29	12,23	6,76	21,14	29,30	4,70	2,13	10,07	39,88
DKI Jakarta	44,08	38,32	50,00	6,79	11,79	8,79	15,63	14,69	7,40	4,91	11,02	20,66
Jawa Barat	31,67	29,74	33,67	3,17	26,18	24,50	27,93	3,35	4,84	4,06	5,74	8,83
Jawa Tengah	32,10	30,65	33,60	2,35	29,76	28,52	31,04	2,16	3,26	2,82	3,76	7,32
DI Yogyakarta	29,27	25,97	32,81	5,97	31,13	28,10	34,33	5,11	3,57	2,38	5,33	20,58
Jawa Timur	29,93	28,49	31,40	2,48	29,34	28,08	30,64	2,22	3,96	3,43	4,57	7,34
Banten	34,33	30,55	38,31	5,77	21,72	18,64	25,14	7,64	4,04	2,57	6,29	22,86
Bali	32,00	29,19	34,95	4,59	27,54	25,28	29,91	4,29	2,81	1,91	4,13	19,75
Nusa Tenggara Barat	33,69	29,29	38,38	6,90	34,86	31,30	38,59	5,34	2,43	1,53	3,82	23,32
Nusa Tenggara Timur	35,30	33,07	37,58	3,26	39,54	37,53	41,58	2,62	2,08	1,39	3,09	20,30
Kalimantan Barat	34,72	31,38	38,23	5,04	31,31	28,46	34,31	4,77	4,94	3,40	7,13	18,93
Kalimantan Tengah	47,12	43,00	51,28	4,49	22,06	18,71	25,81	8,22	6,31	4,58	8,62	16,14
Kalimantan Selatan	38,16	34,79	41,65	4,59	29,02	26,04	32,19	5,41	5,02	3,72	6,74	15,18
Kalimantan Timur	43,38	37,74	49,18	6,76	17,44	14,40	20,98	9,62	7,67	5,56	10,47	16,16
Kalimantan Utara	37,03	29,96	44,71	10,23	25,18	19,87	31,34	11,64	6,02	3,69	9,66	24,57
Sulawesi Utara	45,33	42,40	48,28	3,31	18,60	16,27	21,17	6,71	6,75	5,00	9,04	15,11
Sulawesi Tengah	37,81	34,44	41,30	4,64	32,63	29,61	35,80	4,84	5,76	4,45	7,43	13,09
Sulawesi Selatan	36,33	33,74	38,99	3,69	32,31	30,05	34,65	3,64	4,89	3,86	6,19	12,04
Sulawesi Tenggara	40,36	37,09	43,72	4,20	31,68	28,97	34,52	4,47	4,48	3,12	6,39	18,30
Gorontalo	38,60	33,54	43,91	6,87	29,14	25,11	33,53	7,39	3,21	1,99	5,14	24,18
Sulawesi Barat	34,65	28,87	40,93	8,91	41,15	35,86	46,65	6,71	1,89	0,90	3,96	38,01
Maluku	46,26	42,29	50,27	4,41	25,66	22,67	28,90	6,21	2,72	1,73	4,27	23,14
Maluku Utara	39,73	35,29	44,36	5,84	31,97	28,21	35,98	6,21	4,42	3,11	6,25	17,83
Papua Barat	42,76	36,14	49,65	8,11	24,49	19,93	29,72	10,21	1,75	0,69	4,38	47,45
Papua Barat Daya	46,79	40,45	53,24	7,01	28,29	22,77	34,56	10,66	NA	NA	NA	68,45
Papua	51,61	44,22	58,94	7,33	19,66	15,97	23,97	10,38	1,29	0,58	2,81	40,15
Papua Selatan	51,44	44,04	58,77	7,36	22,83	17,87	28,69	12,09	NA	NA	NA	52,96
Papua Tengah	31,08	24,94	37,96	10,73	33,11	27,04	39,80	9,88	0,62	0,25	1,52	46,46
Papua Pegunungan	23,66	18,20	30,16	12,92	46,63	40,58	52,77	6,70	NA	NA	NA	100,07
Indonesia	33,37	32,76	33,99	0,94	28,46	27,94	28,99	0,94	4,82	4,57	5,09	2,76

Lanjutan Tabel 5.19

Provinsi	Buruh/Karyawan/Pegawai				Pekerja Bebas				Pekerja Keluarga/Pekerja Tidak Dibayar			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Aceh	10,68	8,90	12,76	9,21	7,93	6,40	9,79	10,85	7,01	5,82	8,42	9,39
Sumatera Utara	12,69	10,92	14,70	7,59	4,86	3,86	6,10	11,70	12,27	10,92	13,78	5,94
Sumatera Barat	6,77	5,66	8,07	9,04	7,73	6,33	9,40	10,08	11,45	10,16	12,89	6,09
Riau	11,12	9,03	13,61	10,46	6,41	4,82	8,48	14,42	6,68	5,16	8,62	13,10
Jambi	8,77	6,93	11,04	11,90	5,64	4,05	7,80	16,74	9,65	7,97	11,64	9,66
Sumatera Selatan	11,15	9,34	13,25	8,93	3,68	2,72	4,97	15,42	16,29	14,67	18,05	5,29
Bengkulu	7,41	5,66	9,64	13,59	6,24	4,61	8,38	15,24	15,76	13,52	18,29	7,71
Lampung	6,59	5,41	8,02	10,04	7,89	6,44	9,62	10,23	12,63	11,02	14,43	6,88
Kep. Bangka Belitung	15,08	12,25	18,44	10,43	2,66	1,66	4,23	23,92	10,37	8,18	13,07	11,97
Kepulauan Riau	26,24	17,91	36,70	18,38	2,54	1,49	4,28	26,84	11,64	7,11	18,50	24,50
DKI Jakarta	25,15	20,74	30,14	9,55	3,57	2,03	6,20	28,52	8,01	5,77	11,02	16,53
Jawa Barat	11,99	10,79	13,30	5,35	15,95	14,45	17,57	4,99	9,38	8,42	10,44	5,46
Jawa Tengah	9,14	8,33	10,02	4,71	9,93	8,95	11,01	5,29	15,81	14,83	16,84	3,25
DI Yogyakarta	11,59	9,33	14,30	10,90	4,46	3,28	6,05	15,65	19,98	17,32	22,93	7,16
Jawa Timur	9,16	8,39	9,99	4,45	13,21	12,09	14,41	4,46	14,40	13,49	15,37	3,32
Banten	16,86	13,97	20,22	9,45	12,34	9,96	15,20	10,80	10,71	8,83	12,93	9,74
Bali	11,57	9,70	13,75	8,90	6,75	5,31	8,55	12,18	19,33	17,34	21,49	5,48
Nusa Tenggara Barat	7,20	5,50	9,36	13,58	7,07	5,08	9,76	16,67	14,77	12,26	17,69	9,37
Nusa Tenggara Timur	3,44	2,58	4,58	14,62	1,31	0,94	1,83	17,05	18,33	16,86	19,89	4,22
Kalimantan Barat	8,29	6,53	10,48	12,08	4,79	3,52	6,47	15,51	15,95	13,71	18,47	7,60
Kalimantan Tengah	11,42	9,27	13,99	10,51	4,96	3,46	7,06	18,19	8,14	6,45	10,22	11,76
Kalimantan Selatan	12,87	10,84	15,23	8,68	3,03	2,18	4,20	16,69	11,89	10,01	14,07	8,68
Kalimantan Timur	17,39	13,87	21,59	11,31	3,05	1,86	4,96	25,07	11,07	8,39	14,48	13,93
Kalimantan Utara	14,93	11,07	19,82	14,88	4,07	2,15	7,58	32,20	12,78	9,43	17,08	15,16
Sulawesi Utara	10,68	9,05	12,56	8,37	8,04	6,69	9,65	9,35	10,61	9,14	12,27	7,50
Sulawesi Tengah	7,11	5,56	9,05	12,45	5,43	4,11	7,14	14,08	11,27	9,46	13,37	8,83
Sulawesi Selatan	8,41	6,94	10,17	9,76	4,42	3,52	5,55	11,65	13,64	12,18	15,24	5,73
Sulawesi Tenggara	6,46	5,10	8,16	11,97	2,29	1,54	3,39	20,11	14,73	12,88	16,79	6,76
Gorontalo	10,39	8,04	13,33	12,93	6,05	3,90	9,26	22,07	12,60	8,47	18,35	19,76
Sulawesi Barat	5,35	3,31	8,55	24,29	3,31	1,75	6,18	32,22	13,64	10,57	17,43	12,78
Maluku	8,09	6,34	10,27	12,31	2,26	1,34	3,80	26,65	15,01	12,80	17,52	8,01
Maluku Utara	7,34	5,40	9,91	15,53	2,71	1,53	4,75	28,91	13,83	11,26	16,87	10,33
Papua Barat	13,79	7,43	24,18	30,33	NA	NA	NA	72,14	16,47	11,24	23,48	18,87
Papua Barat Daya	9,07	6,05	13,37	20,27	1,05	0,64	1,71	25,18	13,06	9,61	17,51	15,33
Papua	8,77	6,14	12,37	17,88	NA	NA	NA	61,98	18,51	12,95	25,76	17,61
Papua Selatan	10,06	6,51	15,24	21,78	3,05	1,53	6,00	34,93	10,25	7,03	14,71	18,88
Papua Tengah	1,42	0,70	2,83	35,55	1,44	0,57	3,60	47,26	32,34	24,39	41,46	13,58
Papua Pegunungan	2,36	1,10	4,95	38,37	NA	NA	NA	100,19	26,90	23,02	31,17	7,74
Indonesia	10,43	10,06	10,82	1,85	9,54	9,12	9,98	2,28	13,37	13,01	13,75	1,41

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

Tabel 5.20 Sampling Error Persentase Lansia Bekerja dengan Status Pekerja Tidak Tetap Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	21,85	17,92	26,36	9,86	15,52	12,92	18,53	9,20
Sumatera Utara	21,26	18,00	24,92	8,31	10,05	8,30	12,13	9,67
Sumatera Barat	17,26	14,58	20,31	8,47	11,26	9,09	13,87	10,79
Riau	20,20	15,68	25,62	12,55	13,43	10,64	16,81	11,68
Jambi	19,52	14,82	25,27	13,64	11,17	8,65	14,31	12,85
Sumatera Selatan	20,33	15,93	25,56	12,09	10,97	9,05	13,23	9,67
Bengkulu	19,47	14,14	26,21	15,79	10,06	7,65	13,13	13,81
Lampung	18,55	15,22	22,40	9,86	11,48	9,28	14,12	10,72
Kep. Bangka Belitung	19,27	15,24	24,08	11,69	13,53	9,62	18,70	17,00
Kepulauan Riau	29,32	19,54	41,48	19,32	21,97	14,95	31,07	18,74
DKI Jakarta	24,94	20,54	29,93	9,62	–	–	–	–
Jawa Barat	27,93	25,86	30,09	3,87	23,38	20,34	26,73	6,98
Jawa Tengah	23,18	21,60	24,85	3,58	13,52	11,77	15,48	6,99
DI Yogyakarta	18,51	15,26	22,28	9,67	7,51	4,62	11,98	24,38
Jawa Timur	23,00	21,42	24,67	3,61	19,30	17,23	21,55	5,71
Banten	23,23	19,30	27,69	9,22	23,96	18,89	29,89	11,73
Bali	18,93	15,90	22,38	8,73	15,93	12,80	19,65	10,96
Nusa Tenggara Barat	12,84	9,93	16,45	12,89	14,01	9,64	19,93	18,59
Nusa Tenggara Timur	8,12	5,49	11,86	19,69	2,48	1,96	3,12	11,84
Kalimantan Barat	20,76	15,98	26,52	12,96	8,86	6,82	11,44	13,20
Kalimantan Tengah	16,86	12,66	22,09	14,23	14,77	11,69	18,49	11,72
Kalimantan Selatan	19,23	15,52	23,57	10,67	11,08	8,68	14,05	12,30
Kalimantan Timur	20,38	15,77	25,93	12,72	14,53	10,05	20,56	18,31
Kalimantan Utara	19,99	13,94	27,81	17,68	13,41	8,25	21,06	24,04
Sulawesi Utara	18,09	15,14	21,48	8,94	15,96	13,48	18,79	8,49
Sulawesi Tengah	15,61	10,87	21,92	17,94	9,86	7,80	12,39	11,82
Sulawesi Selatan	17,46	13,80	21,86	11,75	7,47	6,18	9,00	9,57
Sulawesi Tenggara	8,47	5,65	12,49	20,28	7,92	6,29	9,91	11,61
Gorontalo	19,59	13,67	27,27	17,68	12,51	9,27	16,67	15,00
Sulawesi Barat	14,80	7,91	25,97	30,57	6,81	4,18	10,90	24,54
Maluku	11,77	8,05	16,88	18,94	5,16	3,65	7,25	17,50
Maluku Utara	11,59	6,71	19,28	27,06	7,33	5,13	10,37	17,97
Papua Barat	13,75	5,98	28,55	40,42	11,15	4,02	27,35	49,79
Papua Barat Daya	8,59	3,68	18,78	42,02	8,83	6,14	12,53	18,24
Papua	7,85	4,34	13,77	29,56	3,44	2,18	5,40	23,18
Papua Selatan	22,65	12,50	37,50	28,31	7,75	4,95	11,95	22,54
Papua Tengah	10,11	5,01	19,34	34,73	NA	NA	NA	70,91
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	75,01	1,28	0,54	2,99	43,84
Indonesia	22,78	22,02	23,56	1,72	14,16	13,46	14,89	2,57



Lanjutan Tabel 5.20

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	19,57	16,89	22,56	7,39	13,82	10,63	17,79	13,16
Sumatera Utara	18,65	16,06	21,56	7,51	12,48	10,13	15,27	10,47
Sumatera Barat	14,93	12,74	17,43	8,00	12,60	10,29	15,33	10,17
Riau	19,43	16,15	23,19	9,24	8,47	5,94	11,93	17,81
Jambi	15,91	13,12	19,17	9,69	9,19	6,32	13,18	18,81
Sumatera Selatan	16,01	13,62	18,73	8,13	10,16	7,70	13,28	13,92
Bengkulu	13,76	11,03	17,04	11,12	11,00	7,70	15,49	17,87
Lampung	14,67	12,53	17,10	7,94	11,52	8,85	14,85	13,21
Kep. Bangka Belitung	18,23	14,51	22,64	11,36	13,88	9,65	19,56	18,09
Kepulauan Riau	32,63	22,63	44,51	17,33	15,81	6,54	33,50	42,38
DKI Jakarta	29,61	23,69	36,31	10,91	18,20	12,87	25,11	17,11
Jawa Barat	27,11	25,00	29,34	4,08	26,11	23,20	29,24	5,90
Jawa Tengah	19,13	17,74	20,61	3,83	16,96	15,30	18,76	5,21
DI Yogyakarta	16,97	13,51	21,09	11,37	11,97	9,08	15,61	13,85
Jawa Timur	22,40	20,76	24,13	3,84	19,62	17,98	21,36	4,40
Banten	26,66	22,56	31,21	8,29	17,93	13,76	23,03	13,17
Bali	20,99	17,81	24,56	8,21	14,07	11,23	17,49	11,31
Nusa Tenggara Barat	14,13	10,76	18,34	13,62	12,59	8,99	17,36	16,83
Nusa Tenggara Timur	5,10	3,96	6,55	12,83	2,05	1,38	3,04	20,15
Kalimantan Barat	14,22	11,51	17,45	10,62	9,05	6,40	12,65	17,39
Kalimantan Tengah	18,23	15,00	21,97	9,74	10,48	6,88	15,63	20,98
Kalimantan Selatan	14,48	11,87	17,56	9,98	14,53	11,17	18,70	13,16
Kalimantan Timur	23,66	18,91	29,17	11,08	7,55	4,26	13,04	28,65
Kalimantan Utara	19,64	14,43	26,16	15,23	13,77	7,77	23,24	28,12
Sulawesi Utara	19,18	16,72	21,91	6,90	13,41	10,62	16,79	11,69
Sulawesi Tengah	13,38	10,63	16,71	11,55	8,20	5,64	11,77	18,79
Sulawesi Selatan	12,87	10,54	15,64	10,08	9,19	7,19	11,66	12,34
Sulawesi Tenggara	8,66	6,75	11,05	12,60	7,25	5,28	9,89	16,02
Gorontalo	16,89	13,02	21,62	12,97	14,10	9,53	20,38	19,46
Sulawesi Barat	8,54	5,05	14,07	26,23	8,07	4,41	14,32	30,21
Maluku	8,73	6,47	11,69	15,12	5,38	3,26	8,75	25,22
Maluku Utara	11,01	8,08	14,84	15,52	3,44	1,52	7,60	41,23
Papua Barat	12,16	7,38	19,40	24,78	NA	NA	NA	70,23
Papua Barat Daya	13,37	8,66	20,07	21,53	NA	NA	NA	54,96
Papua	10,09	6,31	15,74	23,40	NA	NA	NA	55,22
Papua Selatan	18,16	11,77	26,96	21,24	4,56	2,00	10,06	41,37
Papua Tengah	3,44	1,76	6,59	33,73	NA	NA	NA	100,10
Papua Pegunungan	1,97	0,84	4,53	43,03	NA	NA	NA	100,23
Indonesia	20,19	19,55	20,85	1,65	16,38	15,64	17,15	2,36

Lanjutan Tabel 5.20

Provinsi	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	17,46	15,24	19,92	6,84
Sumatera Utara	15,92	13,98	18,06	6,52
Sumatera Barat	13,99	12,25	15,93	6,69
Riau	15,91	13,43	18,75	8,51
Jambi	13,66	11,31	16,41	9,51
Sumatera Selatan	13,81	11,87	16,01	7,64
Bengkulu	12,76	10,35	15,64	10,54
Lampung	13,61	11,72	15,75	7,55
Kep. Bangka Belitung	16,81	13,87	20,24	9,65
Kepulauan Riau	28,22	19,75	38,58	17,16
DKI Jakarta	24,94	20,54	29,93	9,62
Jawa Barat	26,74	25,00	28,56	3,39
Jawa Tengah	18,22	17,01	19,50	3,49
DI Yogyakarta	14,54	12,12	17,36	9,17
Jawa Timur	21,19	19,88	22,56	3,23
Banten	23,46	20,26	26,99	7,32
Bali	17,79	15,53	20,31	6,85
Nusa Tenggara Barat	13,44	10,67	16,81	11,62
Nusa Tenggara Timur	3,67	2,96	4,55	10,99
Kalimantan Barat	12,40	10,31	14,84	9,28
Kalimantan Tengah	15,63	13,05	18,61	9,06
Kalimantan Selatan	14,50	12,34	16,97	8,13
Kalimantan Timur	18,39	14,87	22,51	10,59
Kalimantan Utara	17,58	13,16	23,11	14,40
Sulawesi Utara	17,08	15,10	19,27	6,22
Sulawesi Tengah	11,52	9,44	13,98	10,02
Sulawesi Selatan	11,43	9,71	13,42	8,25
Sulawesi Tenggara	8,09	6,61	9,87	10,25
Gorontalo	15,79	12,46	19,81	11,83
Sulawesi Barat	8,35	5,71	12,07	19,13
Maluku	7,33	5,67	9,42	12,95
Maluku Utara	8,23	6,12	10,98	14,94
Papua Barat	11,97	5,89	22,81	34,85
Papua Barat Daya	8,72	5,78	12,97	20,69
Papua	5,99	3,83	9,26	22,58
Papua Selatan	12,29	8,39	17,66	19,04
Papua Tengah	2,48	1,32	4,62	32,06
Papua Pegunungan	1,26	0,57	2,80	40,79
Indonesia	18,66	18,13	19,19	1,44

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

Tabel 5.21 Sampling Error Persentase Lansia Bekerja di Sektor Formal Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	25,25	20,80	30,28	9,59	15,01	12,45	17,99	9,40
Sumatera Utara	29,07	25,32	33,14	6,87	14,19	12,16	16,50	7,80
Sumatera Barat	17,24	14,47	20,42	8,80	8,15	6,46	10,23	11,72
Riau	28,98	23,64	34,97	10,01	29,79	25,28	34,73	8,11
Jambi	24,73	19,68	30,59	11,27	21,11	17,62	25,08	9,02
Sumatera Selatan	27,59	22,65	33,13	9,71	10,54	8,70	12,70	9,65
Bengkulu	22,06	16,64	28,64	13,89	11,92	9,57	14,77	11,09
Lampung	18,93	15,59	22,80	9,71	8,42	6,48	10,88	13,24
Kep. Bangka Belitung	26,22	21,47	31,59	9,86	18,52	13,85	24,32	14,40
Kepulauan Riau	33,34	22,95	45,65	17,63	17,28	11,56	25,03	19,79
DKI Jakarta	32,55	27,86	37,62	7,66	-	-	-	-
Jawa Barat	19,26	17,53	21,11	4,74	9,90	7,80	12,48	12,00
Jawa Tengah	18,49	17,00	20,08	4,24	6,61	5,59	7,79	8,47
DI Yogyakarta	20,98	17,34	25,16	9,50	4,85	2,67	8,64	30,00
Jawa Timur	17,53	16,04	19,12	4,48	8,52	7,37	9,83	7,34
Banten	25,87	21,54	30,72	9,06	9,87	5,55	16,96	28,64
Bali	17,09	14,38	20,19	8,66	9,94	7,52	13,03	14,02
Nusa Tenggara Barat	13,08	10,04	16,88	13,27	6,35	4,10	9,73	22,12
Nusa Tenggara Timur	16,23	12,00	21,58	15,00	2,66	2,10	3,36	12,04
Kalimantan Barat	23,14	17,34	30,17	14,16	9,04	6,94	11,70	13,33
Kalimantan Tengah	19,56	14,98	25,13	13,23	16,44	13,19	20,30	11,01
Kalimantan Selatan	25,67	21,62	30,18	8,52	12,26	9,47	15,73	12,97
Kalimantan Timur	27,72	22,13	34,10	11,05	19,92	13,97	27,61	17,45
Kalimantan Utara	21,36	15,54	28,61	15,62	20,23	13,97	28,36	18,14
Sulawesi Utara	19,96	16,00	24,62	11,01	14,60	11,90	17,78	10,25
Sulawesi Tengah	23,60	18,48	29,61	12,04	8,51	6,78	10,64	11,51
Sulawesi Selatan	21,96	18,19	26,27	9,38	7,61	6,31	9,15	9,48
Sulawesi Tenggara	14,65	10,25	20,52	17,76	9,22	7,41	11,41	11,00
Gorontalo	18,43	13,24	25,08	16,35	9,43	6,90	12,77	15,75
Sulawesi Barat	17,66	9,81	29,73	28,53	4,74	2,73	8,11	27,81
Maluku	18,64	13,77	24,75	15,00	6,99	5,11	9,49	15,82
Maluku Utara	16,36	10,44	24,70	22,06	10,54	8,03	13,71	13,65
Papua Barat	21,07	11,73	34,89	28,07	13,00	5,41	28,08	42,63
Papua Barat Daya	13,73	7,30	24,33	30,95	8,60	5,90	12,39	18,99
Papua	13,19	8,44	20,01	22,11	5,76	4,02	8,18	18,17
Papua Selatan	24,93	14,63	39,14	25,33	6,95	4,40	10,79	22,93
Papua Tengah	5,84	2,67	12,26	39,08	0,98	0,44	2,17	40,51
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	80,61	2,47	1,12	5,36	39,96
Indonesia	20,64	19,93	21,38	1,79	9,37	8,89	9,87	2,66

Lanjutan Tabel 5.21

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	20,50	17,67	23,66	7,45	14,09	10,66	18,40	13,95
Sumatera Utara	26,48	23,57	29,61	5,81	16,32	13,66	19,40	8,95
Sumatera Barat	14,47	12,21	17,05	8,52	9,06	7,27	11,24	11,10
Riau	31,83	27,91	36,02	6,51	24,55	18,33	32,05	14,30
Jambi	25,67	22,05	29,66	7,56	15,28	11,53	19,97	14,05
Sumatera Selatan	18,49	15,94	21,35	7,46	11,11	8,40	14,55	14,03
Bengkulu	16,97	14,13	20,25	9,18	11,06	7,51	15,99	19,31
Lampung	13,68	11,38	16,35	9,25	7,45	5,36	10,27	16,61
Kep. Bangka Belitung	26,63	22,16	31,62	9,08	15,24	10,81	21,06	17,07
Kepulauan Riau	35,90	25,52	47,79	16,07	16,97	7,42	34,27	39,66
DKI Jakarta	36,80	30,42	43,68	9,24	26,42	19,99	34,05	13,63
Jawa Barat	20,33	18,48	22,31	4,81	10,84	8,90	13,15	9,94
Jawa Tengah	14,12	12,94	15,39	4,43	10,00	8,85	11,28	6,19
DI Yogyakarta	17,29	13,76	21,49	11,38	12,90	10,02	16,45	12,66
Jawa Timur	15,41	14,08	16,85	4,58	10,15	8,94	11,50	6,44
Banten	25,05	20,99	29,61	8,79	13,74	9,89	18,77	16,40
Bali	18,14	15,30	21,37	8,52	10,00	7,31	13,53	15,73
Nusa Tenggara Barat	11,43	8,64	14,98	14,04	7,36	5,03	10,64	19,16
Nusa Tenggara Timur	7,43	5,91	9,30	11,54	3,37	2,10	5,34	23,80
Kalimantan Barat	17,08	13,90	20,80	10,30	6,17	4,16	9,08	19,97
Kalimantan Tengah	20,95	17,36	25,07	9,40	11,33	7,84	16,09	18,37
Kalimantan Selatan	19,83	16,56	23,56	9,01	14,96	11,65	19,02	12,53
Kalimantan Timur	31,16	25,66	37,25	9,52	12,52	8,28	18,49	20,56
Kalimantan Utara	25,12	19,57	31,64	12,28	13,19	7,38	22,46	28,57
Sulawesi Utara	19,81	16,50	23,60	9,14	13,24	10,29	16,88	12,63
Sulawesi Tengah	15,86	13,21	18,94	9,20	7,52	5,17	10,82	18,88
Sulawesi Selatan	16,83	14,41	19,57	7,82	7,81	5,97	10,16	13,58
Sulawesi Tenggara	12,78	10,30	15,75	10,84	8,25	5,96	11,30	16,35
Gorontalo	14,80	11,23	19,27	13,80	11,75	7,85	17,22	20,10
Sulawesi Barat	9,43	6,02	14,48	22,47	NA	NA	NA	50,31
Maluku	14,73	11,60	18,52	11,95	5,36	3,37	8,42	23,38
Maluku Utara	15,57	12,26	19,58	11,96	5,20	2,91	9,12	29,23
Papua Barat	17,05	11,57	24,43	19,15	NA	NA	NA	62,33
Papua Barat Daya	15,73	10,76	22,41	18,78	3,96	1,57	9,66	46,62
Papua	17,05	12,07	23,53	17,08	1,00	0,41	2,39	44,82
Papua Selatan	18,69	12,19	27,57	20,91	4,17	1,72	9,76	44,52
Papua Tengah	2,52	1,42	4,44	29,09	NA	NA	NA	77,08
Papua Pegunungan	3,88	2,05	7,21	32,19	NA	NA	NA	100,38
Indonesia	18,16	17,57	18,76	1,68	10,95	10,36	11,56	2,80

Lanjutan Tabel 5.21

Provinsi	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	18,15	15,86	20,68	6,77
Sumatera Utara	21,98	19,76	24,37	5,36
Sumatera Barat	12,29	10,68	14,09	7,07
Riau	29,49	25,97	33,27	6,32
Jambi	22,19	19,26	25,42	7,08
Sumatera Selatan	15,72	13,67	18,00	7,02
Bengkulu	14,83	12,42	17,62	8,93
Lampung	11,59	9,84	13,59	8,24
Kep. Bangka Belitung	22,92	19,46	26,78	8,15
Kepulauan Riau	30,94	22,10	41,43	16,10
DKI Jakarta	32,55	27,86	37,62	7,66
Jawa Barat	16,82	15,41	18,34	4,44
Jawa Tengah	12,39	11,47	13,38	3,92
DI Yogyakarta	15,16	12,58	18,16	9,37
Jawa Timur	13,12	12,15	14,15	3,88
Banten	20,90	17,56	24,69	8,70
Bali	14,38	12,40	16,62	7,49
Nusa Tenggara Barat	9,62	7,63	12,06	11,68
Nusa Tenggara Timur	5,52	4,45	6,83	10,92
Kalimantan Barat	13,23	10,88	16,01	9,87
Kalimantan Tengah	17,72	14,96	20,88	8,51
Kalimantan Selatan	17,89	15,48	20,59	7,28
Kalimantan Timur	25,06	20,72	29,96	9,42
Kalimantan Utara	20,94	16,46	26,27	11,95
Sulawesi Utara	17,43	14,90	20,28	7,86
Sulawesi Tengah	12,86	10,89	15,13	8,39
Sulawesi Selatan	13,30	11,55	15,28	7,14
Sulawesi Tenggara	10,94	9,01	13,23	9,82
Gorontalo	13,60	10,78	17,03	11,68
Sulawesi Barat	7,25	4,89	10,61	19,81
Maluku	10,81	8,72	13,32	10,81
Maluku Utara	11,76	9,33	14,72	11,65
Papua Barat	15,54	8,97	25,57	26,90
Papua Barat Daya	10,81	7,40	15,54	18,99
Papua	10,06	7,24	13,81	16,53
Papua Selatan	12,43	8,49	17,83	18,98
Papua Tengah	2,03	1,16	3,53	28,40
Papua Pegunungan	2,73	1,35	5,48	35,89
Indonesia	15,25	14,81	15,70	1,50

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

Tabel 5.22 *Sampling Error* Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Pendapatan dalam Sebulan, 2024

Provinsi	< 1.000.000				1.000.000–1.999.999			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	30,46	27,52	33,56	5,07	27,98	25,39	30,72	4,87
Sumatera Utara	30,16	27,98	32,43	3,77	29,41	27,05	31,88	4,19
Sumatera Barat	36,21	33,42	39,09	4,00	28,31	25,95	30,80	4,38
Riau	18,91	16,11	22,06	8,02	24,43	21,34	27,81	6,76
Jambi	20,73	17,84	23,95	7,52	30,03	26,82	33,45	5,64
Sumatera Selatan	27,14	24,30	30,18	5,53	30,58	27,87	33,43	4,65
Bengkulu	27,95	24,47	31,72	6,62	28,43	25,28	31,81	5,87
Lampung	34,62	31,27	38,12	5,06	32,26	29,45	35,21	4,56
Kep. Bangka Belitung	21,00	17,48	25,01	9,14	30,13	25,76	34,89	7,75
Kepulauan Riau	12,61	9,60	16,40	13,69	22,60	15,87	31,13	17,26
DKI Jakarta	8,28	5,96	11,40	16,58	17,74	13,87	22,41	12,25
Jawa Barat	34,99	33,03	37,00	2,89	30,89	29,11	32,72	2,98
Jawa Tengah	45,88	44,16	47,62	1,93	28,96	27,54	30,42	2,54
DI Yogyakarta	56,41	52,27	60,47	3,71	21,63	18,61	24,99	7,53
Jawa Timur	41,24	39,52	42,99	2,15	29,04	27,65	30,47	2,48
Banten	28,07	24,36	32,11	7,05	25,42	21,54	29,74	8,24
Bali	30,87	27,61	34,33	5,56	31,55	27,98	35,34	5,96
Nusa Tenggara Barat	41,52	36,56	46,66	6,22	25,02	21,37	29,07	7,86
Nusa Tenggara Timur	58,29	55,68	60,84	2,26	21,40	19,40	23,55	4,95
Kalimantan Barat	37,70	33,96	41,59	5,17	26,51	23,51	29,75	6,01
Kalimantan Tengah	23,88	20,29	27,88	8,11	30,11	26,19	34,34	6,92
Kalimantan Selatan	32,78	29,48	36,25	5,28	31,47	28,38	34,73	5,15
Kalimantan Timur	11,81	9,29	14,89	12,06	23,98	19,69	28,85	9,76
Kalimantan Utara	28,47	22,55	35,24	11,41	25,46	20,04	31,77	11,78
Sulawesi Utara	18,22	16,05	20,62	6,40	30,86	28,01	33,87	4,85
Sulawesi Tengah	31,19	27,82	34,76	5,68	28,30	25,52	31,25	5,17
Sulawesi Selatan	34,40	31,80	37,10	3,93	26,03	23,57	28,65	4,98
Sulawesi Tenggara	36,60	33,08	40,26	5,01	27,76	24,64	31,10	5,94
Gorontalo	36,29	31,52	41,34	6,93	35,04	30,39	39,98	7,00
Sulawesi Barat	38,18	32,15	44,60	8,36	24,37	19,90	29,47	10,04
Maluku	47,98	43,58	52,41	4,71	22,47	19,12	26,21	8,06
Maluku Utara	29,23	25,08	33,74	7,57	29,94	25,65	34,62	7,66
Papua Barat	28,22	22,36	34,91	11,38	31,23	25,07	38,13	10,71
Papua Barat Daya	23,44	17,37	30,83	14,67	27,31	19,91	36,21	15,31
Papua	30,66	23,32	39,14	13,25	29,95	22,33	38,85	14,17
Papua Selatan	29,20	23,32	35,87	11,01	34,11	27,12	41,87	11,09
Papua Tengah	21,61	15,66	29,04	15,80	31,44	25,34	38,26	10,53
Papua Pegunungan	24,33	16,99	33,54	17,42	31,59	25,04	38,95	11,29
Indonesia	36,40	35,73	37,07	0,93	28,50	27,92	29,08	1,04



Lanjutan Tabel 5.22

Provinsi	2.000.000–2.999.999				≥ 3.000.000			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	18,69	16,33	21,29	6,77	22,88	20,22	25,78	6,20
Sumatera Utara	17,54	15,58	19,69	5,98	22,90	20,25	25,78	6,17
Sumatera Barat	16,97	14,95	19,20	6,39	18,51	16,18	21,10	6,78
Riau	19,87	16,86	23,28	8,24	36,79	32,91	40,85	5,51
Jambi	20,82	18,03	23,92	7,21	28,42	25,00	32,11	6,39
Sumatera Selatan	19,76	17,56	22,15	5,92	22,52	20,01	25,25	5,94
Bengkulu	17,30	14,53	20,47	8,75	26,32	23,02	29,91	6,69
Lampung	18,05	15,81	20,53	6,68	15,07	13,03	17,37	7,35
Kep. Bangka Belitung	21,07	17,36	25,32	9,63	27,81	23,64	32,39	8,04
Kepulauan Riau	16,77	11,39	24,01	19,11	48,02	38,65	57,53	10,15
DKI Jakarta	14,81	11,13	19,44	14,25	59,17	54,15	64,00	4,26
Jawa Barat	14,57	13,21	16,05	4,97	19,55	17,92	21,29	4,39
Jawa Tengah	13,33	12,35	14,37	3,86	11,83	10,86	12,88	4,36
DI Yogyakarta	10,21	8,02	12,92	12,17	11,74	9,49	14,45	10,75
Jawa Timur	13,39	12,39	14,45	3,91	16,33	15,14	17,59	3,83
Banten	13,96	11,24	17,22	10,90	32,55	28,90	36,42	5,91
Bali	14,51	12,48	16,81	7,61	23,07	20,31	26,08	6,38
Nusa Tenggara Barat	14,02	11,44	17,07	10,21	19,44	16,20	23,14	9,11
Nusa Tenggara Timur	8,77	7,28	10,52	9,38	11,54	9,79	13,56	8,30
Kalimantan Barat	16,54	14,05	19,39	8,23	19,25	16,32	22,56	8,27
Kalimantan Tengah	19,57	16,39	23,21	8,89	26,44	22,93	30,27	7,09
Kalimantan Selatan	16,76	14,42	19,40	7,57	18,99	16,34	21,97	7,55
Kalimantan Timur	16,23	12,97	20,11	11,20	47,99	42,32	53,71	6,08
Kalimantan Utara	12,66	8,91	17,68	17,53	33,41	27,91	39,39	8,80
Sulawesi Utara	20,71	18,53	23,07	5,59	30,21	27,24	33,36	5,17
Sulawesi Tengah	17,01	14,55	19,80	7,87	23,50	20,72	26,53	6,31
Sulawesi Selatan	15,65	13,66	17,88	6,87	23,92	21,31	26,73	5,78
Sulawesi Tenggara	14,24	12,11	16,68	8,16	21,40	18,71	24,37	6,74
Gorontalo	12,79	9,81	16,52	13,32	15,88	12,31	20,25	12,70
Sulawesi Barat	16,36	12,20	21,59	14,59	21,09	16,45	26,64	12,33
Maluku	15,17	12,30	18,57	10,51	14,39	11,63	17,66	10,67
Maluku Utara	15,80	12,89	19,22	10,19	25,04	21,25	29,24	8,15
Papua Barat	20,92	15,86	27,08	13,67	19,63	14,17	26,54	16,05
Papua Barat Daya	21,47	15,91	28,31	14,74	27,79	20,61	36,33	14,50
Papua	13,78	8,18	22,30	25,74	25,61	19,37	33,03	13,65
Papua Selatan	13,91	10,09	18,87	16,02	22,78	16,47	30,61	15,86
Papua Tengah	15,14	11,37	19,88	14,28	31,81	23,83	41,04	13,91
Papua Pegunungan	19,45	14,91	24,97	13,18	24,63	18,89	31,45	13,03
Indonesia	14,88	14,44	15,33	1,54	20,23	19,70	20,77	1,35

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

Tabel 5.23 Sampling Error Persentase Lansia Bekerja dengan Upah Rendah Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	50,72	39,63	61,73	11,30	41,35	30,06	53,63	14,80
Sumatera Utara	30,39	23,71	38,01	12,06	49,75	39,81	59,71	10,34
Sumatera Barat	29,67	20,87	40,29	16,84	41,31	28,31	55,64	17,30
Riau	20,07	13,30	29,12	20,07	45,73	32,99	59,05	14,87
Jambi	21,09	10,61	37,55	32,64	27,12	17,48	39,53	20,95
Sumatera Selatan	42,39	31,51	54,07	13,81	48,45	37,15	59,92	12,20
Bengkulu	34,74	20,87	51,79	23,38	37,46	21,27	57,05	25,40
Lampung	27,88	19,66	37,91	16,82	34,33	20,87	50,90	22,92
Kep. Bangka Belitung	19,25	11,17	31,14	26,37	26,85	14,16	44,96	29,85
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	51,21	47,80	24,46	72,15	27,68
DKI Jakarta	19,46	13,23	27,69	18,92	-	-	-	-
Jawa Barat	27,34	21,74	33,76	11,24	36,85	23,22	52,96	21,17
Jawa Tengah	42,27	37,46	47,23	5,92	41,60	30,83	53,24	13,97
DI Yogyakarta	36,41	27,26	46,67	13,75	48,20	28,43	68,54	22,49
Jawa Timur	34,80	30,09	39,83	7,16	47,55	38,38	56,90	10,05
Banten	20,97	14,24	29,78	18,90	40,37	14,73	72,63	41,55
Bali	19,42	12,94	28,09	19,85	16,89	7,41	34,04	39,49
Nusa Tenggara Barat	52,37	33,42	70,66	19,05	53,15	27,33	77,39	26,38
Nusa Tenggara Timur	16,43	9,08	27,91	28,88	62,98	50,21	74,16	9,87
Kalimantan Barat	20,51	12,21	32,37	25,05	38,09	26,58	51,13	16,76
Kalimantan Tengah	19,85	11,01	33,14	28,36	23,24	14,53	35,02	22,59
Kalimantan Selatan	40,87	29,21	53,66	15,56	30,17	20,82	41,52	17,70
Kalimantan Timur	16,48	8,46	29,63	32,30	15,30	5,72	35,00	47,17
Kalimantan Utara	22,94	11,38	40,83	33,06	50,04	31,77	68,30	19,52
Sulawesi Utara	14,09	7,65	24,50	29,90	53,00	40,83	64,83	11,77
Sulawesi Tengah	43,11	27,41	60,34	20,22	40,46	21,71	62,48	27,22
Sulawesi Selatan	30,15	20,49	41,95	18,37	54,75	44,34	64,77	9,65
Sulawesi Tenggara	31,36	17,75	49,17	26,26	56,54	40,66	71,19	14,21
Gorontalo	58,35	39,76	74,84	15,99	39,81	22,79	59,71	24,77
Sulawesi Barat	48,64	29,34	68,35	21,60	78,74	73,19	83,40	3,31
Maluku	51,89	35,01	68,34	17,03	38,54	25,71	53,20	18,64
Maluku Utara	NA	NA	NA	114,32	37,00	20,76	56,82	25,93
Papua Barat	11,12	6,26	18,98	28,45	51,80	17,01	84,93	40,74
Papua Barat Daya	46,52	14,37	81,84	44,88	NA	NA	NA	52,71
Papua	16,45	5,93	38,09	48,55	NA	NA	NA	71,53
Papua Selatan	NA	NA	NA	108,12	21,81	10,28	40,43	35,47
Papua Tengah	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Indonesia	30,61	28,62	32,67	3,38	41,95	38,49	45,50	4,27

Lanjutan Tabel 5.23

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	38,30	29,47	47,97	12,46	67,45	51,71	80,05	10,96
Sumatera Utara	19,83	14,46	26,59	15,58	63,32	51,43	73,78	9,14
Sumatera Barat	20,76	13,31	30,89	21,59	67,44	50,38	80,85	11,84
Riau	20,57	13,62	29,85	20,10	67,73	50,71	81,07	11,74
Jambi	16,42	9,78	26,25	25,34	54,84	30,69	76,90	23,24
Sumatera Selatan	33,45	24,72	43,50	14,46	81,10	67,27	89,96	7,10
Bengkulu	27,47	16,43	42,20	24,27	61,62	31,92	84,61	24,09
Lampung	23,94	15,79	34,58	20,11	55,35	36,42	72,84	17,58
Kep. Bangka Belitung	15,62	9,02	25,69	26,87	40,12	21,40	62,24	27,50
Kepulauan Riau	13,24	5,20	29,78	45,23	NA	NA	NA	58,59
DKI Jakarta	18,56	11,21	29,17	24,56	21,34	11,90	35,27	27,99
Jawa Barat	19,91	15,30	25,50	13,06	52,90	40,60	64,86	11,93
Jawa Tengah	29,53	25,05	34,45	8,14	65,28	58,08	71,85	5,41
DI Yogyakarta	23,32	15,60	33,34	19,47	56,41	41,58	70,18	13,29
Jawa Timur	26,98	22,13	32,45	9,78	58,39	50,98	65,43	6,36
Banten	14,05	8,45	22,46	25,06	53,23	33,04	72,41	19,93
Bali	14,60	8,42	24,11	27,01	27,19	15,70	42,80	25,82
Nusa Tenggara Barat	45,78	29,43	63,09	19,50	64,34	38,83	83,68	19,00
Nusa Tenggara Timur	34,79	27,60	42,74	11,18	36,23	18,05	59,44	30,82
Kalimantan Barat	21,67	13,76	32,42	21,99	54,05	30,59	75,83	23,00
Kalimantan Tengah	16,92	10,36	26,41	24,01	37,34	19,47	59,49	28,83
Kalimantan Selatan	22,27	14,24	33,07	21,61	60,06	43,12	74,89	13,95
Kalimantan Timur	12,60	6,03	24,49	36,13	40,84	15,60	72,07	39,77
Kalimantan Utara	21,93	10,95	39,06	32,87	51,21	21,97	79,64	32,74
Sulawesi Utara	16,11	10,40	24,12	21,56	45,27	31,17	60,17	16,82
Sulawesi Tengah	36,58	23,35	52,20	20,65	62,29	34,76	83,66	21,76
Sulawesi Selatan	28,29	20,89	37,08	14,68	64,66	46,05	79,68	13,74
Sulawesi Tenggara	36,65	23,90	51,58	19,73	61,35	42,88	77,05	14,77
Gorontalo	40,45	25,45	57,46	20,89	69,42	47,15	85,24	14,56
Sulawesi Barat	53,28	35,97	69,84	16,87	93,59	60,46	99,29	7,38
Maluku	37,17	25,58	50,45	17,40	76,63	47,44	92,25	15,38
Maluku Utara	19,87	10,85	33,57	29,09	NA	NA	NA	51,34
Papua Barat	11,82	7,55	18,03	22,29	80,80	27,69	97,88	23,48
Papua Barat Daya	31,54	14,48	55,62	34,95	NA	NA	NA	77,68
Papua	13,03	4,85	30,56	47,80	NA	NA	NA	76,49
Papua Selatan	8,40	3,47	18,95	43,73	NA	NA	NA	73,77
Papua Tengah	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Indonesia	23,57	21,82	25,42	3,89	55,85	52,40	59,25	3,13



Lanjutan Tabel 5.23

Provinsi	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	45,71	37,41	54,26	9,49
Sumatera Utara	35,05	29,28	41,29	8,77
Sumatera Barat	33,14	25,63	41,63	12,40
Riau	31,84	24,68	39,97	12,33
Jambi	24,16	16,48	33,95	18,52
Sumatera Selatan	45,17	37,15	53,44	9,28
Bengkulu	35,80	24,77	48,58	17,26
Lampung	30,55	22,92	39,41	13,86
Kep. Bangka Belitung	21,52	14,23	31,18	20,11
Kepulauan Riau	13,72	6,18	27,76	38,82
DKI Jakarta	19,46	13,23	27,69	18,92
Jawa Barat	28,36	23,10	34,28	10,08
Jawa Tengah	42,11	37,56	46,79	5,61
DI Yogyakarta	37,72	29,13	47,16	12,31
Jawa Timur	38,38	34,10	42,85	5,83
Banten	23,15	16,52	31,45	16,48
Bali	18,75	13,06	26,16	17,78
Nusa Tenggara Barat	52,66	36,94	67,87	15,49
Nusa Tenggara Timur	35,04	27,15	43,83	12,24
Kalimantan Barat	28,07	20,92	36,54	14,27
Kalimantan Tengah	21,57	14,97	30,04	17,83
Kalimantan Selatan	36,92	28,54	46,17	12,30
Kalimantan Timur	16,20	9,27	26,78	27,24
Kalimantan Utara	29,04	18,37	42,66	21,64
Sulawesi Utara	25,94	19,19	34,06	14,68
Sulawesi Tengah	42,22	29,62	55,93	16,26
Sulawesi Selatan	35,94	27,94	44,81	12,08
Sulawesi Tenggara	45,01	33,82	56,72	13,21
Gorontalo	52,23	38,56	65,58	13,52
Sulawesi Barat	63,66	52,19	73,76	8,77
Maluku	46,82	35,12	58,88	13,20
Maluku Utara	23,31	12,86	38,51	28,27
Papua Barat	34,85	11,17	69,47	48,12
Papua Barat Daya	29,51	14,10	51,65	33,67
Papua	13,06	5,06	29,73	45,94
Papua Selatan	11,50	5,14	23,75	39,49
Papua Tengah	NA	NA	NA	NA
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA
Indonesia	33,30	31,56	35,08	2,69

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024



BAB 6

SOSIAL EKONOMI

<https://www.pps.go.id>

Menghadapi masa lanjut usia (lansia) bukanlah hal yang mudah bagi semua orang. Perubahan biologis yang terjadi pada lansia mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi mereka (Jumita *et al.* 2012, 86–94). Menurut Anggreni dan Ayuningsasi (2023, 188–196), secara sosial, lansia kerap dipandang negatif atau dianggap tidak memberikan kontribusi bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Dari segi ekonomi, lansia cenderung dipersepsikan sebagai beban daripada sebagai sumber daya. Kondisi ini menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya meningkatkan kualitas hidup lansia, dengan tujuan agar mereka tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan sebagai aset yang memiliki potensi (Kuntjorowati 2018, 209–222). Salah satu aspek yang digunakan untuk menilai kualitas hidup lansia adalah kesejahteraan. Ketika lansia berada dalam keadaan sejahtera, mereka dapat menikmati masa tua dengan lebih baik (Mulyati *et al.* 2018, 1–8). Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi lansia sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup mereka dan mencapai kesejahteraan.

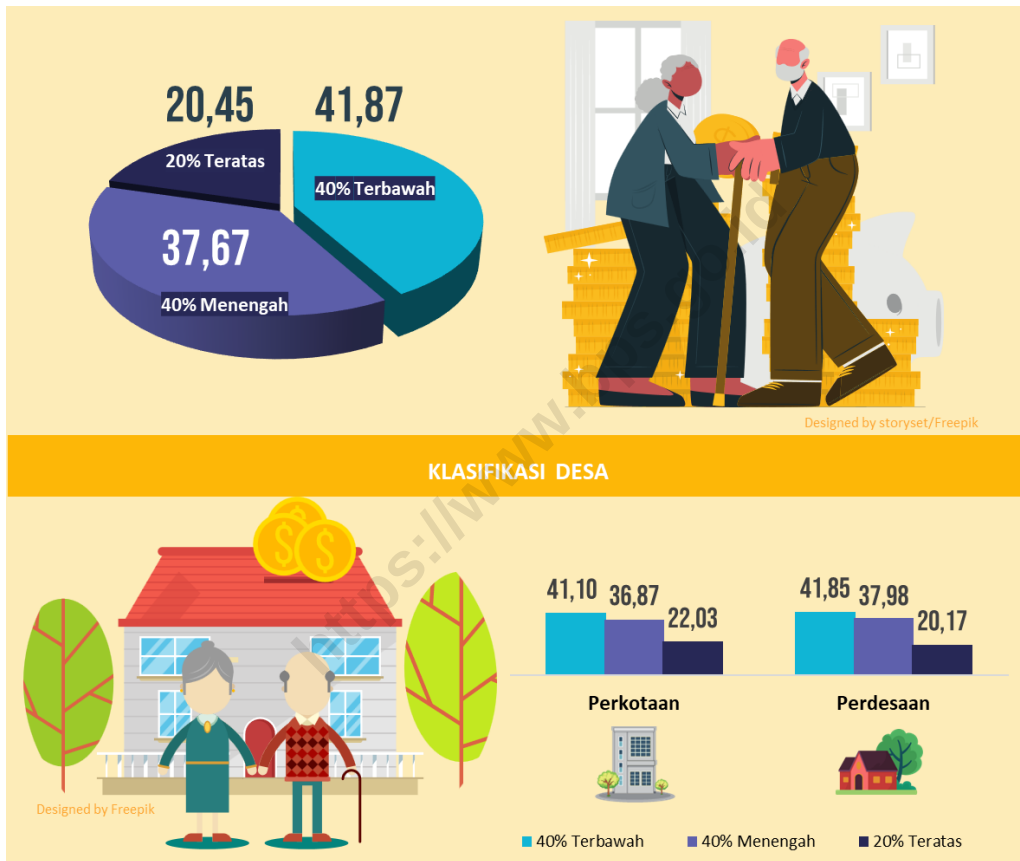
6.1 Kesejahteraan Lansia

Aspek keamanan ekonomi menjadi salah satu kerentanan yang dialami oleh lansia, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan dukungan finansial dari keluarga (Wulandari dan Irfan 2023, 102–110). Menurunnya kemampuan dan kondisi fisik pada lansia berdampak pada penurunan produktivitas kerja, yang pada gilirannya memengaruhi penghasilan mereka atau bahkan menyebabkan kehilangan pendapatan sepenuhnya. Lansia yang semakin bertambah usia tanpa kemandirian finansial berisiko mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Situasi ini diperparah jika lansia memiliki masalah kesehatan yang meningkatkan biaya layanan kesehatan.

Gambar 6.1 menunjukkan distribusi kesejahteraan lansia di Indonesia. Lansia yang tinggal di rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40 persen

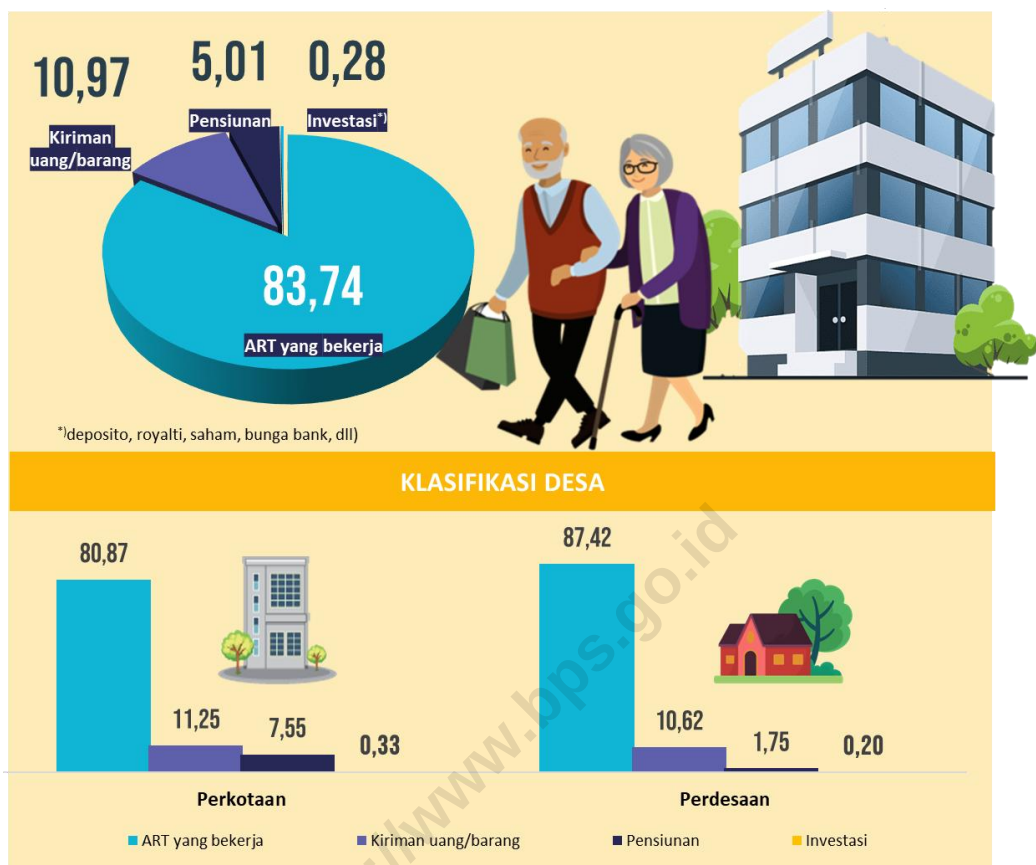


terbawah mencapai 41,87 persen. Sementara itu, lansia dalam rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas hanya sebesar 20,45 persen. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa keberadaan lansia banyak ditemukan seiring semakin rendahnya tingkat kesejahteraan. Pola yang sama terjadi jika dilihat berdasarkan klasifikasi desa, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 6.1 Persentase Lansia Menurut Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga dan Klasifikasi Desa, 2024

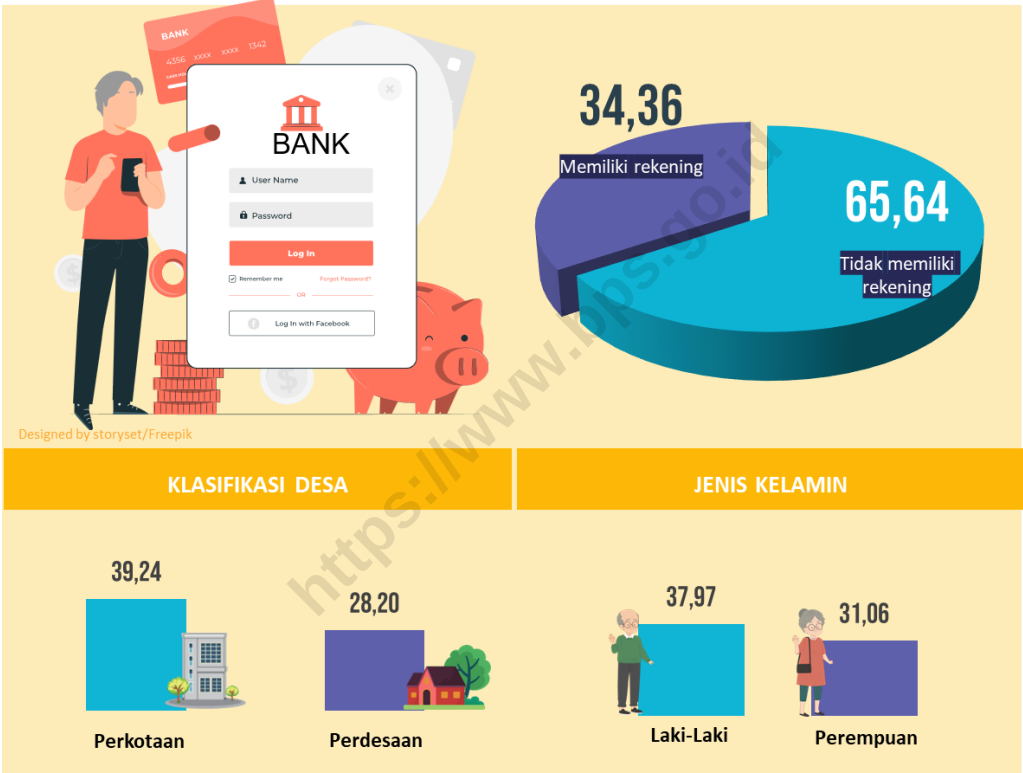


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga dan Klasifikasi Desa, 2024

Rumah tangga lansia masih sangat bergantung pada anggota rumah tangga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gambar 6.2 menunjukkan bahwa sumber utama pembiayaan rumah tangga lansia berasal dari anggota rumah tangga yang bekerja, yaitu mencapai 83,74 persen. Sementara itu, sekitar 10,97 persen rumah tangga lansia mengandalkan kiriman dari pihak lain sebagai sumber pembiayaan utama. Hanya sebagian kecil rumah tangga lansia yang sumber pembiayaan utamanya berasal dari jaminan pensiun, yakni 5,01 persen. Kurang dari satu persen rumah tangga lansia mendapatkan sumber pembiayaan utama dari investasi, seperti deposito, royalti, saham, bunga bank, dan sejenisnya.

Kuntjorowati (2018, 209–220) menyatakan bahwa banyak lansia mengalami ketelantaran karena tidak ada keluarga yang merawat atau keluarga yang ada tidak mampu memberikan perawatan yang layak. Ketelantaran ini juga berkaitan dengan karakter masyarakat, di mana sebagian besar lansia mengandalkan keluarga untuk masa tua mereka tanpa memiliki tabungan hari tua. Padahal, kepemilikan tabungan dapat memberikan perlindungan finansial bagi lansia.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Rekening Tabungan di Lembaga Keuangan Menurut Klasifikasi Desa dan Jenis Kelamin, 2024

Lebih dari dua per tiga lansia belum memiliki rekening tabungan. Hasil pendataan Susenas Maret 2024 menunjukkan, hanya 34,36 persen lansia yang memiliki tabungan di lembaga keuangan (Gambar 6.3). Dilihat dari klasifikasi desa, persentase lansia di perkotaan yang memiliki rekening tabungan lebih tinggi dibandingkan dengan lansia di perdesaan, yaitu 39,24 persen berbanding

28,20 persen. Berdasarkan jenis kelamin, lansia laki-laki memiliki persentase kepemilikan rekening tabungan yang lebih besar dibandingkan perempuan, yakni 37,97 persen dibandingkan 31,06 persen. Kepemilikan tabungan yang lebih tinggi pada lansia laki-laki ini disebabkan oleh pandangan bahwa laki-laki sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab dalam mencari nafkah dan mengelola keuangan keluarga (Adityandani dan Asandimitra 2019, 316–326).

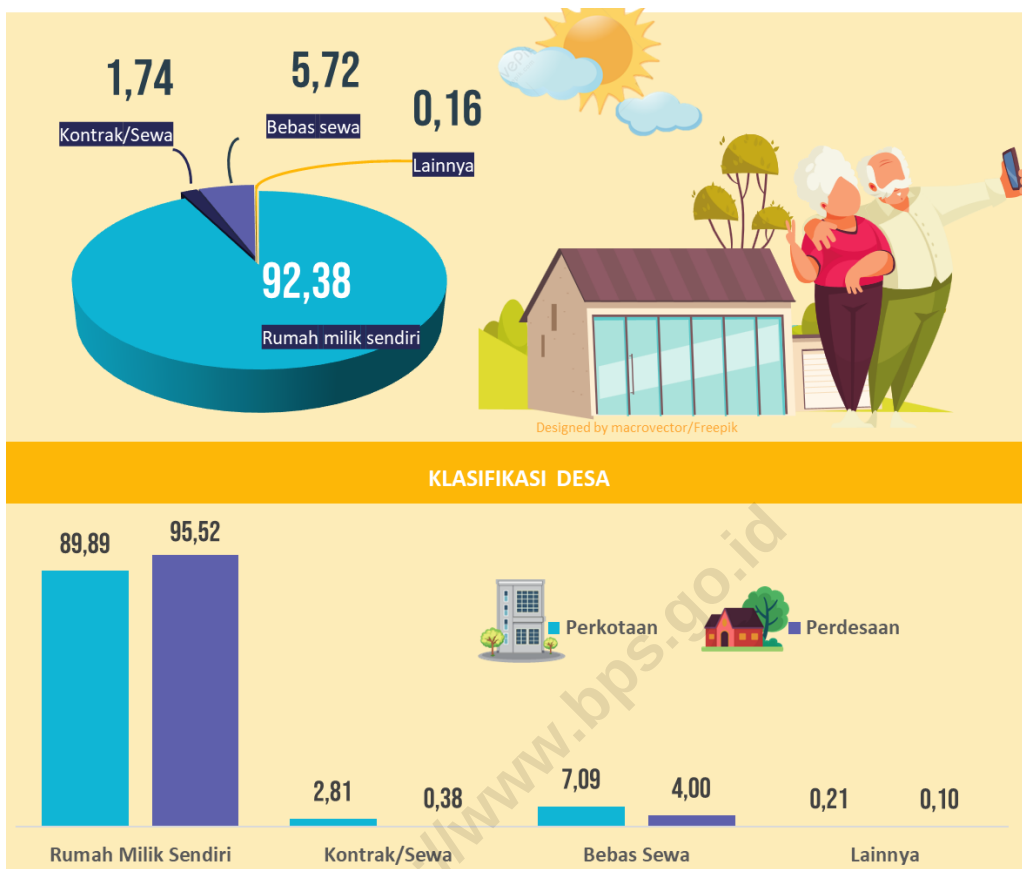
6.2 Rumah Layak Bagi Lansia

Bertambahnya usia membuat kondisi fisik lansia semakin menurun, sehingga lebih rentan mengalami berbagai masalah kesehatan (Kholifah 2016, 5). Kondisi ini menyebabkan lansia cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Karena itu, lingkungan rumah yang aman, sehat, dan nyaman sangat dibutuhkan bagi lansia. Cicih dan Nugroho (2021, 1–14) menyatakan bahwa menjaga lansia agar merasa aman dan nyaman di rumahnya sendiri dapat membantu mempertahankan kondisi kesehatan mereka.

Pada tahun 2024, tercatat bahwa 92,38 persen lansia tinggal di rumah dengan status kepemilikan sendiri (Gambar 6.4). Rumah dikategorikan sebagai milik sendiri jika menjadi hak milik lansia atau anggota rumah tangga lainnya yang tinggal bersama lansia. Selain itu, sebanyak 5,72 persen lansia tinggal di rumah bebas sewa/kontrak, 1,74 persen menempati rumah kontrak/sewa, dan 0,16 persen tinggal di rumah dengan status lainnya.

Status kepemilikan rumah bagi lansia menunjukkan pola yang berbeda antara daerah perkotaan dan perdesaan. Persentase lansia di perkotaan yang tinggal di rumah milik sendiri sebesar 89,89 persen, lebih rendah dibandingkan dengan di perdesaan yang mencapai 95,52 persen. Sebaliknya, persentase lansia yang tinggal di rumah kontrak/sewa atau bebas sewa lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di perdesaan (Gambar 6.4).

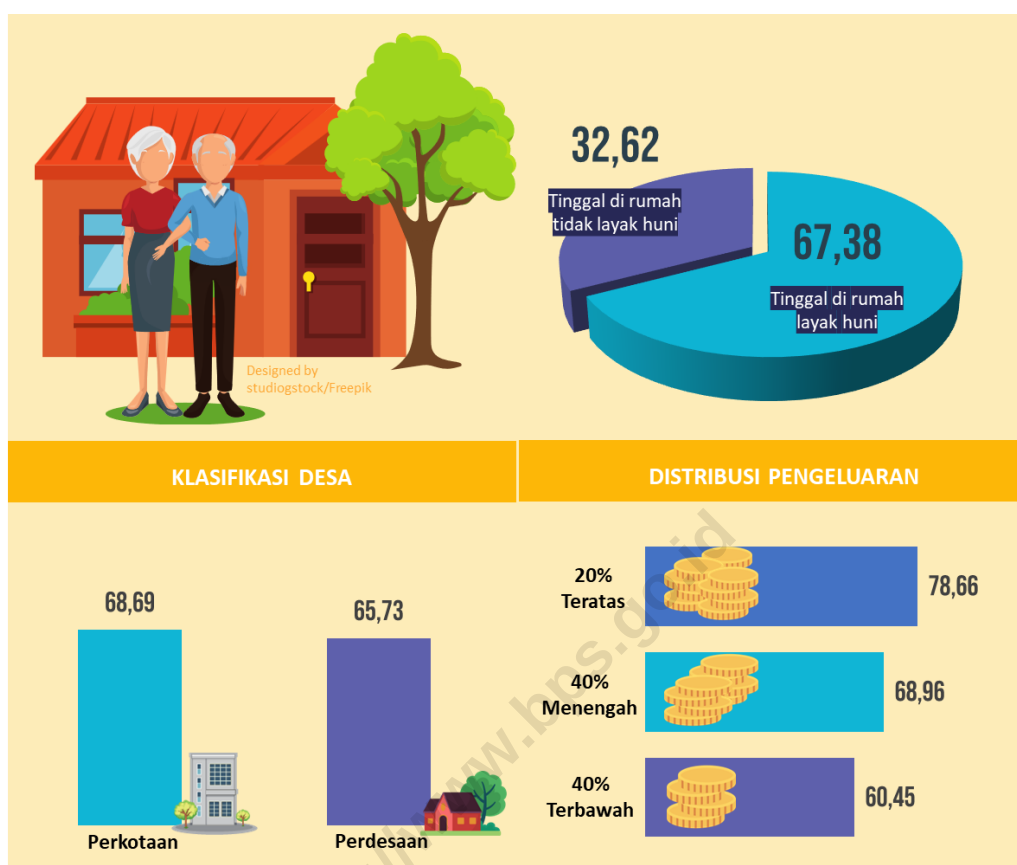




Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 6.4 Persentase Lansia Menurut Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal dan Klasifikasi Desa, 2024

Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman Pasal 5 Ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23). Lansia umumnya lebih banyak beraktivitas di dalam rumah, oleh karena itu kondisi rumah sangat berpengaruh terhadap kondisi hidup lansia. Hal ini dikarenakan kondisi rumah yang layak juga menentukan kelayakan hidup lansia (Djamhari dkk. 2021, 37).



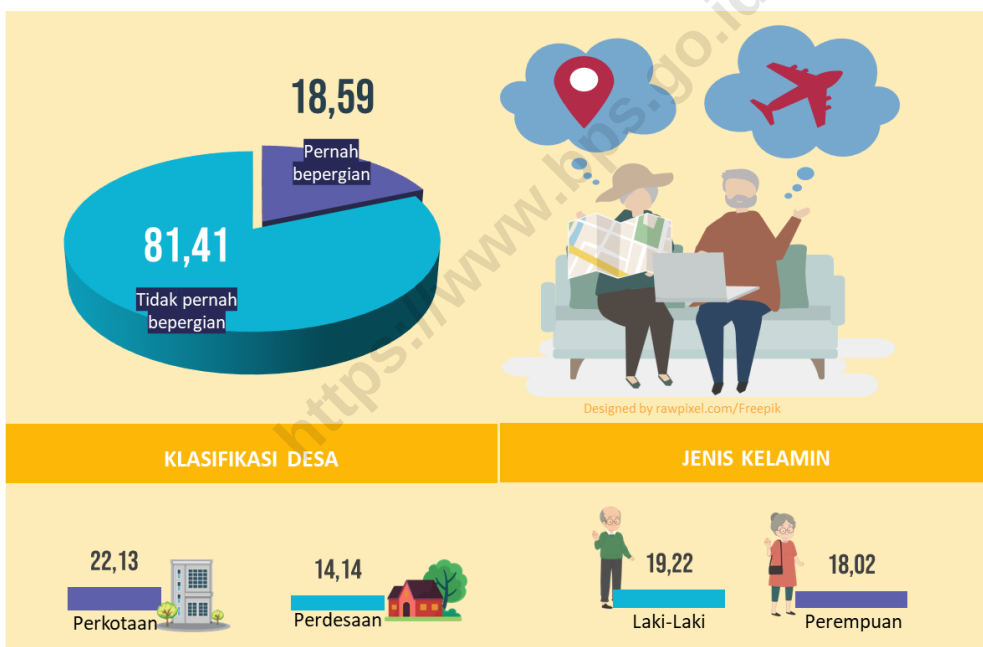
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 6.5 Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Klasifikasi Desa dan Distribusi Pengeluaran, 2024

Gambar 6.5 menunjukkan bahwa sekitar 67,38 persen lansia tinggal di rumah layak huni (Gambar 6.5). Jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan klasifikasi desa, persentase lansia di perkotaan yang tinggal di rumah layak huni lebih tinggi dibandingkan lansia di perdesaan (68,69 persen berbanding 65,73 persen). Semakin sejahtera seseorang, maka semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Seperti yang terlihat pada Gambar 6.5, sebesar 78,66 persen lansia kelompok pengeluaran 20 persen teratas tinggal di rumah layak huni. Sementara itu, lansia pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang tinggal di rumah layak huni persentasenya hanya sebesar 60,45 persen.

6.3 Kehidupan Sosial Lansia

Biasanya seseorang tidak bisa melakukan kegiatan yang dulu diminati, seperti bepergian atau berwisata, jika telah memasuki masa lansia. Keterbatasan kondisi fisik dan finansial menjadi salah satu penyebab mengapa hal tersebut sulit dilakukan oleh lansia. Padahal, melakukan perjalanan wisata memiliki banyak manfaat yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental lansia (Maharani 2018). Utami (2018, 420–427) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa bepergian atau berwisata dapat menjadi solusi untuk menghilangkan kejenuhan bagi lansia karena memberikan efek relaksasi yang akan berdampak terhadap kualitas hidup lansia.

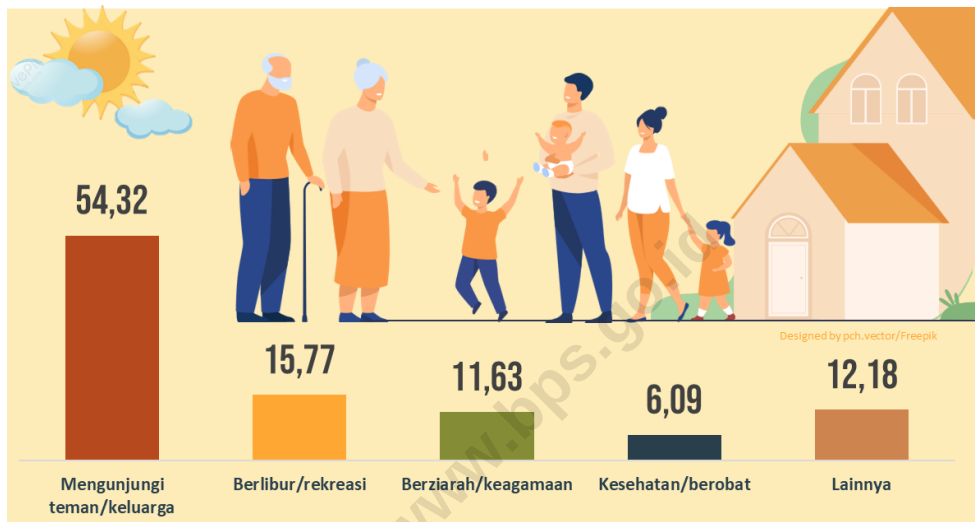


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 6.6 Persentase Lansia yang Pernah Bepergian Menurut Klasifikasi Desa dan Jenis Kelamin, 2024

Tahun 2024, hanya sekitar 18,59 persen lansia yang pernah melakukan kegiatan bepergian (Gambar 6.6). Semakin bertambahnya usia seseorang, maka kendala yang ditemui pada saat bepergian juga akan semakin banyak dan terkadang semakin rumit (Isnutomo 2012, 119–138). Kendala tersebut menyebabkan lansia tidak ingin atau belum pernah bepergian ketika sudah

menginjak usia lanjut. Apabila dilihat menurut klasifikasi desa, persentase lansia yang bepergian lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di perdesaan (22,13 persen berbanding 14,14 persen). Sementara jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase lansia laki-laki yang bepergian lebih besar dibanding perempuan (19,22 persen berbanding 18,02 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

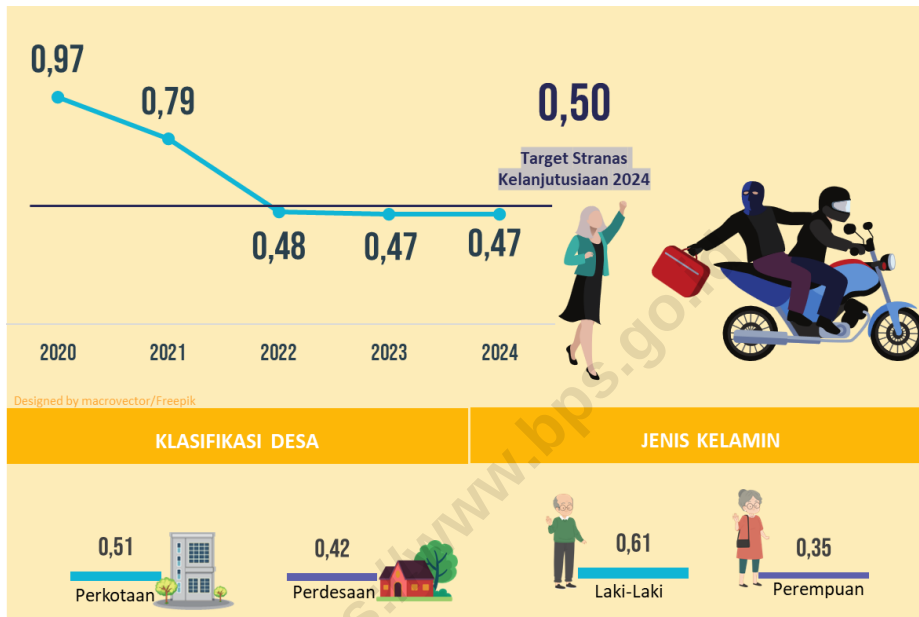
Gambar 6.7 Persentase Lansia yang Bepergian Menurut Tujuan Utama Bepergian, 2024

Analisis lebih lanjut berdasarkan tujuan utama bepergian, seperti yang terlihat pada Gambar 6.7, terlihat bahwa sebagian besar lansia yang bepergian memiliki tujuan untuk mengunjungi teman/keluarga (54,32 persen) dan berlibur atau rekreasi (15,77 persen). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ravularparthy, *et al.* dalam Rahmawati (2017, 76) dimana dikemukakan bahwa dengan melakukan kegiatan bepergian penduduk lansia bisa bertemu dengan teman atau keluarga yang dapat meningkatkan hubungan sosial mereka dan bila melakukan bepergian untuk tujuan wisata dapat menghilangkan kejenuhan dan menurunkan tingkat stres pada lansia.

Isu sosial yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama yang terjadi pada lansia, adalah masalah kriminalitas atau tindak kejahatan. Proses penuaan yang menyebabkan penurunan fungsi fisik dan psikis membuat lansia menjadi



lebih rentan terhadap berbagai ancaman. Selain lebih mudah terkena penyakit, lansia juga sering menjadi sasaran pelecehan dan eksploitasi, baik secara fisik maupun emosional (Julianti 2017, 67–79). Kejahatan terhadap lansia, seperti penipuan atau kekerasan, seringkali terjadi karena mereka dianggap lebih lemah dan mudah dimanipulasi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 6.8 Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Klasifikasi Desa dan Jenis Kelamin, 2024

Lansia yang menjadi korban kejahatan cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (Gambar 6.8). Susenas Maret 2024 mencatat sebesar 0,47 persen lansia pernah menjadi korban kejahatan. Meskipun lansia lebih jarang mengalami tindak kejahatan dibandingkan kelompok penduduk yang lebih muda (Lindesay 1996, 199–204), akan tetapi setiap tindak kejahatan perlu menjadi perhatian terlebih kejahatan terhadap lansia. Namun demikian, masih ditemukan adanya 0,51 persen lansia di perkotaan yang menjadi korban kejahatan. Selain itu, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, masih terdapat 0,61 persen lansia laki-laki yang menjadi korban kejahatan. Angka tersebut masih melebihi target stranas kelanjutan 2024 yang seharusnya maksimal sebesar 0,50 persen.

Tabel 6.1 Persentase Lansia Menurut Karakteristik dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2024

Karakteristik	Distribusi Pengeluaran			Jumlah
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	41,87	37,67	20,45	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	40,62	38,63	20,75	100,00
Perempuan	43,03	36,80	20,18	100,00
Kelompok Umur				
Lansia Muda (60–69 tahun)	38,56	39,46	21,98	100,00
Lansia Madya (70–79 tahun)	45,46	35,51	19,03	100,00
Lansia Tua (80+ tahun)	54,53	31,62	13,85	100,00
Status Disabilitas				
Nondisabilitas	41,03	38,07	20,90	100,00
Disabilitas	49,62	34,04	16,34	100,00
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	41,10	36,87	22,03	100,00
Perdesaan	41,85	37,98	20,17	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Karakteristik dan Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga, 2024

Karakteristik	Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga				Jumlah
	ART yang Bekerja	Kiriman uang/ barang	Investasi*)	Pensiunan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	83,74	10,97	0,28	5,01	100,00
Distribusi Pengeluaran					
20% Teratas	74,03	11,14	0,60	14,22	100,00
40% Menengah	84,83	10,71	0,28	4,17	100,00
40% Terbawah	87,70	11,13	0,10	1,07	100,00
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	80,87	11,25	0,33	7,55	100,00
Perdesaan	87,42	10,62	0,20	1,75	100,00

Catatan: Termasuk deposito, royalti, saham, bunga bank, dll

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 6.3 Persentase Lansia yang Memiliki Rekening Tabungan di Lembaga Keuangan Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2024

Karakteristik	Klasifikasi Desa		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	39,24	28,20	34,36
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	43,06	31,55	37,97
Perempuan	35,75	25,13	31,06
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60–69 tahun)	41,31	29,97	36,37
Lansia Madya (70–79 tahun)	37,27	26,68	32,54
Lansia Tua (80+ tahun)	29,61	21,08	25,51
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	40,18	29,01	35,24
Disabilitas	30,55	20,89	26,23
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	67,68	39,39	58,80
40% Menengah	37,86	28,55	33,12
40% Terbawah	25,24	22,49	23,54

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 6.4 Persentase Lansia Menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2024

Karakteristik	Sumber Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati				Jumlah
	Milik sendiri	Kontrak/ sewa	Bebas sewa	Dinas/ Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	92,38	1,74	5,72	0,16	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	93,20	1,83	4,83	0,15	100,00
Perempuan	91,64	1,65	6,54	0,17	100,00
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60–69 tahun)	92,48	2,03	5,31	0,18	100,00
Lansia Madya (70–79 tahun)	92,28	1,34	6,25	0,13	100,00
Lansia Tua (80+ tahun)	91,98	0,91	7,01	0,11	100,00
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	92,51	1,78	5,54	0,17	100,00
Disabilitas	91,18	1,31	7,42	0,09	100,00
Distribusi Pengeluaran					
20% Teratas	92,25	2,01	5,34	0,41	100,00
40% Menengah	91,92	2,13	5,83	0,12	100,00
40% Terbawah	92,86	1,25	5,81	0,08	100,00
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	89,89	2,81	7,09	0,21	100,00
Perdesaan	95,52	0,38	4,00	0,10	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 6.5 Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2024

Karakteristik	Klasifikasi Desa		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	68,69	65,73	67,38
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	68,69	66,11	67,55
Perempuan	68,68	65,38	67,22
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60–69 tahun)	69,20	66,21	67,90
Lansia Madya (70–79 tahun)	67,88	64,74	66,48
Lansia Tua (80+ tahun)	67,40	65,53	66,50
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	68,88	66,11	67,65
Disabilitas	66,91	62,28	64,84
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	80,98	74,82	78,66
40% Menengah	69,32	68,02	68,96
40% Terbawah	61,53	59,27	60,45

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 6.6 Persentase Lansia yang Pernah Bepergian Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2024

Karakteristik	Klasifikasi Desa		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	22,13	14,14	18,59
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	22,48	15,13	19,22
Perempuan	21,80	13,24	18,02
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60–69 tahun)	25,83	16,59	21,81
Lansia Madya (70–79 tahun)	17,29	11,38	14,65
Lansia Tua (80+ tahun)	9,34	6,23	7,85
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	23,31	14,82	19,56
Disabilitas	11,18	7,99	9,75
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	42,33	26,07	37,10
40% Menengah	22,55	14,66	18,91
40% Terbawah	10,91	7,92	9,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 6.7 Persentase Lansia yang Pernah Bepergian Menurut Karakteristik dan Maksud Utama Bepergian, 2024

Karakteristik	Maksud Utama Bepergian				
	Mengunjungi teman/keluarga	Berlibur/rekreasi	Berziarah/keagamaan	Kesehatan/berobat	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	54,32	15,77	11,63	6,09	12,18
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	55,09	14,60	10,23	6,52	13,56
Perempuan	53,57	16,91	13,00	5,68	10,84
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60–69 tahun)	53,26	16,20	12,36	5,13	13,04
Lansia Madya (70–79 tahun)	57,57	14,96	9,23	8,33	9,90
Lansia Tua (80+ tahun)	56,18	11,89	11,42	12,10	8,41
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	54,57	15,99	11,87	5,25	12,32
Disabilitas	49,78	11,68	7,26	21,66	9,61
Distribusi Pengeluaran					
20 Persen Teratas	49,94	20,73	8,90	6,33	14,10
40 Persen Menengah	56,82	13,47	11,90	6,12	11,69
40 Persen Terbawah	58,29	10,29	16,48	5,60	9,34
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	52,17	19,04	10,84	4,41	13,54
Perdesaan	58,56	9,31	13,21	9,42	9,51

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 6.8 Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2024

Karakteristik	Klasifikasi Desa		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	0,51	0,42	0,47
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	0,63	0,57	0,61
Perempuan	0,40	0,29	0,35

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 6.9 Persentase Lansia di Perkotaan Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2024

Provinsi	Distribusi Pengeluaran			Jumlah
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	31,46	43,21	25,32	100,00
Sumatera Utara	32,09	39,24	28,67	100,00
Sumatera Barat	34,75	38,76	26,49	100,00
Riau	36,17	39,19	24,64	100,00
Jambi	36,38	38,06	25,55	100,00
Sumatera Selatan	34,22	39,50	26,28	100,00
Bengkulu	36,04	37,79	26,17	100,00
Lampung	37,58	40,77	21,65	100,00
Kep. Bangka Belitung	40,11	36,88	23,01	100,00
Kepulauan Riau	38,91	38,30	22,79	100,00
DKI Jakarta	25,27	39,51	35,22	100,00
Jawa Barat	39,97	39,45	20,58	100,00
Jawa Tengah	43,31	37,44	19,26	100,00
DI Yogyakarta	44,33	36,08	19,58	100,00
Jawa Timur	45,69	36,75	17,57	100,00
Banten	38,33	35,82	25,86	100,00
Bali	44,18	36,70	19,13	100,00
Nusa Tenggara Barat	35,33	40,02	24,64	100,00
Nusa Tenggara Timur	37,41	37,58	25,00	100,00
Kalimantan Barat	33,23	39,17	27,61	100,00
Kalimantan Tengah	38,45	37,16	24,39	100,00
Kalimantan Selatan	38,09	38,76	23,15	100,00
Kalimantan Timur	36,73	39,51	23,75	100,00
Kalimantan Utara	32,84	37,98	29,18	100,00
Sulawesi Utara	33,05	41,50	25,45	100,00
Sulawesi Tengah	32,52	42,55	24,93	100,00
Sulawesi Selatan	34,98	40,27	24,75	100,00
Sulawesi Tenggara	32,27	43,39	24,34	100,00
Gorontalo	36,40	41,04	22,56	100,00
Sulawesi Barat	34,78	45,87	19,35	100,00
Maluku	35,06	38,31	26,63	100,00
Maluku Utara	32,87	43,20	23,93	100,00
Papua Barat	34,73	32,63	32,64	100,00
Papua Barat Daya	29,41	45,98	24,62	100,00
Papua	31,27	38,82	29,91	100,00
Papua Selatan	38,52	32,62	28,86	100,00
Papua Tengah	35,09	39,44	25,47	100,00
Papua Pegunungan	46,66	NA	37,92	100,00
Indonesia	41,10	36,87	22,03	100,00

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 6.10 Persentase Lansia di Perdesaan Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2024

Provinsi	Distribusi Pengeluaran			Jumlah
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	34,59	41,21	24,19	100,00
Sumatera Utara	29,47	39,37	31,17	100,00
Sumatera Barat	36,19	40,89	22,92	100,00
Riau	34,65	38,39	26,96	100,00
Jambi	39,85	36,41	23,75	100,00
Sumatera Selatan	36,27	42,20	21,53	100,00
Bengkulu	40,13	40,29	19,58	100,00
Lampung	41,81	37,87	20,32	100,00
Kep. Bangka Belitung	38,11	40,40	21,50	100,00
Kepulauan Riau	34,08	38,17	27,75	100,00
DKI Jakarta	—	—	—	100,00
Jawa Barat	40,26	39,86	19,88	100,00
Jawa Tengah	46,29	36,53	17,18	100,00
DI Yogyakarta	43,36	39,59	17,05	100,00
Jawa Timur	43,82	38,25	17,93	100,00
Banten	40,30	39,87	19,82	100,00
Bali	38,15	40,53	21,32	100,00
Nusa Tenggara Barat	43,60	38,19	18,21	100,00
Nusa Tenggara Timur	35,74	39,32	24,93	100,00
Kalimantan Barat	41,94	38,67	19,40	100,00
Kalimantan Tengah	41,35	39,74	18,91	100,00
Kalimantan Selatan	37,30	40,61	22,10	100,00
Kalimantan Timur	36,90	39,86	23,24	100,00
Kalimantan Utara	27,79	48,33	23,89	100,00
Sulawesi Utara	36,44	40,76	22,80	100,00
Sulawesi Tengah	34,24	41,62	24,14	100,00
Sulawesi Selatan	40,65	39,01	20,33	100,00
Sulawesi Tenggara	36,07	40,46	23,47	100,00
Gorontalo	39,87	36,64	23,49	100,00
Sulawesi Barat	40,78	35,33	23,89	100,00
Maluku	31,61	41,95	26,44	100,00
Maluku Utara	34,56	41,11	24,33	100,00
Papua Barat	34,24	32,89	32,88	100,00
Papua Barat Daya	34,66	42,18	23,16	100,00
Papua	27,03	45,38	27,60	100,00
Papua Selatan	17,02	45,48	37,50	100,00
Papua Tengah	37,97	40,54	21,50	100,00
Papua Pegunungan	38,50	30,79	30,71	100,00
Indonesia	41,85	37,98	20,17	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 6.11 Persentase Lansia Laki-Laki Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2024

Provinsi	Distribusi Pengeluaran			Jumlah
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	35,19	40,12	24,69	100,00
Sumatera Utara	29,61	41,58	28,81	100,00
Sumatera Barat	35,41	39,67	24,92	100,00
Riau	34,91	39,33	25,76	100,00
Jambi	36,44	38,13	25,43	100,00
Sumatera Selatan	33,03	43,41	23,56	100,00
Bengkulu	37,04	41,46	21,51	100,00
Lampung	37,96	40,15	21,90	100,00
Kep. Bangka Belitung	39,35	37,22	23,42	100,00
Kepulauan Riau	36,42	40,18	23,40	100,00
DKI Jakarta	26,37	40,27	33,35	100,00
Jawa Barat	39,65	40,33	20,02	100,00
Jawa Tengah	44,35	37,78	17,87	100,00
DI Yogyakarta	44,46	36,47	19,07	100,00
Jawa Timur	44,36	38,15	17,49	100,00
Banten	38,18	38,73	23,08	100,00
Bali	42,22	38,70	19,08	100,00
Nusa Tenggara Barat	39,38	39,09	21,53	100,00
Nusa Tenggara Timur	36,26	40,13	23,62	100,00
Kalimantan Barat	36,17	39,85	23,98	100,00
Kalimantan Tengah	38,88	38,00	23,13	100,00
Kalimantan Selatan	36,72	39,53	23,75	100,00
Kalimantan Timur	36,61	39,40	23,98	100,00
Kalimantan Utara	28,13	44,96	26,90	100,00
Sulawesi Utara	34,16	42,26	23,58	100,00
Sulawesi Tengah	33,04	45,34	21,61	100,00
Sulawesi Selatan	37,55	40,54	21,91	100,00
Sulawesi Tenggara	34,94	41,81	23,25	100,00
Gorontalo	41,11	38,21	20,68	100,00
Sulawesi Barat	36,48	38,08	25,45	100,00
Maluku	33,73	41,54	24,72	100,00
Maluku Utara	33,77	42,86	23,37	100,00
Papua Barat	38,32	34,20	27,48	100,00
Papua Barat Daya	33,51	41,21	25,29	100,00
Papua	32,13	37,44	30,44	100,00
Papua Selatan	23,00	43,44	33,57	100,00
Papua Tengah	33,81	38,06	28,12	100,00
Papua Pegunungan	36,60	32,35	31,05	100,00
Indonesia	40,62	38,63	20,75	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 6.12 Persentase Lansia Perempuan Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2024

Provinsi	Distribusi Pengeluaran			Jumlah
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	33,86	41,06	25,08	100,00
Sumatera Utara	32,54	38,64	28,82	100,00
Sumatera Barat	37,38	38,28	24,35	100,00
Riau	35,15	39,80	25,04	100,00
Jambi	40,51	35,18	24,30	100,00
Sumatera Selatan	39,10	38,20	22,70	100,00
Bengkulu	42,37	36,99	20,64	100,00
Lampung	41,30	36,99	21,70	100,00
Kep. Bangka Belitung	41,35	35,00	23,66	100,00
Kepulauan Riau	41,63	37,26	21,11	100,00
DKI Jakarta	24,27	38,81	36,92	100,00
Jawa Barat	41,90	38,36	19,74	100,00
Jawa Tengah	45,59	36,39	18,03	100,00
DI Yogyakarta	46,21	35,35	18,44	100,00
Jawa Timur	46,87	36,25	16,88	100,00
Banten	41,49	34,87	23,64	100,00
Bali	44,30	38,49	17,20	100,00
Nusa Tenggara Barat	40,16	38,15	21,69	100,00
Nusa Tenggara Timur	37,77	38,59	23,64	100,00
Kalimantan Barat	40,60	36,08	23,32	100,00
Kalimantan Tengah	41,97	37,35	20,68	100,00
Kalimantan Selatan	39,90	37,75	22,34	100,00
Kalimantan Timur	38,52	39,36	22,12	100,00
Kalimantan Utara	33,37	38,15	28,47	100,00
Sulawesi Utara	34,31	41,84	23,85	100,00
Sulawesi Tengah	34,60	41,70	23,70	100,00
Sulawesi Selatan	39,88	38,49	21,62	100,00
Sulawesi Tenggara	36,94	40,58	22,48	100,00
Gorontalo	35,68	36,95	27,38	100,00
Sulawesi Barat	40,81	39,29	19,90	100,00
Maluku	32,82	44,17	23,01	100,00
Maluku Utara	35,85	39,66	24,49	100,00
Papua Barat	30,22	35,74	34,04	100,00
Papua Barat Daya	38,40	37,03	24,57	100,00
Papua	32,22	38,85	28,92	100,00
Papua Selatan	23,32	53,11	23,56	100,00
Papua Tengah	31,61	41,22	27,17	100,00
Papua Pegunungan	38,80	28,97	32,22	100,00
Indonesia	43,03	36,80	20,18	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 6.13 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2024

Provinsi	Distribusi Pengeluaran			Jumlah
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	34,49	40,61	24,90	100,00
Sumatera Utara	31,18	40,00	28,82	100,00
Sumatera Barat	36,45	38,93	24,61	100,00
Riau	35,03	39,56	25,40	100,00
Jambi	38,48	36,65	24,86	100,00
Sumatera Selatan	36,17	40,72	23,11	100,00
Bengkulu	39,69	39,23	21,08	100,00
Lampung	39,60	38,60	21,80	100,00
Kep. Bangka Belitung	40,33	36,13	23,54	100,00
Kepulauan Riau	38,96	38,76	22,28	100,00
DKI Jakarta	25,27	39,51	35,22	100,00
Jawa Barat	40,80	39,32	19,87	100,00
Jawa Tengah	45,01	37,03	17,95	100,00
DI Yogyakarta	45,41	35,87	18,73	100,00
Jawa Timur	45,71	37,13	17,16	100,00
Banten	39,82	36,83	23,36	100,00
Bali	43,33	38,59	18,08	100,00
Nusa Tenggara Barat	39,81	38,58	21,61	100,00
Nusa Tenggara Timur	37,06	39,31	23,63	100,00
Kalimantan Barat	38,41	37,94	23,65	100,00
Kalimantan Tengah	40,31	37,70	22,00	100,00
Kalimantan Selatan	38,36	38,62	23,03	100,00
Kalimantan Timur	37,53	39,38	23,09	100,00
Kalimantan Utara	30,58	41,79	27,64	100,00
Sulawesi Utara	34,24	42,04	23,72	100,00
Sulawesi Tengah	33,82	43,51	22,66	100,00
Sulawesi Selatan	38,84	39,41	21,75	100,00
Sulawesi Tenggara	35,98	41,17	22,85	100,00
Gorontalo	38,20	37,54	24,26	100,00
Sulawesi Barat	38,78	38,72	22,50	100,00
Maluku	33,26	42,91	23,83	100,00
Maluku Utara	34,81	41,26	23,93	100,00
Papua Barat	34,53	34,92	30,55	100,00
Papua Barat Daya	35,88	39,18	24,94	100,00
Papua	32,17	38,11	29,72	100,00
Papua Selatan	23,15	47,94	28,91	100,00
Papua Tengah	32,89	39,39	27,73	100,00
Papua Pegunungan	37,42	31,09	31,49	100,00
Indonesia	41,87	37,67	20,45	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 6.14 Persentase Lansia yang Memiliki Rekening Tabungan di Lembaga Keuangan Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	43,99	33,60	36,34	37,55	36,98
Sumatera Utara	41,21	33,57	42,15	34,11	37,83
Sumatera Barat	44,74	28,79	36,63	36,50	36,56
Riau	43,50	31,72	45,90	26,65	36,38
Jambi	42,78	25,76	39,36	23,20	31,25
Sumatera Selatan	36,39	21,79	32,17	22,65	27,25
Bengkulu	40,94	31,31	40,54	27,64	34,10
Lampung	36,82	28,49	32,48	29,69	31,10
Kep. Bangka Belitung	37,17	22,33	36,52	25,29	31,01
Kepulauan Riau	49,60	24,39	54,22	34,82	44,77
DKI Jakarta	62,75	—	70,68	55,55	62,75
Jawa Barat	36,10	32,20	39,04	31,36	35,11
Jawa Tengah	33,47	28,95	33,48	29,33	31,27
DI Yogyakarta	48,27	32,37	41,27	44,64	43,09
Jawa Timur	32,32	24,85	30,91	27,03	28,83
Banten	37,83	18,06	37,77	27,35	32,62
Bali	37,40	22,85	42,02	24,34	32,63
Nusa Tenggara Barat	42,24	31,51	38,75	35,55	37,01
Nusa Tenggara Timur	58,92	36,19	44,98	38,56	41,56
Kalimantan Barat	42,79	26,00	39,92	25,69	32,73
Kalimantan Tengah	45,20	25,61	41,24	24,64	33,58
Kalimantan Selatan	43,78	24,27	38,39	28,93	33,52
Kalimantan Timur	49,38	39,83	56,44	34,96	46,11
Kalimantan Utara	40,86	32,11	41,51	32,27	37,20
Sulawesi Utara	43,94	26,53	37,52	34,17	35,78
Sulawesi Tengah	43,23	26,58	35,09	28,04	31,55
Sulawesi Selatan	47,25	27,33	39,91	32,47	35,81
Sulawesi Tenggara	55,24	34,92	44,72	39,15	41,83
Gorontalo	42,28	30,34	34,27	37,16	35,82
Sulawesi Barat	43,33	29,90	35,67	30,24	32,78
Maluku	47,68	27,47	34,24	36,70	35,52
Maluku Utara	44,52	20,06	30,92	22,61	26,76
Papua Barat	64,71	32,29	48,12	35,87	42,39
Papua Barat Daya	59,55	36,22	55,38	38,93	47,39
Papua	72,35	41,65	66,98	52,12	59,92
Papua Selatan	60,31	26,60	43,40	34,69	39,35
Papua Tengah	71,65	12,26	35,66	28,47	32,65
Papua Pegunungan	52,00	18,06	25,00	12,92	20,50
Indonesia	39,24	28,20	37,97	31,06	34,36

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 6.15 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2024

Provinsi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal			
	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Dinas/Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	93,84	0,91	4,85	0,40
Sumatera Utara	84,44	4,47	10,8	0,29
Sumatera Barat	85,76	1,88	12,3	0,04
Riau	90,86	3,13	5,62	NA
Jambi	93,56	1,37	4,92	NA
Sumatera Selatan	90,31	1,60	8,01	0,09
Bengkulu	94,88	1,84	3,17	NA
Lampung	95,75	1,16	3,06	NA
Kep. Bangka Belitung	94,46	0,51	5,02	NA
Kepulauan Riau	85,39	6,25	8,32	NA
DKI Jakarta	77,73	9,37	12,5	0,41
Jawa Barat	92,37	2,20	5,38	0,06
Jawa Tengah	93,60	0,58	5,80	NA
DI Yogyakarta	95,16	0,87	3,97	NA
Jawa Timur	94,91	0,92	4,10	0,07
Banten	93,28	1,77	4,15	0,80
Bali	95,98	1,08	2,85	NA
Nusa Tenggara Barat	94,87	0,34	4,74	NA
Nusa Tenggara Timur	97,61	0,37	1,74	0,28
Kalimantan Barat	95,78	0,15	4,03	NA
Kalimantan Tengah	91,69	1,72	5,76	0,83
Kalimantan Selatan	90,38	1,86	7,15	0,60
Kalimantan Timur	88,48	3,21	8,02	NA
Kalimantan Utara	87,95	5,11	6,62	NA
Sulawesi Utara	88,03	1,12	10,8	NA
Sulawesi Tengah	94,13	0,86	4,95	NA
Sulawesi Selatan	93,45	0,78	5,51	0,26
Sulawesi Tenggara	95,43	0,62	3,95	NA
Gorontalo	90,71	NA	9,00	NA
Sulawesi Barat	95,59	NA	4,04	NA
Maluku	92,04	1,19	6,51	NA
Maluku Utara	93,92	0,85	5,23	NA
Papua Barat	89,58	NA	5,42	3,62
Papua Barat Daya	93,82	2,01	3,26	NA
Papua	81,09	7,38	8,73	2,81
Papua Selatan	83,34	NA	11,0	NA
Papua Tengah	91,73	5,59	NA	NA
Papua Pegunungan	99,60	NA	NA	NA
Indonesia	92,38	1,74	5,72	0,16

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 6.16 Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	74,67	66,47	69,38	68,92	69,14
Sumatera Utara	81,18	71,67	77,34	76,66	76,98
Sumatera Barat	66,24	61,42	63,88	63,67	63,77
Riau	77,32	69,43	72,01	73,11	72,55
Jambi	71,61	66,02	68,66	67,00	67,83
Sumatera Selatan	71,00	61,54	65,14	65,02	65,08
Bengkulu	55,18	55,21	55,67	54,73	55,20
Lampung	59,35	70,39	66,43	67,43	66,92
Kep. Bangka Belitung	47,60	33,80	42,61	41,10	41,87
Kepulauan Riau	57,11	20,13	56,37	43,35	50,03
DKI Jakarta	53,28	—	50,32	55,97	53,28
Jawa Barat	55,85	60,54	57,36	56,73	57,04
Jawa Tengah	72,16	68,25	71,12	69,50	70,25
DI Yogyakarta	87,49	88,32	88,36	87,26	87,76
Jawa Timur	74,53	70,42	73,82	71,56	72,61
Banten	70,29	51,82	65,27	65,59	65,43
Bali	93,95	86,25	91,30	91,53	91,43
Nusa Tenggara Barat	67,39	60,41	63,86	64,09	63,98
Nusa Tenggara Timur	60,29	46,05	49,27	49,55	49,42
Kalimantan Barat	76,22	66,17	69,54	70,84	70,20
Kalimantan Tengah	68,80	50,35	59,05	56,45	57,85
Kalimantan Selatan	70,81	53,70	62,10	61,55	61,82
Kalimantan Timur	85,60	62,25	76,95	78,35	77,62
Kalimantan Utara	72,56	67,25	70,80	69,80	70,33
Sulawesi Utara	80,08	75,21	76,42	79,09	77,80
Sulawesi Tengah	64,29	65,76	64,52	66,12	65,32
Sulawesi Selatan	79,83	68,33	72,99	73,42	73,23
Sulawesi Tenggara	80,15	75,75	77,76	76,77	77,24
Gorontalo	81,46	64,18	69,45	74,40	72,10
Sulawesi Barat	74,47	59,30	64,17	61,13	62,55
Maluku	74,00	67,62	69,67	70,62	70,16
Maluku Utara	86,34	64,24	71,24	69,34	70,29
Papua Barat	76,42	57,27	60,20	66,70	63,24
Papua Barat Daya	72,74	43,37	59,52	55,23	57,44
Papua	75,31	48,15	67,92	60,33	64,31
Papua Selatan	63,40	39,45	50,99	45,66	48,51
Papua Tengah	88,40	21,51	41,54	48,56	44,48
Papua Pegunungan	32,25	NA	NA	4,31	2,89
Indonesia	68,69	65,73	67,55	67,22	67,38

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 6.17 Persentase Lansia yang Bepergian menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	21,62	16,63	18,63	17,91	18,25
Sumatera Utara	30,03	24,03	25,87	28,67	27,37
Sumatera Barat	29,76	23,22	26,32	26,48	26,40
Riau	22,15	14,25	18,92	15,80	17,38
Jambi	16,22	16,77	18,42	14,77	16,59
Sumatera Selatan	18,98	16,47	18,77	16,14	17,41
Bengkulu	35,87	25,50	28,83	28,18	28,51
Lampung	19,96	17,07	18,35	17,58	17,97
Kep. Bangka Belitung	26,88	30,35	30,43	26,14	28,32
Kepulauan Riau	22,40	11,06	20,85	19,58	20,23
DKI Jakarta	34,15	–	33,40	34,84	34,15
Jawa Barat	20,89	13,58	19,46	18,64	19,04
Jawa Tengah	18,20	11,78	15,47	14,72	15,07
DI Yogyakarta	26,44	12,38	21,09	22,51	21,86
Jawa Timur	19,92	10,37	16,72	14,38	15,46
Banten	25,04	9,62	22,23	19,70	20,98
Bali	13,62	11,65	14,74	11,42	12,97
Nusa Tenggara Barat	24,99	17,71	23,21	19,96	21,44
Nusa Tenggara Timur	23,58	13,11	18,41	13,10	15,58
Kalimantan Barat	21,82	10,21	15,73	14,01	14,86
Kalimantan Tengah	22,61	13,61	17,57	16,93	17,27
Kalimantan Selatan	29,83	20,28	25,05	24,58	24,81
Kalimantan Timur	18,59	10,61	16,35	15,34	15,86
Kalimantan Utara	12,64	10,64	11,74	11,87	11,80
Sulawesi Utara	24,89	24,54	24,13	25,28	24,73
Sulawesi Tengah	17,13	13,38	13,96	15,03	14,50
Sulawesi Selatan	23,22	15,57	19,81	18,03	18,83
Sulawesi Tenggara	32,24	20,26	26,61	22,23	24,34
Gorontalo	22,30	20,14	20,09	22,04	21,13
Sulawesi Barat	19,15	16,05	17,87	15,69	16,71
Maluku	16,29	14,08	15,65	14,32	14,96
Maluku Utara	10,91	10,71	11,88	9,65	10,77
Papua Barat	16,55	12,36	15,77	11,27	13,66
Papua Barat Daya	16,26	31,31	25,27	22,87	24,10
Papua	11,96	11,14	12,57	10,58	11,63
Papua Selatan	14,74	7,64	12,40	7,95	10,33
Papua Tengah	12,99	5,42	8,38	7,52	8,02
Papua Pegunungan	NA	4,96	4,76	4,33	4,60
Indonesia	22,13	14,14	19,22	18,02	18,59

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



**Tabel 6.18 Sampling Error Persentase Lansia Kelompok Pengeluaran Rumah
Tangga 40 Persen Terbawah Menurut Provinsi dan Klasifikasi
Desa, 2024**

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)
Aceh	31,46	26,70	36,23	7,72	34,59	31,65	37,54	4,34	34,49	31,99	37,00	3,71
Sumatera Utara	32,09	28,95	35,22	4,98	29,47	26,83	32,11	4,57	31,18	29,11	33,26	3,39
Sumatera Barat	34,75	30,61	38,88	6,07	36,19	33,38	39,00	3,96	36,45	34,01	38,90	3,42
Riau	36,17	30,88	41,47	7,47	34,65	30,71	38,59	5,80	35,03	31,88	38,19	4,59
Jambi	36,38	30,99	41,78	7,57	39,85	36,06	43,64	4,85	38,48	35,40	41,57	4,09
Sumatera Selatan	34,22	29,73	38,71	6,69	36,27	33,34	39,20	4,12	36,17	33,68	38,65	3,51
Bengkulu	36,04	30,04	42,04	8,50	40,13	36,07	44,19	5,16	39,69	36,33	43,06	4,32
Lampung	37,58	32,35	42,81	7,10	41,81	38,84	44,77	3,62	39,60	37,06	42,15	3,28
Kep. Bangka Belitung	40,11	34,54	45,68	7,09	38,11	31,95	44,26	8,24	40,33	36,19	44,47	5,23
Kepulauan Riau	38,91	32,48	45,33	8,43	34,08	23,85	44,31	15,32	38,96	33,48	44,44	7,18
DKI Jakarta	25,27	22,02	28,52	6,57	—	—	—	—	25,27	22,02	28,52	6,57
Jawa Barat	39,97	37,86	42,09	2,70	40,26	37,63	42,89	3,33	40,80	39,09	42,51	2,14
Jawa Tengah	43,31	41,55	45,07	2,07	46,29	44,66	47,92	1,80	45,01	43,81	46,21	1,36
DI Yogyakarta	44,33	40,42	48,24	4,50	43,36	38,51	48,21	5,70	45,41	42,39	48,42	3,39
Jawa Timur	45,69	44,00	47,38	1,89	43,82	42,31	45,32	1,75	45,71	44,57	46,85	1,27
Banten	38,33	34,17	42,48	5,53	40,30	35,23	45,38	6,43	39,82	36,52	43,12	4,23
Bali	44,18	40,93	47,43	3,75	38,15	34,26	42,04	5,20	43,33	40,83	45,83	2,95
Nusa Tenggara Barat	35,33	30,29	40,37	7,28	43,60	38,85	48,34	5,55	39,81	36,35	43,26	4,43
Nusa Tenggara Timur	37,41	31,44	43,39	8,15	35,74	33,48	38,01	3,23	37,06	34,91	39,22	2,97
Kalimantan Barat	33,23	28,39	38,07	7,43	41,94	38,39	45,48	4,31	38,41	35,61	41,21	3,72
Kalimantan Tengah	38,45	32,37	44,53	8,06	41,35	36,94	45,75	5,43	40,31	36,71	43,90	4,55
Kalimantan Selatan	38,09	33,40	42,77	6,28	37,30	33,71	40,89	4,91	38,36	35,45	41,26	3,87
Kalimantan Timur	36,73	31,91	41,55	6,69	36,90	30,11	43,70	9,39	37,53	33,60	41,47	5,35
Kalimantan Utara	32,84	25,08	40,60	12,05	27,79	19,54	36,03	15,13	30,58	25,00	36,15	9,30
Sulawesi Utara	33,05	29,20	36,90	5,94	36,44	33,27	39,61	4,44	34,24	31,83	36,64	3,58
Sulawesi Tengah	32,52	26,11	38,93	10,06	34,24	30,73	37,75	5,23	33,82	30,73	36,91	4,66
Sulawesi Selatan	34,98	31,62	38,34	4,90	40,65	38,22	43,08	3,05	38,84	36,87	40,80	2,58
Sulawesi Tenggara	32,27	26,42	38,12	9,24	36,07	32,78	39,36	4,65	35,98	33,08	38,88	4,11
Gorontalo	36,40	29,14	43,65	10,17	39,87	34,24	45,50	7,20	38,20	33,81	42,60	5,87
Sulawesi Barat	34,78	24,89	44,67	14,51	40,78	35,50	46,07	6,61	38,78	34,22	43,34	6,00
Maluku	35,06	28,79	41,32	9,11	31,61	27,70	35,53	6,32	33,26	30,05	36,47	4,92
Maluku Utara	32,87	25,40	40,34	11,59	34,56	30,16	38,96	6,49	34,81	31,02	38,59	5,55
Papua Barat	34,73	22,80	46,65	17,53	34,24	26,10	42,38	12,13	34,53	28,11	40,96	9,49
Papua Barat Daya	29,41	17,93	40,89	19,91	34,66	27,71	41,62	10,24	35,88	29,36	42,41	9,28
Papua	31,27	24,05	38,49	11,78	27,03	21,76	32,29	9,94	32,17	27,63	36,72	7,20
Papua Selatan	38,52	20,98	56,06	23,23	17,02	11,34	22,71	17,04	23,15	15,47	30,83	16,92
Papua Tengah	35,09	22,63	47,56	18,13	37,97	30,91	45,02	9,48	32,89	27,56	38,22	8,27
Papua Pegunungan	46,66	19,61	73,70	29,57	38,50	31,20	45,80	9,68	37,42	30,40	44,44	9,58
Indonesia	41,10	40,34	41,86	0,94	41,85	41,22	42,47	0,76	41,87	41,37	42,38	0,61

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

**Tabel 6.19 Sampling Error Persentase Lansia Kelompok Pengeluaran Rumah
Tangga 40 Persen Menengah Menurut Provinsi dan Klasifikasi
Desa, 2024**

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)
Aceh	43,21	38,35	48,07	5,74	41,21	38,36	44,07	3,53	40,61	38,15	43,07	3,09
Sumatera Utara	39,24	35,91	42,58	4,34	39,37	36,67	42,06	3,49	40,00	37,78	42,22	2,83
Sumatera Barat	38,76	34,43	43,10	5,71	40,89	38,10	43,68	3,48	38,93	36,41	41,45	3,30
Riau	39,19	33,84	44,54	6,96	38,39	34,51	42,27	5,16	39,56	36,39	42,74	4,10
Jambi	38,06	32,51	43,61	7,44	36,41	32,78	40,03	5,08	36,65	33,64	39,67	4,20
Sumatera Selatan	39,50	34,89	44,11	5,96	42,20	39,17	45,23	3,66	40,72	38,17	43,27	3,20
Bengkulu	37,79	31,61	43,97	8,35	40,29	36,27	44,31	5,09	39,23	35,87	42,59	4,37
Lampung	40,77	35,50	46,04	6,60	37,87	35,00	40,74	3,87	38,60	36,01	41,18	3,42
Kep. Bangka Belitung	36,88	31,62	42,14	7,28	40,40	34,07	46,72	7,99	36,13	32,17	40,09	5,59
Kepulauan Riau	38,30	31,26	45,35	9,38	38,17	28,39	47,96	13,08	38,76	32,79	44,73	7,86
DKI Jakarta	39,51	36,09	42,92	4,41	—	—	—	—	39,51	36,09	42,92	4,41
Jawa Barat	39,45	37,36	41,54	2,70	39,86	37,32	42,39	3,24	39,32	37,64	41,01	2,19
Jawa Tengah	37,44	35,75	39,12	2,29	36,53	34,98	38,07	2,16	37,03	35,89	38,18	1,58
DI Yogyakarta	36,08	32,39	39,78	5,22	39,59	35,07	44,11	5,82	35,87	32,97	38,76	4,12
Jawa Timur	36,75	35,08	38,41	2,31	38,25	36,77	39,74	1,98	37,13	36,01	38,25	1,54
Banten	35,82	31,76	39,87	5,77	39,87	34,79	44,95	6,50	36,83	33,53	40,12	4,57
Bali	36,70	33,32	40,07	4,69	40,53	36,52	44,54	5,05	38,59	35,99	41,19	3,44
Nusa Tenggara Barat	40,02	34,96	45,09	6,46	38,19	33,51	42,86	6,25	38,58	35,14	42,02	4,55
Nusa Tenggara Timur	37,58	32,00	43,17	7,59	39,32	37,05	41,60	2,95	39,31	37,10	41,52	2,86
Kalimantan Barat	39,17	34,05	44,28	6,66	38,67	35,27	42,06	4,48	37,94	35,05	40,84	3,89
Kalimantan Tengah	37,16	31,01	43,31	8,44	39,74	35,46	44,02	5,49	37,70	34,22	41,17	4,70
Kalimantan Selatan	38,76	34,22	43,29	5,97	40,61	37,00	44,21	4,53	38,62	35,78	41,46	3,75
Kalimantan Timur	39,51	34,64	44,39	6,29	39,86	33,33	46,39	8,36	39,38	35,53	43,24	5,00
Kalimantan Utara	37,98	29,72	46,24	11,10	48,33	39,85	56,80	8,95	41,79	35,82	47,75	7,28
Sulawesi Utara	41,50	37,38	45,62	5,07	40,76	37,56	43,95	4,00	42,04	39,35	44,73	3,26
Sulawesi Tengah	42,55	35,77	49,33	8,13	41,62	38,04	45,20	4,39	43,51	40,31	46,72	3,75
Sulawesi Selatan	40,27	36,57	43,96	4,69	39,01	36,67	41,36	3,07	39,41	37,34	41,48	2,68
Sulawesi Tenggara	43,39	36,92	49,86	7,61	40,46	37,03	43,89	4,32	41,17	38,00	44,35	3,94
Gorontalo	41,04	33,59	48,50	9,27	36,64	31,40	41,89	7,31	37,54	33,18	41,89	5,92
Sulawesi Barat	45,87	35,83	55,91	11,17	35,33	30,08	40,57	7,58	38,72	34,07	43,38	6,13
Maluku	38,31	31,92	44,71	8,51	41,95	37,43	46,47	5,50	42,91	39,10	46,72	4,53
Maluku Utara	43,20	34,57	51,83	10,19	41,11	36,54	45,68	5,67	41,26	37,27	45,25	4,94
Papua Barat	32,63	22,45	42,81	15,91	32,89	25,00	40,77	12,23	34,92	28,35	41,49	9,60
Papua Barat Daya	45,98	33,91	58,04	13,39	42,18	35,47	48,89	8,11	39,18	32,54	45,81	8,64
Papua	38,82	31,32	46,31	9,85	45,38	39,64	51,12	6,45	38,11	33,19	43,03	6,59
Papua Selatan	32,62	17,23	48,00	24,06	45,48	36,11	54,85	10,51	47,94	39,33	56,55	9,17
Papua Tengah	39,44	26,31	52,56	16,98	40,54	32,75	48,32	9,80	39,39	32,68	46,09	8,69
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	57,49	30,79	22,92	38,67	13,05	31,09	23,60	38,58	12,28
Indonesia	36,87	36,12	37,62	1,04	37,98	37,38	38,59	0,81	37,67	37,17	38,17	0,68

Catatan: Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



**Tabel 6.20 Sampling Error Persentase Lansia Kelompok Pengeluaran Rumah
Tangga 20 Persen Teratas Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa,
2024**

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)
Aceh	25,32	21,47	29,18	7,76	24,19	22,00	26,38	4,61	24,90	22,90	26,89	4,10
Sumatera Utara	28,67	25,74	31,60	5,21	31,17	28,70	33,63	4,04	28,82	26,87	30,76	3,45
Sumatera Barat	26,49	22,54	30,44	7,61	22,92	20,65	25,19	5,05	24,61	22,29	26,94	4,82
Riau	24,64	19,98	29,30	9,64	26,96	23,48	30,44	6,58	25,40	22,64	28,17	5,54
Jambi	25,55	21,12	29,99	8,85	23,75	20,68	26,81	6,58	24,86	22,27	27,46	5,33
Sumatera Selatan	26,28	22,09	30,47	8,14	21,53	19,20	23,86	5,53	23,11	20,98	25,25	4,71
Bengkulu	26,17	20,67	31,68	10,73	19,58	16,47	22,69	8,10	21,08	18,39	23,76	6,49
Lampung	21,65	17,62	25,69	9,51	20,32	17,98	22,66	5,88	21,80	19,72	23,88	4,87
Kep. Bangka Belitung	23,01	18,85	27,16	9,21	21,50	16,52	26,48	11,81	23,54	20,22	26,86	7,20
Kepulauan Riau	22,79	15,56	30,02	16,18	27,75	18,77	36,73	16,51	22,28	16,08	28,49	14,21
DKI Jakarta	35,22	31,95	38,50	4,74	—	—	—	—	35,22	31,95	38,50	4,74
Jawa Barat	20,58	19,05	22,10	3,77	19,88	17,97	21,79	4,90	19,87	18,63	21,11	3,18
Jawa Tengah	19,26	17,99	20,53	3,36	17,18	16,02	18,34	3,44	17,95	17,10	18,81	2,43
DI Yogyakarta	19,58	16,71	22,45	7,47	17,05	13,26	20,83	11,33	18,73	16,43	21,03	6,26
Jawa Timur	17,57	16,40	18,73	3,39	17,93	16,84	19,01	3,09	17,16	16,35	17,98	2,41
Banten	25,86	22,48	29,23	6,66	19,82	16,06	23,58	9,67	23,36	20,69	26,03	5,83
Bali	19,13	16,20	22,05	7,80	21,32	18,31	24,33	7,20	18,08	15,88	20,28	6,21
Nusa Tenggara Barat	24,64	20,53	28,76	8,52	18,21	14,84	21,59	9,45	21,61	18,90	24,33	6,41
Nusa Tenggara Timur	25,00	20,12	29,89	9,97	24,93	23,02	26,84	3,90	23,63	21,79	25,46	3,96
Kalimantan Barat	27,61	22,83	32,38	8,83	19,40	16,86	21,93	6,67	23,65	21,13	26,17	5,44
Kalimantan Tengah	24,39	19,49	29,28	10,24	18,91	15,78	22,04	8,44	22,00	19,03	24,96	6,88
Kalimantan Selatan	23,15	19,62	26,69	7,78	22,10	19,24	24,95	6,60	23,03	20,73	25,32	5,09
Kalimantan Timur	23,75	20,18	27,33	7,68	23,24	17,65	28,82	12,26	23,09	20,09	26,08	6,62
Kalimantan Utara	29,18	22,05	36,30	12,46	23,89	16,93	30,85	14,86	27,64	22,54	32,73	9,41
Sulawesi Utara	25,45	22,09	28,81	6,74	22,80	20,26	25,35	5,69	23,72	21,57	25,87	4,62
Sulawesi Tengah	24,93	19,04	30,82	12,06	24,14	21,38	26,89	5,82	22,66	20,09	25,23	5,79
Sulawesi Selatan	24,75	21,57	27,93	6,56	20,33	18,56	22,11	4,45	21,75	20,04	23,46	4,01
Sulawesi Tenggara	24,34	18,91	29,76	11,38	23,47	20,65	26,28	6,12	22,85	20,20	25,50	5,91
Gorontalo	22,56	16,82	28,30	12,98	23,49	19,02	27,95	9,70	24,26	20,48	28,04	7,95
Sulawesi Barat	19,35	11,86	26,84	19,75	23,89	19,80	27,98	8,74	22,50	18,91	26,09	8,15
Maluku	26,63	20,53	32,73	11,69	26,44	22,42	30,45	7,74	23,83	20,60	27,06	6,91
Maluku Utara	23,93	17,14	30,73	14,48	24,33	20,63	28,03	7,77	23,93	20,65	27,22	7,01
Papua Barat	32,64	22,37	42,92	16,06	32,88	25,09	40,67	12,08	30,55	24,58	36,52	9,97
Papua Barat Daya	24,62	14,99	34,24	19,94	23,16	18,46	27,86	10,35	24,94	19,42	30,46	11,29
Papua	29,91	23,23	36,60	11,40	27,60	22,68	32,52	9,10	29,72	25,06	34,37	7,99
Papua Selatan	28,86	14,51	43,21	25,37	37,50	28,65	46,34	12,04	28,91	21,29	36,53	13,44
Papua Tengah	25,47	15,40	35,54	20,17	21,50	15,13	27,87	15,12	27,73	21,76	33,69	10,98
Papua Pegunungan	37,92	12,40	63,43	34,33	30,71	23,49	37,92	11,99	31,49	24,54	38,44	11,26
Indonesia	22,03	21,44	22,63	1,37	20,17	19,71	20,63	1,17	20,45	20,06	20,85	0,98

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 6.21 *Sampling Error* Persentase Lansia yang Memiliki Rekening Tabungan di Lembaga Keuangan Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	43,99	39,79	48,18	4,87	33,60	31,38	35,82	3,37
Sumatera Utara	41,21	38,39	44,03	3,49	33,57	31,51	35,63	3,13
Sumatera Barat	44,74	40,86	48,63	4,43	28,79	26,68	30,90	3,74
Riau	43,50	38,72	48,29	5,61	31,72	28,68	34,75	4,88
Jambi	42,78	38,13	47,42	5,54	25,76	23,09	28,43	5,29
Sumatera Selatan	36,39	32,63	40,15	5,27	21,79	19,89	23,69	4,45
Bengkulu	40,94	35,72	46,17	6,51	31,31	28,56	34,07	4,49
Lampung	36,82	32,55	41,09	5,92	28,49	26,41	30,57	3,73
Kep. Bangka Belitung	37,17	32,95	41,40	5,80	22,33	18,09	26,56	9,68
Kepulauan Riau	49,60	42,79	56,40	7,00	24,39	17,47	31,30	14,46
DKI Jakarta	62,75	59,66	65,85	2,51	—	—	—	—
Jawa Barat	36,10	34,42	37,77	2,37	32,20	30,42	33,99	2,83
Jawa Tengah	33,47	32,13	34,82	2,05	28,95	27,82	30,08	1,99
DI Yogyakarta	48,27	45,04	51,49	3,41	32,37	28,69	36,06	5,81
Jawa Timur	32,32	30,97	33,67	2,13	24,85	23,84	25,86	2,07
Banten	37,83	34,29	41,38	4,78	18,06	15,01	21,11	8,61
Bali	37,40	34,56	40,25	3,88	22,85	20,19	25,51	5,94
Nusa Tenggara Barat	42,24	37,98	46,50	5,15	31,51	28,17	34,86	5,42
Nusa Tenggara Timur	58,92	54,57	63,27	3,76	36,19	34,46	37,92	2,44
Kalimantan Barat	42,79	38,52	47,06	5,09	26,00	23,50	28,50	4,91
Kalimantan Tengah	45,20	39,91	50,49	5,97	25,61	22,61	28,61	5,97
Kalimantan Selatan	43,78	39,82	47,74	4,61	24,27	21,79	26,74	5,20
Kalimantan Timur	49,38	45,11	53,65	4,41	39,83	34,35	45,31	7,02
Kalimantan Utara	40,86	33,56	48,17	9,12	32,11	25,85	38,36	9,94
Sulawesi Utara	43,94	40,56	47,31	3,92	26,53	24,25	28,81	4,38
Sulawesi Tengah	43,23	37,74	48,72	6,48	26,58	24,14	29,01	4,68
Sulawesi Selatan	47,25	44,07	50,43	3,44	27,33	25,69	28,97	3,07
Sulawesi Tenggara	55,24	49,70	60,77	5,11	34,92	32,42	37,42	3,65
Gorontalo	42,28	36,03	48,53	7,54	30,34	26,45	34,24	6,56
Sulawesi Barat	43,33	34,55	52,11	10,34	29,90	25,94	33,86	6,75
Maluku	47,68	41,62	53,73	6,48	27,47	24,27	30,68	5,95
Maluku Utara	44,52	37,55	51,49	7,98	20,06	17,17	22,95	7,35
Papua Barat	64,71	54,96	74,46	7,69	32,29	26,10	38,47	9,77
Papua Barat Daya	59,55	49,16	69,93	8,89	36,22	31,22	41,22	7,04
Papua	72,35	66,35	78,34	4,23	41,65	36,86	46,43	5,86
Papua Selatan	60,31	43,91	76,71	13,87	26,60	19,79	33,41	13,06
Papua Tengah	71,65	60,52	82,79	7,93	12,26	7,93	16,59	18,03
Papua Pegunungan	52,00	25,05	78,94	26,44	18,06	12,79	23,33	14,89
Indonesia	39,24	38,60	39,88	0,83	28,20	27,77	28,64	0,79



Lanjutan Tabel 6.21

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	36,34	33,40	39,29	4,14	37,55	34,79	40,31	3,74	36,98	34,95	39,01	2,80
Sumatera Utara	42,15	39,54	44,76	3,16	34,11	31,82	36,40	3,42	37,83	36,01	39,65	2,45
Sumatera Barat	36,63	33,72	39,54	4,05	36,50	33,71	39,28	3,90	36,56	34,35	38,77	3,09
Riau	45,90	42,25	49,56	4,07	26,65	23,40	29,90	6,22	36,38	33,72	39,04	3,73
Jambi	39,36	35,99	42,73	4,37	23,20	20,34	26,07	6,30	31,25	28,88	33,62	3,87
Sumatera Selatan	32,17	29,36	34,97	4,45	22,65	20,28	25,01	5,33	27,25	25,39	29,11	3,48
Bengkulu	40,54	36,76	44,31	4,75	27,64	24,21	31,06	6,32	34,10	31,62	36,59	3,72
Lampung	32,48	29,73	35,22	4,31	29,69	26,92	32,45	4,75	31,10	29,14	33,07	3,22
Kep. Bangka Belitung	36,52	31,97	41,07	6,35	25,29	21,43	29,16	7,79	31,01	27,99	34,03	4,97
Kepulauan Riau	54,22	46,65	61,79	7,12	34,82	27,34	42,31	10,96	44,77	38,98	50,57	6,60
DKI Jakarta	70,68	66,88	74,48	2,74	55,55	51,61	59,49	3,62	62,75	59,66	65,85	2,51
Jawa Barat	39,04	37,15	40,93	2,47	31,36	29,59	33,12	2,87	35,11	33,78	36,44	1,93
Jawa Tengah	33,48	32,20	34,76	1,95	29,33	28,15	30,50	2,05	31,27	30,38	32,15	1,44
DI Yogyakarta	41,27	37,76	44,78	4,34	44,64	41,41	47,87	3,69	43,09	40,61	45,58	2,94
Jawa Timur	30,91	29,66	32,16	2,06	27,03	25,91	28,15	2,11	28,83	27,97	29,69	1,52
Banten	37,77	34,08	41,47	4,99	27,35	23,73	30,98	6,76	32,62	29,85	35,40	4,34
Bali	42,02	38,92	45,12	3,76	24,34	21,84	26,84	5,24	32,63	30,51	34,76	3,32
Nusa Tenggara Barat	38,75	34,66	42,84	5,38	35,55	31,90	39,21	5,24	37,01	34,27	39,75	3,78
Nusa Tenggara Timur	44,98	42,38	47,58	2,94	38,56	36,16	40,95	3,16	41,56	39,84	43,29	2,12
Kalimantan Barat	39,92	36,65	43,18	4,17	25,69	22,81	28,58	5,73	32,73	30,40	35,05	3,62
Kalimantan Tengah	41,24	37,39	45,10	4,77	24,64	21,03	28,24	7,47	33,58	30,73	36,43	4,33
Kalimantan Selatan	38,39	35,18	41,61	4,27	28,93	25,95	31,90	5,25	33,52	31,19	35,85	3,55
Kalimantan Timur	56,44	52,16	60,71	3,86	34,96	30,53	39,39	6,46	46,11	42,73	49,50	3,74
Kalimantan Utara	41,51	34,97	48,06	8,04	32,27	25,78	38,76	10,26	37,20	32,21	42,19	6,85
Sulawesi Utara	37,52	34,62	40,43	3,95	34,17	31,37	36,97	4,18	35,78	33,69	37,88	2,99
Sulawesi Tengah	35,09	31,56	38,61	5,13	28,04	24,72	31,35	6,04	31,55	29,17	33,92	3,85
Sulawesi Selatan	39,91	37,50	42,32	3,08	32,47	30,33	34,62	3,37	35,81	34,10	37,51	2,43
Sulawesi Tenggara	44,72	40,97	48,48	4,28	39,15	35,66	42,65	4,55	41,83	39,27	44,40	3,13
Gorontalo	34,27	29,19	39,36	7,57	37,16	32,09	42,22	6,95	35,82	32,24	39,39	5,09
Sulawesi Barat	35,67	30,37	40,98	7,59	30,24	25,38	35,09	8,19	32,78	29,12	36,45	5,71
Maluku	34,24	30,05	38,44	6,25	36,70	32,42	40,98	5,95	35,52	32,40	38,64	4,48
Maluku Utara	30,92	26,88	34,95	6,66	22,61	18,77	26,45	8,67	26,76	23,77	29,75	5,70
Papua Barat	48,12	41,22	55,02	7,32	35,87	28,72	43,02	10,17	42,39	36,71	48,07	6,83
Papua Barat Daya	55,38	48,14	62,62	6,67	38,93	30,61	47,25	10,91	47,39	41,50	53,28	6,34
Papua	66,98	62,05	71,91	3,76	52,12	46,51	57,74	5,49	59,92	55,79	64,05	3,51
Papua Selatan	43,40	34,69	52,11	10,24	34,69	25,48	43,90	13,54	39,35	31,91	46,78	9,64
Papua Tengah	35,66	29,16	42,16	9,30	28,47	21,43	35,51	12,61	32,65	27,04	38,26	8,77
Papua Pegunungan	25,00	19,33	30,67	11,57	12,92	5,81	20,04	28,09	20,50	15,30	25,70	12,94
Indonesia	37,97	37,39	38,54	0,77	31,06	30,53	31,58	0,87	34,36	33,95	34,76	0,60

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 6.22 *Sampling Error* Persentase Lansia menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2024

Provinsi	Milik Sendiri				Kontrak/Sewa			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	93,84	92,55	95,13	0,70	0,91	0,47	1,35	24,59
Sumatera Utara	84,44	82,77	86,10	1,00	4,47	3,42	5,51	11,93
Sumatera Barat	85,76	84,00	87,52	1,05	1,88	1,24	2,52	17,45
Riau	90,86	89,03	92,69	1,03	3,13	2,19	4,08	15,41
Jambi	93,56	92,02	95,11	0,84	1,37	0,49	2,26	32,75
Sumatera Selatan	90,31	88,64	91,98	0,94	1,60	0,94	2,25	20,91
Bengkulu	94,88	93,43	96,33	0,78	1,84	0,95	2,73	24,62
Lampung	95,75	94,73	96,78	0,54	1,16	0,62	1,71	23,85
Kep. Bangka Belitung	94,46	92,66	96,27	0,97	0,51	0,03	0,99	47,62
Kepulauan Riau	85,39	81,30	89,48	2,44	6,25	3,08	9,42	25,87
DKI Jakarta	77,73	74,90	80,55	1,85	9,37	7,30	11,44	11,27
Jawa Barat	92,37	91,52	93,21	0,47	2,20	1,72	2,68	11,15
Jawa Tengah	93,60	93,00	94,20	0,33	0,58	0,38	0,79	17,94
DI Yogyakarta	95,16	94,09	96,22	0,57	0,87	0,52	1,22	20,64
Jawa Timur	94,91	94,41	95,41	0,27	0,92	0,71	1,14	12,06
Banten	93,28	91,64	94,92	0,90	1,77	0,82	2,73	27,37
Bali	95,98	95,01	96,96	0,52	1,08	0,56	1,61	24,83
Nusa Tenggara Barat	94,87	93,32	96,41	0,83	0,34	0,05	0,63	43,05
Nusa Tenggara Timur	97,61	96,96	98,25	0,34	0,37	0,09	0,64	38,28
Kalimantan Barat	95,78	94,60	96,95	0,63	0,15	0,03	0,27	40,85
Kalimantan Tengah	91,69	89,47	93,91	1,23	1,72	0,89	2,55	24,60
Kalimantan Selatan	90,38	88,58	92,19	1,02	1,86	1,02	2,70	23,01
Kalimantan Timur	88,48	86,21	90,75	1,31	3,21	2,04	4,39	18,66
Kalimantan Utara	87,95	84,28	91,62	2,13	5,11	2,45	7,77	26,56
Sulawesi Utara	88,03	86,16	89,89	1,08	1,12	0,51	1,72	27,52
Sulawesi Tengah	94,13	92,62	95,65	0,82	0,86	0,18	1,54	40,44
Sulawesi Selatan	93,45	92,47	94,43	0,53	0,78	0,44	1,12	22,49
Sulawesi Tenggara	95,43	94,27	96,58	0,62	0,62	0,25	0,99	30,28
Gorontalo	90,71	88,02	93,40	1,51	NA	NA	NA	74,58
Sulawesi Barat	95,59	93,94	97,24	0,88	NA	NA	NA	51,28
Maluku	92,04	89,85	94,23	1,21	1,19	0,39	1,99	34,43
Maluku Utara	93,92	91,90	95,94	1,10	0,85	0,19	1,50	39,40
Papua Barat	89,58	86,05	93,11	2,01	NA	NA	NA	52,63
Papua Barat Daya	93,82	90,77	96,87	1,66	2,01	0,24	3,79	44,98
Papua	81,09	76,09	86,09	3,15	7,38	3,45	11,30	27,14
Papua Selatan	83,34	76,94	89,75	3,92	NA	NA	NA	53,46
Papua Tengah	91,73	87,38	96,08	2,42	5,59	1,67	9,51	35,81
Papua Pegunungan	99,60	99,12	100,00	0,25	NA	NA	NA	94,71
Indonesia	92,38	92,11	92,65	0,15	1,74	1,59	1,88	4,29



Lanjutan Tabel 6.22

Provinsi	Bebas Sewa				Dinas/Lainnya			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	4,85	3,67	6,03	12,41	0,40	0,06	0,74	42,86
Sumatera Utara	10,80	9,43	12,18	6,49	0,29	0,05	0,53	42,60
Sumatera Barat	12,32	10,65	13,99	6,91	0,04	0,00	0,08	48,42
Riau	5,62	4,06	7,18	14,19	NA	NA	NA	57,78
Jambi	4,92	3,63	6,21	13,39	NA	NA	NA	63,06
Sumatera Selatan	8,01	6,43	9,58	10,03	0,09	0,01	0,17	48,03
Bengkulu	3,17	2,01	4,34	18,75	NA	NA	NA	88,39
Lampung	3,06	2,18	3,94	14,68	NA	NA	NA	97,85
Kep. Bangka Belitung	5,02	3,28	6,77	17,73	NA	NA	NA	NA
Kepulauan Riau	8,32	5,51	11,13	17,24	NA	NA	NA	100,15
DKI Jakarta	12,50	10,36	14,64	8,73	0,41	0,03	0,79	47,76
Jawa Barat	5,38	4,67	6,08	6,73	0,06	0,01	0,11	45,92
Jawa Tengah	5,80	5,23	6,37	5,02	NA	NA	NA	74,36
DI Yogyakarta	3,97	2,95	4,99	13,10	NA	NA	NA	100,04
Jawa Timur	4,10	3,64	4,56	5,69	0,07	0,01	0,12	42,22
Banten	4,15	2,93	5,37	15,05	0,80	0,15	1,44	41,20
Bali	2,85	2,03	3,67	14,62	NA	NA	NA	99,99
Nusa Tenggara Barat	4,74	3,22	6,26	16,37	NA	NA	NA	100,01
Nusa Tenggara Timur	1,74	1,22	2,27	15,33	0,28	0,02	0,55	47,52
Kalimantan Barat	4,03	2,85	5,20	14,87	NA	NA	NA	57,95
Kalimantan Tengah	5,76	3,75	7,78	17,84	0,83	0,20	1,46	38,61
Kalimantan Selatan	7,15	5,55	8,75	11,42	0,60	0,17	1,04	36,42
Kalimantan Timur	8,02	6,05	9,99	12,51	NA	NA	NA	54,62
Kalimantan Utara	6,62	3,98	9,27	20,36	NA	NA	NA	67,36
Sulawesi Utara	10,85	9,06	12,64	8,43	NA	NA	NA	100,05
Sulawesi Tengah	4,95	3,58	6,31	14,07	NA	NA	NA	89,06
Sulawesi Selatan	5,51	4,60	6,42	8,42	0,26	0,08	0,44	35,74
Sulawesi Tenggara	3,95	2,85	5,05	14,21	NA	NA	NA	100,09
Gorontalo	9,00	6,34	11,66	15,08	NA	NA	NA	NA
Sulawesi Barat	4,04	2,42	5,65	20,47	NA	NA	NA	NA
Maluku	6,51	4,47	8,54	15,98	NA	NA	NA	62,21
Maluku Utara	5,23	3,31	7,15	18,77	NA	NA	NA	NA
Papua Barat	5,42	2,65	8,19	26,09	3,62	1,70	5,53	27,05
Papua Barat Daya	3,26	1,28	5,25	31,04	NA	NA	NA	91,76
Papua	8,73	5,49	11,97	18,92	2,81	0,49	5,12	42,03
Papua Selatan	11,02	5,89	16,16	23,77	NA	NA	NA	70,72
Papua Tengah	NA	NA	NA	60,26	NA	NA	NA	65,45
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	86,59	NA	NA	NA	NA
Indonesia	5,72	5,49	5,95	2,07	0,16	0,12	0,20	12,24

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 6.23 *Sampling Error* Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	74,67	70,17	79,18	3,08	66,47	63,59	69,36	2,22
Sumatera Utara	81,18	78,52	83,85	1,68	71,67	69,41	73,93	1,61
Sumatera Barat	66,24	62,01	70,47	3,26	61,42	58,65	64,19	2,30
Riau	77,32	72,53	82,12	3,16	69,43	65,59	73,27	2,82
Jambi	71,61	66,53	76,69	3,62	66,02	62,37	69,67	2,82
Sumatera Selatan	71,00	66,40	75,59	3,30	61,54	58,61	64,47	2,43
Bengkulu	55,18	49,51	60,85	5,24	55,21	51,13	59,29	3,77
Lampung	59,35	54,19	64,52	4,44	70,39	67,67	73,10	1,97
Kep. Bangka Belitung	47,60	42,40	52,81	5,58	33,80	27,87	39,72	8,94
Kepulauan Riau	57,11	50,50	63,72	5,90	20,13	12,16	28,10	20,21
DKI Jakarta	53,28	49,79	56,77	3,34	—	—	—	—
Jawa Barat	55,85	53,75	57,96	1,92	60,54	58,08	63,00	2,08
Jawa Tengah	72,16	70,57	73,76	1,13	68,25	66,76	69,74	1,11
DI Yogyakarta	87,49	84,79	90,20	1,58	88,32	85,70	90,94	1,51
Jawa Timur	74,53	72,95	76,11	1,08	70,42	69,06	71,77	0,98
Banten	70,29	66,39	74,19	2,83	51,82	46,81	56,83	4,93
Bali	93,95	92,49	95,41	0,79	86,25	83,55	88,95	1,60
Nusa Tenggara Barat	67,39	62,22	72,57	3,92	60,41	55,63	65,18	4,03
Nusa Tenggara Timur	60,29	54,81	65,77	4,64	46,05	43,76	48,35	2,54
Kalimantan Barat	76,22	72,11	80,33	2,75	66,17	62,91	69,42	2,51
Kalimantan Tengah	68,80	62,83	74,77	4,42	50,35	45,91	54,79	4,50
Kalimantan Selatan	70,81	66,71	74,91	2,95	53,70	50,08	57,32	3,44
Kalimantan Timur	85,60	82,47	88,74	1,87	62,25	55,55	68,96	5,49
Kalimantan Utara	72,56	65,36	79,75	5,06	67,25	59,62	74,88	5,79
Sulawesi Utara	80,08	76,59	83,57	2,22	75,21	72,45	77,98	1,87
Sulawesi Tengah	64,29	57,49	71,10	5,40	65,76	62,35	69,18	2,65
Sulawesi Selatan	79,83	77,13	82,54	1,73	68,33	66,14	70,52	1,63
Sulawesi Tenggara	80,15	75,12	85,18	3,20	75,75	72,87	78,62	1,94
Gorontalo	81,46	75,46	87,46	3,76	64,18	58,73	69,63	4,33
Sulawesi Barat	74,47	65,12	83,81	6,40	59,30	54,35	64,25	4,26
Maluku	74,00	67,82	80,19	4,27	67,62	63,84	71,40	2,85
Maluku Utara	86,34	80,55	92,14	3,42	64,24	59,88	68,59	3,46
Papua Barat	76,42	67,56	85,29	5,92	57,27	49,15	65,39	7,23
Papua Barat Daya	72,74	62,46	83,03	7,22	43,37	36,88	49,87	7,64
Papua	75,31	68,73	81,88	4,45	48,15	42,53	53,76	5,95
Papua Selatan	63,40	47,83	78,96	12,53	39,45	30,34	48,57	11,79
Papua Tengah	88,40	80,51	96,29	4,55	21,51	16,41	26,62	12,10
Papua Pegunungan	32,25	7,13	57,37	39,74	NA	NA	NA	79,60
Indonesia	68,69	67,94	69,43	0,56	65,73	65,15	66,31	0,45



Lanjutan Tabel 6.23

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	69,38	66,42	72,34	2,18	68,92	66,09	71,76	2,10	69,14	66,70	71,58	1,80
Sumatera Utara	77,34	75,22	79,45	1,40	76,66	74,65	78,67	1,34	76,98	75,19	78,76	1,18
Sumatera Barat	63,88	60,90	66,87	2,38	63,67	60,95	66,39	2,18	63,77	61,27	66,27	2,00
Riau	72,01	68,60	75,41	2,41	73,11	69,61	76,61	2,44	72,55	69,55	75,55	2,11
Jambi	68,66	65,36	71,96	2,45	67,00	63,55	70,45	2,63	67,83	64,87	70,79	2,23
Sumatera Selatan	65,14	62,24	68,03	2,27	65,02	62,22	67,83	2,20	65,08	62,58	67,58	1,96
Bengkulu	55,67	51,92	59,42	3,43	54,73	50,95	58,51	3,53	55,20	51,87	58,53	3,08
Lampung	66,43	63,69	69,18	2,11	67,43	64,58	70,29	2,16	66,92	64,45	69,40	1,89
Kep. Bangka Belitung	42,61	38,11	47,12	5,39	41,10	36,61	45,59	5,57	41,87	37,91	45,83	4,83
Kepulauan Riau	56,37	49,99	62,75	5,78	43,35	36,03	50,67	8,62	50,03	44,24	55,82	5,91
DKI Jakarta	50,32	46,25	54,39	4,12	55,97	52,00	59,93	3,61	53,28	49,79	56,77	3,34
Jawa Barat	57,36	55,43	59,29	1,72	56,73	54,78	58,69	1,76	57,04	55,34	58,73	1,52
Jawa Tengah	71,12	69,87	72,36	0,89	69,50	68,25	70,74	0,91	70,25	69,16	71,35	0,79
DI Yogyakarta	88,36	86,05	90,66	1,33	87,26	85,04	89,47	1,29	87,76	85,75	89,78	1,17
Jawa Timur	73,82	72,62	75,03	0,83	71,56	70,36	72,76	0,86	72,61	71,56	73,66	0,74
Banten	65,27	61,66	68,89	2,83	65,59	61,77	69,41	2,97	65,43	62,24	68,62	2,49
Bali	91,30	89,68	92,93	0,91	91,53	90,06	93,00	0,82	91,43	90,10	92,76	0,74
Nusa Tenggara Barat	63,86	59,57	68,15	3,43	64,09	60,23	67,94	3,07	63,98	60,45	67,51	2,82
Nusa Tenggara Timur	49,27	46,64	51,89	2,72	49,55	47,07	52,03	2,56	49,42	47,22	51,61	2,27
Kalimantan Barat	69,54	66,60	72,48	2,16	70,84	67,87	73,80	2,14	70,20	67,63	72,76	1,86
Kalimantan Tengah	59,05	55,13	62,98	3,39	56,45	52,07	60,84	3,96	57,85	54,27	61,44	3,16
Kalimantan Selatan	62,10	58,91	65,29	2,62	61,55	58,37	64,73	2,63	61,82	59,06	64,58	2,28
Kalimantan Timur	76,95	73,33	80,57	2,40	78,35	74,57	82,13	2,46	77,62	74,45	80,80	2,09
Kalimantan Utara	70,80	64,96	76,64	4,21	69,80	63,26	76,35	4,78	70,33	65,07	75,60	3,82
Sulawesi Utara	76,42	73,68	79,17	1,83	79,09	76,66	81,51	1,56	77,80	75,54	80,06	1,48
Sulawesi Tengah	64,52	60,90	68,14	2,86	66,12	62,54	69,70	2,76	65,32	62,18	68,47	2,46
Sulawesi Selatan	72,99	70,94	75,04	1,43	73,42	71,46	75,38	1,36	73,23	71,51	74,95	1,20
Sulawesi Tenggara	77,76	74,80	80,72	1,94	76,77	73,77	79,76	1,99	77,24	74,69	79,80	1,69
Gorontalo	69,45	64,40	74,51	3,72	74,40	69,92	78,89	3,07	72,10	68,03	76,17	2,88
Sulawesi Barat	64,17	59,21	69,13	3,95	61,13	55,98	66,28	4,30	62,55	58,24	66,87	3,52
Maluku	69,67	65,75	73,59	2,87	70,62	66,83	74,40	2,73	70,16	66,84	73,48	2,42
Maluku Utara	71,24	67,31	75,18	2,82	69,34	65,20	73,49	3,05	70,29	66,73	73,86	2,59
Papua Barat	60,20	52,91	67,48	6,17	66,70	59,69	73,71	5,36	63,24	56,94	69,53	5,08
Papua Barat Daya	59,52	52,78	66,27	5,78	55,23	46,90	63,55	7,69	57,44	51,04	63,83	5,68
Papua	67,92	63,15	72,69	3,58	60,33	54,75	65,91	4,72	64,31	59,69	68,93	3,67
Papua Selatan	50,99	42,12	59,86	8,88	45,66	35,85	55,46	10,96	48,51	40,10	56,92	8,85
Papua Tengah	41,54	35,97	47,11	6,84	48,56	42,27	54,84	6,60	44,48	39,00	49,96	6,29
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	53,53	4,31	0,19	8,42	48,72	2,89	0,81	4,97	36,77
Indonesia	67,55	66,98	68,11	0,43	67,22	66,66	67,78	0,42	67,38	66,89	67,87	0,37

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 6.24 *Sampling Error* Persentase Lansia yang Pernah Bepergian Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	21,62	17,77	25,47	9,09	16,63	14,51	18,75	6,50
Sumatera Utara	30,03	26,99	33,06	5,16	24,03	21,83	26,24	4,68
Sumatera Barat	29,76	25,85	33,67	6,70	23,22	21,04	25,39	4,78
Riau	22,15	17,79	26,52	10,06	14,25	11,66	16,85	9,29
Jambi	16,22	12,35	20,09	12,16	16,77	14,24	19,30	7,71
Sumatera Selatan	18,98	15,51	22,45	9,33	16,47	14,27	18,68	6,84
Bengkulu	35,87	30,09	41,66	8,23	25,50	22,17	28,84	6,67
Lampung	19,96	15,80	24,12	10,62	17,07	14,94	19,19	6,36
Kep. Bangka Belitung	26,88	22,19	31,57	8,89	30,35	24,38	36,33	10,04
Kepulauan Riau	22,40	15,73	29,08	15,20	11,06	5,22	16,89	26,92
DKI Jakarta	34,15	30,94	37,36	4,80	—	—	—	—
Jawa Barat	20,89	19,32	22,46	3,84	13,58	11,93	15,23	6,19
Jawa Tengah	18,20	16,98	19,43	3,43	11,78	10,84	12,73	4,09
DI Yogyakarta	26,44	23,08	29,79	6,47	12,38	8,88	15,88	14,43
Jawa Timur	19,92	18,61	21,24	3,38	10,37	9,49	11,25	4,34
Banten	25,04	21,63	28,45	6,95	9,62	7,19	12,05	12,89
Bali	13,62	11,33	15,90	8,56	11,65	9,37	13,94	10,01
Nusa Tenggara Barat	24,99	20,54	29,45	9,09	17,71	14,32	21,10	9,76
Nusa Tenggara Timur	23,58	18,84	28,32	10,25	13,11	11,63	14,58	5,75
Kalimantan Barat	21,82	17,80	25,83	9,39	10,21	8,35	12,06	9,29
Kalimantan Tengah	22,61	17,83	27,39	10,79	13,61	10,52	16,71	11,60
Kalimantan Selatan	29,83	25,89	33,78	6,74	20,28	17,50	23,06	7,00
Kalimantan Timur	18,59	14,96	22,22	9,96	10,61	6,96	14,26	17,56
Kalimantan Utara	12,64	7,11	18,17	22,31	10,64	6,51	14,77	19,81
Sulawesi Utara	24,89	21,62	28,15	6,69	24,54	21,94	27,15	5,42
Sulawesi Tengah	17,13	11,82	22,43	15,80	13,38	11,26	15,50	8,08
Sulawesi Selatan	23,22	20,33	26,11	6,35	15,57	13,95	17,20	5,33
Sulawesi Tenggara	32,24	25,99	38,49	9,89	20,26	17,70	22,82	6,44
Gorontalo	22,30	16,79	27,81	12,60	20,14	16,04	24,24	10,38
Sulawesi Barat	19,15	12,65	25,64	17,31	16,05	12,35	19,75	11,77
Maluku	16,29	11,76	20,83	14,20	14,08	11,23	16,92	10,32
Maluku Utara	10,91	6,66	15,16	19,87	10,71	8,12	13,30	12,32
Papua Barat	16,55	8,98	24,12	23,33	12,36	8,52	16,20	15,85
Papua Barat Daya	16,26	8,52	24,00	24,29	31,31	25,82	36,80	8,94
Papua	11,96	7,72	16,19	18,07	11,14	8,26	14,03	13,21
Papua Selatan	14,74	2,81	26,68	41,31	7,64	1,33	13,96	42,16
Papua Tengah	12,99	4,39	21,60	33,79	5,42	1,43	9,41	37,57
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA	4,96	2,14	7,77	28,99
Indonesia	22,13	21,52	22,74	1,41	14,14	13,74	14,54	1,44



Lanjutan Tabel 6.24

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	18,63	16,24	21,01	6,53	17,91	15,72	20,11	6,25	18,25	16,35	20,15	5,32
Sumatera Utara	25,87	23,57	28,17	4,54	28,67	26,35	30,98	4,12	27,37	25,42	29,33	3,65
Sumatera Barat	26,32	23,52	29,11	5,42	26,48	23,99	28,97	4,80	26,40	24,19	28,61	4,27
Riau	18,92	16,08	21,76	7,65	15,80	13,09	18,52	8,77	17,38	15,04	19,72	6,87
Jambi	18,42	15,83	21,01	7,18	14,77	12,35	17,20	8,37	16,59	14,47	18,71	6,52
Sumatera Selatan	18,77	16,46	21,08	6,28	16,14	13,96	18,31	6,89	17,41	15,52	19,30	5,55
Bengkulu	28,83	25,43	32,23	6,02	28,18	24,73	31,63	6,25	28,51	25,58	31,43	5,24
Lampung	18,35	16,08	20,63	6,32	17,58	15,26	19,91	6,74	17,97	16,02	19,93	5,56
Kep. Bangka Belitung	30,43	26,02	34,83	7,38	26,14	22,00	30,28	8,08	28,32	24,62	32,02	6,67
Kepulauan Riau	20,85	14,12	27,59	16,47	19,58	12,70	26,45	17,93	20,23	14,68	25,78	14,00
DKI Jakarta	33,40	29,63	37,18	5,77	34,84	31,09	38,59	5,49	34,15	30,94	37,36	4,80
Jawa Barat	19,46	17,95	20,97	3,96	18,64	17,17	20,11	4,02	19,04	17,80	20,29	3,34
Jawa Tengah	15,47	14,50	16,44	3,21	14,72	13,81	15,63	3,15	15,07	14,29	15,85	2,64
DI Yogyakarta	21,09	18,09	24,10	7,28	22,51	19,70	25,32	6,37	21,86	19,33	24,39	5,90
Jawa Timur	16,72	15,69	17,74	3,12	14,38	13,46	15,30	3,28	15,46	14,65	16,28	2,70
Banten	22,23	19,09	25,38	7,22	19,70	16,57	22,83	8,11	20,98	18,38	23,58	6,33
Bali	14,74	12,57	16,90	7,50	11,42	9,60	13,24	8,13	12,97	11,27	14,68	6,72
Nusa Tenggara Barat	23,21	19,64	26,79	7,86	19,96	16,90	23,02	7,82	21,44	18,60	24,27	6,75
Nusa Tenggara Timur	18,41	16,16	20,65	6,22	13,10	11,26	14,94	7,17	15,58	13,98	17,18	5,25
Kalimantan Barat	15,73	13,28	18,17	7,93	14,01	11,73	16,29	8,30	14,86	12,90	16,82	6,74
Kalimantan Tengah	17,57	14,65	20,49	8,48	16,93	13,62	20,24	9,98	17,27	14,59	19,95	7,92
Kalimantan Selatan	25,05	22,22	27,89	5,78	24,58	21,74	27,43	5,91	24,81	22,45	27,17	4,86
Kalimantan Timur	16,35	13,18	19,51	9,88	15,34	12,02	18,67	11,07	15,86	13,15	18,57	8,71
Kalimantan Utara	11,74	7,44	16,03	18,68	11,87	7,45	16,30	18,99	11,80	8,14	15,46	15,81
Sulawesi Utara	24,13	21,60	26,67	5,36	25,28	22,78	27,78	5,04	24,73	22,60	26,85	4,38
Sulawesi Tengah	13,96	11,43	16,49	9,24	15,03	12,30	17,77	9,28	14,50	12,32	16,68	7,67
Sulawesi Selatan	19,81	17,84	21,77	5,07	18,03	16,26	19,80	5,00	18,83	17,29	20,37	4,18
Sulawesi Tenggara	26,61	23,15	30,07	6,63	22,23	19,17	25,28	7,01	24,34	21,59	27,09	5,77
Gorontalo	20,09	16,00	24,18	10,39	22,04	17,65	26,43	10,17	21,13	17,77	24,49	8,11
Sulawesi Barat	17,87	13,89	21,85	11,37	15,69	11,80	19,58	12,65	16,71	13,49	19,93	9,83
Maluku	15,65	12,30	19,00	10,92	14,32	11,32	17,33	10,70	14,96	12,47	17,45	8,50
Maluku Utara	11,88	9,04	14,73	12,21	9,65	7,06	12,24	13,69	10,77	8,56	12,97	10,47
Papua Barat	15,77	10,97	20,57	15,52	11,27	7,55	14,99	16,85	13,66	10,12	17,21	13,25
Papua Barat Daya	25,27	19,71	30,82	11,22	22,87	17,21	28,54	12,64	24,10	19,41	28,80	9,94
Papua	12,57	9,14	16,01	13,93	10,58	7,23	13,94	16,15	11,63	8,85	14,40	12,18
Papua Selatan	12,40	5,67	19,13	27,68	7,95	1,74	14,15	39,82	10,33	4,37	16,29	29,43
Papua Tengah	8,38	4,06	12,70	26,31	7,52	3,03	12,02	30,50	8,02	4,07	11,97	25,15
Papua Pegunungan	4,76	2,12	7,41	28,29	4,33	0,45	8,21	45,67	4,60	1,99	7,22	28,96
Indonesia	19,22	18,76	19,69	1,24	18,02	17,57	18,46	1,26	18,59	18,21	18,98	1,05

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



BAB 7

PROGRAM

KESEJAHTERAAN

LANJUT USIA



PROGRAM KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Penduduk lanjut usia atau lansia merupakan salah satu dari kelompok rentan, dimana secara fisik dan fungsi tubuhnya mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Penurunan fisik dan fungsi tubuh tersebut turut berpengaruh ke berbagai bidang yang merugikan lansia. Selain itu, seorang lansia dapat mengalami beberapa kerentanan lainnya sekaligus. Misalnya apabila lansia tersebut mengalami disabilitas, lansia perempuan, lansia tinggal di rumah tangga miskin, dan lansia yang tinggal di wilayah rawan bencana. Oleh karena itu, keberadaan program kesejahteraan lansia menjadi penting agar lansia terjamin kehidupannya dan dapat menjadikan lansia produktif yang dapat memberi sumbangan terhadap perekonomian. Dalam bab ini akan dijelaskan beberapa Program Kesejahteraan Lanjut Usia yang ada di Indonesia.

7.1 Strategi Nasional Kelanjutusiaan

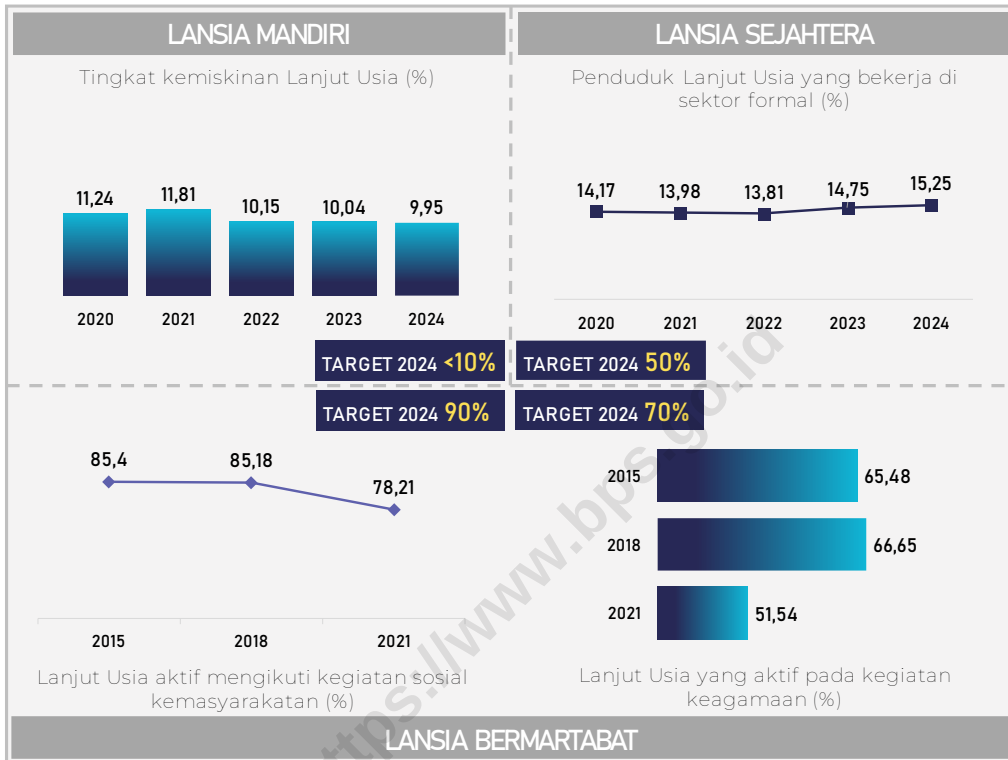
Dominasi penduduk usia tua yang akan terjadi pasca bonus demografi perlu dipersiapkan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional (Stranas) Kelanjutusiaan, Pemerintah Indonesia telah bersiap memasuki *aging population*. Stranas Kelanjutusiaan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan lainnya terkait kelanjutusiaan.

Stranas Kelanjutusiaan memiliki visi "Mewujudkan kehidupan lanjut usia Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat". Dalam stranas ini tertuang Strategi Nasional Kelanjutusiaan yang terdiri dari 5 (lima) strategi sebagai berikut:

- a. peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu
- b. peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup lanjut usia



- c. pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah lanjut usia
- d. penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan
- e. penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020–2024
 Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020–2024
 Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 2015, 2018, 2021

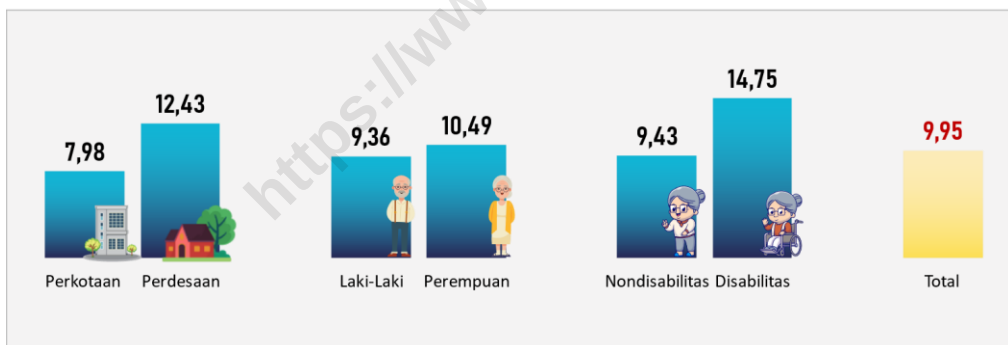
Gambar 7.1 Capaian Indikator Visi Strategi Nasional Kelanjutusiaan

Dalam mewujudkan Lansia Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat ditetapkan sebelas indikator beserta target di tahun 2024 yang digunakan sebagai arah dalam implementasi Stranas Kelanjutusiaan. Beberapa Indikator yang digunakan diantaranya berasal dari berbagai survei yang dilaksanakan oleh BPS, seperti Susenas Maret, Susenas MSBP, Sakernas, dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Susenas Maret dapat memotret seberapa banyak lansia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2024, persentase lansia miskin yang tidak

mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan ada sebanyak 9,95 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya atau dengan kata lain mengalami perbaikan capaian karena tingkat kemiskinan merupakan indikator negatif. Dengan capaian yang sudah di bawah 10 persen, target pemerintah pada tahun 2024 dalam mewujudkan Lansia Mandiri telah tercapai.

Walaupun tingkat kemiskinan lansia secara nasional sudah mencapai target, ketimpangan masih terjadi pada kelompok lansia yang tinggal di wilayah perdesaan, lansia perempuan, dan lansia penyandang disabilitas. Pada kelompok-kelompok tersebut tingkat kemiskinan lansia masih di atas 10 persen. Bahkan tingkat kemiskinan pada lansia penyandang disabilitas mencapai 14,75 persen. Artinya ada sebanyak 14,75 persen lansia yang mengalami tiga kerentanan sekaligus yaitu rentan karena menjadi lansia, rentan karena penyandang disabilitas, dan rentan karena mengalami kemiskinan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 7.2 Tingkat Kemiskinan Lansia Menurut Karakteristik, 2024

Target pemerintah untuk mewujudkan Lansia Sejahtera pada tahun 2024 belum dapat tercapai. Dalam lima tahun terakhir, persentase lansia yang bekerja di sektor formal cenderung stagnan. Pada tahun 2024, ada sebanyak 15,25 persen lansia yang bekerja di sektor formal dan angka tersebut hanya mengalami kenaikan sebesar 1,08 persen poin dalam lima tahun. Angka ini juga masih jauh di bawah target yang ditetapkan, dimana pada tahun 2024 ditargetkan 50 persen lansia yang bekerja merupakan pekerja di sektor formal.



Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas lansia bekerja pada sektor nonformal. Apabila dibandingkan dengan persentase tenaga formal pada kelompok umur 15 tahun ke atas pada tahun 2023 yang sebesar 40,89 persen (BPS 2024), kesempatan lansia untuk bekerja pada sektor formal masih rendah.

Dua dari tiga indikator yang digunakan dalam Stranas Kelanjutusiaan untuk menggambarkan Lansia Bermartabat yaitu persentase lansia yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan persentase lansia yang aktif dalam kegiatan keagamaan. Kedua indikator tersebut dihasilkan oleh BPS dari data Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP) setiap tiga tahun sekali. Pendataan Susenas MSBP terakhir dilakukan pada tahun 2021. Pada tahun 2021, persentase lansia yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan ada sebanyak 78,21 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Penurunan tersebut tidak terlepas dari pembatasan kegiatan yang dilakukan selama pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 sangat terlihat jelas pada indikator-indikator yang melibatkan partisipasi masyarakat secara fisik. Selain penurunan partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, penurunan juga terjadi pada kegiatan keagamaan. Persentase lansia yang mengikuti kegiatan keagamaan pada tahun 2021 sebesar 51,54 persen. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 15,11 persen poin dari capaian tahun 2018.

7.2 Program Kesejahteraan Lanjut Usia

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin/rentan sesuai dengan kriteria tertentu. PKH menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga sasaran dan dalam cakupan lebih luas, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Sasaran PKH adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial serta memenuhi komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Seluruh Keluarga Penerima Manfaat



(KPM) PKH berhak mendapatkan program bantuan komplementer sebagai pelengkap bantuan sosial PKH.

Penduduk lansia sebagai bagian dari salah satu siklus kehidupan manusia tidak terkecuali menjadi salah satu sasaran penerima PKH. Setiap tahun lansia yang terdaftar sebagai penerima PKH akan mendapatkan bantuan sebesar 2,4 juta. Bantuan sosial tersebut diberikan secara nontunai melalui rekening bank bekerja sama dengan Bank Penyalur yang dapat diakses menggunakan kartu debit Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

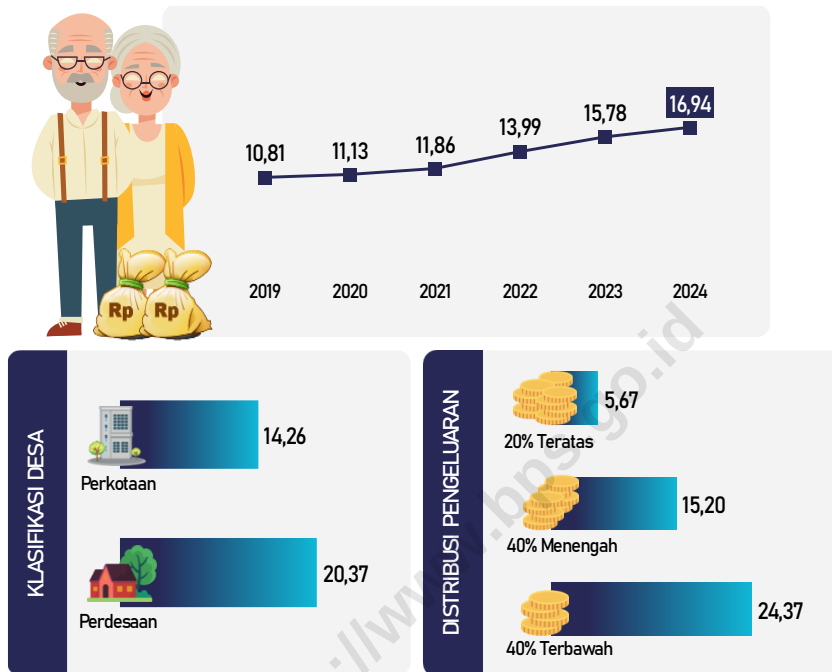
Kepesertaan penerima bantuan PKH ditetapkan selama enam tahun. Namun, setelah enam tahun menjadi penerima PKH tingkat kesejahteraan keluarga belum tentu mengalami perbaikan. Oleh karena itu, akan dilakukan evaluasi untuk menilai apakah keluarga tersebut masih layak menjadi KPM PKH. Bagi keluarga yang dinilai telah berhasil memperbaiki tingkat kesejahteraannya, mereka tidak lagi mendapat bantuan PKH. Bagi keluarga yang belum berubah tingkat kesejahteraannya masih akan tetap menerima PKH selama 3 tahun.

Upaya peningkatan kesejahteraan lansia melalui program PKH menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Dalam rentang waktu enam tahun terakhir, persentase rumah tangga lansia yang masih menjadi penerima PKH semakin meningkat. Pada tahun 2024, terdapat 16,94 persen rumah tangga lansia yang tercakup sebagai penerima PKH. Penurunan tingkat kemiskinan lansia sejalan dengan kenaikan persentase rumah tangga lansia yang masih menjadi penerima PKH. Dalam subbab sebelumnya dijelaskan bahwa pada tahun 2024 tingkat kemiskinan lansia turun menjadi 9,95 persen dari angka 10,04 persen di tahun 2023.

Di wilayah perkotaan, persentase rumah tangga lansia yang masih menjadi penerima PKH sebanyak 14,26 persen. Sedangkan di wilayah perdesaan, angka ini relatif lebih tinggi yaitu sebesar 20,37 persen rumah tangga lansia yang masih tercatat sebagai penerima PKH. Berdasarkan distribusi pengeluaran, semakin sejahtera rumah tangga semakin kecil kejadian rumah tangga lansia yang masih menjadi penerima PKH. Pada kelompok



terkaya, ada 5,67 persen rumah tangga lansia masih menerima PKH. Di sisi lain, sebanyak 24,37 persen rumah tangga lansia dari kelompok keluarga dengan pengeluaran terendah menerima PKH.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 7.3 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat sebagai Penerima PKH Menurut Klasifikasi Desa dan Distribusi Pengeluaran, 2024

Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (ATENSI LU)

Inisiasi program Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (ATENSI LU) dilatarbelakangi dari banyaknya kendala yang ditemui pada program-program bantuan sosial lansia seperti duplikasi penerima program, *inclusion error*, *exclusion error*, dan *moral hazard* pelaksana di lapangan. Dengan ATENSI LU diharapkan intervensi kepada lansia dapat diperluas untuk meningkatkan kualitas lansia di masa depan. Layanan langsung Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dilaksanakan dalam bentuk Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (ATENSI LU) oleh Balai dan Loka lingkup Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

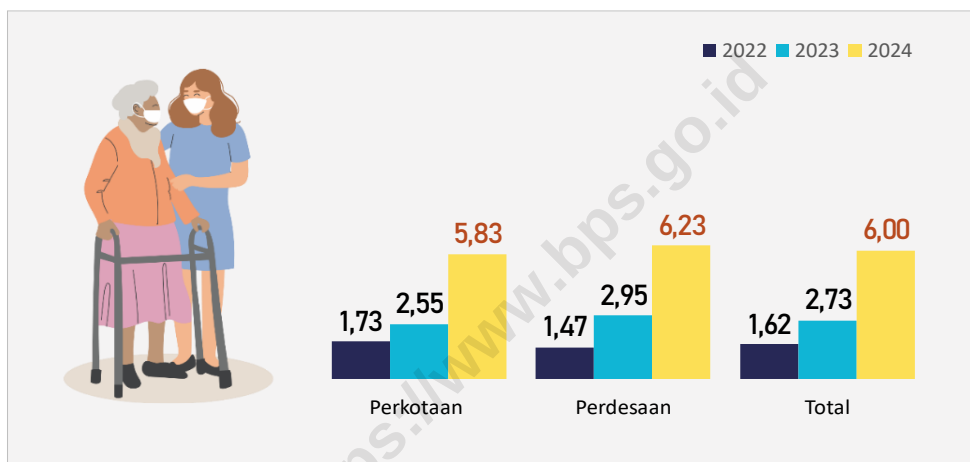
Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dilaksanakan dalam bentuk:

1. Layanan Berbasis Keluarga. ATENSI LU berbasis keluarga dilakukan melalui pendampingan keluarga, penguatan kapasitas keluarga, dukungan keluarga pengganti, dukungan bantuan sosial lansia melalui PKH/BPNT, dan dukungan non operasional lansia dalam keluarga.
2. Layanan Berbasis Komunitas Lanjut Usia. Pemerintah memberikan dukungan non operasional bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS LU) untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan lansia. Setiap lansia yang dibina oleh LKS LU dapat didaftarkan ke dalam DTKS.
3. Layanan Berbasis Residensial di Balai/Loka Lanjut Usia dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Layanan residential melalui Balai Rehsos, Panti Rehsos atau LKS menjadi kebutuhan bagi lansia yang tidak memiliki keluarga atau ditelantarkan oleh keluarga atau keluarga yang tidak mampu merawat karena permasalahan ekonomi, sosial atau lainnya. Pelayanan residential dikhususkan kepada lanjut usia potensial yaitu lansia yang dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa memerlukan pertolongan orang lain. Lansia potensial yang telah mendapatkan program ATENSI LU selama di balai/loka dapat menerima dukungan non operasional untuk peningkatan kesejahteraan lansia.

Sasaran ATENSI LU meliputi lansia, keluarga, dan masyarakat. Adapun kriteria lansia penerima ATENSI LU adalah lansia yang mengalami masalah sosial berupa kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, tuna sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta lansia yang mengalami hambatan dalam fungsi sosialnya. Sasaran Keluarga adalah keluarga lansia yang merupakan keluarga kandung lansia. Apabila lansia tidak memiliki keluarga kandung, orang-orang disekitar lansia seperti tetangga, ketua lingkungan setempat atau tokoh-tokoh masyarakat setempat bisa menjadi keluarga pengganti.



Hasil Susenas Maret 2024 mencatat ada sebanyak 6 persen rumah tangga lansia yang memperoleh ATENSI LU dalam setahun terakhir. Angka tersebut naik sebesar 3,27 poin dibandingkan tahun sebelumnya, relatif lebih signifikan dibandingkan kenaikan pada tahun 2023. Kenaikan ini menggambarkan meluasnya rumah tangga atau keluarga lansia yang tercakup dalam program ATENSI LU. Rumah tangga lansia di perdesaan yang tercakup program ATENSI LU relatif lebih luas dibandingkan di wilayah perkotaan (6,23 persen dibanding 5,83 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret 2022–2024

Gambar 7.4 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Bantuan Sosial dari Program ATENSI Lansia Menurut Klasifikasi Desa, 2022–2024

Sistem Informasi Lanjut Usia (SILANI)

Kementerian PPN/Bappenas melakukan digitalisasi Sistem Informasi Lanjut Usia atau SILANI dalam bentuk aplikasi berbasis website untuk pemutakhiran data lansia, rujukan layanan, dan manajemen kasus. Ujicoba SILANI pertama kali dilakukan pada tahun 2019. Tujuan dari ujicoba ini untuk melakukan pendataan lansia di tingkat desa, sebagai bagian penyusunan sistem informasi yang terintegrasi di tingkat desa berbasis komunitas. Ujicoba dilakukan di tujuh kabupaten/kota dari tiga provinsi berbeda yaitu Bali, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Masing-masing kabupaten/kota diambil satu desa/kelurahan. Informasi yang dikumpulkan yaitu informasi dasar, status

kesehatan fisik dan kondisi psikologis, keadaan sosial, hingga lokasi rumah, dan fasilitas lansia (Winahyu 2020).

Permakanan Lansia

Program Permakanan adalah bantuan sosial berupa makanan siap saji yang dibagikan kepada penyandang kesejahteraan sosial yang baru diinisiasi pada tahun 2022 (Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, 2023). Kriteria Lansia Penerima Manfaat Program Permakanan, yaitu: miskin atau tidak mampu, berusia 75 tahun atau lebih, terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bukan berstatus sebagai pensiunan istri/suami PNS dan/atau purnawirawan TNI/Polri, memiliki NIK dan Nomor Kartu Keluarga, diusulkan camat atau kepala distrik atau nama lain sebagai penerima manfaat permakanan. Melalui program permakanan ini, para lansia akan mendapatkan nutrisi makanan 2 kali sehari yang terdiri dari nasi/jenis makanan pokok lainnya, lauk pauk (hewani/nabati), sayur, buah potong, dan air mineral.

Sekolah Lansia Tangguh (Selantang)

Dalam Sekolah Lansia, konsep dasar yang dikembangkan adalah pendidikan sepanjang hayat (Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan, 2024). Bahwa pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi berlanjut sepanjang hidupnya. Visi Sekolah Lansia adalah menjadi pendidikan nonformal untuk mewujudkan Lansia yang SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, dan Produktif) serta Bermartabat dalam 7 Dimensi Lansia Tangguh secara utuh yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara.

BKKBN membuat program Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) yang merupakan pengembangan dari Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada awal Tahun 2022, Kota Pasuruan, Kota Malang, dan Kabupaten Jombang ditunjuk oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur sebagai daerah ujicoba program Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) di Provinsi Jawa Timur. Pembelajaran Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) terbagi ke dalam 3 tahapan yaitu Standart 1 (S1), Standart 2 (S2) dan Standart 3 (S3). Pada Standart 3



diharapkan lansia dapat menjadi teladan bagi lansia lain atau biasa disebut sebagai Duta Lansia.

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia Kementerian Kesehatan

Program kesejahteraan lanjut usia dari Kementerian Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi lansia, serta meningkatkan pemberdayaan potensi lansia di masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan lansia untuk mencapai lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat, atau disingkat dengan Lansia SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif). Program yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan lansia SMART di antaranya:

1. Pengembangan Pelayanan Rujukan, melalui pengembangan rumah sakit yang mempunyai pelayanan Geriatri Terpadu.
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan di Posyandu Lansia. Kegiatan dilakukan oleh kader dengan pendampingan dari tenaga kesehatan Puskesmas/sektor terkait. Kegiatan ini menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif serta deteksi dini.
3. Peningkatan Pemberdayaan Lansia dalam keluarga/masyarakat. Proses pemberian informasi, kemampuan, dan motivasi bagi lansia agar mereka berperilaku sehat, berperan dalam mengembangkan perilaku sehat, dan mampu memberi solusi apabila ada permasalahan kesehatan dalam keluarga dan masyarakat.
4. Peningkatan Pelayanan *Home Care* yang terintegrasi dalam perawatan kesehatan masyarakat. Program ini ditujukan bagi lanjut usia yang tidak mampu secara fungsional untuk mandiri di rumah namun tidak ada indikasi untuk dirawat di rumah sakit, atau secara teknis sulit untuk berobat jalan.
5. Pengembangan pelayanan Perawatan Jangka Panjang (PJP, *Long Term Care*). PJP dikembangkan dengan memperhatikan aspek budaya yang masih mempertahankan model keluarga besar.
6. Peningkatan pelayanan integrasi dengan lintas program melalui pendekatan siklus hidup. Lansia sehat, aktif dan mandiri dapat dipersiapkan sejak dini



sebagai pendekatan siklus hidup. Pelayanan kepada lanjut usia dilakukan secara terintegrasi yang melibatkan lintas program.

7. Peningkatan kemitraan dengan lembaga sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (Ormas), pihak swasta, dan lain-lain. Peningkatan kemitraan disesuaikan dengan bidang dan kemampuan masing-masing dengan prinsip kesetaraan dan keterbukaan. Di tingkat kecamatan dapat dibentuk kelompok kerja pembinaan lanjut usia yang terdiri dari lintas unsur dan lintas sektor, yang bertujuan untuk:

- a. Melakukan koordinasi dalam upaya pembinaan lanjut usia;
- b. Mendorong terbentuknya kelompok/posyandu lanjut usia di masyarakat;
- c. Memantau permasalahan lanjut usia di masyarakat dan memberi masukan kepada pelaksana program sektor terkait;

Sedangkan di tingkat desa/kelurahan dibentuk tim pelaksana pembinaan lansia.

8. Bina Keluarga Lansia (BKL)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia tangguh dalam bentuk penyuluhan, kunjungan rumah, rujukan dan pencatatan, serta pelaporan. Lansia tangguh adalah upaya agar lansia tetap produktif. Misalnya dengan memperpanjang usia bekerja bagi lansia di sektor formal, baik perusahaan maupun PNS, di atas usia pensiun yang telah ditetapkan (58 tahun dan atau 60 tahun). Selanjutnya, lansia madya yang berusia 70 sampai 80 tahun diharapkan bisa mandiri atau bisa mengurus dirinya sendiri. Baru di usia 80 tahun ke atas, sebagian besar lansia membutuhkan pendampingan melalui pengembangan *home care* atau pengobatan di lingkungan rumah tempat tinggal.

9. Pos Layanan Terpadu (Posyandu) Lansia

Posyandu Lansia adalah suatu wadah pelayanan kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk melayani lansia. Proses pembentukan dan pelaksanaan Posyandu Lansia dilakukan oleh masyarakat bersama LSM, lintas sektor pemerintah dan non pemerintah, swasta, organisasi sosial, dan lain-lain dengan menitikberatkan pelayanan kesehatan



pada upaya promotif dan preventif. Di samping pelayanan kesehatan, posyandu lansia juga memberikan pelayanan sosial, agama, pendidikan, keterampilan, olahraga, seni budaya, dan pelayanan lain yang dibutuhkan para lansia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Posyandu Lansia juga membantu lansia agar dapat beraktifitas dan mengembangkan potensi diri.

7.3 Program Kesejahteraan Lainnya

Beberapa program perlindungan sosial yang ada di Indonesia yang mencakup penduduk lanjut usia, meskipun tidak secara khusus ditargetkan untuk lansia yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

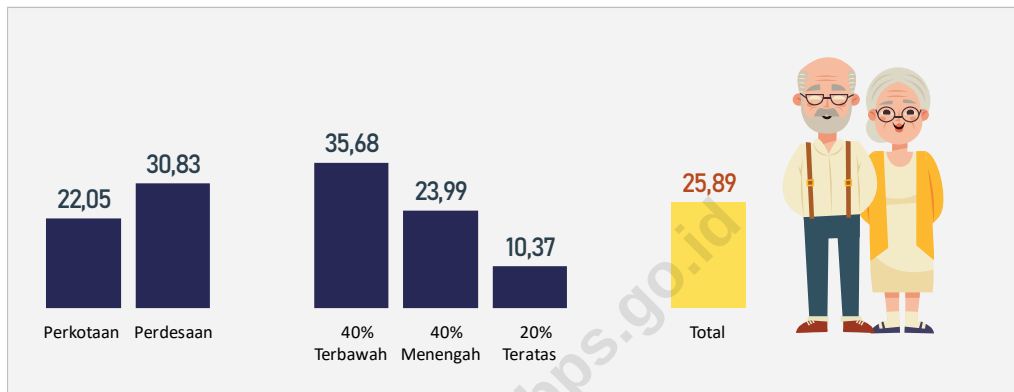
Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)/Program Sembako

Bantuan sosial pangan diberikan dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya (Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-tunai 2020). Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastera, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema non-tunai atau BPNT, dengan sejumlah kabupaten yang memiliki keterbatasan kondisi infrastruktur nontunai menjalankan mekanisme program Sembako untuk wilayah khusus.

BPNT disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur serta komoditi lainnya di e-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang. Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp150.000/KPM/bulan. Selain itu,



program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Mulai bulan Maret 2020, indeks bantuan program Sembako kembali dinaikkan menjadi Rp200.000/KPM/bulan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat selama pandemi Covid-19.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

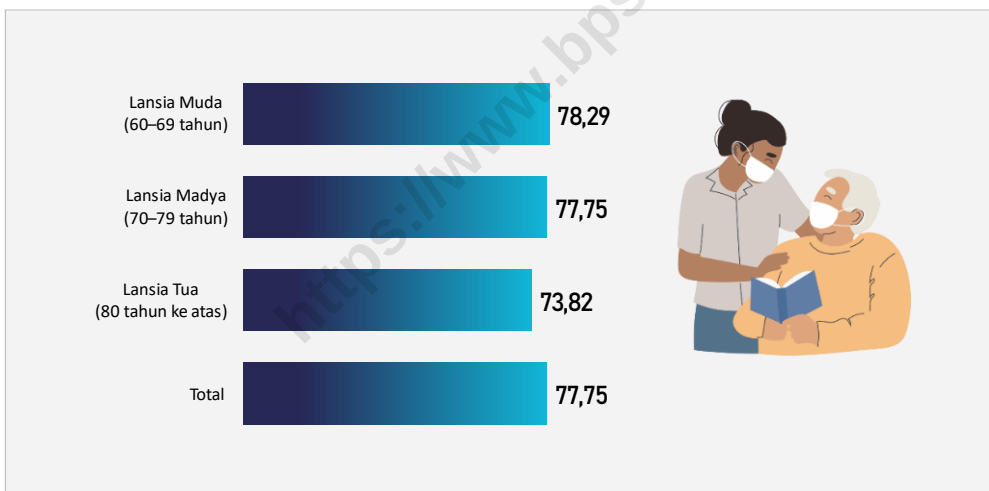
Gambar 7.5 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Pernah Menerima Program Sembako Menurut Klasifikasi Desa dan Distribusi Pengeluaran, 2024

Pada tahun 2024, persentase rumah tangga lansia yang pernah mendapat program sembako sebesar 25,89 persen. Rumah tangga lansia yang memperoleh program sembako tersebut harapannya dapat terpenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan lansia. Berdasarkan klasifikasi desa, persentase rumah tangga lansia di wilayah perdesaan yang pernah menerima program sembako lebih besar daripada rumah tangga lansia di wilayah perkotaan (30,83 persen berbanding 22,05 persen). Menurut distribusi pengeluaran, semakin sejahtera rumah tangga lansia semakin kecil kejadian penerimaan program sembako. Pada kelompok terkaya (20 persen teratas), rumah tangga lansia yang pernah menerima program sembako sebesar 10,37 persen. Sedangkan diantara kelompok termiskin (40 persen terbawah), terdapat 35,68 persen rumah tangga lansia yang pernah menerima program sembako.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)



Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan kombinasi dari sistem asuransi sosial dan sistem subsidi bersumber dari dana APBN berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Thabrany 2014). Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi. Program JKN memerdekakan rakyat dari beban finansial ketika sakit. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kepesertaan JKN terbagi menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (non-PBI). Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Gambar 7.6 Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menurut Kelompok Umur, 2024

Susenas Maret 2024 mencatat bahwa 77,75 persen lansia telah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Capaian tersebut memberikan gambaran bahwa sebagian besar lansia di Indonesia telah memiliki jaminan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan ketika lansia tersebut sakit. Di antara kelompok lansia muda, sebesar 78,29 persen lansia telah memiliki JKN. Angka

ini semakin menurun seiring bertambahnya umur lansia. Pada kelompok lansia tua, persentase lansia yang memiliki JKN ada sebanyak 73,82 persen. Padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa semakin bertambah umur seseorang, frekuensi untuk mengalami gangguan kesehatan akan semakin bertambah.

<https://www.bps.go.id>



Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Jenis Bantuan Sosial yang Diterima, 2024

Karakteristik	PKH	ATENSI LU	BPNT/ Program Sembako	KKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	16,94	6,00	25,89	19,85
Distribusi Pengeluaran				
20% Teratas	5,67	3,67	10,37	8,31
40% Menengah	15,20	6,03	23,99	18,45
40% Terbawah	24,37	7,19	35,68	27,12
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	14,26	5,83	22,05	17,55
Perdesaan	20,37	6,23	30,83	22,81

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 7.2 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Kredit Pengembangan Usaha Menurut Jenis Kredit dan Klasifikasi Desa, 2024

Karakteristik	Klasifikasi Desa		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	17,31	18,34	17,76
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	5,22	6,91	5,96
Kredit dari Bank Umum selain KUR	2,49	2,38	2,44
Kredit dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	0,47	0,41	0,44
Kredit dari Koperasi	1,93	2,43	2,15
Kredit Perorangan dengan Bunga	0,74	0,51	0,64
Kredit Pegadaian	0,75	0,64	0,71
Kredit Perusahaan <i>Leasing</i>	1,56	0,63	1,16
Kredit Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	0,17	0,23	0,20
Pinjaman Online	0,17	0,07	0,13
Kredit PNM-Mekaar	3,53	4,14	3,80
Lainnya	2,30	2,16	2,24

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 7.3 Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan, 2024

Karakteristik	Jaminan Kesehatan	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
(1)	(2)	(3)
Total	78,65	77,75
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	78,83	77,79
Perempuan	78,48	77,71
Kelompok Umur		
Lansia Muda (60–69 Tahun)	79,22	78,29
Lansia Madya (70–79 Tahun)	78,67	77,75
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	74,34	73,82
Status Disabilitas		
Nondisabilitas	78,68	77,77
Disabilitas	78,33	77,57
Distribusi Pengeluaran		
20% Teratas	88,02	85,19
40% Menengah	79,41	78,79
40% Terbawah	73,39	73,18
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	82,87	81,52
Perdesaan	73,33	72,99

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 7.4 Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis, 2024

Karakteristik	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)			Jaminan Kesehatan Swasta	
	PBI	Non-PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	54,62	21,25	3,61	0,35	0,85
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	53,84	22,08	3,56	0,39	0,98
Perempuan	55,32	20,50	3,65	0,32	0,73
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60–69 Tahun)	54,10	22,26	3,69	0,35	0,89
Lansia Madya (70–79 Tahun)	55,41	20,55	3,44	0,38	0,87
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	55,86	16,14	3,56	0,28	0,51
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	54,31	21,56	3,64	0,36	0,86
Disabilitas	57,48	18,40	3,33	0,28	0,73
Distribusi Pengeluaran					
40% Terbawah	63,57	7,75	3,20	0,04	0,19
40% Menengah	55,88	20,72	4,07	0,13	0,59
20% Teratas	33,96	49,88	3,59	1,40	2,67
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	50,75	29,36	3,20	0,56	1,29
Perdesaan	59,49	11,04	4,12	0,10	0,30

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 7.5 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat sebagai Penerima Program PKH Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024

Provinsi	Klasifikasi Desa		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	11,05	18,00	15,72
Sumatera Utara	10,89	14,59	12,50
Sumatera Barat	12,96	18,87	16,00
Riau	11,12	14,24	13,02
Jambi	11,88	13,71	13,11
Sumatera Selatan	13,37	15,13	14,46
Bengkulu	17,51	17,56	17,54
Lampung	17,78	21,01	19,98
Kep. Bangka Belitung	8,97	16,19	11,97
Kepulauan Riau	10,20	22,58	12,44
DKI Jakarta	4,84	—	4,84
Jawa Barat	14,57	17,09	15,19
Jawa Tengah	19,33	24,32	21,73
DI Yogyakarta	23,82	31,84	26,35
Jawa Timur	15,22	20,37	17,60
Banten	9,51	17,09	11,48
Bali	7,73	11,60	8,97
Nusa Tenggara Barat	26,19	27,68	26,90
Nusa Tenggara Timur	25,38	43,20	38,85
Kalimantan Barat	10,04	18,10	14,86
Kalimantan Tengah	7,38	11,63	9,88
Kalimantan Selatan	10,32	9,58	9,93
Kalimantan Timur	7,65	12,19	9,24
Kalimantan Utara	9,49	11,72	10,38
Sulawesi Utara	11,54	13,81	12,59
Sulawesi Tengah	15,98	20,34	18,98
Sulawesi Selatan	12,83	21,31	17,65
Sulawesi Tenggara	16,35	25,23	22,14
Gorontalo	22,59	34,54	28,99
Sulawesi Barat	16,94	24,93	23,27
Maluku	14,47	29,03	23,04
Maluku Utara	8,75	18,43	15,73
Papua Barat	22,41	23,37	23,07
Papua Barat Daya	20,48	21,02	20,76
Papua	11,84	18,43	14,50
Papua Selatan	NA	13,69	8,71
Papua Tengah	NA	NA	2,29
Papua Pegunungan	NA	6,29	5,79
Indonesia	14,26	20,37	16,94

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 7.6 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima ATENSI LU Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024

Provinsi	Klasifikasi Desa		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3,91	7,06	6,02
Sumatera Utara	6,75	7,54	7,10
Sumatera Barat	3,70	7,38	5,59
Riau	6,04	5,58	5,76
Jambi	2,39	4,79	4,00
Sumatera Selatan	5,09	4,96	5,01
Bengkulu	7,92	7,02	7,29
Lampung	3,75	6,33	5,51
Kep. Bangka Belitung	2,29	4,20	3,08
Kepulauan Riau	8,07	21,16	10,44
DKI Jakarta	14,29	–	14,29
Jawa Barat	5,74	5,45	5,67
Jawa Tengah	5,92	6,93	6,41
DI Yogyakarta	3,69	4,27	3,88
Jawa Timur	4,39	4,52	4,45
Banten	5,13	5,23	5,16
Bali	2,70	4,07	3,14
Nusa Tenggara Barat	5,25	8,53	6,83
Nusa Tenggara Timur	6,23	10,89	9,75
Kalimantan Barat	3,72	6,75	5,54
Kalimantan Tengah	2,17	4,79	3,71
Kalimantan Selatan	6,60	5,73	6,15
Kalimantan Timur	4,07	5,82	4,68
Kalimantan Utara	4,13	7,50	5,48
Sulawesi Utara	11,15	5,84	8,70
Sulawesi Tengah	5,87	8,24	7,50
Sulawesi Selatan	6,00	7,00	6,57
Sulawesi Tenggara	4,74	8,09	6,92
Gorontalo	5,87	12,55	9,45
Sulawesi Barat	16,15	13,75	14,25
Maluku	4,27	6,48	5,57
Maluku Utara	7,63	6,90	7,10
Papua Barat	6,11	5,26	5,53
Papua Barat Daya	9,30	14,11	11,78
Papua	5,35	8,28	6,53
Papua Selatan	NA	1,55	0,98
Papua Tengah	NA	2,18	1,45
Papua Pegunungan	NA	NA	NA
Indonesia	5,83	6,23	6,00

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 7.7 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Program Sembako Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024

Provinsi	Klasifikasi Desa		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	23,92	42,53	36,42
Sumatera Utara	16,03	23,39	19,25
Sumatera Barat	15,37	25,34	20,49
Riau	13,39	21,10	18,09
Jambi	12,91	15,45	14,61
Sumatera Selatan	15,51	23,01	20,15
Bengkulu	16,53	31,08	26,78
Lampung	25,88	31,98	30,04
Kep. Bangka Belitung	16,00	15,06	15,61
Kepulauan Riau	9,47	22,89	11,90
DKI Jakarta	6,87	–	6,87
Jawa Barat	28,92	41,46	32,00
Jawa Tengah	28,57	35,75	32,03
DI Yogyakarta	29,52	49,05	35,68
Jawa Timur	23,78	33,27	28,16
Banten	16,89	30,30	20,38
Bali	6,20	13,04	8,40
Nusa Tenggara Barat	28,76	28,68	28,72
Nusa Tenggara Timur	20,19	38,48	34,01
Kalimantan Barat	13,09	21,78	18,29
Kalimantan Tengah	10,84	13,63	12,49
Kalimantan Selatan	14,28	13,83	14,05
Kalimantan Timur	7,96	14,40	10,21
Kalimantan Utara	13,54	11,79	12,84
Sulawesi Utara	10,61	18,34	14,18
Sulawesi Tengah	22,15	24,10	23,49
Sulawesi Selatan	17,17	28,02	23,34
Sulawesi Tenggara	17,16	23,09	21,03
Gorontalo	24,15	47,55	36,70
Sulawesi Barat	13,50	24,18	21,96
Maluku	13,21	17,30	15,62
Maluku Utara	7,40	12,97	11,41
Papua Barat	10,40	29,90	23,80
Papua Barat Daya	24,86	35,95	30,58
Papua	12,06	31,67	19,97
Papua Selatan	NA	28,81	20,30
Papua Tengah	3,73	1,54	2,29
Papua Pegunungan	NA	17,75	16,30
Indonesia	22,05	30,83	25,89

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 7.8 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 2024

Provinsi	Kepemilikan KKS		Jumlah
	Memiliki	Tidak Memiliki	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	17,10	82,90	100,00
Sumatera Utara	11,67	88,33	100,00
Sumatera Barat	16,28	83,72	100,00
Riau	19,50	80,50	100,00
Jambi	11,06	88,94	100,00
Sumatera Selatan	14,23	85,77	100,00
Bengkulu	17,80	82,20	100,00
Lampung	23,57	76,43	100,00
Kep. Bangka Belitung	9,39	90,61	100,00
Kepulauan Riau	14,51	85,49	100,00
DKI Jakarta	5,10	94,90	100,00
Jawa Barat	24,53	75,47	100,00
Jawa Tengah	26,40	73,60	100,00
DI Yogyakarta	31,19	68,81	100,00
Jawa Timur	20,46	79,54	100,00
Banten	15,42	84,58	100,00
Bali	9,94	90,06	100,00
Nusa Tenggara Barat	25,71	74,29	100,00
Nusa Tenggara Timur	23,07	76,93	100,00
Kalimantan Barat	15,25	84,75	100,00
Kalimantan Tengah	6,31	93,69	100,00
Kalimantan Selatan	10,00	90,00	100,00
Kalimantan Timur	7,71	92,29	100,00
Kalimantan Utara	7,35	92,65	100,00
Sulawesi Utara	12,11	87,89	100,00
Sulawesi Tengah	18,60	81,40	100,00
Sulawesi Selatan	18,97	81,03	100,00
Sulawesi Tenggara	19,68	80,32	100,00
Gorontalo	28,66	71,34	100,00
Sulawesi Barat	25,17	74,83	100,00
Maluku	13,79	86,21	100,00
Maluku Utara	6,82	93,18	100,00
Papua Barat	10,44	89,56	100,00
Papua Barat Daya	9,02	90,98	100,00
Papua	7,86	92,14	100,00
Papua Selatan	4,37	95,63	100,00
Papua Tengah	1,05	98,95	100,00
Papua Pegunungan	3,78	96,22	100,00
Indonesia	19,85	80,15	100,00

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 7.9 Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2024

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	99,42	98,36	99,13	98,33	98,71
Sumatera Utara	80,73	72,30	77,72	76,38	77,00
Sumatera Barat	84,52	78,40	81,87	80,95	81,38
Riau	85,28	75,55	79,41	79,38	79,40
Jambi	79,97	60,91	68,42	65,72	67,06
Sumatera Selatan	88,97	70,36	77,40	77,24	77,32
Bengkulu	86,21	74,96	78,35	78,08	78,22
Lampung	84,23	69,05	73,74	73,89	73,81
Kep. Bangka Belitung	91,98	84,91	89,28	88,81	89,05
Kepulauan Riau	90,52	92,35	88,74	93,12	90,87
DKI Jakarta	96,71	–	96,75	96,68	96,71
Jawa Barat	79,29	65,05	76,51	74,90	75,69
Jawa Tengah	81,11	70,29	75,38	76,22	75,83
DI Yogyakarta	93,51	93,40	93,31	93,61	93,47
Jawa Timur	76,97	69,19	72,99	73,65	73,34
Banten	82,13	63,02	77,70	76,49	77,10
Bali	94,66	91,92	93,96	93,58	93,76
Nusa Tenggara Barat	79,96	68,78	76,27	73,03	74,50
Nusa Tenggara Timur	87,52	83,80	86,58	83,01	84,68
Kalimantan Barat	80,87	66,86	72,27	72,68	72,48
Kalimantan Tengah	78,10	68,65	73,02	71,88	72,49
Kalimantan Selatan	79,69	75,18	76,78	77,83	77,32
Kalimantan Timur	91,75	86,43	90,11	89,74	89,93
Kalimantan Utara	91,88	96,61	94,41	93,23	93,86
Sulawesi Utara	92,79	86,98	89,87	90,25	90,07
Sulawesi Tengah	91,16	82,92	86,00	84,77	85,38
Sulawesi Selatan	91,61	85,96	88,65	88,13	88,36
Sulawesi Tenggara	91,92	86,30	89,11	87,38	88,21
Gorontalo	95,29	93,71	95,40	93,60	94,44
Sulawesi Barat	95,13	93,62	94,65	93,32	93,95
Maluku	76,49	67,16	71,70	70,12	70,88
Maluku Utara	78,18	77,77	79,16	76,61	77,88
Papua Barat	82,38	78,65	79,09	80,63	79,81
Papua Barat Daya	91,93	92,83	94,54	90,13	92,40
Papua	91,90	91,73	92,25	91,37	91,83
Papua Selatan	96,62	94,94	96,32	94,72	95,58
Papua Tengah	67,88	67,27	68,28	66,36	67,48
Papua Pegunungan	97,97	99,25	99,77	98,12	99,15
Indonesia	82,87	73,33	78,83	78,48	78,65

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 7.10 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024

Provinsi	Klasifikasi Desa		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	29,45	7,68	14,82
Sumatera Utara	22,29	9,96	16,90
Sumatera Barat	26,40	12,27	19,14
Riau	25,41	6,79	14,06
Jambi	26,02	7,07	13,32
Sumatera Selatan	28,31	14,57	19,81
Bengkulu	27,56	7,98	13,77
Lampung	17,40	4,30	8,46
Kep. Bangka Belitung	23,34	7,66	16,82
Kepulauan Riau	35,84	16,95	32,42
DKI Jakarta	24,49	—	24,49
Jawa Barat	18,26	6,52	15,37
Jawa Tengah	19,86	7,10	13,70
DI Yogyakarta	25,25	9,27	20,20
Jawa Timur	15,56	5,29	10,81
Banten	25,05	7,22	20,41
Bali	24,30	11,84	20,29
Nusa Tenggara Barat	18,07	5,38	11,98
Nusa Tenggara Timur	37,87	9,82	16,66
Kalimantan Barat	30,66	7,57	16,85
Kalimantan Tengah	33,05	13,15	21,33
Kalimantan Selatan	20,97	11,25	15,93
Kalimantan Timur	29,88	12,58	23,82
Kalimantan Utara	29,58	12,06	22,58
Sulawesi Utara	24,41	13,30	19,29
Sulawesi Tengah	35,85	8,02	16,67
Sulawesi Selatan	26,72	10,45	17,47
Sulawesi Tenggara	27,27	9,72	15,83
Gorontalo	34,47	10,18	21,45
Sulawesi Barat	34,58	7,07	12,80
Maluku	38,21	9,48	21,30
Maluku Utara	27,45	10,41	15,17
Papua Barat	35,81	8,64	17,14
Papua Barat Daya	20,00	10,88	15,30
Papua	46,23	7,29	30,51
Papua Selatan	30,43	3,06	13,01
Papua Tengah	35,29	NA	14,39
Papua Pegunungan	NA	NA	NA
Indonesia	21,24	7,75	15,33

Catatan: Jaminan Sosial yang dimaksud adalah Jaminan Pensiunan/Veteran, Jaminan Hari Tua, Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja, Jaminan/Asuransi Kematian, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
 Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 7.11 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Jenis Jaminan Sosial, 2024

Provinsi	Jenis Jaminan Sosial					
	Jaminan Pensiun	Jaminan Hari Tua	Asuransi Kecelakaan Kerja	Asuransi Kematian	Jaminan Kehilangan Pekerjaan	Pesangaan PHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	12,34	9,16	7,78	8,78	1,02	0,99
Sumatera Utara	11,78	7,66	7,70	7,11	0,67	2,05
Sumatera Barat	13,72	10,57	12,01	12,04	0,50	1,10
Riau	8,36	7,69	10,01	8,18	1,01	1,87
Jambi	10,15	7,48	7,64	7,02	0,95	1,83
Sumatera Selatan	10,27	7,71	8,06	13,49	1,63	2,28
Bengkulu	10,95	8,64	8,27	8,23	0,36	1,28
Lampung	5,73	4,23	4,82	3,85	0,81	1,89
Kep. Bangka Belitung	10,16	9,99	11,43	10,01	0,71	2,18
Kepulauan Riau	13,04	20,41	25,14	20,06	5,00	6,37
DKI Jakarta	15,38	11,21	13,32	11,58	2,55	2,73
Jawa Barat	9,62	8,31	8,20	8,51	1,51	2,47
Jawa Tengah	7,71	7,85	8,80	7,58	1,24	1,77
DI Yogyakarta	14,14	10,29	10,52	9,02	1,32	2,08
Jawa Timur	6,54	5,19	6,16	5,38	0,69	1,37
Banten	10,01	12,49	13,84	11,66	2,35	4,91
Bali	13,88	10,47	12,07	10,90	1,12	2,25
Nusa Tenggara Barat	9,35	6,56	6,83	8,19	1,08	1,51
Nusa Tenggara Timur	13,30	8,16	8,04	8,23	0,83	1,31
Kalimantan Barat	12,02	10,88	11,12	10,17	1,13	2,73
Kalimantan Tengah	16,94	11,95	10,16	11,45	0,80	NA
Kalimantan Selatan	11,76	8,72	8,84	9,16	0,56	1,34
Kalimantan Timur	13,75	12,01	15,02	13,37	2,08	4,35
Kalimantan Utara	14,90	10,61	14,97	12,26	1,73	1,99
Sulawesi Utara	15,13	11,17	9,60	10,21	1,61	1,59
Sulawesi Tengah	12,67	8,96	9,38	9,75	1,06	1,76
Sulawesi Selatan	13,44	8,91	8,08	8,90	0,47	0,67
Sulawesi Tenggara	12,86	10,51	9,74	10,48	0,77	1,08
Gorontalo	13,73	11,46	14,08	16,32	2,22	1,77
Sulawesi Barat	11,10	8,76	7,00	8,11	NA	1,22
Maluku	18,41	9,96	8,61	10,71	0,67	1,00
Maluku Utara	9,70	7,31	8,26	7,97	1,79	3,10
Papua Barat	13,75	6,68	6,55	5,19	NA	NA
Papua Barat Daya	12,37	7,61	7,11	6,79	NA	1,45
Papua	28,94	12,75	9,77	9,33	1,42	NA
Papua Selatan	10,77	8,22	6,34	7,44	NA	NA
Papua Tengah	14,39	8,96	6,91	7,60	NA	NA
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Indonesia	9,84	8,09	8,65	8,27	1,18	1,98

Catatan: Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 7.12 *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat sebagai Penerima Program PKH Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	11,05	8,08	14,02	13,72	18,00	15,85	20,16	6,10	15,72	13,97	17,47	5,67
Sumatera Utara	10,89	8,93	12,84	9,17	14,59	12,79	16,38	6,27	12,50	11,15	13,86	5,52
Sumatera Barat	12,96	10,20	15,73	10,87	18,87	16,69	21,05	5,89	16,00	14,25	17,75	5,59
Riau	11,12	7,69	14,56	15,76	14,24	11,68	16,80	9,17	13,02	10,96	15,07	8,05
Jambi	11,88	8,59	15,17	14,14	13,71	11,28	16,14	9,06	13,11	11,15	15,07	7,63
Sumatera Selatan	13,37	10,34	16,39	11,55	15,13	13,13	17,13	6,74	14,46	12,76	16,15	5,97
Bengkulu	17,51	12,61	22,40	14,27	17,56	14,63	20,49	8,52	17,54	15,02	20,06	7,33
Lampung	17,78	13,72	21,83	11,64	21,01	18,73	23,29	5,54	19,98	17,96	22,00	5,16
Kep. Bangka Belitung	8,97	5,84	12,10	17,83	16,19	11,83	20,55	13,74	11,97	9,39	14,55	11,00
Kepulauan Riau	10,20	5,69	14,70	22,55	22,58	14,22	30,93	18,87	12,44	8,47	16,40	16,27
DKI Jakarta	4,84	3,48	6,20	14,30	–	–	–	–	4,84	3,48	6,20	14,30
Jawa Barat	14,57	13,12	16,01	5,06	17,09	15,28	18,90	5,40	15,19	14,01	16,36	3,95
Jawa Tengah	19,33	18,00	20,65	3,49	24,32	22,99	25,64	2,79	21,73	20,80	22,67	2,20
DI Yogyakarta	23,82	20,67	26,97	6,74	31,84	27,84	35,83	6,40	26,35	23,86	28,84	4,82
Jawa Timur	15,22	14,04	16,40	3,97	20,37	19,23	21,51	2,86	17,60	16,77	18,43	2,40
Banten	9,51	6,96	12,05	13,66	17,09	13,35	20,83	11,16	11,48	9,36	13,60	9,43
Bali	7,73	6,09	9,36	10,78	11,60	9,20	14,00	10,55	8,97	7,62	10,33	7,69
Nusa Tenggara Barat	26,19	21,83	30,55	8,49	27,68	23,63	31,72	7,46	26,90	23,92	29,89	5,66
Nusa Tenggara Timur	25,38	20,96	29,79	8,88	43,20	41,03	45,36	2,56	38,85	36,87	40,83	2,60
Kalimantan Barat	10,04	7,19	12,89	14,50	18,10	15,55	20,64	7,18	14,86	12,95	16,77	6,57
Kalimantan Tengah	7,38	3,99	10,77	23,45	11,63	9,00	14,26	11,55	9,88	7,80	11,96	10,75
Kalimantan Selatan	10,32	7,71	12,93	12,90	9,58	7,65	11,50	10,24	9,93	8,33	11,54	8,23
Kalimantan Timur	7,65	5,40	9,90	15,02	12,19	7,78	16,60	18,47	9,24	7,10	11,38	11,80
Kalimantan Utara	9,49	4,73	14,24	25,57	11,72	6,81	16,63	21,37	10,38	6,92	13,84	17,01
Sulawesi Utara	11,54	8,97	14,11	11,36	13,81	11,82	15,81	7,37	12,59	10,93	14,25	6,73
Sulawesi Tengah	15,98	11,15	20,81	15,43	20,34	17,63	23,05	6,80	18,98	16,58	21,38	6,45
Sulawesi Selatan	12,83	10,64	15,02	8,70	21,31	19,47	23,15	4,40	17,65	16,24	19,07	4,09
Sulawesi Tenggara	16,35	11,84	20,86	14,08	25,23	22,49	27,97	5,54	22,14	19,76	24,52	5,48
Gorontalo	22,59	16,50	28,68	13,75	34,54	29,50	39,57	7,43	28,99	25,07	32,92	6,90
Sulawesi Barat	16,94	10,27	23,61	20,09	24,93	20,77	29,08	8,50	23,27	19,69	26,84	7,84
Maluku	14,47	9,78	19,17	16,54	29,03	25,07	32,99	6,96	23,04	20,00	26,08	6,73
Maluku Utara	8,75	4,03	13,47	27,54	18,43	15,13	21,73	9,13	15,73	13,01	18,45	8,82
Papua Barat	22,41	13,17	31,65	21,03	23,37	17,35	29,39	13,15	23,07	18,02	28,11	11,16
Papua Barat Daya	20,48	11,13	29,82	23,28	21,02	15,38	26,67	13,70	20,76	15,38	26,14	13,23
Papua	11,84	6,94	16,74	21,12	18,43	14,16	22,70	11,83	14,50	11,11	17,89	11,94
Papua Selatan	NA	NA	NA	NA	13,69	7,38	20,00	23,53	8,71	4,62	12,80	23,95
Papua Tengah	NA	NA	NA	56,19	NA	NA	NA	50,51	2,29	0,60	3,98	37,64
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	106,63	6,29	2,56	10,02	30,28	5,79	2,36	9,22	30,25
Indonesia	14,26	13,74	14,78	1,86	20,37	19,90	20,84	1,18	16,94	16,58	17,29	1,08

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



**Tabel 7.13 Sampling Error Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima
ATENSI LU Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024**

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	3,91	2,14	5,68	23,08	7,06	5,63	8,49	10,33	6,02	4,90	7,15	9,51
Sumatera Utara	6,75	5,26	8,24	11,28	7,54	6,17	8,91	9,29	7,10	6,06	8,13	7,42
Sumatera Barat	3,70	2,13	5,28	21,71	7,38	5,95	8,82	9,93	5,59	4,53	6,66	9,73
Riau	6,04	3,79	8,29	19,02	5,58	3,83	7,33	15,99	5,76	4,38	7,14	12,24
Jambi	2,39	0,90	3,88	31,77	4,79	3,33	6,25	15,57	4,00	2,90	5,09	14,00
Sumatera Selatan	5,09	3,16	7,03	19,37	4,96	3,89	6,04	11,01	5,01	4,02	6,01	10,09
Bengkulu	7,92	4,36	11,49	22,95	7,02	5,07	8,97	14,19	7,29	5,55	9,02	12,14
Lampung	3,75	1,83	5,67	26,17	6,33	4,98	7,68	10,90	5,51	4,40	6,62	10,25
Kep. Bangka Belitung	2,29	0,90	3,68	31,06	4,20	1,99	6,41	26,85	3,08	1,85	4,31	20,32
Kepulauan Riau	8,07	4,46	11,69	22,82	21,16	11,43	30,89	23,46	10,44	6,98	13,91	16,94
DKI Jakarta	14,29	11,99	16,59	8,22	–	–	–	–	14,29	11,99	16,59	8,22
Jawa Barat	5,74	4,79	6,68	8,38	5,45	4,27	6,62	11,00	5,67	4,90	6,43	6,91
Jawa Tengah	5,92	5,10	6,74	7,05	6,93	6,13	7,73	5,87	6,41	5,83	6,98	4,55
DI Yogyakarta	3,69	2,33	5,05	18,78	4,27	2,61	5,93	19,85	3,88	2,81	4,94	14,06
Jawa Timur	4,39	3,68	5,10	8,24	4,52	3,93	5,11	6,69	4,45	3,98	4,92	5,38
Banten	5,13	3,21	7,06	19,15	5,23	2,91	7,54	22,58	5,16	3,61	6,70	15,31
Bali	2,70	1,61	3,79	20,53	4,07	2,77	5,37	16,32	3,14	2,29	3,99	13,76
Nusa Tenggara Barat	5,25	3,30	7,21	18,98	8,53	6,34	10,73	13,13	6,83	5,36	8,29	10,94
Nusa Tenggara Timur	6,23	4,03	8,43	17,98	10,89	9,53	12,24	6,35	9,75	8,59	10,91	6,08
Kalimantan Barat	3,72	2,06	5,39	22,85	6,75	5,13	8,37	12,24	5,54	4,36	6,72	10,88
Kalimantan Tengah	2,17	0,53	3,80	38,61	4,79	3,11	6,48	17,95	3,71	2,51	4,92	16,51
Kalimantan Selatan	6,60	4,24	8,96	18,22	5,73	4,26	7,19	13,04	6,15	4,78	7,51	11,33
Kalimantan Timur	4,07	2,28	5,86	22,40	5,82	3,04	8,60	24,39	4,68	3,17	6,20	16,51
Kalimantan Utara	4,13	0,99	7,26	38,80	7,50	3,43	11,57	27,68	5,48	2,99	7,96	23,18
Sulawesi Utara	11,15	9,07	13,23	9,50	5,84	4,35	7,33	12,99	8,70	7,39	10,01	7,68
Sulawesi Tengah	5,87	2,71	9,04	27,52	8,24	6,47	10,00	10,92	7,50	5,94	9,06	10,63
Sulawesi Selatan	6,00	4,37	7,63	13,89	7,00	5,86	8,13	8,27	6,57	5,61	7,52	7,42
Sulawesi Tenggara	4,74	2,03	7,44	29,15	8,09	6,36	9,82	10,92	6,92	5,45	8,39	10,84
Gorontalo	5,87	2,43	9,30	29,86	12,55	8,90	16,21	14,85	9,45	6,92	11,98	13,67
Sulawesi Barat	16,15	9,60	22,70	20,70	13,75	10,26	17,24	12,95	14,25	11,17	17,33	11,03
Maluku	4,27	2,04	6,51	26,68	6,48	4,02	8,94	19,37	5,57	3,85	7,29	15,75
Maluku Utara	7,63	3,27	11,99	29,17	6,90	5,17	8,62	12,77	7,10	5,36	8,84	12,52
Papua Barat	6,11	2,01	10,22	34,24	5,26	2,59	7,94	25,94	5,53	3,29	7,77	20,68
Papua Barat Daya	9,30	3,24	15,37	33,28	14,11	10,20	18,02	14,13	11,78	8,21	15,36	15,48
Papua	5,35	2,22	8,49	29,91	8,28	5,21	11,35	18,92	6,53	4,29	8,78	17,55
Papua Selatan	NA	NA	NA	NA	1,55	0,05	3,04	49,33	0,98	0,04	1,93	49,18
Papua Tengah	NA	NA	NA	101,00	2,18	0,24	4,12	45,42	1,45	0,17	2,72	44,95
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,22	NA	NA	NA	100,20
Indonesia	5,83	5,47	6,19	3,13	6,23	5,95	6,51	2,30	6,00	5,77	6,24	2,00

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 7.14 Sampling Error Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Program Sembako Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	23,92	20,08	27,75	8,18	42,53	39,81	45,25	3,26	36,42	34,17	38,67	3,15
Sumatera Utara	16,03	13,86	18,20	6,91	23,39	21,27	25,51	4,62	19,25	17,71	20,79	4,08
Sumatera Barat	15,37	12,23	18,52	10,43	25,34	23,00	27,68	4,71	20,49	18,55	22,44	4,85
Riau	13,39	9,74	17,05	13,93	21,10	18,15	24,06	7,14	18,09	15,80	20,39	6,47
Jambi	12,91	9,53	16,29	13,35	15,45	13,03	17,87	8,00	14,61	12,64	16,58	6,88
Sumatera Selatan	15,51	12,26	18,77	10,71	23,01	20,70	25,32	5,12	20,15	18,25	22,05	4,81
Bengkulu	16,53	12,15	20,91	13,51	31,08	27,56	34,60	5,78	26,78	23,96	29,59	5,36
Lampung	25,88	21,22	30,54	9,19	31,98	29,44	34,52	4,06	30,04	27,76	32,32	3,87
Kep. Bangka Belitung	16,00	12,17	19,82	12,19	15,06	10,91	19,21	14,07	15,61	12,78	18,43	9,23
Kepulauan Riau	9,47	5,97	12,98	18,90	22,89	12,50	33,29	23,17	11,90	8,41	15,40	14,98
DKI Jakarta	6,87	5,28	8,46	11,83	–	–	–	–	6,87	5,28	8,46	11,83
Jawa Barat	28,92	27,11	30,72	3,18	41,46	39,13	43,79	2,87	32,00	30,52	33,48	2,36
Jawa Tengah	28,57	27,09	30,04	2,63	35,75	34,29	37,20	2,07	32,03	30,99	33,07	1,65
DI Yogyakarta	29,52	26,13	32,90	5,85	49,05	44,63	53,47	4,60	35,68	32,99	38,38	3,86
Jawa Timur	23,78	22,40	25,15	2,95	33,27	31,94	34,59	2,03	28,16	27,20	29,12	1,74
Banten	16,89	13,69	20,10	9,68	30,30	25,86	34,74	7,47	20,38	17,74	23,02	6,62
Bali	6,20	4,69	7,71	12,45	13,04	10,40	15,67	10,32	8,40	7,06	9,74	8,13
Nusa Tenggara Barat	28,76	24,31	33,21	7,90	28,68	24,67	32,69	7,14	28,72	25,71	31,73	5,35
Nusa Tenggara Timur	20,19	16,29	24,09	9,85	38,48	36,38	40,58	2,79	34,01	32,14	35,89	2,82
Kalimantan Barat	13,09	9,97	16,21	12,15	21,78	19,21	24,35	6,02	18,29	16,30	20,28	5,55
Kalimantan Tengah	10,84	7,02	14,66	17,98	13,63	10,84	16,43	10,47	12,49	10,21	14,76	9,29
Kalimantan Selatan	14,28	11,14	17,43	11,24	13,83	11,61	16,06	8,20	14,05	12,15	15,95	6,91
Kalimantan Timur	7,96	5,71	10,20	14,41	14,40	9,90	18,90	15,93	10,21	8,06	12,37	10,78
Kalimantan Utara	13,54	7,78	19,31	21,72	11,79	7,31	16,27	19,39	12,84	8,94	16,74	15,51
Sulawesi Utara	10,61	8,19	13,03	11,64	18,34	15,92	20,77	6,75	14,18	12,45	15,90	6,21
Sulawesi Tengah	22,15	16,68	27,62	12,60	24,10	21,17	27,03	6,20	23,49	20,86	26,13	5,73
Sulawesi Selatan	17,17	14,71	19,64	7,32	28,02	25,98	30,06	3,72	23,34	21,75	24,92	3,47
Sulawesi Tenggara	17,16	12,41	21,92	14,14	23,09	20,35	25,83	6,05	21,03	18,59	23,47	5,91
Gorontalo	24,15	17,87	30,43	13,26	47,55	42,30	52,81	5,64	36,70	32,58	40,81	5,72
Sulawesi Barat	13,50	7,95	19,05	20,98	24,18	19,81	28,56	9,23	21,96	18,28	25,64	8,54
Maluku	13,21	9,00	17,42	16,25	17,30	13,73	20,87	10,54	15,62	12,88	18,35	8,93
Maluku Utara	7,40	3,55	11,24	26,54	12,97	10,20	15,74	10,90	11,41	9,14	13,68	10,14
Papua Barat	10,40	4,81	15,99	27,43	29,90	23,17	36,63	11,48	23,80	18,79	28,80	10,72
Papua Barat Daya	24,86	14,91	34,81	20,42	35,95	29,91	41,99	8,57	30,58	24,83	36,33	9,59
Papua	12,06	8,00	16,12	17,17	31,67	26,91	36,42	7,66	19,97	16,83	23,12	8,03
Papua Selatan	NA	NA	NA	58,86	28,81	20,68	36,93	14,39	20,30	14,43	26,17	14,76
Papua Tengah	3,73	0,49	6,98	44,32	1,54	0,09	2,98	47,91	2,29	0,83	3,75	32,46
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA	17,75	13,28	22,23	12,85	16,30	12,15	20,45	12,98
Indonesia	22,05	21,43	22,67	1,43	30,83	30,29	31,37	0,89	25,89	25,47	26,32	0,83

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Tabel 7.15 Sampling Error Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 2024

Provinsi	Memiliki				Tidak Memiliki			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	17,10	15,35	18,86	5,24	82,90	81,14	84,65	1,08
Sumatera Utara	11,67	10,50	12,84	5,13	88,33	87,16	89,50	0,68
Sumatera Barat	16,28	14,63	17,93	5,17	83,72	82,07	85,37	1,00
Riau	19,50	17,13	21,88	6,22	80,50	78,12	82,87	1,51
Jambi	11,06	9,32	12,80	8,02	88,94	87,20	90,68	1,00
Sumatera Selatan	14,23	12,53	15,93	6,10	85,77	84,07	87,47	1,01
Bengkulu	17,80	15,42	20,19	6,84	82,20	79,81	84,58	1,48
Lampung	23,57	21,45	25,69	4,59	76,43	74,31	78,55	1,41
Kep. Bangka Belitung	9,39	7,14	11,63	12,21	90,61	88,37	92,86	1,26
Kepulauan Riau	14,51	9,76	19,26	16,70	85,49	80,74	90,24	2,84
DKI Jakarta	5,10	3,76	6,45	13,46	94,90	93,55	96,24	0,72
Jawa Barat	24,53	23,16	25,90	2,85	75,47	74,10	76,84	0,93
Jawa Tengah	26,40	25,42	27,39	1,91	73,60	72,61	74,58	0,68
DI Yogyakarta	31,19	28,60	33,78	4,24	68,81	66,22	71,40	1,92
Jawa Timur	20,46	19,60	21,32	2,14	79,54	78,68	80,40	0,55
Banten	15,42	12,94	17,89	8,18	84,58	82,11	87,06	1,49
Bali	9,94	8,51	11,37	7,35	90,06	88,63	91,49	0,81
Nusa Tenggara Barat	25,71	22,78	28,63	5,80	74,29	71,37	77,22	2,01
Nusa Tenggara Timur	23,07	21,38	24,76	3,74	76,93	75,24	78,62	1,12
Kalimantan Barat	15,25	13,37	17,13	6,28	84,75	82,87	86,63	1,13
Kalimantan Tengah	6,31	4,66	7,95	13,30	93,69	92,05	95,34	0,90
Kalimantan Selatan	10,00	8,42	11,59	8,09	90,00	88,41	91,58	0,90
Kalimantan Timur	7,71	5,90	9,52	11,99	92,29	90,48	94,10	1,00
Kalimantan Utara	7,35	4,40	10,30	20,49	92,65	89,70	95,60	1,63
Sulawesi Utara	12,11	10,56	13,67	6,55	87,89	86,33	89,44	0,90
Sulawesi Tengah	18,60	16,27	20,93	6,40	81,40	79,07	83,73	1,46
Sulawesi Selatan	18,97	17,54	20,40	3,85	81,03	79,60	82,46	0,90
Sulawesi Tenggara	19,68	17,32	22,03	6,11	80,32	77,97	82,68	1,50
Gorontalo	28,66	24,84	32,48	6,80	71,34	67,52	75,16	2,73
Sulawesi Barat	25,17	21,37	28,97	7,71	74,83	71,03	78,63	2,59
Maluku	13,79	11,23	16,35	9,47	86,21	83,65	88,77	1,51
Maluku Utara	6,82	5,10	8,54	12,84	93,18	91,46	94,90	0,94
Papua Barat	10,44	7,16	13,72	16,04	89,56	86,28	92,84	1,87
Papua Barat Daya	9,02	5,08	12,96	22,27	90,98	87,04	94,92	2,21
Papua	7,86	5,34	10,37	16,32	92,14	89,63	94,66	1,39
Papua Selatan	4,37	0,89	7,84	40,57	95,63	92,16	99,11	1,85
Papua Tengah	1,05	0,05	2,04	48,37	98,95	97,96	99,95	0,51
Papua Pegunungan	3,78	0,89	6,66	38,98	96,22	93,34	99,11	1,53
Indonesia	19,85	19,47	20,24	0,99	80,15	79,76	80,53	0,25

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 7.16 *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2024

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	29,45	25,37	33,53	7,07	7,68	6,18	9,17	9,95	14,82	13,12	16,52	5,85
Sumatera Utara	22,29	19,56	25,03	6,26	9,96	8,38	11,55	8,12	16,90	15,20	18,60	5,13
Sumatera Barat	26,40	23,00	29,80	6,57	12,27	10,46	14,08	7,53	19,14	17,24	21,04	5,05
Riau	25,41	20,95	29,86	8,94	6,79	4,91	8,66	14,10	14,06	11,95	16,17	7,65
Jambi	26,02	21,57	30,47	8,73	7,07	5,35	8,79	12,40	13,32	11,44	15,21	7,22
Sumatera Selatan	28,31	24,34	32,28	7,16	14,57	12,91	16,23	5,81	19,81	17,96	21,65	4,74
Bengkulu	27,56	22,22	32,89	9,87	7,98	5,92	10,04	13,17	13,77	11,61	15,94	8,03
Lampung	17,40	13,52	21,28	11,38	4,30	3,00	5,60	15,42	8,46	6,92	9,99	9,25
Kep. Bangka Belitung	23,34	18,93	27,75	9,64	7,66	4,63	10,70	20,20	16,82	13,92	19,73	8,81
Kepulauan Riau	35,84	28,68	42,99	10,19	16,95	8,14	25,76	26,52	32,42	26,28	38,55	9,65
DKI Jakarta	24,49	21,62	27,35	5,97	–	–	–	–	24,49	21,62	27,35	5,97
Jawa Barat	18,26	16,74	19,77	4,22	6,52	5,29	7,74	9,59	15,37	14,19	16,55	3,92
Jawa Tengah	19,86	18,55	21,17	3,37	7,10	6,31	7,89	5,66	13,70	12,92	14,49	2,92
DI Yogyakarta	25,25	22,04	28,45	6,48	9,27	7,00	11,54	12,51	20,20	17,88	22,53	5,88
Jawa Timur	15,56	14,39	16,72	3,84	5,29	4,62	5,97	6,51	10,81	10,11	11,52	3,33
Banten	25,05	21,51	28,58	7,21	7,22	4,77	9,68	17,33	20,41	17,69	23,13	6,79
Bali	24,30	21,38	27,22	6,13	11,84	9,46	14,23	10,27	20,29	18,16	22,43	5,37
Nusa Tenggara Barat	18,07	14,56	21,59	9,92	5,38	3,32	7,44	19,57	11,98	9,89	14,07	8,90
Nusa Tenggara Timur	37,87	32,61	43,12	7,08	9,82	8,45	11,18	7,10	16,66	14,97	18,36	5,19
Kalimantan Barat	30,66	26,16	35,16	7,49	7,57	5,83	9,32	11,77	16,85	14,73	18,97	6,43
Kalimantan Tengah	33,05	27,87	38,23	7,99	13,15	10,22	16,07	11,35	21,33	18,57	24,08	6,59
Kalimantan Selatan	20,97	17,75	24,20	7,85	11,25	9,06	13,44	9,92	15,93	14,02	17,83	6,11
Kalimantan Timur	29,88	25,69	34,07	7,15	12,58	8,02	17,14	18,49	23,82	20,63	27,02	6,84
Kalimantan Utara	29,58	22,77	36,40	11,75	12,06	7,69	16,43	18,48	22,58	18,04	27,11	10,25
Sulawesi Utara	24,41	21,13	27,70	6,87	13,30	11,15	15,45	8,25	19,29	17,26	21,32	5,37
Sulawesi Tengah	35,85	29,72	41,98	8,73	8,02	6,26	9,77	11,16	16,67	14,33	19,02	7,18
Sulawesi Selatan	26,72	23,61	29,83	5,94	10,45	9,17	11,74	6,29	17,47	15,92	19,02	4,52
Sulawesi Tenggara	27,27	21,96	32,59	9,95	9,72	7,78	11,67	10,21	15,83	13,57	18,09	7,29
Gorontalo	34,47	27,98	40,96	9,61	10,18	6,99	13,37	15,97	21,45	17,96	24,94	8,30
Sulawesi Barat	34,58	25,56	43,61	13,31	7,07	4,70	9,45	17,12	12,80	10,05	15,55	10,97
Maluku	38,21	31,83	44,59	8,52	9,48	6,72	12,25	14,89	21,30	18,08	24,52	7,71
Maluku Utara	27,45	20,26	34,63	13,35	10,41	7,77	13,06	12,96	15,17	12,36	17,97	9,44
Papua Barat	35,81	25,73	45,88	14,36	8,64	4,56	12,72	24,10	17,14	12,92	21,37	12,58
Papua Barat Daya	20,00	10,92	29,07	23,15	10,88	7,15	14,61	17,50	15,30	10,48	20,11	16,07
Papua	46,23	39,20	53,26	7,76	7,29	4,51	10,07	19,47	30,51	26,04	34,99	7,49
Papua Selatan	30,43	16,55	44,31	23,27	3,06	0,48	5,65	43,01	13,01	7,53	18,49	21,50
Papua Tengah	35,29	23,64	46,94	16,85	NA	NA	NA	50,66	14,39	9,54	19,24	17,20
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,39	NA	NA	NA	100,36
Indonesia	21,24	20,65	21,83	1,41	7,75	7,45	8,06	2,02	15,33	14,97	15,69	1,19

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



Tabel 7.17 Sampling Error Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Jenis Jaminan Sosial, 2024

Provinsi	Jaminan Pensiun				Jaminan Hari Tua				Asuransi Kecelakaan Kerja			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	12,34	10,80	13,88	6,37	9,16	7,69	10,63	8,18	7,78	6,46	9,09	8,64
Sumatera Utara	11,78	10,43	13,12	5,83	7,66	6,51	8,81	7,68	7,70	6,36	9,03	8,83
Sumatera Barat	13,72	12,10	15,35	6,03	10,57	9,12	12,03	7,02	12,01	10,41	13,62	6,81
Riau	8,36	6,68	10,04	10,25	7,69	6,07	9,32	10,77	10,01	8,14	11,87	9,51
Jambi	10,15	8,52	11,78	8,18	7,48	6,04	8,93	9,85	7,64	6,09	9,18	10,32
Sumatera Selatan	10,27	8,68	11,85	7,89	7,71	6,25	9,16	9,62	8,06	6,54	9,59	9,66
Bengkulu	10,95	9,03	12,87	8,94	8,64	6,82	10,47	10,77	8,27	6,39	10,15	11,59
Lampung	5,73	4,50	6,97	11,00	4,23	3,06	5,40	14,12	4,82	3,57	6,06	13,20
Kep. Bangka Belitung	10,16	7,79	12,54	11,93	9,99	7,53	12,45	12,57	11,43	8,86	14,00	11,46
Kepulauan Riau	13,04	9,58	16,50	13,53	20,41	14,66	26,15	14,35	25,14	19,17	31,11	12,12
DKI Jakarta	15,38	13,01	17,76	7,87	11,21	9,01	13,40	10,00	13,32	10,95	15,69	9,07
Jawa Barat	9,62	8,66	10,57	5,07	8,31	7,38	9,23	5,68	8,20	7,28	9,13	5,76
Jawa Tengah	7,71	7,12	8,30	3,92	7,85	7,23	8,48	4,06	8,80	8,13	9,48	3,90
DI Yogyakarta	14,14	12,20	16,07	6,97	10,29	8,50	12,08	8,88	10,52	8,60	12,44	9,32
Jawa Timur	6,54	6,01	7,08	4,20	5,19	4,68	5,69	4,95	6,16	5,59	6,73	4,70
Banten	10,01	8,05	11,96	9,97	12,49	10,16	14,82	9,51	13,84	11,37	16,31	9,10
Bali	13,88	12,06	15,70	6,69	10,47	8,83	12,11	7,99	12,07	10,31	13,82	7,42
Nusa Tenggara Barat	9,35	7,46	11,24	10,30	6,56	5,01	8,11	12,05	6,83	5,21	8,44	12,04
Nusa Tenggara Timur	13,30	11,73	14,87	6,02	8,16	6,91	9,40	7,80	8,04	6,79	9,28	7,91
Kalimantan Barat	12,02	10,12	13,91	8,03	10,88	9,05	12,71	8,58	11,12	9,32	12,92	8,27
Kalimantan Tengah	16,94	14,42	19,46	7,59	11,95	9,68	14,22	9,70	10,16	8,06	12,27	10,57
Kalimantan Selatan	11,76	10,11	13,41	7,14	8,72	7,19	10,24	8,95	8,84	7,29	10,38	8,90
Kalimantan Timur	13,75	11,20	16,30	9,46	12,01	9,50	14,52	10,66	15,02	12,31	17,72	9,20
Kalimantan Utara	14,90	11,23	18,57	12,55	10,61	7,66	13,56	14,21	14,97	11,00	18,94	13,52
Sulawesi Utara	15,13	13,29	16,98	6,22	11,17	9,49	12,85	7,66	9,60	7,95	11,26	8,81
Sulawesi Tengah	12,67	10,49	14,85	8,78	8,96	7,09	10,82	10,62	9,38	7,48	11,27	10,30
Sulawesi Selatan	13,44	12,07	14,81	5,20	8,91	7,70	10,11	6,89	8,08	6,99	9,16	6,85
Sulawesi Tenggara	12,86	10,77	14,94	8,27	10,51	8,50	12,53	9,79	9,74	7,77	11,70	10,29
Gorontalo	13,73	10,62	16,84	11,57	11,46	8,61	14,31	12,68	14,08	11,08	17,07	10,84
Sulawesi Barat	11,10	8,49	13,70	11,98	8,76	6,35	11,16	14,01	7,00	4,80	9,20	16,02
Maluku	18,41	15,36	21,46	8,44	9,96	7,44	12,48	12,91	8,61	6,13	11,10	14,73
Maluku Utara	9,70	7,36	12,04	12,30	7,31	5,25	9,36	14,36	8,26	6,07	10,45	13,51
Papua Barat	13,75	10,15	17,36	13,36	6,68	3,90	9,47	21,28	6,55	3,59	9,51	23,06
Papua Barat Daya	12,37	7,77	16,97	18,96	7,61	4,23	11,00	22,68	7,11	4,00	10,23	22,34
Papua	28,94	24,49	33,40	7,85	12,75	9,27	16,23	13,92	9,77	6,55	12,98	16,79
Papua Selatan	10,77	5,69	15,85	24,07	8,22	3,45	12,99	29,59	6,34	2,19	10,50	33,40
Papua Tengah	14,39	9,54	19,24	17,20	8,96	4,81	13,12	23,66	6,91	3,03	10,79	28,66
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	100,36	NA	NA	NA	100,36	NA	NA	NA	100,36
Indonesia	9,84	9,55	10,12	1,48	8,09	7,81	8,37	1,76	8,65	8,36	8,95	1,73



Lanjutan Tabel 7.17

Provinsi	Asuransi Kematian				Jaminan Kehilangan Pekerjaan				Pesangon PHK			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Aceh	8,78	7,39	10,17	8,09	1,02	0,52	1,53	25,12	0,99	0,50	1,48	25,42
Sumatera Utara	7,11	6,04	8,19	7,72	0,67	0,35	1,00	24,67	2,05	1,27	2,84	19,45
Sumatera Barat	12,04	10,49	13,59	6,58	0,50	0,21	0,78	29,17	1,10	0,55	1,65	25,41
Riau	8,18	6,45	9,92	10,81	1,01	0,46	1,55	27,78	1,87	1,13	2,61	20,25
Jambi	7,02	5,58	8,46	10,47	0,95	0,38	1,53	30,86	1,83	0,99	2,68	23,56
Sumatera Selatan	13,49	11,96	15,02	5,78	1,63	0,85	2,40	24,25	2,28	1,37	3,20	20,43
Bengkulu	8,23	6,38	10,08	11,45	0,36	0,03	0,70	46,53	1,28	0,55	2,01	29,03
Lampung	3,85	2,79	4,92	14,09	0,81	0,21	1,42	37,88	1,89	1,01	2,76	23,61
Kep. Bangka Belitung	10,01	7,59	12,43	12,34	0,71	0,15	1,26	40,24	2,18	1,17	3,20	23,74
Kepulauan Riau	20,06	14,42	25,69	14,33	5,00	1,15	8,85	39,31	6,37	2,37	10,38	32,02
DKI Jakarta	11,58	9,32	13,83	9,94	2,55	1,43	3,67	22,39	2,73	1,52	3,93	22,52
Jawa Barat	8,51	7,60	9,42	5,44	1,51	1,10	1,92	13,89	2,47	1,90	3,04	11,80
Jawa Tengah	7,58	6,96	8,20	4,17	1,24	0,96	1,52	11,36	1,77	1,45	2,09	9,33
DI Yogyakarta	9,02	7,34	10,70	9,50	1,32	0,65	1,99	25,79	2,08	1,24	2,93	20,73
Jawa Timur	5,38	4,87	5,90	4,91	0,69	0,50	0,88	14,30	1,37	1,08	1,66	10,74
Banten	11,66	9,39	13,93	9,92	2,35	1,15	3,56	26,10	4,91	3,24	6,58	17,35
Bali	10,90	9,24	12,56	7,78	1,12	0,57	1,67	25,07	2,25	1,36	3,15	20,17
Nusa Tenggara Barat	8,19	6,43	9,95	10,95	1,08	0,32	1,84	35,90	1,51	0,62	2,40	29,99
Nusa Tenggara Timur	8,23	6,98	9,47	7,73	0,83	0,38	1,29	27,93	1,31	0,73	1,90	22,63
Kalimantan Barat	10,17	8,40	11,94	8,88	1,13	0,44	1,82	31,08	2,73	1,70	3,76	19,25
Kalimantan Tengah	11,45	9,17	13,72	10,14	0,80	0,18	1,41	39,59	NA	NA	NA	65,39
Kalimantan Selatan	9,16	7,61	10,72	8,66	0,56	0,21	0,91	32,10	1,34	0,75	1,92	22,29
Kalimantan Timur	13,37	10,79	15,95	9,85	2,08	0,76	3,41	32,39	4,35	2,75	5,95	18,72
Kalimantan Utara	12,26	8,77	15,75	14,53	1,73	0,48	2,98	36,82	1,99	0,70	3,27	32,95
Sulawesi Utara	10,21	8,59	11,83	8,09	1,61	0,96	2,25	20,46	1,59	0,94	2,23	20,64
Sulawesi Tengah	9,75	7,79	11,71	10,27	1,06	0,35	1,76	34,22	1,76	0,88	2,65	25,60
Sulawesi Selatan	8,90	7,80	10,00	6,29	0,47	0,19	0,74	30,30	0,67	0,39	0,94	21,39
Sulawesi Tenggara	10,48	8,49	12,48	9,71	0,77	0,17	1,37	39,57	1,08	0,27	1,89	38,32
Gorontalo	16,32	13,17	19,47	9,86	2,22	0,86	3,57	31,13	1,77	0,59	2,96	34,10
Sulawesi Barat	8,11	5,83	10,39	14,34	NA	NA	NA	63,73	1,22	0,07	2,36	48,09
Maluku	10,71	8,08	13,34	12,53	0,67	0,10	1,23	43,43	1,00	0,33	1,67	34,33
Maluku Utara	7,97	5,83	10,12	13,74	1,79	0,72	2,85	30,40	3,10	1,70	4,50	23,00
Papua Barat	5,19	2,94	7,44	22,13	NA	NA	NA	61,86	NA	NA	NA	55,58
Papua Barat Daya	6,79	3,38	10,21	25,64	NA	NA	NA	61,37	1,45	0,04	2,86	49,70
Papua	9,33	6,22	12,44	17,03	1,42	0,16	2,68	45,31	NA	NA	NA	50,50
Papua Selatan	7,44	2,97	11,91	30,66	NA	NA	NA	57,87	NA	NA	NA	72,62
Papua Tengah	7,60	3,60	11,59	26,85	NA	NA	NA	69,46	NA	NA	NA	69,46
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	100,36	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Indonesia	8,27	7,99	8,54	1,71	1,18	1,06	1,31	5,29	1,98	1,81	2,14	4,25

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024



DAFTAR PUSTAKA

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Adityandani, Welldan, and Nadia Asandimitra Haryono. 2019. "Pengaruh demografi, financial attitude, financial knowledge, dan suku bunga terhadap perilaku menabung masyarakat Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)* 7 (2): 316-326. <https://core.ac.uk/download/pdf/230764463.pdf>
- Adioetomo, S. M., & Pardede, E. L. 2018. *Memetik Bonus Demografi: Membangun Manusia Sejak Dini*. Depok: Rajawali Pers.
- Affandi, Moch. 2009. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penduduk Lanjut Usia Memilih Untuk Bekerja". *Journal of Indonesian Applied Economics* Vol. 3 No. 2 Oktober 2009, 99-110.
- Amir, Vaisal. 2022. "Lansia dan Masa Depan Indonesia". Kompas, Mei 30. <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/05/29/lansia-dan-masa-depan-indonesia>
- Andini, Ni Kadek, Desak Putu Eka Nilakusmawati, and Made Susilawati. 2013. "Faktor-faktor yang memengaruhi penduduk lanjut usia masih bekerja." *Piramida Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* 9, no. 1: 44-49
- Anggreni, Ni Luh Putu Evi, and Anak Agung Ketut Ayuningsasi. 2023. "Determinan Kesejahteraan Penduduk Lanjut Usia di Desa Kemenuh Gianyar." *Buletin Studi Ekonomi* 28 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/index>
- Anker dkk. 2002. Measuring Decent Work with Statistical Indicators. *Working Paper* No 2: ILO.
- Astuti, Agnes Dewi. 2019. "Status perkawinan meningkatkan kualitas hidup lansia di pstw sinta rangkang tangkiling Kalimantan Tengah." *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama* 8, no. 1: 1-8. <https://doi.org/10.31596/jcu.v8i1.300>
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2024. [Metode Baru] Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun), 2022-2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE0Izl=-metode-baru-umur-harapan-hidup-saat-lahir--uhh---tahun-.html>



- _____. 2024. August 20. Accessed November 5, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE2OCMy/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-provinsi--persen-.html>.
- Becker, G. S. (1965). "A Theory of the Allocation of Time". *The Economic Journal*, 75(299), 493. <https://doi.org/10.2307/2228949>
- Borjas, George J. 2016. *Labor Economics 7th Edition*. New York: McGraw-Hill education.
- Cicih, Lilis H. Mis. 2018. "Menjadi Lansia: antara Anugerah dan Tantangan." Dalam Memetik Bonus Demografi: Membangun Manusia Sejak Dini, disunting oleh Sri Moertiningsih Adioetomo dan Elda Luciana Pardede. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Cicih, Lilis Heri Mis, and Darojad Nurjono Agung Nugroho. 2021. "Kondisi Lanjut Usia di Indonesia Era Bonus Demografi." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 17(1):1-14. <https://doi.org/10.14203/jki.v17i1.636>
- CNBN Indonesia. 2023. Laporan Pak Jokowi! Upah Buruh Wanita dan Pria Masih Jauh Nih. Artikel 27 April 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230427093035-128-432622/lapor-pak-jokowi-upah-buruh-wanita-dan-pria-masih-jauh-nih>
- Djamhari, Eka Afrina, Herni Ramdlaningrum, Aqilatul Layyinah, Adrian Chrisnahutama, and Darmawan Prasetya. 2021. Kondisi kesejahteraan lansia dan perlindungan sosial lansia di Indonesia. Perkumpulan PRAKARSA: Jakarta
- Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan. 2024. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. May 13. Accessed November 4, 2024. <https://golantang.bkkbn.go.id/selantang-sekolah-lansia-tangguh>.
- Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. 2021. Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021. Kementerian Sosial RI.
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. 2020. Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Kementerian Sosial RI.



- _____. 2023. Kementerian Sosial Republik Indonesia. June 23. Accessed November 4, 2024. <https://kemensos.go.id/bantuan-permakanan-diberikan-untuk-lansia-tunggal-dan-disabilitas-tunggal>.
- Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia. 2022. Rencana Aksi Kegiatan Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia 2022-2025. Kementerian Kesehatan.
- Ehrenberg, Ronald G. & Smith, Robert S. 2012. *Modern Labor Economics 11th Edition*. Boston: Prentice Hall.
- Hakim, Lukman Nul. 2020. "Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia". *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Volume 11, No. 1 Juni 2020.
- Heryanah. 2015. Ageing Population dan Bonus Demografi Kedua di Indonesia. *Jurnal Populasi* Vol. 23 Nomor 2 Tahun 2015, hal. 1-16.
- Infodatin Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2014. Situasi dan Analisis Lanjut Usia. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- International Labour Organization. 2011. Profil Pekerjaan yang Layak Indonesia. Geneva: ILO.
- _____. 2013. Decent Work Indicators: Guidelines For Producers And Users Of Statistical And Legal Framework Indicators. Geneva: ILO.
- Isnutomo, Maulita Dwasti. 2012. "Identifikasi permintaan kelompok usia lanjut terhadap kegiatan rekreasi di kota bandung." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 23 (2): 119-138. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2012.23.2.3>
- Jamalludin. 2021. "Keputusan Pekerja Lansia tetap Bekerja Pascapensiun dan Kaitannya dengan Kebahagiaan". *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 89-101. <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i1.2450>
- Julianti, Shinta. 2017. "Kekerasan Struktural terhadap Orang Lanjut Usia sebagai Hasil dari Konstruksi Sosial yang Merendahkan tentang Lansia (Studi Pada Penghuni Panti Werdha Di Bekasi)". *Jurnal Kriminologi Indonesia* 9 (2): 67-79. journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/7505



- Jumita, Rina, Azrimaidaliza Azrimaidaliza, and Rizanda Machmud. "Kemandirian Lansia Diwilayah Kerja Puskesmas Lampasi Kota Payakumbuh." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 6, <https://doi.org/10.24893/jkma.v6i2.95>
- Junaidi, Erfit, & Prihanto, Purwaka H. 2017. "Faktor-faktor Sosial Ekonomi yang Memengaruhi Keterlibatan Penduduk Lanjut Usia dalam Pasar Kerja di Provinsi Jambi". *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 30(2), 197-205. <https://dx.doi.org/10.20473/mkp.V30I22017.197-205>.
- Kholifah, Siti Nur. 2016. "Keperawatan Gerontik." Modul Bahan Ajar Cetak Keperawatan. Kementerian Kesehatan: Jakarta.
- Kuntjorowati, Elly. 2018. "Nyaman dan Tentram di Rumah Pelayanan Lanjut Usia". *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 16 (2):209-222. <https://doi.org/10.31105/jpks.v16i2.1390>
- Lindesay, James. 1996. "Elderly People and Crime." *Reviews in Clinical Gerontology* 6(2): 199–204. <https://doi.org/10.1017/S0959259800004664>
- Maharani, Ayu. 2018. "Manfaat Berwisata untuk Lansia" www.klikdokter.com. Diakses pada 30 Oktober 2024. <https://www.klikdokter.com/info/sehat/kesehatan-lansia/manfaat-berwisata-untuk-lansia>
- Mankiw, N. G., Quah, E. & Wilson, P. 2012. *Principle of Economics: An Asian Edition*. Singapura: Cengage Learning.
- Muhammad, Ali, H.G., dan Arifin. 2017. "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Minat Melanjutkan Pendidikan Anak di Desa Wunse Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan". *Jurnal Al-Ta'dib* Vol. 10 (1) Januari- Juni.
- Mulyati, Mulyati, Rasha Rasha, and Kenty Martiatuti. 2018. "Pengaruh dukungan sosial keluarga terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan lansia." *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan* 5 (1):1-8. <https://doi.org/10.21009/JKKP.051.01>
- Munawaroh, Titik. 2021. "Penuaan Penduduk, Lansia, dan Generasi Sandwich". <https://news.detik.com/kolom/d-5854089/penuaan-penduduk-lansia-dan-generasi-sandwich>



- Nugroho, Adityo. 2020. "Persepsi anak muda terhadap keberadaan lansia di indonesia." *Journal of Urban Sociology* 2(2):44-55.
<http://dx.doi.org/10.30742/jus.v2i2.996>
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 24 Tahun 2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia Yang Responsif Gender
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan
- Rahmawati, Dina Atika. 2017. Kesejahteraan Lansia di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 [skripsi]. Jakarta: Sekolah Tinggi https://www.academia.edu/40180264/Skripsi_Dina
- Rosadi, A. 2017. "Dampak Pendidikan Keaksaraan Fungsional Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Ekonomi di Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima". *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume IX (2).
- Saunders, R. 2006. Risk and Opportunity: Creating Options for Vulnerable Workers. *Vulnerable Workers Series*, 7(7), 74.
- Syukri, M. 2017. "PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL: KONSEP DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM". *Jurnal Cakrawala Kependidikan* Vol. 6. No.2. September 2008:112–207.
- Thabrany, H. 2014. *Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2020. (Laporan Penelitian) Situasi Lansia di Indonesia dan Akses terhadap Program Perlindungan Sosial: Analisis Data Sekunder. Jakarta. TNP2K.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai. 2020. Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020. Kemenko PMK.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Utami, Putu Ayu Sani. 2018. "Pengalaman Berwisata Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia". *Jurnal Keperawatan Respati Yogyakarta* 5(3):420-427. <http://dx.doi.org/10.35842/jkry.v5i3.268>

Wahyudi, Muchamad Zaid. 2019. "Siapkah Menyongsong Era Lansia?". <https://interaktif.kompas.id/baca/siapkah-menyongsong-era-lansia/>

Winahyu, Atikah Ishmah. 2020. *Media Indonesia*. October 1. Accessed November 4, 2024. <https://mediaindonesia.com/humaniora/349491/pengembangan-silani-untuk-upaya-pemenuhan-hak-lansia>.

World Health Organization (WHO). 2002. *Active Ageing: A Policy Framework*. Diunduh dari <https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2014/06/WHO-Active-Ageing-Framework.pdf> pada 29 Oktober 2024

World Health Organization (WHO). 2012. *Good Health Adds Life to Years*. Global brief for World Health Day 2012. WHO reference number: WHO/DCO/WHO/2012 2.

_____. 2024. *Ageing and health*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>

_____. 2024. *Healthy life expectancy (HALE) at birth (years)*. <https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/gho-gha-hale-healthy-life-expectancy-at-birth>

Wulandari, Wulandari and Maulana Irfan. 2023. "Active Aging Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia." *Share: Social Work Journal* 13, no. 1: 102-110. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46851>

Zulkarnaen dan Ari Dwi Handoyo. 2019. "Faktor-Faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata di Indonesia". *Prosiding Seminar Nasional "Menjadi Mahasiswa Yang Unggul Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0"*.





LAMPIRAN

<https://www.ppt-go.id>

YSEN24K

Dibuat 1 set untuk BPS Kab/Kota

REPUBLIK INDONESIA

SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 2024

KETERANGAN POKOK ANGGOTA RUMAH TANGGA

RAHASIA

MARET

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT

101

Provinsi

102

Kabupaten/Kota*)

103

Kecamatan

104

Desa/Kelurahan*)

105

Klasifikasi Desa/Kelurahan

1. Perkotaan 2. Perdesaan

106

Nomor Blok Sensus

107

Nomor Kode Sampel

108

Nomor Urut Bangunan Tempat Tinggal

109

Nomor Urut Sampel Rumah Tangga

110

Nama Kepala Rumah Tangga

111

Alamat (Nama Jalan/Gang, RT/RW/Dusun)

112

Koordinat Lokasi Rumah Tangga

Latitude (lintang) :

Longitude (bujur) :

BLOK II. KETERANGAN PENCACAHAN

Uraian

Nama dan Kode/NIP

Jabatan

Waktu

Tanda Tangan

201. Pencacah

Staf BPS Provinsi.....1

Staf BPS Kab/Kota.....2

Mitra.....3

Tgl

Bln

202. Pengawas

Staf BPS Provinsi.....1

Staf BPS Kab/Kota.....2

Mitra.....3

Tgl

Bln

203. Hasil pencacahan rumah tangga

Terisi lengkap.....1

Terisi tidak lengkap.....2

Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan3

Responden menolak.....4

Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada.....5

BLOK III. RINGKASAN

301

Banyaknya anggota rumah tangga

302

Banyaknya anggota rumah tangga berumur 0-4 tahun

303

Banyaknya anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas

304

Banyaknya anggota rumah tangga berumur 10 tahun ke atas

305

Banyaknya perempuan berumur 10-54 tahun berstatus pernah kawin

SELAMAT PAGI/SIANG/SORE/MALAM. KAMI/SAYA DARI BPS SEDANG MENGUMPULKAN DATA/INFORMASI KEADAAAN SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEKERJAAN, PERUMAHAN, DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA. UNTUK ITU KAMI/SAYA AKAN MEWAWANCARA BAPAK/IBU BESERTA ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART) LAINNYA. SELURUH DATA YANG BAPAK/IBU BERIKAN KEPADA KAMI, AKAN DIRAHASIAKAN DAN HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. BOLEH SAYA MULAI WAWANCARA SEKARANG?

☐ Ya bersedia → Mulai wawancara

☐ Bersedia dengan perjanjian di lain waktu → Blok XXIV. Catatan

☐ Tidak bersedia → Lengkapi isian Blok I, Blok II, dan Blok XXIV Catatan. Lampirkan Berita Acara Nonrespon. Selesai dan segera laporkan ke pengawas.

*) Coret yang tidak perlu

1

247

PETUNJUK PENGISIAN

Dalam pengisian kuesioner, perlu diperhatikan tata tertib sebagai berikut:

1. Kuasi konsep, definisi, maksud, dan tujuan survei.
2. Tulis isian selesai-jelasnya dengan pensil hitam pada tempat yang disediakan, agar mudah dibaca.
3. Gunakan blok catatan untuk mencatat hal-hal penting yang perlu diketahui oleh pengawas dan pengelola. Bagian kosong dari kuesioner juga dapat digunakan untuk mencatat hal-hal yang ditemui saat wawancara berlangsung.
4. Pencacah harus meneliti/meriksa seluruh isian kuesioner dan memperbaiki setiap kesalahan, sebelum kuesioner diserahkan ke pengawas.
5. Perlihatkan dan patuhi tanda-tanda atau alur pertanyaan yang tertera pada kuesioner.
6. Pertanyaan atau pilihan jawaban yang dicetak dengan huruf kapital harus dibaca, sedangkan pertanyaan atau pilihan jawaban yang dicetak menggunakan huruf kecil tidak perlu dibacakan.
7. Kode pilihan jawaban yang menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya, boleh diingkari lebih dari satu pilihan jawaban. Kode pilihan jawaban yang menggunakan angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya, hanya boleh diingkari satu saja.
8. **Blok I** lantang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**.
Isikan Blok IV terlebih dahulu sampai selesai sebagai panduan untuk mengisi pertanyaan dalam format roster. Lipat bagian kertas yang ada tanda **garis putus-putus dan tulisan lipat disini** pada Blok IV halaman 2 sebagai panduan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada halaman genap. Sementara itu, untuk panduan mengisi pada halaman ganjil, kertas pada halaman 2 tidak perlu dilipat (dibekalkan saja).
9. **Blok II** lantang format roster (nama anggota rumah tangga (ART) per baris) seperti pada Blok IV sampai dengan Blok XII diselesaikan dahulu dalam satu roster kemudian lanjut ke roster berikutnya.
10. Tanda garis tebal pada pertanyaan roster menunjukkan batas pertanyaan untuk ART, isikan jawaban pertanyaan di dalam tanda garis tebal untuk seluruh ART, lalu berpindah ke pertanyaan selanjutnya.
11. Tanda garis dua pada pertanyaan roster menunjukkan perbedaan tema pertanyaan dari setiap blok.
12. Contoh cara penulisan informasi penerimaan Bantuan dari Pemerintah Daerah adalah menggunakan format rata kanan:

Bantuan yang Diterima Setelah Terakhir	
(1) BANTUAN RIUTN UNTUK PANGANI	Rp. <u>300.000,-</u>
(2) BANTUAN RIUTN UNTUK ANAK	Rp. <u>1.500.000,-</u>

14. Tabulasi umur responden yang sudah berulang tahun pada bulan Februari 2024:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2009
Umur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
Fahun lahir	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994									
Umur	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29										
Fahun lahir	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979									
Umur	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45									
Fahun lahir	1979	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964									
Umur	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60									

BLOK IV. KETERANGAN DEMOGRAFI

Waktu mulai wawancara:

BLOK IV. KETERANGAN DEMOGRAFI												
(Disisi oleh pengawas)	No. urut ART	Nama ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART), SEBUTAN SISA SISA YANG BIASA TINGGAL DI RUMAH TANGGA INI DAN KELOLA DARI SATU DAPUR, MULAI DARI KEPALA RUMAH TANGGA, PASANGANNYA, ANAK YANG BELUM MENIKAH, MENANTU, CUCU, ORANG TUA/MERTUA, PEMBANTU/SOPR, FAMILI LAIN, DAN LAINNYA.	APAKAH HUBUNGAN (nama) DENGAN KEPALA RUMAH TANGGA?	APAKAH STATUS PER-KAWINAN (nama)? ATAU PEREMPUAN?	APAKAH LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN?	KAPAN (nama) DILAHIRKAN?	BERAPA KAKI UMUR (nama)? Umur harus diisi. Jika ≥ 97 tahun, tulis '97' (Dalam tahun)	Jika berstatus kawin (40± 2) Apakah PASANGAN (nama)? PADA BASANYA TINGGAL DIRUMAH TANGGA MELANGSUNGKAN PER-KAWINAN PERTAMA?	Jika berstatus pernah kawin (44± 2,3 atau 4) PADA UMUR BERAPA (nama) TINGGAL DIRUMAH TANGGA MELANGSUNGKAN PER-KAWINAN PERTAMA?	No. urut ART	pen-bermasi	
No. urut ART	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	
	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Pasihkan seluruh anggota rumah tangga tercatat dan tidak ada yang terlewat.

Cek sekali lagi, apakah kepengurusan makan seluruh anggota rumah tangga di kolom 402 dikelola dari satu dapur.

Jika terdapat ART yang kepenqurusan makannya tidak dari satu dapur, maka keluarkan dari daftar.

Code 403: Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT)

1. KRT
2. Istri/suami
3. Anak kandung/liri
4. Anak angkat
5. Menantu
6. Cucu
7. Orang tua/mertua
8. Pembantu/sosir
9. Lainnya (famili lain, orang yang tidak ada hubungan famili dengan KRT)

KONSEP DAN DEFINISI	KONSEP DAN DEFINISI
➤ Pertanyaan 614: Apa Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki? Ijazah/STTB adalah lembaran atau tanda bukti kelulusan yang diberikan kepada seseorang yang sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik pada suatu jenjang pendidikan tertentu. ➤ Pertanyaan 701: Apakah (nama) memiliki rekening tabungan baik atas nama sendiri atau bersama-sama di Lembaga keuangan (perbankan, koperasi)? a. Responden dikatakan memiliki rekening tabungan di bank jika memiliki nomor rekening meskipun rekening tabungan tersebut kosong. b. Kekuisasaan tabungan tidak harus sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya, yang penting responden masih dapat mengakses tabungannya. ➤ Pertanyaan 703: Selama Seminggu Terakhir, Apa Saja Kegiatan yang Dilakukan (nama)? Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut boleh dilakukan baik secara berturut-turut/tidak terputus maupun kumulatif satu jam dalam seminggu terakhir. Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal maupun sekolah non formal (Paket A/B/C), baik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau pendidikan tinggi. Tidak termasuk yang sedang libur/cuti. Mengurus rumah tangga adalah kegiatan mengurus rumah tangga/membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji. Anggota rumah tangga yang melakukan kegiatan kerumahantngaan, seperti memasak, mencuci, dsb, digolongkan sebagai mengurus rumah tangga. Lainnya selain kegiatan pribadi adalah kegiatan selain bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga. ➤ Pertanyaan 812: Dalam 3 bulan terakhir, berapa kali (nama) menggunakan internet? Minimal satu kali dalam sehari, yaitu setiap hari menggunakan internet, artinya orang tersebut tergolong mengakses internet yang tinggi. Minimal satu kali dalam seminggu tapi tidak setiap hari, yaitu tidak setiap hari menggunakan internet, artinya orang tersebut tergolong orang yang sangat jarang mengakses internet. Kurang dari satu kali dalam seminggu, yaitu pernah lebih dari 1 minggu tidak menggunakan internet, artinya orang tersebut tergolong orang yang jarang menggunakan internet. ➤ Pertanyaan 905: Sejak 1 Januari – 31 Desember 2023, Apakah Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian, Penganiayaan, Pencurian dengan Kekerasan, Pelecehan Seksual, atau Lainnya? Korban kejahatan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/perobaan tindak kejahatan. ➤ Pertanyaan 2301: Apakah Terdapat Mantan ART/Orang yang Sebelumnya Merupakan ART, yang Saat Ini Sedang Tinggal di Luar Negeri, yang Berangkat Sejak 1 Februari 2019? Mantan ART adalah penduduk yang sedang tinggal di luar negeri lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun tetapi bermaksud menetap yang sebelum berangkat merupakan ART di rumah tangga responden. Tinggal di luar negeri adalah tinggal atau menetap di luar negeri 1 tahun atau lebih, atau kurang dari 1 tahun tetapi bermaksud menetap. Termasuk mereka yang belum 1 tahun berada di luar negeri, tetapi telah berniat menetap untuk memenuhi keperluan jangka panjang seperti bekerja dan sekolah. Tidak termasuk bepergian yang sifatnya sementara seperti: rekreasi, dinas, berobat, dan ibadah/ziarah.	➤ Pertanyaan 203: Hasil Pencacahan Rumah Tangga - Terisi lengkap, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih dan memperoleh informasi secara lengkap. - Terisi tidak lengkap, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, tetapi tidak dapat memperoleh informasi secara lengkap. Misalnya sampai batas akhir waktu pencacahan, informasi mengenai rumah tangga tersebut tidak diperoleh secara lengkap karena responden pergi keluar kota. - Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, namun tidak ada ART/responden yang dapat memberikan informasi mengenai rumah tangga sampai akhir masa pencacahan. - Responden menolak, apabila responden menolak untuk diwawancarai. - Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada, apabila petugas tidak berhasil menemukan rumah tangga/bangunan sensus terpilih sampai batas akhir masa pencacahan. Misalnya: rumah tangga pindah keluar blok sensus, bangunan digusur, dan bangunan terbakar/runtuh karena gempa/banjir/bencana lain. ➤ Pertanyaan 403: Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga Kepala rumah tangga (KRT) adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Pada kasus tertentu, misalnya beberapa anak sekolah mengontrak/menyewa rumah bersama-sama, maka KRT adalah seseorang yang ditunjuk di antara anak sekolah tersebut sebagai KRT. ➤ Pertanyaan 408: Apakah Pasangan Biasanya Tinggal di Rumah Tangga Ini? Yang dimaksud dengan pasangan biasanya tinggal di rumah tangga ini adalah jika dalam 1 tahun terakhir pasangan dari responden, tinggal di rumah lebih dari 6 bulan, meskipun tidak berturut-turut. ➤ Pertanyaan 605: Apakah Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah? Pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. ➤ Pertanyaan 610: Apakah Bersekolah (Termasuk Mengikuti Program Paket A/B/C)? Bersekolah: apabila seseorang terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal, khususnya program kesetaraan (Paket A/B/C) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun kementerian lainnya. ➤ Pertanyaan 612: Apa Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Sedang/Pernah Dikuti? Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diduduki: jenjang pendidikan tertinggi yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah atau yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi, baik jenjang pendidikan formal maupun nonformal kesetaraan (Paket A/B/C). ➤ Pertanyaan 613: Apa Tingkat/Kelas Tertinggi yang Sedang/Pernah Diduduki? Tingkat/kelas tertinggi adalah tingkatan/kelas terakhir atau paling tinggi yang dilalui seseorang pada suatu jenjang pendidikan baik formal maupun nonformal (Paket A/B/C) di sekolah negeri maupun swasta. Tamat sekolah/satuan pendidikan adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang baik pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C) di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan lulus, dianggap tamat sekolah/satuan pendidikan.

BLOK V. KETERANGAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN																																															
No. Urut ART	Jika berstatus pernah kawin (404 = 2, 3, atau 4) APAKAH (nama) MEMILIKI BUKU/AKTA NIKAH DARI KANTOR CATATAN SIPIL? BOLEH SAYA MELIHATNYA? (untuk perkawinan yang terakhir) (Kode)	No. Urut Keluarga	No. Urut Ibu Kandung Lihat Blok IV (Isikan 00 bila ibu kandung tidak tinggal di rumah tangga ini)	APAKAH (nama) MEMPUNYAI NOMOR INDIK KENDUDUKAN (NIK)? 1. Ya 5. Tidak 508 ←	Nomor Induk Kependudukan (Tuliskan Nomor Induk Kependudukan setiap ART) 1. Jika ART mempunyai NIK tetapi tidak sesuai format → pada empat digit terakhir 505 tuliskan 9999 dan pada 506 tuliskan kode 9, kemudian tulis catatan di Blok XXIV. 2. Jika ART mempunyai NIK tetapi tidak ingat/tidak memiliki catatan → pada empat digit terakhir 505 tuliskan 9999 dan pada 506 dan 507 tuliskan kode 9, kemudian tulis catatan di Blok XXIV. Catatan.										Kode Jenis Kelamin ART berdasarkan NIK (Cek digit ke-7 NIK pada 505) (Kode)	Sumber Data Kependudukan 1. KK 2. KTP 3. Lainnya	APAKAH (nama) MEMILIKI AKTA KELAHIRAN DARI KANTOR CATATAN SIPIL? BOLEH SAYA MELIHATNYA? (Kode)	(Disisi oleh pengawas) Apakah isian 506 sama dengan isian 405? (Cek isian 405) 1. Sama 2. Berbeda 3. Tidak relevan																													
					504	503	505	506	507	508	509																																				
401																																															
1																																															
2																																															
3																																															
4																																															
5																																															
6																																															
7																																															
8																																															
9																																															
10																																															
Kode 501: Kepemilikan Buku Akta Nikah 1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 5. Tidak memiliki 8. Tidak tahu												Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU Nomor 52 Tahun 2009). Penentuan keluarga didasarkan pada ikatan perkawinan. Termasuk keluarga apabila seseorang yang berstatus pernah kawin dan tinggal sendiri (tanpa pasangan atau anak), sedangkan yang berstatus belum kawin tidak dianggap keluarga (Supas, 2015).												Kode 506: Kode Jenis Kelamin ART berdasarkan NIK 1. Laki-laki Jika angka pada digit ke-7 NIK adalah 0, 1, 2, atau 3 2. Perempuan Jika angka pada digit ke-7 NIK adalah 4, 5, 6, atau 7 5. Tidak dapat ditentukan Jika tidak termasuk kode 1 atau 2												Kode 508: Kepemilikan Akta Kelahiran 1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 5. Tidak memiliki 8. Tidak tahu											

BLOK VI. KETERANGAN MIGRASI DAN PENDIDIKAN											
Untuk ART Semua Umur			Untuk ART Berumur 5 Tahun ke Atas		Untuk ART Berumur 0-10 Tahun			Untuk ART Berumur 5 Tahun ke Atas			
No. Unit ART	Di MANAKAH TEMPAT LAHIR (nama)? Tempat lahir adalah tempat tinggal ibu (nama) ketika melahirkan (nama). Tuliskan nama tempat (Kode tempat diisi oleh pengawas)		Di MANAKAH TEMPAT TINGGAL (nama) 5 TAHUN YANG LALU (FEBRUARI 2019)? Tuliskan nama tempat (Kode tempat diisi oleh pengawas)		APAKAH (nama) SEDANG/ PERNAH MENGIKUTI PENDIDIKAN PRA-SEKOLAH?	Jika pernah/ masih (605- (605- 1,2, atau 3). APA JENIS PENDIDIKAN PRASEKOLAH- NYA?	Jika tidak/ belum pernah (605-4). APAKAH SEDANG/PERNAH MENGIKUTI KEGIATAN KURSUS SEBELUM KURSUS, KUNJUN SENI, DLL.?	APAKAH (nama) DAPAT MEMBACA DAN MENULIS KALIMAT SEDERHANA DALAM BAHASA SEHARI-HARI DENGAN MENGGUNAKAN:			
	PROVINSI/NEGARA	KABUPATEN/KOTA Jika lahir di Kota, tuliskan "Kota" sebelum nama kota	PROVINSI/NEGARA	KABUPATEN/KOTA Jika di Kota, tuliskan "Kota" sebelum nama kota	(Kode)	(Kode)	(Kode)	HURUF LATIN/ ALFABET?	HURUF ARAB/ HURUF?	1.Ya 1.Ya 5.Tidak 5.Tidak	1.Ya 1.Ya 5.Tidak 5.Tidak
401	601	602	603	604	605	606	606-A	607	608	609	
1							A B X				
2							A B X				
3							A B X				
4							A B X				
5							A B X				
6							A B X				
7							A B X				
8							A B X				
9							A B X				
10							A B X				
Kode 605: Partisipasi Prasekolah 1. Masih mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran ini (2023/2024) 2. Pernah mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran ini (2023/2024) 3. Pernah mengikuti pendidikan prasekolah sebelum tahun ajaran 2023/2024 4. Tidak/belum pernah mengikuti pendidikan prasekolah											
Kode 606: Jenis Prasekolah 1. Taman Kanak-kanak 2. Bustanul Athfal 3. Raudatul Athfal 4. Satuan PAUD Sejenis (PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAMI, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll.) 5. Kelompok Bermain 6. Taman Penitipan Anak											
Kode 606-A: Kegiatan Kursus A. Ya, kursus pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung B. Ya, kursus bukan pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung X. Tidak sedang/pernah mengikuti kegiatan kursus											

BLOK VI. KETERANGAN MIGRASI DAN PENDIDIKAN												
No. Urut ART	Untuk ART berumur 5 tahun ke atas				Untuk ART berumur 5-30 tahun			Untuk ART berumur 5-24 tahun				
	APAKAH (nama) BERSEKOLAH? (termasuk mengikuti program paket A/B/C) (Kode) Kode = 1 ke ART berikutnya/ Blok VII Kode = 3 → 612	APAKAH (nama) BERSEKOLAH DI SEKOLAH NEGERI ATAU SWASTA? (Kode) Kode = 1 Negeri 2. Swasta	APA JENJANG PENDIDIKAN TERTINGGI YANG SEDANG/ DIKUTI (nama)? (Kode)	APA TINGKAT/ KELAS TERTINGGI YANG PERNAH DIDUDUKI (nama)? (Kode)	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEMILIKI KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)? (Kode) 1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 5. Tidak	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEMPEROLEH PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)? (Kode) 1. Ya 5. Tidak → 619	SELAMA BULAN AGUSTUS 2023-FEBRUARI 2024 BERAPA JUMLAH UANG PIP YANG DITERIMA? (Rp)	(Jika P.617 ≠ 0) UNTUK PENERIMAAN BERAPA SEMESTER? (Semester)	Untuk ART yang masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi (610 = 2 atau 3)			
									APAKAH (nama) BERSEKOLAH PADA TAHUN AJARAN SEBELUMNYA (2022/2023)? (Kode) Kode = 1 atau 3 ke ART berikutnya/ Blok VII	APA JENJANG PENDIDIKAN YANG DIKUTI (nama) WAKTU ITU?	TINGKAT/ KELAS YANG DIDUDUKI (nama)	WAKTU ITU?
401	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
Kode 610 dan 619: Partisipasi Sekolah 1. Tidak/ belum pernah bersekolah 2. Masih bersekolah 3. Tidak bersekolah lagi												
Kode 612 dan 620: Jenjang Pendidikan dan Kode 614: Ijazah/STTB 01. Paket A 02. SDLB 03. SD 04. MI 05. SPM/PDF Ula 06. Paket B 07. SMP LB 08. SMP 09. MTs 10. SPM/PDF Wustha 11. Paket C 12. SMLB 13. SMA 14. MA 15. SMK 16. MAK 17. SPM/PDF Ulya 18. D1/D2 19. D3 20. D4 21. S1 22. Profesi 23. S2 24. S3												
Kode 613 dan 621: Tingkat/Kelas Kode 613: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Tamat) Kode 621: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 • Jika pernah/ sedang kuliah Profesi, kode 1 • Jika pernah/ sedang kuliah S2, kode 6 • Jika pernah/ sedang kuliah S3, kode 7												
25. Tidak Punya Ijazah SD (Krusus 614) ☐ Cek isian P.612 jika berkode 13 = SMA, pastikan jurnsannya IPA/IPS/Bahasa dan berikan tanda centang (✓)												

BLOK VII. KETERANGAN KEPEMILIKAN TABUNGAN, INKLUSI KEUANGAN, DAN KETENAGAKERJAAN											
Untuk ART Umur 5 Tahun ke Atas											
No. Urut ART	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) MENGGUNAKAN PRODUK/LAYANAN JASA KEUANGAN (PERBANKAN, ASURANSI, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DANA PENSIUN, FINTECH, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, PERGADAIAN, UANG ELEKTRONIK, PASAR MODAL) SEPERTI TABUNGAN, DEPOSITO, ASURANSI, PINJAMAN ONLINE, REKSADANA, SAHAM, DLL.?		SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, APAKAH (nama) MELAKUKAN KEGIATAN YANG HARUS DIBACAKAN		DARI KEGIATAN YANG DILAKUKAN SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, KEGIATAN APAKAH YANG MENGGUNAKAN WAKTU TERBATAS?		Jika tidak bekerja (703 pilihan A tidak diilangkan)		Jika bekerja atau sementara tidak bekerja (703 = pilihan A terpilih atau 705 = 1)		
	1. Ya 5. Tidak	1. Ya 5. Tidak	A. Bekerja B. Sekolah C. Mengurus rumah tangga pribadi D. Lainnya selain kegiatan pribadi X. Tidak melakukan kegiatan	1. Bekerja → 706 2. Sekolah 3. Mengurus rumah tangga 4. Lainnya selain kegiatan pribadi X. Tidak melakukan kegiatan	SELAGI SEMINGGU TERAKHIR, APAKAH (nama) MELAKUKAN KEGIATAN YANG HARUS DIBACAKAN	SELAGI SEMINGGU TERAKHIR, APAKAH (nama) MELAKUKAN KEGIATAN YANG HARUS DIBACAKAN	SELAGI SEMINGGU TERAKHIR, APAKAH (nama) MELAKUKAN KEGIATAN YANG HARUS DIBACAKAN	SELAGI SEMINGGU TERAKHIR, APAKAH (nama) MELAKUKAN KEGIATAN YANG HARUS DIBACAKAN	SELAGI SEMINGGU TERAKHIR, APAKAH (nama) MELAKUKAN KEGIATAN YANG HARUS DIBACAKAN	SELAGI SEMINGGU TERAKHIR, APAKAH (nama) MELAKUKAN KEGIATAN YANG HARUS DIBACAKAN	SELAGI SEMINGGU TERAKHIR, APAKAH (nama) MELAKUKAN KEGIATAN YANG HARUS DIBACAKAN
401											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Untuk ART Umur 10 Tahun ke Atas											
No. Urut ART	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) MELAKUKAN KEGIATAN YANG HARUS DIBACAKAN		SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, APAKAH (nama) MELAKUKAN KEGIATAN YANG HARUS DIBACAKAN		DARI KEGIATAN YANG DILAKUKAN SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, KEGIATAN APAKAH YANG MENGGUNAKAN WAKTU TERBATAS?		Jika tidak bekerja (703 pilihan A tidak diilangkan)		Jika bekerja atau sementara tidak bekerja (703 = pilihan A terpilih atau 705 = 1)		
	1. Ya 5. Tidak	1. Ya 5. Tidak	A. Bekerja B. Sekolah C. Mengurus rumah tangga pribadi D. Lainnya selain kegiatan pribadi X. Tidak melakukan kegiatan	1. Bekerja → 706 2. Sekolah 3. Mengurus rumah tangga 4. Lainnya selain kegiatan pribadi X. Tidak melakukan kegiatan	SELAGI SEMINGGU TERAKHIR, APAKAH (nama) MELAKUKAN KEGIATAN YANG HARUS DIBACAKAN	SELAGI SEMINGGU TERAKHIR, APAKAH (nama) MELAKUKAN KEGIATAN YANG HARUS DIBACAKAN	SELAGI SEMINGGU TERAKHIR, APAKAH (nama) MELAKUKAN KEGIATAN YANG HARUS DIBACAKAN	SELAGI SEMINGGU TERAKHIR, APAKAH (nama) MELAKUKAN KEGIATAN YANG HARUS DIBACAKAN	SELAGI SEMINGGU TERAKHIR, APAKAH (nama) MELAKUKAN KEGIATAN YANG HARUS DIBACAKAN	SELAGI SEMINGGU TERAKHIR, APAKAH (nama) MELAKUKAN KEGIATAN YANG HARUS DIBACAKAN	SELAGI SEMINGGU TERAKHIR, APAKAH (nama) MELAKUKAN KEGIATAN YANG HARUS DIBACAKAN
401											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Kode 707: Status/Kedudukan dalam Pekerjaan											
(Jika 705=1, 707 tidak boleh berkode 5 atau 6)											
1. Berusaha sendiri 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/ tidak dibayar 3. Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar 4. Buruh/karyawan/pegawai 5. Pekerja bebas 6. Pekerja keluarga atau tidak dibayar											

Kode 708: Status/Kedudukan dalam Pekerjaan											
(Jika 705=1, 708 tidak boleh berkode 5 atau 6)											
1. Berusaha sendiri 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/ tidak dibayar 3. Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar 4. Buruh/karyawan/pegawai 5. Pekerja bebas 6. Pekerja keluarga atau tidak dibayar											

Kode 709: Status/Kedudukan dalam Pekerjaan											
(Jika 705=1, 709 tidak boleh berkode 5 atau 6)											
1. Berusaha sendiri 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/ tidak dibayar 3. Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar 4. Buruh/karyawan/pegawai 5. Pekerja bebas 6. Pekerja keluarga atau tidak dibayar											

88

No.	Dalam 3 bulan terakhir, apakah (nama) menggunakan telepon seluler (HP)? NIRKABEL	Dalam 3 bulan terakhir, apakah (nama) memiliki akses ke internet? NIKABEL?	Dalam 3 bulan terakhir, apakah (nama) menggunakan komputer/laptop/tablet? NIRKABEL?	Dalam 3 bulan terakhir, apakah (nama) menggunakan smartphone? NIRKABEL?	Dalam 3 bulan terakhir, apakah (nama) menggunakan aplikasi media sosial? NIRKABEL?	Dalam 3 bulan terakhir, apakah (nama) menggunakan layanan streaming video? NIRKABEL?	Dalam 3 bulan terakhir, apakah (nama) menggunakan layanan cloud storage? NIRKABEL?	Dalam 3 bulan terakhir, apakah (nama) menggunakan layanan email? NIRKABEL?	Dalam 3 bulan terakhir, apakah (nama) menggunakan layanan perbankan digital? NIRKABEL?	Dalam 3 bulan terakhir, apakah (nama) menggunakan layanan transportasi online? NIRKABEL?	Dalam 3 bulan terakhir, apakah (nama) menggunakan layanan kesehatan digital? NIRKABEL?
1	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak
2	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak
3	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak
4	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak
5	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak
6	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak
7	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak
8	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak
9	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak
10	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak	Ya Tidak

Kode 812:

- Menggunakan HP yang dimaksud tidak harus menggunakan HP yang dimiliki sendiri atau dibeli/dibayar sendiri oleh individu yang menggunakan.
- Memiliki/menguasai HP apabila anggota rumah tangga tersebut memiliki/menguasai HP dengan minimal 1 kartu yang aktif dalam 3 bulan terakhir.

Lanjutan Lampiran 1

BLOK IX. KETERANGAN BEPERGIAN DAN KORBAN KEJAHATAN																			
SEJAK 1 JANUARI-31 DESEMBER 2023, APAKAH (nama) PERNAH BEPERGIAN KELUAR KABUPATEN/KOTA, MINIMAL 6 JAM DI TEMPAT TUJUAN, TIDAK UNTUK SEKOLAH ATAU BEKERJA?		Jika pernah bepergian (901=1)		SEJAK 1 JANUARI-31 DESEMBER 2023, APAKAH (nama) PERNAH MENJADI KORBAN KEJAHATAN DENGAN PENYALINGAN, PENGANIAYAAN, PENGURANGAN, PELECEHAN SEKSUAL, ATAU LAINNYA?		BERAPA KALI (nama) MENJADI KORBAN KEJAHATAN YANG DI LAPORKAN KE POLISI? (Jika ≥ 7 kejadian, Tulis '7')										Jika 907, 909, 911, 913, atau 915(40)			
No. Urut ART	1 JANUARI 2023 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023? (Kali)	1 JULI 2023 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023? (Kali)	PADA KUNDISI BEPERGIAN YANG TERAKHIR, APA MAKSUD UTAMA (nama) MELAKUKAN BEPERGIAN?	(Kode)	905	PENGANIAYAAN			PENCURIAN DENGAN KEKERASAN			PELECEHAN SEKSUAL			LAINNYA		KETIKA KEJAHATAN TERSEBUT DALAM PROSES LAPORAN KE POLISI, APAKAH (nama) MENYIMPATKAN/ DITAMBAH BANTUAN HUKUM? 1. Ya 5. Tidak		
						JULI 2023 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023? (Kali)	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915			
401	☐	☐	☐	☐	904	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

Kode 904: Maksud Utama Bepergian	• Bepergian rutin adalah bepergian ke tempat/tujuan utama dengan frekuensi paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.	Suatu peristiwa kejahatan dianggap telah dilaporkan ke polisi apabila:
01. Beribadah/rekreasi	07. Mengunjungi teman/keluarga	a. Korban kejahatan telah melaporkannya ke polisi.
02. Profesi/bisnis	08. Mudik/pulang kampung hari raya	b. Orang lain melaporkan peristiwa kejahatan tersebut ke polisi.
03. Misi/pertemuan/kongres/seminar	09. Othragak/kesenian	c. Polisi mengeluturnya sendiri atau terlengkap langan.
04. Training/pendidikan/pelatihan	10. Belanja/shopping	
05. Kesehatan/berobat	11. Lainnya	
06. Berziarah/keagamaan		

Lanjutan Lampiran 1

BLOK X. KETERANGAN GANGGUAN FUNGSIONAL (UNTUK ART BERUMUR 2 TAHUN KE ATAS)										
Isikan kode 1 jika Umur ≥ 2 tahun atau kode 0 jika Umur < 2 tahun	APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/ GANGGUAN PENGLIHATAN?	APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/ GANGGUAN BERJALAN/ NAIK TANGGA?	APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/ GANGGUAN MENGGERAKAN TANGAN/ JARI?	APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/ GANGGUAN DALAM HAL MENGINGAT ATAU BERKONSENTRASI?	APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/ GANGGUAN PERILAKU DAN/ ATAU EMOSIONAL?	APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/ GANGGUAN UNTUK MENGURUS DIRI SENDIRI?	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) MENEMERKAN BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH PUSAT BERUPA ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL (ATENSI) PENYANDANG DISABILITAS?			
No. Urut ART	1. Ya, sama sekali tidak bisa melihat kesulitan	1. Ya, sama sekali tidak bisa berjalan/naik tangga kesulitan	5. Ya, sama sekali tidak bisa menggunakan/ mengerakkan tangan/jari kesulitan	1. Ya, selalu mengalami kesulitan	5. Ya, selalu mengalami gangguan	1. Ya, sama sekali tidak bisa berkomunikasi kesulitan	1. Ya			
1 → 1002	2. Ya, banyak kesulitan	2. Ya, banyak kesulitan	6. Ya, banyak kesulitan	2. Ya, seringkali mengalami kesulitan	6. Ya, seringkali mengalami gangguan	2. Ya, sama sekali tidak bisa mengurus diri sendiri kesulitan	5. Tidak			
0 → ART berikutnya/ Blok XI	3. Ya, sedikit kesulitan	3. Ya, sedikit kesulitan	7. Ya, sedikit kesulitan	3. Ya, sedikit mengalami kesulitan	7. Ya, sedikit mengalami gangguan	3. Ya, sedikit mengalami kesulitan	5. Tidak			
	4. Tidak mengalami kesulitan	4. Tidak mengalami kesulitan	8. Tidak mengalami kesulitan	4. Tidak mengalami kesulitan	8. Tidak mengalami gangguan	4. Tidak mengalami kesulitan				
1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
• Disabilitas adalah adanya gangguan/kelembasan fungsi yang berlangsung lama dan menyebabkan terbatasnya partisipasi di masyarakat. • Gangguan/kelembasan fungsi ditandai oleh kondisi ketidakmampuan atau kehilangan ataupun kelainan baik dari psikologis, fisiologis, maupun struktur atau fungsi anatomis. • Peluang tidak diperkenankan memutuskan bahwa responden tidak mengalami disabilitas tertentu berdasarkan apa yang dilihat secara kasat mata. • Gangguan/kelembasan fungsi antara lain: kesulitan melihat, kesulitan mendengar, berbicara tidak lancar, kesulitan memahami/ingat/gangguan jiwa, lambat dalam belajar/memahami pelajaran, keterbatasan berjalan, keterbatasan bergerak, kesulitan mengambil barang kecil menggunakan tangan/jari. • Setiap orang bisa mengalami lebih dari satu jenis gangguan.										
• Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yaitu layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan/atau residential melalui kegiatan dukungan pemenuhan kehidupan layak, dukungan keluarga, perawatan sosial, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental, pelatihan vokasional pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial, asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas.										

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XI. KETERANGAN KELUHAN KESEHATAN DAN RAWAT JALAN										
	JAMINAN KESEHATAN APA SALA YANG DIMILIKI (nama)?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) KESEHATAN MEMPUNYAI KELUHAN (PAINAS, BATUK, PUKING, PENYAKIT KRONIS, DSB)?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) KESEHATAN MEMPUNYAI KELUHAN (PAINAS, BATUK, PUKING, PENYAKIT KRONIS, DSB)?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) KESEHATAN MEMPUNYAI KELUHAN (PAINAS, BATUK, PUKING, PENYAKIT KRONIS, DSB)?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) KESEHATAN MEMPUNYAI KELUHAN (PAINAS, BATUK, PUKING, PENYAKIT KRONIS, DSB)?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) KESEHATAN MEMPUNYAI KELUHAN (PAINAS, BATUK, PUKING, PENYAKIT KRONIS, DSB)?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) KESEHATAN MEMPUNYAI KELUHAN (PAINAS, BATUK, PUKING, PENYAKIT KRONIS, DSB)?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) KESEHATAN MEMPUNYAI KELUHAN (PAINAS, BATUK, PUKING, PENYAKIT KRONIS, DSB)?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) KESEHATAN MEMPUNYAI KELUHAN (PAINAS, BATUK, PUKING, PENYAKIT KRONIS, DSB)?	JIKA 1109 PILIHAN A, B, dan C tidak dilingkari APA SALA ALASAN (nama) TIDAK MENGGUNAKAN JKNU/JAMKESDA UNTUK RAWAT JALAN? A. BPJS Kesehatan B. Prosedur/persyaratan sulit dipenuhi C. Kartu JKN tidak aktif D. Tidak ada fasilitas yang mudah dijangkau dari rumah E. Tidak ada petugas pelayanan jaminan kesehatan F. Tidak ada biaya (transportasi, dll.) G. Waktu tunggu pelayanan lama/antara panjang H. Menggunakan asuransi selain JKN/Jamkesda I. Lainnya, tuliskan:
No. Urut	JAMINAN KESEHATAN APA SALA YANG DIMILIKI (nama)?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) KESEHATAN MEMPUNYAI KELUHAN (PAINAS, BATUK, PUKING, PENYAKIT KRONIS, DSB)?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) KESEHATAN MEMPUNYAI KELUHAN (PAINAS, BATUK, PUKING, PENYAKIT KRONIS, DSB)?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) KESEHATAN MEMPUNYAI KELUHAN (PAINAS, BATUK, PUKING, PENYAKIT KRONIS, DSB)?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) KESEHATAN MEMPUNYAI KELUHAN (PAINAS, BATUK, PUKING, PENYAKIT KRONIS, DSB)?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) KESEHATAN MEMPUNYAI KELUHAN (PAINAS, BATUK, PUKING, PENYAKIT KRONIS, DSB)?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) KESEHATAN MEMPUNYAI KELUHAN (PAINAS, BATUK, PUKING, PENYAKIT KRONIS, DSB)?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) KESEHATAN MEMPUNYAI KELUHAN (PAINAS, BATUK, PUKING, PENYAKIT KRONIS, DSB)?	JIKA 1109 PILIHAN A, B, dan C tidak dilingkari APA SALA ALASAN (nama) TIDAK MENGGUNAKAN JKNU/JAMKESDA UNTUK RAWAT JALAN? A. BPJS Kesehatan B. Prosedur/persyaratan sulit dipenuhi C. Kartu JKN tidak aktif D. Tidak ada fasilitas yang mudah dijangkau dari rumah E. Tidak ada petugas pelayanan jaminan kesehatan F. Tidak ada biaya (transportasi, dll.) G. Waktu tunggu pelayanan lama/antara panjang H. Menggunakan asuransi selain JKN/Jamkesda I. Lainnya, tuliskan:	
401	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110
1	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I
2	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I
3	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I
4	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I
5	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I
6	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I
7	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I
8	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I
9	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I
10	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I
Kode 1106: Alasan Utama Tidak Rawat Jalan 1. Tidak punya biaya berobat 2. Tidak ada biaya transportasi 3. Tidak ada sarana transportasi 4. Waktu tunggu pelayanan lama 5. Mengobati sendiri 6. Tidak ada yang mendampingi 7. Merasa tidak perlu 8. Lainnya										
Kode 1107: Alasan Utama Tidak Rawat Jalan 1. Tidak punya biaya berobat 2. Tidak ada biaya transportasi 3. Tidak ada sarana transportasi 4. Waktu tunggu pelayanan lama 5. Mengobati sendiri 6. Tidak ada yang mendampingi 7. Merasa tidak perlu 8. Lainnya										
Kode 1108: Alasan Utama Tidak Rawat Jalan 1. Tidak punya biaya berobat 2. Tidak ada biaya transportasi 3. Tidak ada sarana transportasi 4. Waktu tunggu pelayanan lama 5. Mengobati sendiri 6. Tidak ada yang mendampingi 7. Merasa tidak perlu 8. Lainnya										
Kode 1109: Alasan Utama Tidak Rawat Jalan 1. Tidak punya biaya berobat 2. Tidak ada biaya transportasi 3. Tidak ada sarana transportasi 4. Waktu tunggu pelayanan lama 5. Mengobati sendiri 6. Tidak ada yang mendampingi 7. Merasa tidak perlu 8. Lainnya										
Kode 1110: Alasan Utama Tidak Rawat Jalan 1. Tidak punya biaya berobat 2. Tidak ada biaya transportasi 3. Tidak ada sarana transportasi 4. Waktu tunggu pelayanan lama 5. Mengobati sendiri 6. Tidak ada yang mendampingi 7. Merasa tidak perlu 8. Lainnya										

BLOK XII. KETERANGAN RAWAT INAP DAN MEROKOK											
No. unit ART	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH MEROKOK?	DALAM SETAHUN TERAKHIR, DI MANA SAJA TEMPAT RAWAT INAP?	DALAM SETAHUN TERAKHIR, BERAPA HARI (nama) RAWAT INAP?	JAMINAN KESEHATAN APA SAJA YANG DIGUNAKAN (nama) UNTUK RAWAT INAP?	Jika 1204 pilihan A, B, dan C tidak dilingkari APA SAJA ALASAN (nama) TIDAK MENGGUNAKAN JKN/JAMKESDA UNTUK RAWAT INAP?	Untuk ART Berumur 5 Tahun ke Atas				APAKAH DULU, SEBELUM SEBULAN TERAKHIR (nama) PERNAH MEROKOK TEMBAKAU?	
						SELAMA SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEROKOK?	SELAMA SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEROKOK TEMBAKAU?	SELAMA SEBULAN TERAKHIR, BERAPA BATANG MEROKOK?	SELAMA SEBULAN TERAKHIR, RATA-RATA PER MINGGU YANG (nama) HISAP?		
401	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209		
1	☐	A B C D E F G	☐	A B C D E X	A B C D E F G H I	☐	☐	☐	☐		
2	☐	A B C D E F G	☐	A B C D E X	A B C D E F G H I	☐	☐	☐	☐		
3	☐	A B C D E F G	☐	A B C D E X	A B C D E F G H I	☐	☐	☐	☐		
4	☐	A B C D E F G	☐	A B C D E X	A B C D E F G H I	☐	☐	☐	☐		
5	☐	A B C D E F G	☐	A B C D E X	A B C D E F G H I	☐	☐	☐	☐		
6	☐	A B C D E F G	☐	A B C D E X	A B C D E F G H I	☐	☐	☐	☐		
7	☐	A B C D E F G	☐	A B C D E X	A B C D E F G H I	☐	☐	☐	☐		
8	☐	A B C D E F G	☐	A B C D E X	A B C D E F G H I	☐	☐	☐	☐		
9	☐	A B C D E F G	☐	A B C D E X	A B C D E F G H I	☐	☐	☐	☐		
10	☐	A B C D E F G	☐	A B C D E X	A B C D E F G H I	☐	☐	☐	☐		

• Rawat inap adalah upaya penyembuhan keluhan kesehatan dengan menginap selama satu malam atau lebih di unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional, termasuk rawat inap untuk persalinan. • Responden yang pernah rawat inap adalah responden yang telah selesai menjalani rawat inap, tidak termasuk bila pada saat pencacahan sedang menjalani rawat inap. • Menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap adalah bila biaya rawat inap anggota rumah tangga seluruhnya atau sebagian dibayar oleh penjamin kesehatan. • Jumlah hari adalah jumlah hari rawat inap dalam satu tahun terakhir.	• Merokok merupakan aktivitas membakar tembakau kemudian menghisap asapnya baik menggunakan rokok maupun pipa pada sebulan terakhir sampai saat pencacahan. • Rokok tembakau meliputi rokok putih, rokok kretek, cerutu, lisong, pipa cangklong/linting/kawung yang diisi tembakau. Termasuk juga orang yang menghisap <i>shisha/waterpipe</i>. • Penghitungan jumlah batang rokok rata-rata per minggu selama sebulan terakhir adalah jumlah rokok yang dihisap selama sebulan dikali 7 dibagi 30.
---	--

PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3
Nama dan No. Urut (Salin dari Blok IV 402 dan 401): Nama & No. Urut Pemberi Informasi			
BLOK XIV. KETERANGAN IMUNISASI, ASI, DAN MP-ASI (DITANYAKAN UNTUK SEMUA ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 0-59 BULAN)			
1401. Umur (nama balita) dalam bulan (Hitung dari Blok IV 406)	bulan	bulan	bulan
IMUNISASI BALITA			
SAYA AKAN MENANYAKAN BEBERAPA PERTANYAAN MENGENAI IMUNISASI			
1402. APAKAH BAPAK/IBU MEMPUYAI BUKU KIA/KIMS ATAU KARTU BEROBAT/DOKUMEN LAIN YANG TERTULIS TANGGAL IMUNISASI (nama balita)? BOLEHAH SAYA MELIHATNYA?	Ya, dapat ditunjukkan..... 1 → 1404 Ya, tidak dapat ditunjukkan..... 2 → 1406 Tidak ada kartu/buku..... 5	Ya, dapat ditunjukkan..... 1 → 1404 Ya, tidak dapat ditunjukkan..... 2 → 1406 Tidak ada kartu/buku..... 5	Ya, dapat ditunjukkan..... 1 → 1404 Ya, tidak dapat ditunjukkan..... 2 → 1406 Tidak ada kartu/buku..... 5
1403. APAKAH BAPAK/IBU PERNAH MEMPUYAI BUKU KIA/KIMS ATAU KARTU BEROBAT/DOKUMEN LAIN YANG TERTULIS TANGGAL IMUNISASI (nama balita)?	Ya..... 1 → 1406 Tidak..... 5 → 1406	Ya..... 1 → 1406 Tidak..... 5 → 1406	Ya..... 1 → 1406 Tidak..... 5 → 1406
1404. Salin dari kartu, tanggal, bulan, dan tahun imunisasi untuk setiap jenis imunisasi. Tulis '44' di kolom tanggal, bulan, dan tahun, jika kartu menunjukkan bahwa imunisasi diberikan, tetapi tanggal, bulan, dan tahun tidak ada. Tulis '00' jika imunisasi tidak diberikan.	Tanggal	Bulan	Tahun
a. HEPATITIS B (<24 JAM)	---	---	---
b. BCG	---	---	---
c. POLIO TETES 1	---	---	---
d. DPT-HB-Hib 1	---	---	---
e. POLIO TETES 2	---	---	---
f. DPT-HB-Hib 2	---	---	---
g. POLIO TETES 3	---	---	---
h. DPT-HB-Hib 3	---	---	---
i. POLIO TETES 4	---	---	---
j. POLIO SUNTIK (IPV)	---	---	---
k. CAMPYAK-RUBELLA (MR)	---	---	---

PERTANYAAN	BALITA 1			BALITA 2			BALITA 3			
	Tanggal	Bulan	Tahun	Tanggal	Bulan	Tahun	Tanggal	Bulan	Tahun	
Nama dan No. Urut (Salin dari Blok IV 402 dan 401):										
I. DPT-HB-Hib LANJUTAN										
m. CAMPAK-RUBELLA (MR) LANJUTAN										
n. MMR										
1405. APAKAH (nama balita) MENEMPAH IMUNISASI DASAR, YANG TIDAK TERCATAT DALAM KARTU, TERMASUK IMUNISASI YANG DITERIMA SAAT PEKAN IMUNISASI NASIONAL? Lingkari kode 1 jika responden menyebutkan jenis imunisasi dasar (lihat pertanyaan 1404).	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417
UNTUK BALITA YANG TIDAK MEMPUNYAI ATAU TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN KARTU IMUNISASI										
1406. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT IMUNISASI UNTUK MELINDUNGINYA DARI BERBAGAI PENYAKIT?	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417
1407. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT VAKSIN BCG UNTUK MENCEGAH PENYAKIT TBC – BIASANYA DISUNTIKAN PADA LENGAN ATAU BAHU DAN MENIMBULKAN BEKAS LUKA-?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8
1408. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT VAKSIN UNTUK MENCEGAH PENYAKIT POLIO – YANG "DITETESKAN KE MULUT ATAU DISUNTIKAN PADA LENGAN/PAHA" –?	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411
1409. KAPAN VAKSIN POLIO PERTAMA DITERIMA (nama balita), APAKAH PADA SEBULAN PERTAMA KELAHIRAN ATAU SETELAHNYA?	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2
1410. SUDAH BERAPA KALI (nama balita) MENDAPATKAN VAKSIN POLIO?	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali
1411. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT VAKSIN DPT – YAITU SUNTIKAN DI PAHA ATAU BOKONG – UNTUK MENCEGAH PENYAKIT TETANUS, BATUK REJAN, ATAU DIPTERI? (Probing dengan menyatakan bahwa pemberian vaksin DPT kadang-kadang bersamaan dengan vaksin Polio dan Hepatitis B)	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413

Lanjutan Lampiran 1

PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3
Nama dan No. Urut (Salin dari Blok IV 402 dan 401):			
1412. SUDAH BERAPA KALI (nama balita) MENDAPATKAN VAKSIN DPT?	 kali	 kali	 kali
1413. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT VAKSIN HEPATITIS B – YAITU SUNTIKAN DI PAHA ATAU BOKONG – UNTUK MENCEGAH PENYAKIT HEPATITIS B? (Probing dengan menyatakan bahwa pemberian vaksin Hepatitis B kadang-kadang bersamaan dengan vaksin Polio dan DPT)	Ya 1 Tidak 5 → 1416 Tidak Tahu 8 → 1416	Ya 1 Tidak 5 → 1416 Tidak Tahu 8 → 1416	Ya 1 Tidak 5 → 1416 Tidak Tahu 8 → 1416
1414. SUDAH BERAPA KALI (nama balita) MENDAPATKAN VAKSIN HEPATITIS B?	 kali	 kali	 kali
1415. KAPAN VAKSINASI HEPATITIS B PERTAMA DITERIMA (nama balita), APAKAH PADA SEMINGGU PERTAMA SETELAH KELAHIRAN ATAU SETELAHNYA?	Seminggu pertama 1 Setelah seminggu pertama 2	Seminggu pertama 1 Setelah seminggu pertama 2	Seminggu pertama 1 Setelah seminggu pertama 2
1416. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT SUNTIKAN CAMPAK – RUBELLA (MR) ATAU MMR – YAITU PADA UMUR 9 BULAN ATAU LEBIH – UNTUK MENCEGAH PENYAKIT CAMPAK?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8
i. CAMPAK – RUBELLA (MR)	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8
ii. MMR	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8
A SI DAN MP-ASI DITANYAKAN UNTUK BADUTA (ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 0-23 BULAN)			
Cek umur balita dari 1401, berikan tanda centang (✓)			
Balita berumur 0-23 bulan Balita berumur ≥ 24 bulan	☐ → 1417 ☐ → Balita berikutnya/Blok XV	☐ → 1417 ☐ → Balita berikutnya/Blok XV	☐ → 1417 ☐ → Balita berikutnya/Blok XV
1417. A. APAKAH (nama baduta) PERNAH DISUSUI/DIBERI AIR SUSU IBU (ASI)?	Ya 1 Tidak 5 → 1419 Tidak tahu 8 → 1419	Ya 1 Tidak 5 → 1419 Tidak tahu 8 → 1419	Ya 1 Tidak 5 → 1419 Tidak tahu 8 → 1419
B. LAMANYA PEMBERIAN ASI: I. TANPA MAKANAN PENDAMPING II. DENGAN MAKANAN PENDAMPING	B. bulan I. bulan II. bulan	B. bulan I. bulan II. bulan	B. bulan I. bulan II. bulan

PERTANYAAN		BALITA 1		BALITA 2		BALITA 3	
Nama dan No. Urut (Salin dari Blok IV 402 dan 401):							
1418. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) DISUSUI/DIBERI ASI?		Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8		
1419. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) MERINJA CAIRAN, TERMASUK CAIRAN YANG DIKOMBINASIKAN DENGAN MAKANAN LAIN DAN CAIRAN YANG DIKONSUMSI DI LUAR RUMAH?		Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8		
a. SUSU SELAIN ASI (SUSU FORMULA, SUSU BUBUK, SUSU SEGAR, UHT PLAIN)? Jika "Ya", isikan berapa kali susu selain ASI dikonsumsi baduta.		a).....1 b).....5 c).....8	a).....1 b).....5 c).....8	a).....1 b).....5 c).....8	a).....1 b).....5 c).....8		
b. MINUMAN LAIN TANPA GULA (AIR PUTIH, JUS TANPA GULA, SUPI KALDU, TEH/Kopi TAWAR, AIR TAJIN, DLL.)?		b).....1 c).....5 d).....8	b).....1 c).....5 d).....8	b).....1 c).....5 d).....8	b).....1 c).....5 d).....8		
c. MINUMAN BERPEMANIS GULA (MINUMAN RINGAN, SODA, THE/Kopi MANIS, SUSU KENTAL MANIS, DLL.)?		c).....1 d).....5 e).....8	c).....1 d).....5 e).....8	c).....1 d).....5 e).....8	c).....1 d).....5 e).....8		
1420. SAYA INGIN MENANYAKAN TENTANG SEMUA YANG DIKONSUMSI OLEH (nama baduta) SEHARIAN KEMARIN, TERMASUK MAKANAN YANG DIKONSUMSI DI LUAR RUMAH ATAU JAJAN. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) MAKAN/MINUM?		Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8		
a. SEREAL, AKAR DAN UMBI (NASI, JAGUNG, GANDUM, PASTA, ROTIPANEKUK, UBI, KENTANG, SORGUM, DLL.)?		a).....1 b).....5 c).....8	a).....1 b).....5 c).....8	a).....1 b).....5 c).....8	a).....1 b).....5 c).....8		
b. MAKANAN DARI KACANG-KACANGAN (KACANG TANAH, KEDELAI, TAHU, TEMPE, ATAU KACANG LAINNYA)?		b).....1 c).....5 d).....8	b).....1 c).....5 d).....8	b).....1 c).....5 d).....8	b).....1 c).....5 d).....8		
c. PRODUK TURUNAN SUSU (YOGURT, KEJU, DLL.)?		c).....1 d).....5 e).....8	c).....1 d).....5 e).....8	c).....1 d).....5 e).....8	c).....1 d).....5 e).....8		
d. DAGING, IKAN (SAPI, AYAM, KAMBING, IKAN, MAKANAN LAUT, DNGG/IKAN DALAM KALENG, DLL.)?		d).....1 e).....5 f).....8	d).....1 e).....5 f).....8	d).....1 e).....5 f).....8	d).....1 e).....5 f).....8		
e. TELUR (AYAM, ITIK, PUYUH, DLL.)?		e).....1 f).....5 g).....8	e).....1 f).....5 g).....8	e).....1 f).....5 g).....8	e).....1 f).....5 g).....8		
f. BUAH DAN SAYUR SUMBER VITAMIN A (TERMASUK SAYURAN BERAUN GELAP)?		f).....1 g).....5 h).....8	f).....1 g).....5 h).....8	f).....1 g).....5 h).....8	f).....1 g).....5 h).....8		
g. BUAH ATAU SAYURAN LAINNYA (LABU SIAM, GAMBAS, ALPUKAT, JERUK, DLL.)?		g).....1 h).....5 i).....8	g).....1 h).....5 i).....8	g).....1 h).....5 i).....8	g).....1 h).....5 i).....8		
h. MAKANAN RINGAN YANG GURIH, GORENGAN, MAKANAN MANIS (ES KRIM, PERMEN, KUE KERING, CAKE, DLL.)?		h).....1 i).....5 j).....8	h).....1 i).....5 j).....8	h).....1 i).....5 j).....8	h).....1 i).....5 j).....8		
1421. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) DIBERI MAKANAN BAK BERUPA MAKANAN PADAT, MAKANAN SETENGGAH PADAT, ATAU MAKANAN LUNAK?		Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8		
Jika "Ya", isikan berapa kali baduta diberi makanan padat, setengah padat, atau lunak.		Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8		

PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut: Umur (Salin dari Blok IV 407): Nama & No. Urut Pemberi Informasi (Salin dari Blok IV 402 & 401):	 tahun tahun	 tahun tahun	 tahun tahun
KETERANGAN TENTANG PENOLONG PERSALINAN DAN KELUARGA BERENCANA (DITANYAKAN KEPADA SEMUA PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN)			
BLOK XV. PENOLONG PERSALINAN			
1501. A. APAKAH (nama) PERNAH HAMIL? B. UJIUR BERAPAKAH (nama) PADA SAAT HAMIL PERTAMA?	A) Ya.....1 Tidak.... 5→ PPK berikutnya/Blok XVI B) tahun	A) Ya.....1 Tidak.... 5→ PPK berikutnya/Blok XVI B) tahun	A) Ya.....1 Tidak.... 5→ PPK berikutnya/Blok XVI B) tahun
1502. A. APAKAH (nama) PERNAH MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP? B. UJIUR BERAPAKAH (nama) PADA SAAT MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP YANG PERTAMA KALI?	A) Ya.....1 Tidak.... 5→ PPK berikutnya/Blok XVI B) tahun	A) Ya.....1 Tidak.... 5→ PPK berikutnya/Blok XVI B) tahun	A) Ya.....1 Tidak.... 5→ PPK berikutnya/Blok XVI B) tahun
1503. KAPAN MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP YANG TERAKHIR?	2 tahun yang lalu atau kurang...1 Lebih dari 2 tahun yang lalu.....2 PPK berikutnya/Blok XVI ←	2 tahun yang lalu atau kurang...1 Lebih dari 2 tahun yang lalu.....2 PPK berikutnya/Blok XVI ←	2 tahun yang lalu atau kurang...1 Lebih dari 2 tahun yang lalu.....2 PPK berikutnya/Blok XVI ←
1504. A. DIMANA (nama) MELAHIRKAN (nama anak lahir hidup yang terakhir)?	RS Pemerintah/RS Swasta..... 1 Rumah bersalin/Klinik..... 2 Puskesmas..... 3 Pustu..... 4 Praktik dokter/bidan/perawat.... 5 Polindes/Poskesdes..... 6 Rumah..... 7 Lainnya, tuliskan:..... 8	RS Pemerintah/RS Swasta..... 1 Rumah bersalin/Klinik..... 2 Puskesmas..... 3 Pustu..... 4 Praktik dokter/bidan/perawat.... 5 Polindes/Poskesdes..... 6 Rumah..... 7 Lainnya, tuliskan:..... 8	RS Pemerintah/RS Swasta..... 1 Rumah bersalin/Klinik..... 2 Puskesmas..... 3 Pustu..... 4 Praktik dokter/bidan/perawat.... 5 Polindes/Poskesdes..... 6 Rumah..... 7 Lainnya, tuliskan:..... 8

PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut: Umur (Salin dari Blok IV 407): Nama & No. Urut Pemberi Informasi (Salin dari Blok IV 402 & 401):	 tahun tahun	 tahun tahun	 tahun tahun
B. SIAPA YANG MENOLONG PROSES KELAHIRAN TERAKHIR?	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya 7 Tidak ada 8	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya 7 Tidak ada 8	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya 7 Tidak ada 8
C. BERAPA BERAT (nama anak lahir hidup yang terakhir) KETIKA DILAHIRKAN?	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8
1505. BERAPA LAMA SETELAH KELAHIRAN (nama anak lahir hidup yang terakhir) PERTAMA KALI DILETAKKAN DI ATAS DADA IBU DENGAN BERSENTUHAN KULIT SECARA LANGSUNG?	<1 jam setelah lahir 1 1-23 jam setelah lahir 2 ≥24 jam setelah lahir 3 Tidak pernah 5 Tidak tahu 8	<1 jam setelah lahir 1 1-23 jam setelah lahir 2 ≥24 jam setelah lahir 3 Tidak pernah 5 Tidak tahu 8	<1 jam setelah lahir 1 1-23 jam setelah lahir 2 ≥24 jam setelah lahir 3 Tidak pernah 5 Tidak tahu 8

Lanjutan Lampiran 1

PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut: Umur (Salin dari Blok IV 407): Nama & No. Urut Pemberi Informasi (Salin dari Blok IV 402 & 407):	 tahun tahun	 tahun tahun	 tahun tahun
BLOK XVI. KELUARGA BERENCANA			
1601. APAKAH (nama atau pasangan) PERNAH/SEDANG MENGGUNAKAN ALAT KB ATAU CARA TRADISIONAL UNTUK MENUNDA ATAU MENCEGAH KEHAMILAN?	Ya, pernah..... 1 → PPK berikutnya/ Blok XVII Ya, sedang..... 2 Tidak..... 5 → PPK berikutnya/ Blok XVII	Ya, pernah..... 1 → PPK berikutnya/ Blok XVII Ya, sedang..... 2 Tidak..... 5 → PPK berikutnya/ Blok XVII	Ya, pernah..... 1 → PPK berikutnya/ Blok XVII Ya, sedang..... 2 Tidak..... 5 → PPK berikutnya/ Blok XVII
1602. ALAT KB ATAU CARA TRADISIONAL APA YANG SEDANG DIGUNAKAN? Jika (nama) menyebutkan lebih dari satu, lingkari kode terkecil.	Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW..... 1 Sterilisasi pria/vasektomi/MOP..... 2 IUD/AKDR/spiral..... 3 Suntikan..... 4 Susuk KB/implan..... 5 PIL..... 6 Kondom pria/karet KB..... 7 Intravag/kondom wanita/diafragma..... 8 Metode menyusui alami..... 9 Pantang berkala/kalender..... 10 Lainnya..... 11	Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW..... 1 Sterilisasi pria/vasektomi/MOP..... 2 IUD/AKDR/spiral..... 3 Suntikan..... 4 Susuk KB/implan..... 5 PIL..... 6 Kondom pria/karet KB..... 7 Intravag/kondom wanita/diafragma..... 8 Metode menyusui alami..... 9 Pantang berkala/kalender..... 10 Lainnya..... 11	Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW..... 1 Sterilisasi pria/vasektomi/MOP..... 2 IUD/AKDR/spiral..... 3 Suntikan..... 4 Susuk KB/implan..... 5 PIL..... 6 Kondom pria/karet KB..... 7 Intravag/kondom wanita/diafragma..... 8 Metode menyusui alami..... 9 Pantang berkala/kalender..... 10 Lainnya..... 11
1603. JIKA MENGGUNAKAN ALAT KB MODERN (1602 = 1-8), DI MANA (nama atau pasangan) MEMPEROLEH (ALAT KB) TERAKHIR KALI?	Rumah sakit..... 1 Puskesmas/Pustu/Klinik..... 2 TKBK/TMK/MUYAN..... 3 Polindes/Poskesdes..... 4 Posyandu/Pos KB/PPKBD..... 5 Rumah bersalin..... 6 Praktik dokter umum/kandungan..... 7 Praktik bidan/bidan di desa/ perawat..... 8 Apotek/toko obat..... 9 Lainnya..... 10	Rumah sakit..... 1 Puskesmas/Pustu/Klinik..... 2 TKBK/TMK/MUYAN..... 3 Polindes/Poskesdes..... 4 Posyandu/Pos KB/PPKBD..... 5 Rumah bersalin..... 6 Praktik dokter umum/kandungan..... 7 Praktik bidan/bidan di desa/ perawat..... 8 Apotek/toko obat..... 9 Lainnya..... 10	Rumah sakit..... 1 Puskesmas/Pustu/Klinik..... 2 TKBK/TMK/MUYAN..... 3 Polindes/Poskesdes..... 4 Posyandu/Pos KB/PPKBD..... 5 Rumah bersalin..... 6 Praktik dokter umum/kandungan..... 7 Praktik bidan/bidan di desa/ perawat..... 8 Apotek/toko obat..... 9 Lainnya..... 10

20

BLOK XVIII. KETERANGAN PERUMAHAN	
1809. A. APAKAH MEMILIKI FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR DAN SAMA SAMA YANG MENGGUNAKAN?	Ada, digunakan hanya ART sendiri 1 Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu 2 Ada, di MCK komunal 3 Ada, di MCK umum/ siapun menggunakan 4 } 1810.A Ada, ART tidak menggunakan 5 Tidak ada fasilitas 6
B. (Jika 1809.A = 1, atau 3) APAKAH JENIS KLOSET YANG DIGUNAKAN?	Leher angsa 1 Pengsengkan dengan tutup 2 Pengsengkan tanpa tutup 3 Cemplung/cubluk 4
C. DI MANAKAH TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR Tinja?	Tangki septik 1 IPAL 2 Kolam/sawah/sungai/danau/laut 3 } 1810.A Lubang tanah 4 Pantailanah lapang/kebun 5 Lainnya 6
D. SUDAH BERAPA LAMA TANGKI SEPTIK INI DIBUAT/DIBANGUN?	Tidak tahu 98 ☐ kal (Isikan 6, jika 6 kali atau lebih) Tidak pernah 7 Tidak tahu 8
E. DALAM 5 TAHUN TERAKHIR, BERAPA KALI TANGKI SEPTIK INI DIKOSONGKAN/ DILUKAKAN PENYEDOTAN?	Air kemasin bemerek 1 } 1811.A Air isi ulang 2 Leding 3 Sumur bor/pompa 4 Sumur terfundung 5 Sumur tak terfundung 6 } 1810.C Mata air terfundung 7 Mata air tak terfundung 8 Air permukaan (sungai/ danau/waduk/kolam/irigasi) 9 Air hujan 10 } 1811.A Lainnya 11
1810. A. APA SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MINUM?	Air kemasin bemerek 1 } 1815.A Air isi ulang 2 Leding 3 Sumur bor/pompa 4 Sumur terfundung 5 Sumur tak terfundung 6 } 1814.C Mata air terfundung 7 Mata air tak terfundung 8 Air permukaan (sungai/ danau/waduk/kolam/irigasi) 9 Air hujan 10 } 1815.A Lainnya 11
B. (Jika 1810.A = 3 (leding)). APA MEDIA UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MENGAKSES SUMBER AIR UTAMA UNTUK MINUM?	Pipa/pipa meteran 1 } 1815.A Pipa/pipa tanpa meteran 2 Hydran umum 3 Keran umum 4 Terminal air 5 Tidak ada 6 } 1815.A Tidak tahu 8
C. (Jika 1814.A = 4, 5, 6, 7, atau 8 (sumur/pompa/mata air)) BERAPA JAUH JARAK KE TEMPAT PEMAMPUNGAN LIMBAH/ KOTORAN/TINJA TERDEKAT?	< 10 m 1 ≥ 10 m 2 Tidak tahu 8

BLOK XVIII. KETERANGAN PERUMAHAN	
1815. A. BOLEHAH SAYA MELIHAT TEMPAT DI MANA ANGGOTA RUMAH TANGGA ANDA BIASA MENCUCI TANGAN?	Ya, di dalam rumah.....1 Ya, di luar rumah.....2 Tidak ada tempat cuci tangan.....3 } 1816.A Tidak dizinkan melihat.....4
B. Antri ketersediaan air di tempat mencuci tangan! Verifikasi dengan memeriksa Kran/pompa atau bascom, ember, wadah air atau sejenisnya.	Tersedia air.....1 Tidak tersedia air.....5
C. Cek ketersediaan sabun/detergen	Tersedia sabun/detergen.....1 Tidak tersedia sabun/detergen.....5
1816.A. APAKAH SUMBER UTAMA PENERANGAN RUMAH TANGGA INI?	Listrik PLN dengan meteran.....1 Listrik PLN tanpa meteran.....2 } 1817 Listrik non-PLN.....3 Bukan listrik.....4
B. BERAPA DAYA TERPASANG DI RUMAH INI?	Meteran 1.....Meteran 2.....Meteran 3..... 1. 450 Watt 2. 900 Watt 3. 1.300 Watt atau lebih
1817. APAKAH JENIS BAHAN BAKAR UTAMA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMASAK?	Listrik.....1 Etili 5 kg/blue gaz.....2 Etili 12 kg.....3 Etili 3 kg.....4 Gas kota.....5 Biogas.....6 Minyak tanah.....7 Briket.....8 Arang.....9 Kayu bakar.....10 Lainnya.....11 Tidak memasak di rumah.....0

BLOK XIX. AKSES TERHADAP LAYANAN KEUANGAN	
1901. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA/MECAURKAN KREDIT?	Ya Tidak A. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR).....1 5 B. KREDIT DARI BANK UMUM SELAN KUR.....1 5 C. KREDIT DARI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR).....1 5 D. KREDIT DARI KOPERASI.....1 5 E. PERORANGAN DENGAN BUNGA.....1 5 F. PEGADAIAN.....1 5 G. PERUSAHAAN LEASING.....1 5 H. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES).....1 5 I. PINJAMAN ONLINE.....1 5 J. PNM-MEKAR.....1 5 K. LAINNYA.....1 5
(Lingkari kode 1 jika menerima, kode 5 bila tidak menerima)	

BLOK XIX. AKSES TERHADAP LAYANAN KEUANGAN	
1902. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI E-WALLET?	Ya Tidak A. GOPAY.....1 5 B. OVO.....1 5 C. LINK AJA.....1 5 D. DANA.....1 5 E. SHOPEEPAY.....1 5 F. LAINNYA, tuliskan:.....1 5
(Lingkari kode 1 jika memiliki, kode 5 bila tidak memiliki)	

BLOK XX. KETERANGAN KEPEMILIKAN BARANG	
2001. APAKAH RUMAH TANGGA INI MEMILIKI BARANG-BARANG SEBAGAI BERIKUT?	Ya Tidak A. TABUNG GAS 5,5 KG ATAU LEBIH.....1 5 B. LEMARI ES/KULKAS.....1 5 C. AC.....1 5 D. PEMASANG AIR (WATER HEATER).....1 5 E. TELEPON RUMAH (PSTN).....1 5 F. KOMPUTER/LAPTOP/TABLET.....1 5 G. EMAS/PERHASAN MINIMAL 10 GRAM.....1 5 H. SEPEDA MOTOR.....1 5 I. PERAHU.....1 5 J. PERAHU MOTOR.....1 5 K. MOBIL.....1 5 L. TELEVISI LAYAR DATAR MINIMAL 30 INCH.....1 5 M. TANPA/LAHAN.....1 5
2002. (Jika 2001.M = 1), JIKA MEMILIKI TANPA/LAHAN, SIAPA PEMILIK TANPA/LAHAN TERSEBUT?	KRT.....A Pasangan KRT.....B Anak.....C ART lainnya.....D

BLOK XXI. KETERANGAN SUMBER PENGHASILAN RUMAH TANGGA	
2101. A. APAKAH SUMBER TERBESAR PEMBIAYAAN DI RUMAH TANGGA INI?	ART YANG BEKERJA.....1 → 2101.B KIRIMAN UANG/BARANG.....2 → 2101.C INVESTASI (DEPOSITO, ROYALTI, SAHAM, BUNGA BANK, DAN SEJENISNYA).....3 → Blok XXII PENSUNAN.....4 → Blok XXII
B. (Jika 2101.A = 1) SIAPAKAH ART YANG MENANGGUNG PEMBIAYAAN TERBESAR?	Nama ART : No. Urut ART : Orang tua.....1 Anak.....2 Famili lain.....3 Lainnya.....4
C. (Jika 2101.A = 2) APABILA MENERIMA KIRIMAN UANG/BARANG DARI MANAKAH SUMBER UTAMANYA?	

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XXII. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL			
	Ya	Tidak	BERAPA JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI ATAU MENEMER JAMINAN SOSIAL TERSEBUT?
	(i)	(ii)	(iii)
2201. DALAM SETAHUN TERAKHIR , APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI ATAU MENEMER JAMINAN SOSIAL BERUPA:			
A. JAMINAN PENSUNUN VETERAN	A. 1 → 2201.iii.A	5 → 2201.B	A. orang
B. JAMINAN HARI TUA	B. 1 → 2201.iii.B	5 → 2201.C	B. orang
C. JAMINAN ASURANSI KECELAKAAN KERJA	C. 1 → 2201.iii.C	5 → 2201.D	C. orang
D. JAMINAN ASURANSI KEKAWATAN	D. 1 → 2201.iii.D	5 → 2201.E	D. orang
E. JAMINAN KEHLANGAN PEKERJAAN (JKP)	E. 1 → 2201.iii.E	5 → 2201.F	E. orang
F. PESANGON PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)	F. 1 → 2201.iii.F	5 → 2202	F. orang
2202. APAKAH RUMAH TANGGA INI MENEMER KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS)?	Ya, dapat menunjukkan kartu..... 1 Ya, tidak dapat menunjukkan kartu..... 2 Tidak..... 5		
2203. DALAM SETAHUN TERAKHIR , APAKAH RUMAH TANGGA ANDA PERNAH MENJADI PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)?	Ya..... 1 Tidak..... 5 → 2205		
2204. A. APAKAH SAAT INI RUMAH TANGGA ANDA MASIH TERCATAT/ MENJADI PENERIMA PKH?	Ya..... 1 Tidak tahu..... 8 } 2205		
B. DI MANA RUMAH TANGGA ANDA MENEMER BANTUAN PKH?	Kantor Pos..... 1 ATM..... 2 Kantor Bank..... 3 Agen Bank..... 4 Pendamping, Ketua Kelompok..... 5		
C. DALAM SETAHUN TERAKHIR , UNTUK APA SAJA BANTUAN PKH DIPERGUNAKAN? ADA LAGI? (Pilihan jawaban boleh lebih dari satu yang dipilih)	Belanja Pangan..... A Biaya Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga (sewa rumah/kontrak, listrik, air, telepon, bahan bakar, dll.)..... B Biaya Pengobatan..... C Biaya Perawatan Ibu Hamil..... D Biaya Sekolah..... E Pembayaran Hutang/Kredit..... F Lainnya, tuliskan:..... G		
2205. DALAM SETAHUN TERAKHIR , APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA LANSIA (60 TAHUN KE ATAS) YANG MENEMER BANTUAN SOSIAL DARI PROGRAM ATENSI LANSIA?	Ya..... 1 Tidak..... 5	Tuliskan No. Urut ART Lansia 1) [] [] [] [] ; 2) [] [] [] [] ; 3) [] [] [] [] ; 4) [] [] [] []	
2207. APAKAH RUMAH TANGGA ANDA PERNAH MENJADI PENERIMA PROGRAM BNP/TP/PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT Pos?	Ya..... 1 Tidak..... 5 → 2209		

BLOK XXII. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL

	Bulan Januari 2024	Bulan Desember 2023	Bulan November 2023	Bulan Oktober 2023
2208. DALAM 4 BULAN TERAKHIR, SEBUTKAN INFORMASI PEMBELIAN/ PENGUNAIAN PROGRAM BPNT/PROGRAM SEIMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS:				
A. APAKAH RUMAH TANGGA MENEMUKAN PROGRAM BPNT/ PROGRAM SEIMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS PADA 4 BULAN TERAKHIR?	A) Ya 1 Tidak 5 → Desember '23	A) Ya 1 Tidak 5 → November '23	A) Ya 1 Tidak 5 → Oktober '23	A) Ya 1 Tidak 5 → 2209
B. APAKAH ANDA MENGETAHUI BERAPA NILAI YANG DITERIMA DARI PROGRAM BPNT/PROGRAM SEIMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS?	B) Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2208.D Tidak 5 → 2208.D	B) Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2208.D Tidak 5 → 2208.D	B) Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2208.D Tidak 5 → 2208.D	B) Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2208.D Tidak 5 → 2208.D
C. UNTUK PENERIMAAN BERAPA BULAN?	C) _____ Bulan	C) _____ Bulan	C) _____ Bulan	C) _____ Bulan
D. DI MANA RUMAH TANGGA ANDA MENEMUKAN PROGRAM BPNT/ PROGRAM SEIMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS TERSEBUT?	D) Kantor Pos 1 ATM 2 Kantor Bank 3 Agen Bank 4 Pendamping, ketua kelompok 5	D) Kantor Pos 1 ATM 2 Kantor Bank 3 Agen Bank 4 Pendamping, ketua kelompok 5	D) Kantor Pos 1 ATM 2 Kantor Bank 3 Agen Bank 4 Pendamping, ketua kelompok 5	D) Kantor Pos 1 ATM 2 Kantor Bank 3 Agen Bank 4 Pendamping, ketua kelompok 5
E. UNTUK APA SAMA PROGRAM BPNT/PROGRAM SEIMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS DIPERGUNAKAN? ADA LAGI?	E) Belanja Pangan A Biaya Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga B Biaya Pengobatan C Biaya Perawatan Ibu Hamil D Biaya Sekolah E Pembayaran Hutang/Kredit F Lainnya, tuliskan: G	E) Belanja Pangan A Biaya Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga B Biaya Pengobatan C Biaya Perawatan Ibu Hamil D Biaya Sekolah E Pembayaran Hutang/Kredit F Lainnya, tuliskan: G	E) Belanja Pangan A Biaya Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga B Biaya Pengobatan C Biaya Perawatan Ibu Hamil D Biaya Sekolah E Pembayaran Hutang/Kredit F Lainnya, tuliskan: G	E) Belanja Pangan A Biaya Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga B Biaya Pengobatan C Biaya Perawatan Ibu Hamil D Biaya Sekolah E Pembayaran Hutang/Kredit F Lainnya, tuliskan: G
2209. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENEMUKAN BANTUAN/PROGRAM DARI PEMERINTAH SEBAGAI BERIKUT: (Lingkari kode 1 jika menerima, kode 5 bila tidak menerima)	A. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) 1 B. BANTUAN PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) 5 C. BANTUAN PANGAN PEMERINTAH (BERAS BAHAN PANGAN NASIONAL/BAPNAS) 1 D. PROGRAM BANTUAN SERTIFIKASI TANAH 5	A. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) 1 B. BANTUAN PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) 5 C. BANTUAN PANGAN PEMERINTAH (BERAS BAHAN PANGAN NASIONAL/BAPNAS) 1 D. PROGRAM BANTUAN SERTIFIKASI TANAH 5	A. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) 1 B. BANTUAN PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) 5 C. BANTUAN PANGAN PEMERINTAH (BERAS BAHAN PANGAN NASIONAL/BAPNAS) 1 D. PROGRAM BANTUAN SERTIFIKASI TANAH 5	A. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) 1 B. BANTUAN PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) 5 C. BANTUAN PANGAN PEMERINTAH (BERAS BAHAN PANGAN NASIONAL/BAPNAS) 1 D. PROGRAM BANTUAN SERTIFIKASI TANAH 5
2210. A. APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI USAHA MIKRO ATAU KECIL?	Ya 1 Tidak 5	Ya 1 Tidak 5	Ya 1 Tidak 5	Ya 1 Tidak 5
Usaha mikro atau kecil bisa pada sektor apapun, tidak terbatas pada sektor industri atau perdagangan				

BLOK XXII. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL																																																																																	
B. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA DARI PEMERINTAH SEBAGAI BERIKUT: (Lingkari kode 1 jika menerima, kode 5 bila tidak menerima)																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ya</th> <th>Tidak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(i) PELATIHAN TEKNIK PRODUKSI</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>(ii) PERIZINAN KOMERSI/SERTIFIKASI</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>(iii) PEMASARAN/DIGITALISASI USAHA</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>(iv) PELAPORAN KEUANGAN</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>(v) FASILITAS PERMODALAN</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>											Ya	Tidak	(i) PELATIHAN TEKNIK PRODUKSI	1	5	(ii) PERIZINAN KOMERSI/SERTIFIKASI	1	5	(iii) PEMASARAN/DIGITALISASI USAHA	1	5	(iv) PELAPORAN KEUANGAN	1	5	(v) FASILITAS PERMODALAN	1	5																																																						
	Ya	Tidak																																																																															
(i) PELATIHAN TEKNIK PRODUKSI	1	5																																																																															
(ii) PERIZINAN KOMERSI/SERTIFIKASI	1	5																																																																															
(iii) PEMASARAN/DIGITALISASI USAHA	1	5																																																																															
(iv) PELAPORAN KEUANGAN	1	5																																																																															
(v) FASILITAS PERMODALAN	1	5																																																																															
2211. A. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN/BANTUAN SOSIAL/SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH BERUPA BANTUAN RUTIN?																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ya 1 → 2211.A. i s.d. v</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Tidak 5 → 2211.B</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table>										Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir		Ya 1 → 2211.A. i s.d. v	Rp.	Tidak 5 → 2211.B	Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.																																																										
Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir																																																																																	
Ya 1 → 2211.A. i s.d. v	Rp.																																																																																
Tidak 5 → 2211.B	Rp.																																																																																
	Rp.																																																																																
	Rp.																																																																																
	Rp.																																																																																
	Rp.																																																																																
B. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN/BANTUAN SOSIAL/SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH BERUPA BANTUAN TIDAK RUTIN?																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ya 1 → 2211.B. i</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Tidak 5 → Blok XXIII</td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table>										Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir		Ya 1 → 2211.B. i	Rp.	Tidak 5 → Blok XXIII	Rp.																																																																		
Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir																																																																																	
Ya 1 → 2211.B. i	Rp.																																																																																
Tidak 5 → Blok XXIII	Rp.																																																																																
BLOK XXIII. KETERANGAN MIGRASI KELUAR INTERNASIONAL																																																																																	
2301. APAKAH TERDAPAT MANTAN ARTTORANG YANG SEBELUMNYA MERUPAKAN ART, YANG SAAT INI SEDIANG TINGGAL DI LUAR NEGERI, BERANGKAT DALAM RENTANG 1 FEBRUARI 2019 SAMPAI DENGAN SEKARANG?																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ya 1</th> <th colspan="2">Tidak</th> <th colspan="2">Ya 1</th> <th colspan="2">Tidak</th> <th colspan="2">Ya 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No. Urut Mantan ART</td> <td>Apakah (nama) LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN? 1. Laki-laki 2. Perempuan</td> <td>Sebutkan nama MANTAN ART yang TINGGAL di LUAR NEGERI yang BERANGKAT SEJAK 1 FEBRUARI 2019 SAMPAI DENGAN SEKARANG?</td> <td>Apakah (nama) DI MANAKAH NEGARA TEMPAT TINGGAL (nama)? Tuliskan nama negara (Kode negara diisi oleh pengawas)</td> <td>Tahun berapa BERANGKAT KE NEGARA TERSEBUT? (Tahun)</td> <td>Berapakah UMUR (nama) SAAT BERANGKAT? (Tahun)</td> <td>APA PENDIDIKAN TERTINGGI YANG (nama) TAMATKAN SAAT BERANGKAT? (Kode pada halaman terakhir VSEN24.K)</td> <td>APAKAH ALASAN (nama) PINDAH KE NEGARA TERSEBUT? (Kode pada halaman terakhir VSEN24.K)</td> </tr> <tr> <td>2302</td> <td></td> <td>2303</td> <td>2304</td> <td>2305</td> <td>2306</td> <td>2307</td> <td>2308</td> <td>2309</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>☐</td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>☐</td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>☐</td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>☐</td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>☐</td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>										Ya 1		Tidak		Ya 1		Tidak		Ya 1		No. Urut Mantan ART	Apakah (nama) LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN? 1. Laki-laki 2. Perempuan	Sebutkan nama MANTAN ART yang TINGGAL di LUAR NEGERI yang BERANGKAT SEJAK 1 FEBRUARI 2019 SAMPAI DENGAN SEKARANG?	Apakah (nama) DI MANAKAH NEGARA TEMPAT TINGGAL (nama)? Tuliskan nama negara (Kode negara diisi oleh pengawas)	Tahun berapa BERANGKAT KE NEGARA TERSEBUT? (Tahun)	Berapakah UMUR (nama) SAAT BERANGKAT? (Tahun)	APA PENDIDIKAN TERTINGGI YANG (nama) TAMATKAN SAAT BERANGKAT? (Kode pada halaman terakhir VSEN24.K)	APAKAH ALASAN (nama) PINDAH KE NEGARA TERSEBUT? (Kode pada halaman terakhir VSEN24.K)	2302		2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	1.	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	2.	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	3.	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	4.	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	5.	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ya 1		Tidak		Ya 1		Tidak		Ya 1																																																																									
No. Urut Mantan ART	Apakah (nama) LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN? 1. Laki-laki 2. Perempuan	Sebutkan nama MANTAN ART yang TINGGAL di LUAR NEGERI yang BERANGKAT SEJAK 1 FEBRUARI 2019 SAMPAI DENGAN SEKARANG?	Apakah (nama) DI MANAKAH NEGARA TEMPAT TINGGAL (nama)? Tuliskan nama negara (Kode negara diisi oleh pengawas)	Tahun berapa BERANGKAT KE NEGARA TERSEBUT? (Tahun)	Berapakah UMUR (nama) SAAT BERANGKAT? (Tahun)	APA PENDIDIKAN TERTINGGI YANG (nama) TAMATKAN SAAT BERANGKAT? (Kode pada halaman terakhir VSEN24.K)	APAKAH ALASAN (nama) PINDAH KE NEGARA TERSEBUT? (Kode pada halaman terakhir VSEN24.K)																																																																										
2302		2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309																																																																									
1.	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																									
2.	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																									
3.	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																									
4.	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																									
5.	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																									

BLOK XXIV. CATATAN									
Kunjungan I : Tanggal:									
Kunjungan II : Tanggal:									
Kode 706: Lapangan Usaha (diisi oleh pengawas)									
01. Pertanian tanaman padi dan palawija									
02. Hortikultura									
03. Perkebunan									
04. Perikanan									
05. Peternakan									
06. Kehutanan dan pertanian lainnya									
07. Perambangan dan penggalan									
08. Industri pengolahan									
09. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin									
10. Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi									
11. Konstruksi									
12. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor									
13. Pengangkutan dan perdagangan									
14. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum									
15. Informasi dan komunikasi									
16. Aktivitas keuangan dan asuransi									
17. Real estat									
18. Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis									
19. Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya									
20. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib									
21. Pendidikan									
22. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial									
23. Kesenian, hiburan, dan rekreasi									
24. Aktivitas jasa lainnya									
25. Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja									
26. Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya									
Kode 2306: Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan									
01. Paket A									
02. SDB									
03. SD									
04. MI									
05. SPMPDF Ula									
06. Paket B									
07. SMP LB									
08. SMP									
09. MTs									
10. SPMPDF Wustha									
11. Paket C									
12. SMLB									
13. SMA									
14. MA									
15. SMK									
16. MAK									
17. SPMPDF Ulya									
18. D1/D2									
19. D3									
20. D4									
21. S1									
22. Profesi									
23. S2									
24. S3									
25. Tidak Punya Ijazah SD									
Kode 2309: Alasan Pindah									
1. Pekerjaan									
2. Pendidikan									
3. Ikut suami/istri/orang tua/anak									
4. Ikut saudara/famili lain									
5. Keamanan/politik									
6. Bencana/kerusakan lingkungan									
7. Lainnya									
Waktu selesai wawancara:									

Lampiran 2 Metadata

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus Indikator	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase penduduk lanjut usia	Penduduk lanjut usia adalah penduduk yang berumur 60 tahun ke atas	$\text{Persentase penduduk lansia} = \frac{\text{Penduduk lanjut usia}}{\text{Penduduk total}} \times 100$	Susenas Maret 2024
2	Komposisi penduduk lanjut usia menurut karakteristik	Penduduk lanjut usia adalah penduduk yang berumur 60 tahun ke atas	$\text{Contoh persentase penduduk lansia laki-laki} = \frac{\text{Penduduk lanjut usia laki-laki}}{\text{Penduduk lanjut usia}} \times 100$	Susenas Maret 2024
3	Rasio ketergantungan penduduk lanjut usia	Perbandingan antara penduduk berumur 60 tahun ke atas (lansia) terhadap penduduk berumur 15-59 tahun.	$\text{Rasio ketergantungan} = \frac{\text{Penduduk lanjut usia}}{\text{Penduduk usia produktif}} \times 100$	Susenas Maret 2024
4	Persentase penduduk lanjut usia menurut status keanggotaan rumah tangga	Status anggota rumah tangga terdiri dari kepala rumah tangga (KRT) dan anggota rumah tangga (ART). Yang dimaksud ART adalah pasangan KRT, mertua/orang tua, dan lainnya	$\text{Persentase penduduk lanjut usia menurut status keanggotaan rumah tangga} = \frac{\text{Penduduk lanjut usia menurut status keanggotaan rumah tangga}}{\text{Penduduk lanjut usia}} \times 100$	Susenas Maret 2024
5	Persentase penduduk lanjut usia menurut status perkawinan	Status perkawinan yang dicatat mengacu pada status perkawinan pada saat pencacahan. Status perkawinan terdiri dari belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati.	$\text{Persentase penduduk lanjut usia menurut status perkawinan} = \frac{\text{Penduduk lanjut usia menurut status perkawinan}}{\text{Penduduk lanjut usia}} \times 100$	Susenas Maret 2024



Lanjutan Lampiran 2

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus Indikator	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Persentase penduduk lanjut usia menurut status tinggal bersama	Status tinggal bersama adalah status anggota rumah tangga yang tinggal bersama lansia dalam suatu rumah tangga lansia, yang terdiri atas lansia tinggal sendiri, bersama pasangan (suami atau isteri), bersama keluarga (suami/isteri dan anak), tiga generasi (bersama anak dan cucu), dan lainnya.	_____ x 100	Susenas Maret 2024
7	Angka Melek Huruf Penduduk Lanjut Usia	Proporsi penduduk lanjut usia yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya	$\frac{\text{Jumlah lansia yang dapat membaca dan menulis huruf latin / huruf lainnya}}{\text{Jumlah lansia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2024
8	Persentase Penduduk penduduk lanjut usia Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah	$\frac{\text{Jumlah lansia yang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah lansia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2024
9	Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Lanjut Usia	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk umur 60 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.	$\frac{1}{\text{Jumlah penduduk 60 tahun ke atas}} \times \sum_{i=1}^{\text{Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 60 tahun ke atas}} \text{Jumlah penduduk 60 tahun ke atas}$	Susenas Maret 2024
10	Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Penggunaan Telepon Seluler	Perbandingan jumlah penduduk lanjut usia yang menggunakan telepon seluler terhadap seluruh penduduk lanjut usia	_____	Susenas Maret 2024
11	Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Penggunaan Komputer	Perbandingan jumlah penduduk lanjut usia yang menggunakan komputer terhadap seluruh penduduk lanjut usia	_____	Susenas Maret 2024



Lanjutan Lampiran 2

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus Indikator	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Akses Internet	Perbandingan jumlah penduduk lanjut usia yang mengakses internet terhadap seluruh penduduk lanjut usia	_____	Susenas Maret 2024
13	Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan	Perbandingan antara jumlah penduduk lanjut usia yang mengalami keluhan kesehatan (panas, batuk, pilek, diare, pusing, penyakit kronis, dsb.) dalam sebulan terakhir terhadap total penduduk lanjut usia. Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami, seperti: panas, batuk, pilek, diare, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), karena kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan kesehatan lainnya. Keluhan yang dimaksud adalah keluhan fisik maupun psikis. Penyakit kronis adalah suatu penyakit yang diderita dalam waktu yang sudah cukup lama, menahun dan belum sembuh, biasanya digunakan untuk sakit yang sudah cukup lama atau menahun.	$\frac{\text{Jumlah penduduk lanjut usia yang mengalami keluhan kesehatan}}{\text{jumlah penduduk lanjut usia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2024



Lanjutan Lampiran 2

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus Indikator	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Angka kesakitan lansia	Perbandingan antara jumlah penduduk lanjut usia yang mengalami keluhan kesehatan (panas, batuk, pilek, diare, pusing, penyakit kronis, dsb.) dan mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari dalam sebulan terakhir terhadap total penduduk lanjut usia. Terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari yang dimaksud adalah ketika seseorang tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya karena keluhan kesehatan.	$\frac{\text{Jumlah penduduk lanjut usia yang mengalami keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari}}{\text{jumlah penduduk lanjut usia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2024
15	Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir	Perbandingan antara jumlah penduduk lanjut usia yang pernah dirawat inap dalam setahun terakhir terhadap total penduduk lanjut usia. Rawat inap adalah upaya penyembuhan dengan menginap satu malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional. Responden yang pernah rawat inap adalah responden yang telah selesai menjalani rawat inap, tidak termasuk bila pada saat pencacahan sedang menjalani rawat inap.	$\frac{\text{Jumlah penduduk lanjut usia yang pernah dirawat inap}}{\text{jumlah penduduk lanjut usia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2024
16	Rata-Rata Lama Rawat Inap dari Penduduk Lanjut Usia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir	Rata-rata lama rawat inap lansia yang pernah dirawat inap dalam setahun terakhir. Lama hari rawat inap adalah jumlah hari menginap satu malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional.	$\frac{\text{Jumlah hari rawat inap penduduk lanjut usia yang pernah dirawat inap}}{\text{jumlah penduduk lanjut usia yang pernah dirawat inap}}$	Susenas Maret 2024

Lanjutan Lampiran 2

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus Indikator	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Persentase Lansia yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Jalan	Perbandingan antara jumlah penduduk lanjut usia yang memanfaatkan jaminan kesehatan (BPJS PBI, BPJS Non-PBI/Mandiri, Jamkesda, Asuransi Swasta, Perusahaan/Kantor) untuk rawat jalan terhadap total penduduk lanjut usia yang pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir.	$\frac{\text{Jumlah penduduk lanjut usia yang memanfaatkan jaminan kesehatan untuk rawat jalan}}{\text{jumlah penduduk lanjut usia yang pernah rawat jalan}} \times 100$	Susenas Maret 2024
18	Persentase Lansia yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap	Perbandingan antara jumlah penduduk lanjut usia yang memanfaatkan jaminan kesehatan (BPJS PBI, BPJS Non-PBI/Mandiri, Jamkesda, Asuransi Swasta, Perusahaan/Kantor) untuk rawat inap terhadap total penduduk lanjut usia yang pernah dirawat inap dalam sebulan terakhir.	$\frac{\text{Jumlah penduduk lanjut usia yang memanfaatkan jaminan kesehatan untuk rawat inap}}{\text{jumlah penduduk lanjut usia yang pernah rawat inap}} \times 100$	Susenas Maret 2024
19	Persentase Lansia Menurut Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga	Distribusi pengeluaran adalah share pengeluaran dari masing-masing kelompok distribusi pengeluaran terhadap total pengeluaran. Kelompok distribusi pengeluaran: 1. 40% penduduk dengan pendapatan rendah 2. 40% penduduk dengan pendapatan sedang 3. 20% penduduk dengan pendapatan tinggi	$\frac{\text{Jumlah penduduk lansia yang tinggal di rumah tangga pada masing – masing kelompok distribusi pengeluaran}}{\text{Jumlah penduduk lansia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2024

Lanjutan Lampiran 2

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus Indikator	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga	Sumber pembiayaan terbesar mengacu pada sumber pembiayaan terbesar yang digunakan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam setahun terakhir. Sumber terbesar pembiayaan rumah tangga: 1. ART yang bekerja 2. Kiriman Uang/Barang 3. Investasi 4. Pensiunan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penduduk lansia pada masing – masing sumber terbesar pembiayaan rumah tangga}}{\text{Jumlah rumah tangga penduduk lansia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2024
21	Persentase Lansia Menurut Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal	Status kepemilikan bangunan tempat tinggal/rumah yang ditempati oleh rumah tangga pada waktu pencacahan. Status kepemilikan bangunan tempat tinggal rumah tangga: 1. Milik sendiri 2. Kontrak/sewa 3. Bebas sewa 4. Dinas 5. Lainnya	$\frac{\text{Jumlah penduduk lansia yang tinggal pada masing – masing status kepemilikan bangunan tempat tinggal/rumah}}{\text{Jumlah penduduk lansia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2024
22	Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni	Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya	$\frac{\text{Jumlah penduduk lansia yang tinggal di rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk lansia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2024



Lanjutan Lampiran 2

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus Indikator	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	Persentase Lansia yang Bepergian	Bepergian adalah pergi/keluar ke tempat/tujuan utama di luar tempat tinggal/lingkungan kesehariannya (bukan rutin) dalam wilayah geografis Indonesia kurang dari 12 bulan, baik dilakukan secara perorangan (sendiri) ataupun berkelompok (rombongan) dengan lama berdiam di tempat/tujuan utama paling sedikit 3 jam serta bukan bermaksud untuk sekolah atau bekerja secara rutin.	$\frac{\text{Jumlah penduduk lansia yang bepergian}}{\text{Jumlah penduduk lansia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2024
24	Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan	Korban kejahatan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.	$\frac{\text{Jumlah penduduk lansia yang pernah menjadi korban kejahatan}}{\text{Jumlah penduduk lansia}} \times 100\%$	Susenas Maret 2024
25	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Pernah Menerima Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako)	Perbandingan antara rumah tangga lansia yang pernah menerima bantuan pangan (BPNT/Program sembako) terhadap jumlah rumah tangga lansia.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang pernah menerima bantuan pangan (BPNT / program sembako)}}{\text{Jumlah rumah tangga yang minimal ada 1 ART berumur 60 tahun ke atas}} \times 100\%$	Susenas Maret 2024
26	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat/Menerima PKH	Perbandingan antara rumah tangga lansia yang masih tercatat/menerima PKH terhadap jumlah rumah tangga lansia.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang masih tercatat/menerima PKH}}{\text{Jumlah rumah tangga yang minimal ada 1 ART berumur 60 tahun ke atas}} \times 100\%$	Susenas Maret 2024
27	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima KKS	Perbandingan antara rumah tangga lansia yang menerima KKS terhadap jumlah rumah tangga lansia.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang minimal ada 1 ART berumur 60 tahun ke atas yang menerima KKS}}{\text{Jumlah rumah tangga yang minimal ada 1 ART berumur 60 tahun ke atas}} \times 100\%$	Susenas Maret 2024

Lanjutan Lampiran 2

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus Indikator	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Bantuan Sosial dari Program ATENSI Lansia	Perbandingan antara rumah tangga lansia yang dalam setahun terakhir menerima bantuan sosial dari program ATENSI lansia terhadap jumlah rumah tangga lansia.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang minimal ada 1 ART berumur 60 tahun ke atas dalam setahun terakhir yang menerima bantuan sosial dari program ATENSI lansia}}{\text{Jumlah rumah tangga yang minimal ada 1 ART berumur 60 tahun ke atas}} \times 100\%$	Susenas Maret 2024
29	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Kredit Pengembangan Usaha	Perbandingan antara rumah tangga lansia dalam setahun terakhir yang menerima kredit terhadap jumlah rumah tangga lansia.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang minimal ada 1 ART berumur 60 tahun ke atas yang menerima kredit}}{\text{Jumlah rumah tangga yang minimal ada 1 ART berumur 60 tahun ke atas}} \times 100\%$	Susenas Maret 2024
30	Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Perbandingan antara lansia yang memiliki jaminan kesehatan terhadap jumlah lansia.	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 60 tahun ke atas yang memiliki jaminan kesehatan}}{\text{Jumlah penduduk berumur 60 tahun ke atas}} \times 100\%$	Susenas Maret 2024
31	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial	Perbandingan antara rumah tangga lansia dalam setahun terakhir yang memiliki/menerima jaminan sosial terhadap jumlah rumah tangga lansia.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang minimal ada 1 ART berumur 60 tahun ke atas yang memiliki/menerima jaminan sosial}}{\text{Jumlah rumah tangga yang minimal ada 1 ART berumur 60 tahun ke atas}} \times 100\%$	Susenas Maret 2024



ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. (021) 3857046

Homepage: <https://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id

ISSN 2086-1036



9 772086 103005